Buku “Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Kajian Partisipatif, Kontruktif dan Aplikatif” merupakan proses hasil riset dan pengalaman lapangan penulis, sekaligus mengajak pembaca untuk menjelaskan penyebab dan solusi praktis terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Konsep dan teori pemberdayaan adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Lembaga Swadya Masyarakat pada era tahun 1970-an sebagai bentuk alternatif menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan sebagaimana diaplikasikan oleh Negara dalam mengatasi kesenjangan sosial. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat desa sendiri menuju kesejahteraan, kemandirian, dan berkelanjutan, dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pendamping dari penggiat, fasilitator dan akademisi. Sehingga buku ini dapat melengkapi referensi untuk kajian, penerapan dan pengembangan konsep, teori, metode serta model pemberdayaan yang dinamis dengan cara yang dialogis partisipatif yaitu memposisikan diri “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”. Harapannya pemberdayaan sebagai upaya terencana, terstruktur dan komprehensif untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam menggali potensi sumber daya manusia, sosial, ekonomi dan alam yang dimilikinya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan secara partisipatif, konstruktif dan aplikatif, jika “ABGC” yaitu *Academics, Business, Government* dan *Community* dapat bersinergi dalam visi, misi dan program bersama.

Dr. Bambang Kuncoro
Dekan FISIP Unsoed 2005-2009 & Wakil Rektor 3 Untidar 2014-2018

“Buku ini menghadirkan perspektif holistik tentang pemberdayaan masyarakat dengan memotret perjalanan historisnya yang diwarnai oleh paradigma yang beragam. Sebagai sebuah karya akademik, penulis buku ini juga berhasil membangun fondasi keilmuan dengan teori-teori pemberdayaan yang kontekstual dan dinamika kekinian. Berbagai metode, bentuk dan model pemberdayaan juga dihadirkan dengan contoh kasus yang aplikatif. Buku yang didasarkan pada rangkaian pemikiran matang seorang pengajar berdedikasi sekaligus praktisi pemberdayaan masyarakat ini layak menjadi referensi para mahasiswa, praktisi pemberdayaan dan pembuat kebijakan”.

Agus Syarip Hidayat, Ph.D
Peneliti LIPI

nasmedia
PENERBIT ANGGOTA IKAPI
Jl. Batua Raya No. 550
Makassar, Sulawesi Selatan 90233
+62812 1313 3800
redaksi@nasmediapustaka.id
www.nasmediapustaka.co.id
nasmedia.id

ISBN 978-623-6714-84-3
9 786236 714843

Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si

Dinamika **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kata Pengantar
Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A
(Peneliti Utama, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., MAB
(Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Kementerian Pertanian RI)

Yayan Hernuryadin, Ph.D
(Peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

Dinamika **Pemberdayaan Masyarakat** *Desa*

Sebagai Kajian Partisipatif, Konstruktif dan Aplikatif

Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si

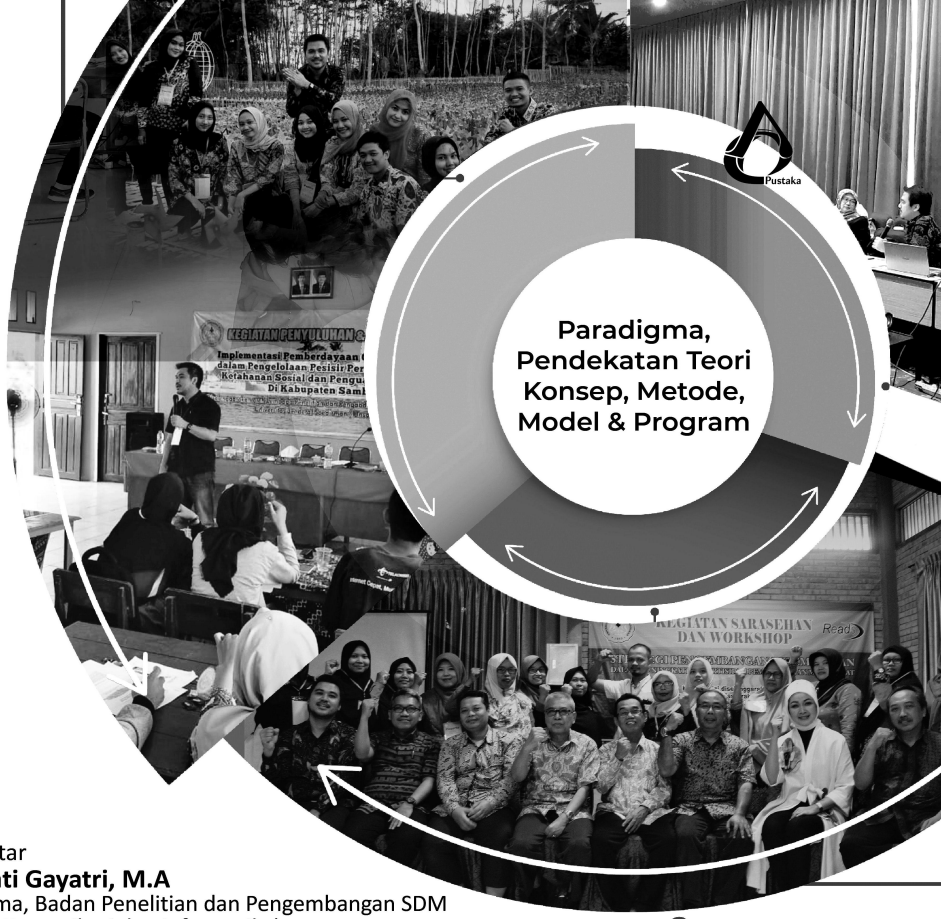

Kata Pengantar
Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A
(Peneliti Utama, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., MAB
(Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
Kementerian Pertanian RI)

Yayan Hernuryadin, Ph.D
(Peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

Dinamika **Pemberdayaan Masyarakat** *Desa*

Sebagai Kajian Partisipatif, Konstruktif dan Aplikatif

Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana
Pasal 113

1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

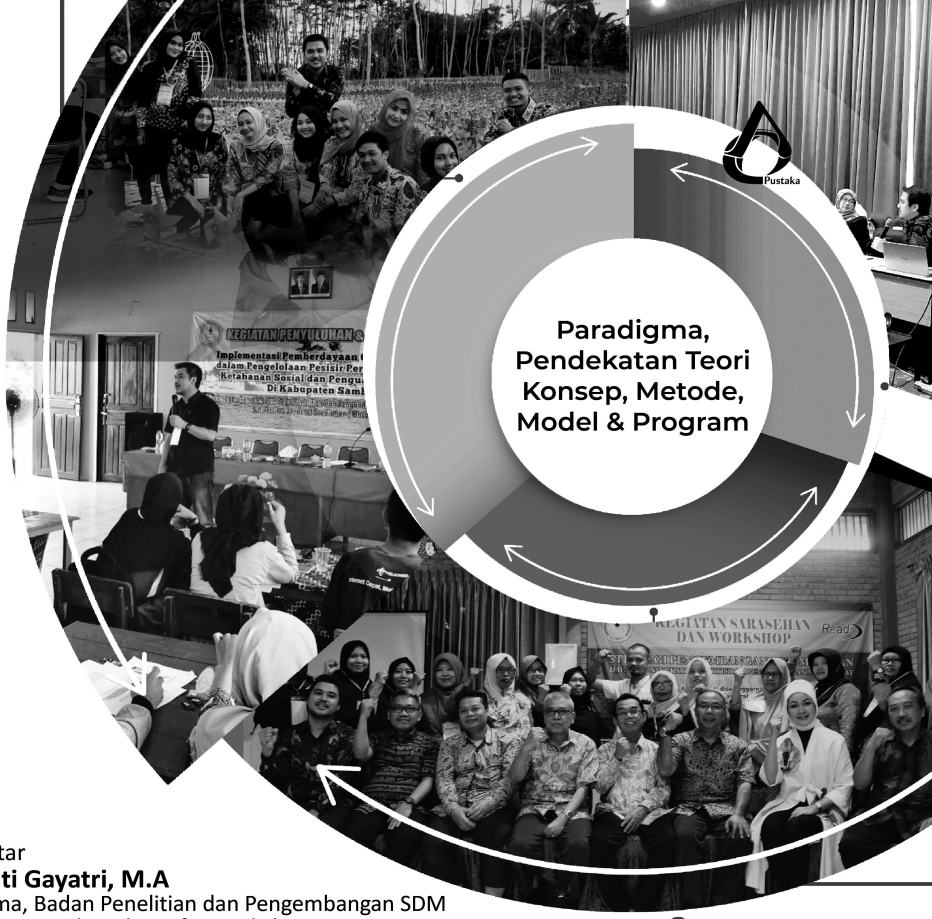

Kata Pengantar
Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A
(Peneliti Utama, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., MAB
(Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
Kementerian Pertanian RI)

Yayan Hernuryadin, Ph.D
(Peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)

Dinamika **Pemberdayaan Masyarakat** *Desa*

Sebagai Kajian Partisipatif, Konstruktif dan Aplikatif

Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si

Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sebagai Kajian Partisipatif, Konstruktif dan Aplikatif

Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si

Copyright © Adhi 2021
All rights reserved

Layout : Rizaldi Salam
Desain Cover : Muhammad Alim

Image Cover
Freepik.com

Cetakan Pertama, Maret 2021
xxii + 226 hlm; 17 x 25 cm
ISBN 978-623-94954-0-4

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka
PT. Nas Media Indonesia
Anggota IKAPI
No. 018/SSL/2018
Jl. Batua Raya No. 550, Makassar 90233
Jl. Tajem Baru No. 11, Yogyakarta 55281
Telp. 0812-1313-3800
redaksi@nasmedia.id
www.nasmediapustaka.co.id
www.nasmedia.id
Instagram : @nasmedia.id
Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Prolog

Penulis memiliki semangat dan tanggung jawab untuk mendiseminasikan, mengimplementasikan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian dengan menerbitkan buku dinamika pemberdayaan masyarakat desa. Buku ini menjadi respon atas berbagai pertanyaan, diskusi dan kajian tentang pemberdayaan yang sebetulnya sudah lama berperan dan beririsan dengan kajian multidisiplin lain. Pemberdayaan senyatanya dapat menjadi pokok kajian penting, menarik dan strategis yang aplikatif terhadap tantangan, perkembangan dan dampak pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, keterbelakangan, marginalisasi, dampak urbanisasi dan industrialisasi. Pemberdayaan hakekatnya mengimplementasikan konsep demokratisasi, otonomi daerah dan desa, pembangunan berbasis kerakyatan yang mengutamakan potensi sumber daya lokal, pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan, kemudian mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, kedaulatan ekonomi, partisipasi serta kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan khususnya di tingkat desa.

Buku ini disusun secara komprehensif dengan membahas tentang (1) Sejarah dan perkembangan pemberdayaan yang sebetulnya sudah menjadi kajian dalam teori pembangunan sebagai perkembangan dan jawaban dari "kekurangan" teori modernisasi dan teori ketergantungan. Pemberdayaan relevan dengan konteks kekinian tentang pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan berpusat pada masyarakat yang menjadi aktor atau subjek pembangunan. (2) Paradigma pemberdayaan yang beragam sebagai bukti pemberdayaan memiliki banyak perspektif kajian yang merespon perkembangan realitas pembangunan. (3) Konsep-konsep pemberdayaan yang selama ini paling banyak dibahas seperti definisi, tujuan, unsur, bentuk, serta tahapan pemberdayaan, kemudian ditegaskan kembali bahwa pemberdayaan dapat menjadi konsep yang layak menjadi kajian utama, indikator dan variabel penelitian, konsep yang aplikatif serta konsep yang mapan untuk dibangun menjadi teori. (4) Pendekatan teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul, bahwa "penelitian pemberdayaan menggunakan teori apa?". Ternyata banyak teori dari multidisplin ilmu yang dapat mendukung dan memperkuat kajian serta penelitian pemberdayaan masyarakat. Khususnya dalam teori komunikasi pembangunan yang dinilai linier (*top down*) dan bersifat teknokratis dengan antitesis berupa paradigma pembangunan partisipatif (*bottom-up*) atau

people centered development yang intinya mengimplementasikan komunikasi partisipatif sebagai pemberdayaan masyarakat dan dapat dikonstruksi menjadi sebuah teori untuk kajian dan penelitian yang konstruktif serta aplikatif. (5) Tujuan, tahapan, unsur dan bentuk pemberdayaan dijelaskan secara rinci untuk menegaskan pentingnya peran pemberdayaan yang berkaitan dengan kegiatan serta metode lainnya seperti penyuluhan, pelatihan, pendampingan, serta kemitraan. Unsur penting yang menjadi kajian ciri khas menarik dalam pemberdayaan juga dibahas yaitu tentang modal sosial (*social capital*), kearifan lokal (*local wisdom*), dan inklusi sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai teknologi yang khas, alamiah serta menjadi tradisi lama (*indigenous technology*). (6) Pemberdayaan didukung metode penelitian yang sudah dipergunakan para ahli, akademisi, penggiat dan praktisi pemberdayaan, sehingga harapanya lebih banyak yang memiliki "ketertarikan dan keberanian" khususnya mahasiswa untuk menggunakan metode penelitian partisipatif seperti metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning and Action* (PLA) dan *Participatory Action Research* (PAR). Metode partisipatif sangat relevan untuk kajian dan penelitian pemberdayaan yang konstruktif serta aplikatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta potensi dari sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi, alam atau lingkungan masyarakat. Penelitian pemberdayaan dapat menghasilkan program, model dan strategi pemberdayaan yang partisipatif, konstruktif serta aplikatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek penelitian atau penerima manfaat (*beneficiaries*). Penelitian pemberdayaan dapat juga menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) dengan mengawali metode kuantitatif untuk identifikasi dan analisis sebagai penelitian pendahuluan, kemudian dilaksanakan penelitian dengan metode kualitatif untuk memperdalam dan mempertajam hasil penelitian, ataupun sebaliknya dengan metode kualitatif terlebih dahulu yang diperkuat hasil penelitian metode kuantitatif. Pertimbangan memilih fokus kajian dan penelitian dalam pemberdayaan ditegaskan dalam tiga dimensi yaitu: pertama, penelitian berdasarkan permasalahan yang akan menghasilkan solusi dalam bentuk program, model dan strategi pemberdayaan. Kedua, penelitian berdasarkan keunikan dan ciri khas yang menarik untuk diteliti sehingga dapat dilestarikan dan dikembangkan dalam bentuk program serta model pemberdayaan. Ketiga, penelitian berdasarkan prestasi yang penting dan perlu diteliti untuk menjadi pionir serta percontohan dalam pemberdayaan. Proses tahapan penelitian dijelaskan dan diberikan contoh praktis seperti pelaksanaan studi pendahuluan dan studi literatur, membangun *state of the art* serta kebaruan penelitian (*novelty*), melaksanakan pembukaan akses,

desain dan indikator penelitian, pengumpulan data, penentuan subjek, strategi dalam memilih lokasi penelitian, analisis penelitian yang mengkompilasi serta memodifikasi dari beberapa analisis yang selama ini banyak dipergunakan menjadi model analisis partisipatif konstruktif. (7) Model, strategi dan program pemberdayaan yang aplikatif serta kontektual dibahas sebagai contoh hasil kajian dan penelitian pemberdayaan penulis selama 2009-2019 dengan tim riset mulai dari pemberdayaan tentang pasca kebencanaan, ketahanan pangan, pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, rehabilitasi sosial dan ekonomi komunitas marginal, penguatan kelompok eks pekerja migran di pedesaan, pengembangan desa wisata, agrowisata, eduwisata, dan kelompok sadar wisata, kemudian pelestarian generasi membatik, budidaya dan pengolahan tanaman herbal sebagai kearifan lokal, serta pengembangan kapasitas lembaga pendidikan sosial keagamaan (Pesantren) yang berperan menjadi lembaga sosial ekonomi.

Harapan penulis buku ini (1) Merekomendasikan untuk kebijakan sosial dan publik bahwa pemberdayaan dapat mengembangkan dan memperkuat masyarakat desa menjadi pelaku pembangunan atau produsen ekonomi kerakyatan berbagai produk bahan pokok yang penting, strategis dan diperlukan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Desa dan masyarakatnya dapat mengembangkan potensi destinasi pariwisata alam yang asri, alami, dan unik sebagai pelestarian serta pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya, maka desa dapat menjadi pondasi pembangunan sosial ekonomi bagi perkotaan, daerah dan nasional. Harapanya desa bukan hanya tempat dilahirkan dan dibesarkan, serta ramai ketika musim liburan dan mudik lebaran, tetapi desa dapat menjamin kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi hanya meninggalkan desa dan mengandalkan untuk mencari pekerjaan di perkotaan (urbanisasi) dan menjadi pekerja migran keluar negeri dengan resiko serta problematika yang komplek. (2) Buku ini dapat menjadi dan menambah referensi, rujukan kajian dan penelitian bagi para penggiat, praktisi, dan akademisi khususnya mahasiswa dalam pembangunan pedesaan. Pemberdayaan menjadi konsep, teori, metode dan hasil penelitian yang komprehensif, partisipatif serta aplikatif, sehingga lebih banyak yang berminat dan menggunakan fokus kajian penelitian pemberdayaan dengan menghasilkan (*output*) program, model dan stratagi yang dapat diimplementasikan serta memberikan kemanfaatan (*outcome*) bagi masyarakat.

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas penelitian, pengabdian masyarakat serta dapat menyusun buku ini. Semoga menjadi motivasi, inspirasi dan solusi dalam memberikan kemanfataan untuk masyarakat, pendidikan, kebijakan sosial serta kebijakan publik. Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah menjadi subjek atau mitra penelitian dan kegiatan pemberdayaan, termasuk kepada keluarga, tim peneliti (*Reads* dan Komunitas Kaki Langit), guru, dosen, mahasiswa, kolega (ahli & praktisi) khususnya Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A (Peneliti Utama, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika), Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., MAB (Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Kementerian Pertanian RI), dan Dr. Bambang Kuncoro (Dekan Fisip Unsoed 2005 - 2009 dan Wakil Rektor 3 Unitidar 2014-2018) yang berkenan memberikan masukan serta kata pengantar. Terima kasih kepada sahabat semua, terutama Yayan Hernuryadin, Ph.D (Peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) serta Agus Syarip Hidayat, Ph.D (Peneliti dari LIPI) yang telah memberikan motivasi, saran, komentar dan kata pengantar, kemudian Niken Hapsari AS, SP., M.P yang membantu mengedit buku ini, kepada pembaca yang mengapresiasi dan memanfaatkan buku ini. Terima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Kementrian Riset dan Teknologi atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga penulis dapat mempublikasikan hasilnya dalam bentuk jurnal ilmiah serta buku ini.

Salam Hormat

Penulis Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si

Kata Pengantar

Masyarakat desa merupakan salah satu komunitas yang diharapkan mampu menjadi subyek pembangunan yang terlibat dalam proses-proses pengelolaan pembangunan, mulai tahap perencanaan sampai dengan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Praktik pembangunan dibanyak negara mengupayakan untuk memberikan dukungan dan kesempatan kepada masyarakat desa agar terlibat dalam proses pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam konsep "pemberdayaan dan partisipasi."

Pemberdayaan masyarakat desa secara umum dapat diartikan sebagai upaya menjadikan masyarakat desa lebih mampu dan lebih percaya diri, khususnya dalam menjalani kehidupan, memenuhi hak, atau melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam berbagai bidang kegiatan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan tindakan aksi untuk memudahkan masyarakat desa dalam mengatasi kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, serta menyadari akan tanggung jawab dan mampu menggunakan sumber-sumber yang mereka miliki.

Saat ini program-program pembangunan pedesaan yang berbasis pengembangan pedesaan (*rural-based development*) umumnya menempatkan upaya memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prioritas. Era pembangunan pedesaan saat ini dapat dikatakan berada pada era pemberdayaan (*The Age of Empowerment*). Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan pedesaan semakin tinggi yang tercermin dalam butir ketiga "Nawacita" yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan". Menurut Nain (2019), upaya pemberdayaan masyarakat dalam program-program pembangunan pedesaan saat ini antara lain dimaksudkan untuk mengatasi dan memberikan solusi terhadap ketidakberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa yang tercipta dalam proses-proses pembangunan pedesaan pada era Orde Baru, dan sependapat dengan Adhi Iman Sulaiman penulis Buku ini, terminologi pemberdayaan dalam proses pembangunan masyarakat desa mulai muncul dalam konsep pembangunan pedesaan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Masalah ketidakberdayaan masyarakat desa bersumber dari berbagai faktor dan hubungan antar faktor yang cukup kompleks, upaya pemberdayaan

masyarakat desa umumnya memiliki dinamika tersendiri dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-disiplin. Dalam bidang pembangunan sosial-ekonomi misalnya, proses pemberdayaan masyarakat bersifat dinamis, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Pemberdayaan bukan merupakan suatu kuasa yang diberikan kepada individu atau kelompok melainkan sebagai upaya yang dilakukan agar seseorang dapat memiliki pengetahuan, kekuasaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan dalam fenomena. Dinamika proses pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh status pendidikan, faktor-faktor budaya dan sosial, sistem kesehatan dan program-program intervensi perlindungan sosial yang tidak efektif.

Salah satu perspektif dalam pendekatan multidisipliner yang sering digunakan dalam implementasi program-program pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi partisipatoris. Intensitas dan kualitas yang tinggi dalam dialog dan pertukaran informasi diantara komunitas masyarakat yang menjadi target dengan para pemangku kepentingan dapat menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Namun, dalam praktiknya upaya penerapan komunikasi partisipatoris tidak selalu mudah untuk dilaksanakan karena kurangnya kemampuan berkomunikasi pada masyarakat. Program pemberdayaan petani kecil, misalnya, hasil studi implementasi komunikasi partisipatoris menunjukkan kecenderungan rendahnya tingkatan komunikasi partisipatoris. Para petani tersebut umumnya tidak memiliki kemampuan memanfaatkan dialog sebagai media pertukaran informasi dan pengetahuan dengan para pemangku kepentingan dalam memecahkan masalah-masalah pertanian (Aminah, 2016).

Kemampuan berkomunikasi tampaknya dapat menjadi penentu keberhasilan program-program pemberdayaan. Hasil penelitian terhadap para janda yang menjadi target sasaran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi individu perempuan dalam Program tersebut dapat ditingkatkan melalui peningkatkan komunikasi kelompok. Hasil studi tersebut menjelaskan bagaimana indikator-indikator peran kelompok dan peran pendampingan telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong perempuan-perempuan kepala keluarga menjadi lebih berdaya dan lebih aktif dalam berkomunikasi. Melalui pengembangan keterampilan berbicara di depan publik (public speaking), budaya kritis dalam kelompok dapat dimunculkan, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, berdaya, bebas, dan berkemampuan (Kuswanti et.al., 2020).

Selain faktor komunikasi, keberhasilan program-program pemberdayaan antara lain dapat ditentukan oleh kemampuan agen-agen perubahan dalam membantu masyarakat meningkatkan keberdayaan dan partisipasinya. Program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), misalnya kemampuan agen perubahan dalam melaksanakan tugasnya ditentukan oleh: (1) Latar belakang pendidikan yang relatif tinggi sehingga ia mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan memberikan pelatihan; (2) Kemampuan teknis menggunakan komputer dan mengawasi masalah keuangan; (3) Kemampuan representasional untuk memberikan advokasi, mengembangkan jejaring, serta membagi pengetahuan dan pengalaman, dan (4) Kemampuan melaksanakan peran fasilitator melalui komunikasi antarpribadi, memanfaatkan keterampilan dan sumber-sumber, animasi sosial, dan mediasi (Azzasyofia et.al., 2020).

Pemanfaatan TIK sebagai media komunikasi sekaligus enabler dalam program pemberdayaan masyarakat desa saat ini semakin meningkat. Perspektif Marshal McLuhan, perkembangan dan kemajuan pesat media elektronik dapat memperlemah struktur hierarkis pemerintah yang membentuk jalur birokratis yang panjang dan sistem komunikasi yang bekerja lamban. Bentuk-bentuk baru komunikasi online dan tuntutan-tuntutan yang meningkat akan kebijakan publik yang diarahkan oleh strategi pemberdayaan (ESG-*driven*) dan keputusan manajerial dapat mengubah cara pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, kesadaran akan manfaat dan kemampuan bentuk media komunikasi berbasis internet yang mampu menyebarluaskan informasi seketika pada saat itu juga (*near-real-time*) dapat membantu mempermudah dan mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil studi Ali et.al. (2018), menunjukkan bagaimana model inovasi sosial dengan memanfaatkan media sosial mampu membantu perempuan pedesaan dalam mengembangkan keterampilan pemasaran untuk mengembangkan usaha kecil mereka.

Buku berjudul "Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Desa – Sebuah Kajian Partisipatif, Konstruktif dan Aplikatif" ini oleh penulisnya dimaksudkan untuk merepresentasikan semangat dan tanggung jawab menyebarluaskan, menerapkan, dan mengembangkan hasil-hasil penelitiannya. Materi di dalamnya merupakan hasil kajian yang menggabungkan informasi umum, gagasan-gagasan ilmiah, dan beberapa contoh kasus pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia disajikan dalam 8 (delapan) bab yang masing-masing diberi judul berturut-turut yaitu Sejarah Konsep Pemberdayaan, Paradigma dalam Pemberdayaan,

Pendekatan Teori dalam Pemberdayaan, Konsep Pemberdayaan di Indonesia, Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan, Unsur dan Bentuk Pemberdayaan, Metode Penelitian dalam Pemberdayaan, serta Model dan Program Pemberdayaan.

Secara ringkas dapat disampaikan kepada para pembaca bahwa materi Buku ini menjelaskan tentang sejarah pembangunan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek pembangunan, berbagai paradigma pemberdayaan, pendekatan teori, dan konsep-konsep penting, definisi, tujuan, unsur, bentuk dan tahap-tahap pemberdayaan, serta metode-metode penelitian tentang pemberdayaan. Salah satu hal penting dan menarik yang disampaikan Penulis kepada para pembaca sebagai pengingat adalah bahwa kajian tentang pemberdayaan masyarakat desa bersifat multidisipliner, dapat didukung oleh teori dari berbagai lintas disiplin tergantung konteks, fokus dan tujuan kajian, mulai teori-teori dari sosiologi, politik, ekonomi pembangunan, dan komunikasi. Penulis juga menawarkan unsur-unsur penting yang khas dan menarik dalam kajian tentang pemberdayaan antara lain adalah tentang modal sosial (*social capital*), kearifan lokal (*local wisdom*), inkusi sosial, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai teknologi yang khas, alamiah serta menjadi tradisi lama (*indigenous technology*). Materi menarik lainnya yang disajikan dalam Buku ini adalah paparan berbagai model, strategi dan program pemberdayaan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Penulisnya selama tahun 2009-2019, yang disajikan pada Bab terakhir.

Buku ini secara langsung dan tidak langsung dapat mengingatkan para pembaca bahwa program-program pemberdayaan dapat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan dan memperkuat kapasitasnya sebagai subjek pembangunan, dan sebagaimana diharapkan oleh penulisnya, Buku ini dapat menjadi tambahan referensi dan rujukan bagi para akademisi dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian, bagi para praktisi serta penggiat pemberdayaan dalam melaksanakan program-program pembangunan pedesaan.

Jakarta, 4 Desember 2020

Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A.
Peneliti Utama
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Daftar Pustaka

Ali, N.H., Muhamad, S., Jalil, M.M.A.. & Mustafaman (2018). Empowering Rural Women Entrepreneurs Through Social Innovation Model. *International Journal of Business and Economic Affairs* (IJBEA), *3*(6), 253-259. doi: 10.24088/IJBEA-2018-36003

Aminah, S. (2016). The Application of Participatory Communication in the Implementation of Small Farmers Empowerment Program. *Jurnal Bina Praja*, *8*(1), 135-148, https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.135-148

Azzasyofia, M., Adi, I.R. & Aritonang, A.N. (2020). The Role of Change Agents in Community Empowerment Using Information and Communication Technology (ICT): Case Study at Desa Kaliabu, Central Java. *Indonesian Journal of Social Work*, *3*(2), 135-146. https://doi.org/10.31595/ijsw.v3i2.266

Kuswanti, A., Saleh A., Hubeis, A.V.S., & Puspitawati, H. (2020). Effects of Communication and Characteristics in Pekka Groups on the Economic Empowerment of Members. *Jurnal The Messenger*, *12*(2), 152-167. http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v12i2.2389

Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah saya mengucapkan selamat dan bangga kepada penulis Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si yang telah menyelesaikan dan mempersembahkan Buku Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kajian Partisifatif, Konstruktif dan Aplikatif untuk dunia pendidikan khususnya dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Penulis tentu memerlukan perjuangan yang cukup panjang baik waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk dapat menuangkan ide serta pikiran kedalam sebuah buku yang menurut saya sangat lengkap membahas pemberdayaan masyarakat desa.

Buku ini membahas kajian pemberdayaan masyarakat yang komprehensif tentang (1) Sejarah dan perkembangan pemberdayaan dalam konteks kekinian tentang pembangunan sumber daya manusia; (2) Paradigma pemberdayaan; (3) Konsep pemberdayaan seperti definisi, tujuan, dan unsur pemberdayaan; (4) Pendekatan teori-teori pemberdayaan; (5) Tahapan dan bentuk pemberdayaan; (6) Pemberdayaan didukung metode penelitian yang dipergunakan para ahli, akademisi, penggiat dan praktisi pemberdayaan; (7) Model, strategi dan program pemberdayaan yang aplikatif.

Buku ini menurut saya dapat menjadi salah satu referensi yang sangat baik dan *up to date* serta bahan rujukan bagi para mahasiswa S1, S2, S3 dan para penggiat, praktisi, serta akademisi pembangunan pedesaan. Selain itu, yang paling utama buku ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan dan penguatan masyarakat desa sebagai aktor pelaku utama pembangunan.

Semoga buku ini dapat menginspirasi Dosen-dosen lain di lingkup Universitas Jenderal Soedirman. Apresiasi yang tinggi bagi penulis, kami doakan semoga lebih produktif dan membawa kemajuan bagi kampus tercinta Universitas Jenderal Soedirman khususnya dan umumnya bagi pembangunan perdesaan di Indonesia.

Jakarta, 9 Desember 2020

Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., M.A.M
Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
Kementerian Pertanian RI

Kata Pengantar

Masyarakat di masa sekarang dan akan datang dituntut untuk terus menggali potensi sumber daya yang dimiliki dari lingkungannya. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat akan potensi yang dimiliki mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menuntut peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri, yang dapat dikaji dari pendekatan paradigma, teori dan konsep bersumber dari berbagai macam disiplin ilmu.

Buku ini membahas secara komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat dari teori-teori tentang pemberdayaan, strategi, metodologi dan model-model pemberdayaan masyarakat. Sebagai seorang "blusuker" penulis paham betul bagaimana program pemberdayaan dapat diaplikasikan di lapangan, hal ini dapat dilihat dalam buku ini terkait berbagai model-model pemberdayaan yang merupakan hasil penelitian dan pengalaman penulis di lapangan yaitu dari model pemberdayaan di wilayah pedesaan sampai dengan model pemberdayaan di daerah perbatasan pesisir, dari model pemberdayaan lembaga sosial keagamaan sampai dengan model pemberdayaan desa wisata, dari pemberdayaan masyarakat pengrajin batik sampai pemberdayaan eks pekerja migran. Oleh karena itu buku ini sangat tepat untuk dapat dijadikan rujukan referensi dalam pemberdayaan masyarakat karena telah memuat berbagai model pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, penggiat pemberdayaan masyarakat, akademisi serta mahasiswa yang tertarik dalam pemberdayaan masyarakat. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mereka dalam melakukan kajian ataupun penelitian karena telah memuat konsep, teori, metode dan model-model penelitian secara komprehenshif. Teori-teori pemberdayaan telah dijelaskan dengan apik dalam buku ini, begitu juga dengan metode-metode penelitian dalam pemberdayaan yaitu metode kombinasi dan metode penelitian partisipatif. Hasil-hasil riset terkait model pemberdayaan masyarakat dalam segala sektor juga telah dijelaskan secara rinci dalam buku ini, sehingga memudahkan bagi kalangan praktisi dan akademisi dalam mempelajari pemberdayaan masyarakat.

Buku ini juga bermanfaat bagi para perencana dan pengambil keputusan seperti Pemintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR RI dan DPRD terutama membantu dalam menyusun program-program, pelaksanaan dan monitoring pemberdayaan masyarakat. Selama ini masyarakat sangat tergantung pada berbagai program bantuan pemerintah, sehingga kemandirian masyarakat sangat rendah. Buku ini sangat bagus untuk dijadikan referensi karena telah menjelaskan model-model pemberdayaan dari berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana identifikasi potensi, strategi dan model pemberdayaan di setiap sektor kehidupan masyarakat.Selamat kepada Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si yang telah menulis buku "Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Desa" sebagai kajian partisifatif, konstruktif dan aplikatif (Paradigma, Pendekatan Teori, Konsep, Metode, Model dan Program). Semoga buku ini diberkai Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, 9 Desember 2020

Yayan Hernuryadin, Ph.D
Peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

DAFTAR ISI

PROLOG
Kata Pengantar 1. Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A
(Peneliti Utama, Balitbang SDM Kementerian Kominfo RI)
Kata Pengantar 2. Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., MAB
(Kabid Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Kementan RI)
Kata Pengantar 3. Yayan Hernuryadin, Ph.D (Peneliti KKP RI)

BAB 1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP PEMBERDAYAAN 1
1.1. Konsep Awal Pemberdayaan 2
1.2. Konsep Pemberdayaan di Indonesia 6

BAB 2. PARADIGMA DALAM PEMBERDAYAAN 11
2.1. Paradigma Dalam Kajian Keilmuan 11
2.2. Berbagai Paradigma dalam Pemberdayaan 12

BAB 3. PENDEKATAN TEORI DALAM PEMBERDAYAAN 17
3.1. Pemberdayaaan sebagai Kajian Interdisipliner 17
3.2. Pendekatan Teori Sosiologi dalam Pemberdayaan 20
3.3. Pendekatan Teori Politik dalam Pemberdayaan 22
3.4. Pendekatan Teori Ekonomi dalam Pemberdayaan 23
3.5. Pendekatan Teori Komunikasi dalam Pemberdayaan 24
3.6. Membangun Teori Pemberdayaan Masyarakat 34

BAB 4. KONSEP PEMBERDAYAAN 37
4.1. Konsep Umum Pemberdayaan 37
4.2. Konsep Khusus Pemberdayaan 39

BAB 5. TUJUAN DAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN 43
5.1. Tujuan Pemberdayaan 43
5.2. Tahapan Pemberdayaan 48
5.3. Strategi Pemberdayaan 53

BAB 6. UNSUR DAN BENTUK PEMBERDAYAAN 57
6.1. Unsur Penting Dalam Pemberdayaan 57
6.2. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan 66

BAB 7. METODE PENELITIAN DALAM PEMBERDAYAAN 73
7.1. Metode Kombinasi *(Mixed Methods)* 74
7.2. Metode Penelitian Partisipatif (*Participatory Research Methods)* 77
7.2.1. Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) 78
7.2.2. *Metode Participatory Learing and Action* (PLA) 81
7.2.3. Metode *Participatory Action Research* (PAR) 82
7.3. Penentuan Lokasi dan Subjek Penelitian 84
7.4. Studi Pendahuluan Penelitian 85
7.5. *State of The Art* dan Kebaruan Penelitian *(Novelty)* 90
7.6. Pengumpulan Data Penelitian 94
7.7. Analisis Data Penelitian 97
7.8. Penyajian Laporan 101

BAB 8. MODEL DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN 104
8.1. Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana 105
8.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Relokasi Pembangunan 121
8.3. Pemberdayaan Masyarakat Eks Pekerja Migran 128
8.3.1. Pemberdayaan dalam Forum Komunikasi Perempuan (FKP) 135
8.3.2. Pemberdayaan Eks Pekerja Migran di Era Digital 140
8.4. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa 147
8.5. Pemberdayaan Ketahanan Pangan dalam Agrowisata dan Eduwisata 152
8.5.1. Permasalahan dan Potensi Ketahanan Pangan 152
8.5.2. Pemberdayaan Agrowisata dan Eduwisata Berbasis Kearifan Lokal 155
8.6. Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan 160
8.6.1. Problematika Penyalahgunaan Narkoba 160
8.6.2. Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Spiritual dan Sosial 165
8.6.3. Model Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Holistik 170

8.7. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Pesisir 178
8.7.1. Permasalahan dalam Masyarakat Perbatasan Pesisir 178
8.7.2. Pemberdayaan Ekowisata Masyarakat Perbatasan Pesisir 179
8.7.3. Pemberdayaan Generasi Muda dalam Ekowisata di Perbatasan Pesisir 184
8.8. Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Batik 189
8.8.1. Tantangan dan Perkembangan Pengrajin Batik 189
8.8.2. Model Pemberdayaan Pengrajin Batik 192
8.9. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata 194
8.10. Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga dalam ..... Mendukung Klinik Kesehatan dan Wisata Jamu 196
8.11. Pemberdayaan Masyarakat Pesantren 200
8.11.1. Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) 200
8.11.2. Model Pemberdayaan Ekonomi dalam Materi Kurikulum Pendidikan 207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah Konsep Pemberdayaan 6
Gambar 2. Konsep Pemberdayaan di Indoensia 10
Gambar 3. Paradigma dalam Pemberdayaan 16
Gambar 4. Membangun Teori Komunikasi Pemberdayaan 36
Gambar 5. Perspektif Pemberdayaan 41
Gambar 6. Tujuan Khusus dan Umum Pemberdayaan Masyarakat 47
Gambar 7. Tahapan dan Strategi Pemberdayaan 56
Gambar 8. Unsur Penting dalam Pemberdayaan 65
Gambar 9. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan 68
Gambar 10. *Mixed Methods* dan Analisis Data 77
Gambar 11. *Participatory Research Methods* 84
Gambar 12. Desain Penelitian Pemberdayaan 1 88
Gambar 13. Desain Penelitian Pemberdayaan 2 89
Gambar 14. Pembukaan Akses Penelitian 90
Gambar 15. Contoh *State of the art* dan *Novelty* Penelitian 1 92
Gambar 16. Contoh *State of the art* dan *Novelty* Penelitian 2 93
Gambar 17. Proses Penelitian 97
Gambar 18. Analisis Data Model Spiral 100
Gambar 19. Model Analisis Data Partisipatif Konstruktif 101
Gambar 20. Proses Penelitian Pemberdayaan Tahap 1 108
Gambar 21. Proses Penelitian Pemberdayaan Tahap 2 dan 3 111
Gambar 22. Model Pemberdayaan Desa A, B & C 115
Gambar 23. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelembagaan Koperasi 120
Gambar 24. Model Pemberdayaan dalam Relokasi Desa 127
Gambar 25. Model Forum Komunikasi Pemberdayaan eks/Calon Pekerja Migran Perempuan 138
Gambar 26. Program Pemberdayaan Pekerja Migran di Era Digital 147
Gambar 27. Model Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 151
Gambar 28. Model Pemberdayaan Ketahanan Pangan dalam Agrowosata dan Eduwisata 158
Gambar 29. Model Pemberdayaan Pengembangan Agrowisata dan Eduwisata 159
Gambar 30. Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba 162
Gambar 31. Rehabilitasi Medis dan Pemberdayaan sebagai Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi bagi Eks Pecandu Narkoba 165

Gambar 32. Rehabilitasi Medis dan Non Medis Pecandu Narkoba 169
Gambar 33. Rehabilitasi Konseling dan Terapi Religi Pecandu Narkoba 170
Gambar 34. Model Rehabilitasi Holistik untuk Pecandu Narkoba, *Phubbing* & *Conduct Disorder* 177
Gambar 35. Model Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan Pesisir 183
Gambar 36. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan Berbasis Ekowisata 189
Gambar 37. Model Pemberdayaan Pengrajin Batik 194
Gambar 38. Model Pemberdayaan Desa Wisata 196
Gambar 39. Model Pemberdayaan tanaman herbal 199
Gambar 40. Model Koperasi Pesantren dengan Kemitraan 203
Gambar 41. Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren 206
Gambar 42. Model pemberdayaan ekonomi dalam kurikulum pendidikan pesantren 211

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan RRA dan PRA 80
Tabel 2. Contoh Matrik Analisis Penelitian Terdahulu 93
Tabel 3. Indikator Kegiatan Penelitian Tahap 1 109
Tabel 4. Indikator Kegiatan Penelitian Tahap 2 dan 3 112
Tabel 5. Realisasi Bentuk Pemberdayaan Desa A 116
Tabel 6. Realisasi Bentuk Pemberdayaan Desa B 117
Tabel 7. Realisasi Bentuk Pemberdayaan Desa C 118
Tabel 8. Identifikasi dan Analisis Penelitian 123
Tabel 9. Analisis Permasalahan dan Potensi Pekerja Migran 130
Tabel 10. Program Prioritas Pemberdayaan 139
Tabel 11. Program Pemberdayaan dan Partisipasi Mitra 140
Tabel 12. Program Pemberdayaan Eks Pekerja Migran Di Era Digital 141
Tabel 13. Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Pesisir 185

BAB I

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP PEMBERDAYAAN

Konsep Pemberdayaan hadir sebagai bentuk pemikiran dan gerakan aksi untuk mengatasi dominasi, kesenjangan, diskriminasi, kemiskinan, keterbelakangan karena kurangnya kesempatan dan rendahnya tingkat pendidikan, serta ketergantungan pada kelompok yang memiliki kekuatan khususnya pemilik modal, struktur kekuasaan dan industrialisasi. Pemberdayaan berperan untuk menciptakan dan memberikan kesempatan pada individu, komunitas dan masyarakat dalam meningkatkan semangat, pengetahuan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan, membuat perencanaan dan melaksanan kegiatan sosial ekonomi serta menciptakan kemandirian. Program dan kegiatan pemberdayaan dirancang berdasarkan aspirasi, minat, kebutuhan dan potensi dari berbagai sumber daya baik sumber daya manusia, sosial, ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam dan lingkungan, sehingga dapat membantu komunitas dan masyarakat menciptakan kesejahteraan, kesetaraan (egaliter), kerjasama (kemitraan), kemandirian dan menjadi pionir untuk berbagi keberhasilan dengan komunitas dan masyarakat lain. Pemberdayaan sebagai resep pembangunan untuk mendukung penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi, urbanisasi, dampak negatif industrialisasi, dan ketergantungan kebutuhan ekonomi serta moneter. Pemberdayaan mengutamakan partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan, potensi sumber daya yang dimiliki, merancang dan melaksanakan program bersama. Masyarakat dengan pemberdayaan akan mengelola, mengembangkan dan mengontrol potensi serta sumber dayanya di desa, sehingga tidak semua

masyarakat meninggalkan desa untuk urbanisasi mencari pekerjaan di perkotaan yang sudah padat dan menjadi pekerja migran dengan kompleksitas permasalahan. Pemberdayaan membangun sosial ekonomi masyarakat desa sebagai pondasi pembangunan daerah dan nasional, dengan menciptakan serta mengembangkan kesejahteraan komunitas dan atau kelembagaan sosial ekonomi dengan kewirausahaan, kelompok usaha, Koperasi dan BUMDes, kemudian melalui ketahanan dan kedaulatan pangan pada pertanian, peternakan serta perikanan.

1.1. Konsep Awal Pemberdayaan

Terdapat beberapa literatur yang mendeskripsikan awal mula konsep pemberdayaan, seperti Pranaka dan Vidhyandika (1996) bahwa sejak lahirnya Eropa modern (*renaissance*) dengan revolusi industri abad ke-18 sebagai fase kelahiran kembali yaitu zaman dimana manusia dapat berpikir secara bebas dan kritis untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan atas dogma agama (gereja) dan kekuasaan monarki. Maka pemberdayaan mulai menjadi diskursus makna pembangunan yang lahir sebagai upaya untuk mengkritik dan menentang dominasi kekuasaan monarki serta dogma gereja. Berkembangnya industrialisasi di Eropa yang melahirkan pemberdayaan yang disebabkan adanya kesenjangan antara kelompok yang memiliki dan menguasi faktor modal serta produksi dengan pihak pekerja atau pekerja dari masyarakat yang lemah dan dikuasai. Pemberdayaan muncul di negara-negara sedang berkembang seiring adanya disinteraksi sosial atau terjadi konflik dalam pembangunan disebabkan terjadi degradasi sumber daya alam, kesenjangan tingkat ekonomi dan penguasa yang mendominasi faktor produksi.

Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada akhir tahun 1960 sampai 1970 khususnya hasil kajian di dunia ketiga seperti Afrika, Amerika Selatan dan Asia mengalami kegagalan dalam pendekatan teori pertumbuhan dengan kapitalisme dan industrialisasi yang sukses di Barat, sehingga tidak dapat menjadi *panacea* atau obat yang mujarab untuk mengatasi pertumbuhan perekonomian. Kondisi dunia ketiga diidentikkan sumber daya manusia memiliki produktivitas dan standar hidup yang rendah, tetapi pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi, pasar ekonomi yang belum memadai, dominasi kelompok pemodal dan terjadi kesenjangan ekonomi, masih belum demokratis, cenderung militeristik dan feodalistik (Rogers, 1989); (Easterly, 2001).

Pemberdayaan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kegagalan pembangunan ekonomi mulai muncul sebagai rasionalisasi yang berkembang menjadi pola kehidupan di Eropa atau masyarakat barat. Dekade 70-an konsep pemberdayaan mulai lahir dan berkembang dengan berbagai aliran phenomenologi, eksistensialisme, dan personalisme yang seirama dengan neo Marxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik frankfurt school. Kemudian bersamaan juga dengan konsep kekuasaan, elit, gerakan populis, *anti-establishment*, anti-struktur, ideologi pembebasan, legitimasi, dan *civil society*. Perkembangan selanjutnya pemberdayaan diidentikan bagian dari post-modernisme (abad XX) yang menekankan pemikirian dan argumentasi yang berorientasi pada anti determinisme, anti sistem, dan anti struktur dalam dominasi kekuasaan (Widayanti, 2012). Begitupun menurut Hasan dan Azis (2018) konsep pemberdayaan muncul karena kegagalan *economic development model* dalam menangani problematika kerusakan lingkungan dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemberdayaan juga merupakan praktik menuju pada perubahan yang memfokuskan pada manusia dan kemanusiaan yang adil, beradab dan mandiri. Terjadi pergeseran dan perkembangan konsep pembangunan menjadi berorientasi kerakyatan (*people centered development*), pembangunan berdasarkan komunitas (*community based development*), melestarikan dan mengembangkan lingkungan (*environmental development*), pembangunan wilayah (*regional development*), pembangunan yang berdasarkan kelembagaan (*institution based development*), dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pemberdayaan berawal dari kesenjangan sosial dan ekonomi yang disebabkan dominasi kekuasaan elit politik, ekonomi dan sosial serta tidak adanya kesempatan kelompok marginal untuk melakukan perubahan, maka muncul suatu metode intervensi (Adi, 2013) yang disebut aksi komunitas (*community action*) yang dilakukan agen perubahan atau pemberdayaan (*community worker*), kemudian menjelaskan secara komprehensif sejarah pemberdayaan dari aksi komunitas yaitu:

(1) Fase pertama, antara tahun 1865 sampai 1914 di awal perang dunia pertama dengan cepatnya perkembangan industri sehingga terjadi masalah urbanisasi dan migrasi. Sehingga muncul kelompok aktivis kesejahteraan sosial (*charity organization societies*) untuk membantu masyarakat miskin, kelompok reformasi sosial (*stattlement houses*) untuk pendidikan anak dan dewasa serta pembangunan fasilitas umum, kemudian kelompok aksi (*action groups*) yang idiologis dan politis. Tahun 1880-an sampai 1920-an muncul profesi pekerja sosial (*social work profession*) seperti organisasi amal (*charity organization*

society) yang melahirkan metode bimbingan sosial (*social casework*) untuk mengorganisir serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat.

(2) Fase kedua, tahun 1915 sampai 1929 setelah perang dunia I, muncul permasalahan urbanisasi, industrialisasi, rasialis, dan anti intelektualisme. Terjadi pula peningkatan kelompok lembaga pendanaan baik profesional maupun relawan (*volunteers*) seperti adanya Dewan Kesejahteraan Masyarakat (*community welfare council*) serta pelayanan kesejahteraan dan kesehatan (*health and welfare agencies*). Tahun 1920 sampai 1950-an munculnya ide komunitas wilayah rukun tetangga (*neighbourhood*) dan idiologis terhadap pembangunan areal tempat tinggal. Barulah muncul istilah pemberdayaan masyarakat pada pengalaman bangsa Inggris dikenal dengan pengembangan masyarakat (*community development*) untuk menggantikan istilah pendidikan massa (*mass education*) antara tahun 1925 sampai 1948 tujuannya meningkatkan kehidupan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di daerah koloni serta mengembangkan institusi politik dan kekuasaan politik secara partisipatif supaya dapat menjalankan pemerintahan sendiri (otonomi). Sedangkan di Amerika abad ke-18 dengan adanya perluasan pendidikan di perdesaan (*rural extension program*) khususnya bidang pertanian, kemudian di perkotaan kegiatan pengorganisasian masyarakat (*community organization*) yang melibatkan tenaga profesional.

(3) Fase ketiga, tahun 1929 sampai 1954, terjadi masalah pengangguran akibat rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja yang disebabkan kebangkrutan perbankan dan bisnis bursa saham, terjadi desentralisasi, otonomi daerah dan berkembangnya profesi pendidikan serta profesional bidang pengorganisasian masyarakat. Tahun 1955 sampai 1968, munculnya kesadaran dan pergerakan hak warga sipil (*civil right movement*), anti rasialisme, pelayanan pada disabilitas, perencanaan regional dan otonomi daerah serta idiologi demokrasi partisipatif. Kemudian tahun 1960-an sampai 1970-an munculnya pendekatan konsensus (*consensus approach*) dengan mengutamakan pentingnya komunitas masyarakat yang memiliki identitas profesional baik di dalam atau di luar pekerja sosial dengan melakukan pelatihan untuk menjembatani teori dan praktik.

(4) Fase keempat, tahun 1969 dan sesudahnya, muncul perencanaan sosial dengan bantuan dalam bentuk program (*block grant program*) dalam pengembangan masyarakat (*community development*) otonomi daerah dan masyarakat informasi (*information society*), berkembangnya pendidikan profesional dengan keterampilan penilaian kebutuhan (*need assessment*), kepemimpinan kelompok (*group leadership*), anggaran (*budgeting*), advokasi,

komunikasi, dan komputerisasi. Tahun 1974-an dengan gerakan yang bersifat radikal, politis, pendekatan konflik, dan fokus pada isu kongkrit untuk menuntut pada pembuatan kebijakan. Prosesnya menggalang solidaritas kolektif untuk mempengaruhi dan menggoyang sistem. Melakukan kerjasama (*collaborative*) melakukan diskusi dan musyawarah untuk mempengaruhi keputusan dan atau kebijakan. Kemudian berkampanye (*campaign*) seperti membuat petisi, surat terbuka, demontrasi bahkan memaksa (*coercive*) karena tidak direspons dan perbedaan sistem nilai. Melibatkan *organizer* atau *activist* sebagai outsider (profesional) yang mempunyai perhatian, memotivasi, mengedukasi, menggerakkan (mobilisasi) dan mengagitasi.

(5) Fase kelima, Abad ke-20 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat program pembangunan yang dapat dijadikan memontum untuk pemberdayaan yaitu tahun 1990 sampai 2015 dengan *Millenium Development Goals* (MDG's) yaitu: (a) Penyelesaian masalah kemiskinan serta kekurangan pemenuhan kebutuhan yang mengakibatkan kelaparan (*eradicate exstreme poverty and hunger*), (b) Pencapaian tingkat pendidikan dasar secara merata (*Achieve universal primary education*), (c) Emansipasi atau persamaan dalam gender dan pemberdayaan wanita (*Promote gender equality and empower women*), (d) Pengurangan mortalitas anak (*Reduce child mortality*), (e) Memperbaiki tingkat kesehatan ibu (*Improve maternal health*), (f) Mencegah *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyakit malaria, dan lainnya (*Prevent of HIV, malaria and other disease*), (g) Kepastian dalam keberlanjutan lingkungan (*Ensure environmental sustainability*), (h) Pembangunan dengan mengembangkan kerjasama secara global (*Develop a global partnership for development*). Sejarah konsep awal pemberdayaan dapat diilustrasikan pada gambar 1.

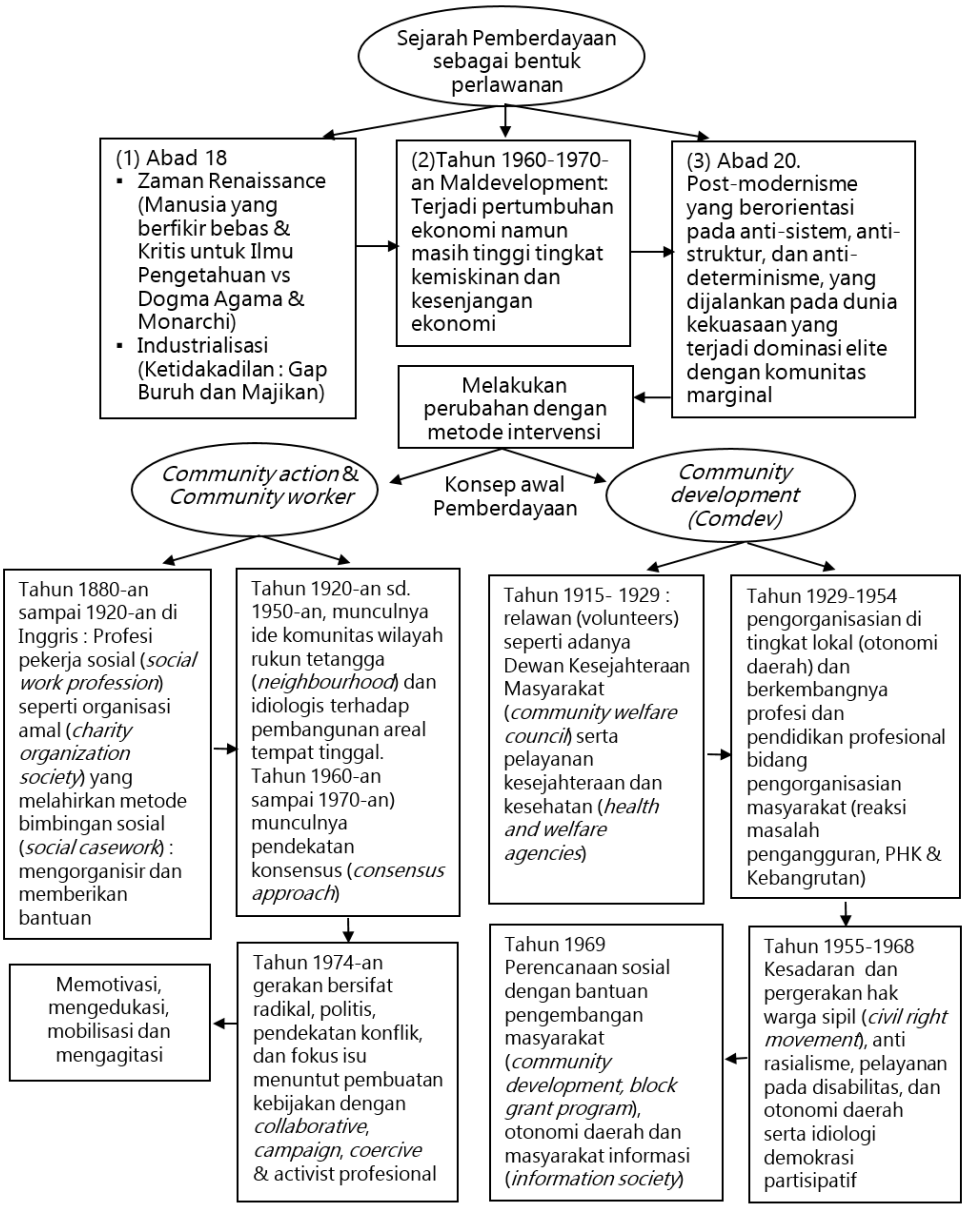

Gambar 1. Sejarah Konsep Pemberdayaan

1.2. Konsep Pemberdayaan di Indonesia

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) serta Mardikanto (2010) sebagai tahapan akhir atau paling baru dalam konsep pembangunan yaitu: (1) Strategi

pertumbuhan ekonomi, yang berorientasi pada tingginya tingkat pendapatan perkapita dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas sumber daya.Tahapan ini sebagai perwujudan dari tahapan teori pembangunan ekonomi Rostow. (2) Pertumbuhan dan distribusi, berorientasi pada pemerataan kelas pendapatan yang ditentukan oleh peran pemerintah. (3) Teknologi tepat guna, sebagai jawaban dari tidak maksimalnya konsep padat modal dan padat karya, sehingga harus mampu memanfaatkan sumber daya lokal dan membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat, serta memberikan nilai tambah produksi. (4) Kebutuhan dasar, berorientasi membarikan kesempatan kerja dan bantuan khususnya bagi masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar atau *basic human needs* seperti bahan pokok, pendidikan dasar, kebutuhan air, kesehatan, sanitasi lingkungan, dan perumahan. (5) Pembangunan dengan teori ketergantungan, sebagai konsekwensi sistem ekonomi kapitalis, dimana negara yang berkembang sebagai sub-sistem dan pinggiran (*periphery*) yang membutuhkan, ditentukan serta terikat oleh kekuasaan dari negara maju sebagai negara pusat. Sekalipun negara *periphery* berperan sebagai produsen tetapi hanya pada level bahan mentah saja, atau pemilik dari perusahan produsen di negara *periphery* tetap milik negara pusat. (6) Pembangunan berkelanjutan, ditujukan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tetapi berlanjut dan tidak merugikan generasi masa datang. (7) Pemberdayaan, berorientasi pada pembangunan yang bukan saja pada pertumbuhan ekonomi, tetapi meningkatkan kualitas hidup manusia berdasarkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Terminologi pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks Indonesia, menurut Adi (2013) perkembangannya mulai tahun 1970-1990-an yaitu pembangunan masyarakat desa yang memiliki unsur desa, masyarakat desa, musyawarah, partisipasi dan pemerintah desa, khususnya dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, walaupun menurut Kuswandoro (2016) undang-undang tersebut belum memberikan kewenangan otonomi secara luas, cenderung diseragamkan, belum dapat mengelola keuangan sendiri dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tidak merepresentasikan fungsi legislasi untuk yang mewakili masyarakat untuk mengontrol karena adanya rangkap jabatan antara kepala desa dan sekretaris desa yang sekaligus menjadi ketua dan sekretaris Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Terjadi perubahan ketika pasca reformasi tentang pedoman umum dalam pengaturan desa dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tahun 2001, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat

hukum memiliki struktur asli yang mendasarkan hak pada sejarah (asal-usul) yang bersifat istimewa sebagai sistem aturan dalam menjalankan susunan organisasi (struktur), wilayahnya, bidang sosial, dan adat budaya masyarakat, termasuk peranan BPD atau Badan Perwakilan Desa yang memiliki fungsi kontrol. Tahap berikutnya dengan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kemudian PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa desa hanya bagian pendukung perencanaan dan pembangunan kabupaten atau kota. Tahap yang paling menentukan yaitu keluarnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dilengkapi peraturan pelaksana di PP Nomor 43 tahun 2014 bahwa desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki otonomi penuh atas anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), BPD memiliki fungsi legislasi yang dipilih melalui musyawarah desa namun tidak dipilih langsung oleh rakyat dan kehilangan fungsi pengawasan karena pertanggung jawaban langsung kepada bupati, sedangkan terhadap BPD bersifat formalitas.

Namun dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tetap menghadirkan peluang bagi kemandirian serta otonomi desa dengan memiliki kewenangan mengelola keuangan desa (DD dan ADD) untuk mendanai dalam melaksanakan pemerintahan, membangunan, dan memberdayakan masyarakat desa (Aziz, 2016). Desa dirancang sebagai miniatur negara dengan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat yang memiliki otonomi mengurus dan bertanggung jawab pada pembangunan masyarakat desa seperti kepala desa secara langsung dipilih oleh masyarakat secara demokratis dalam Pilkades atau pemilihan kepala desa, memiliki mekanisme dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan secara partisipatif melalui Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa secara berjenjang hingga ke pusat, dapat mengeluarkan kebijakan berupa peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta memiliki BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara partisipatif bersamaan dengan membangun dan menyelenggarakan pemerintahan desa yang merupakan tugas, tujuan dan kewenangan desa dengan pendanaan minimal 70% dari jumlah APBDes. Kemudian adanya dukungan dari Peraturan Kementrian Desa yaitu tentang pendampingan desa dalam Permendesa Nomor 3 tahun 2015 dengan melakukan pengembangan kapasitas untuk generasi penerus (kader) pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di desa.

Hadirnya konsep pemberdayaan sebagai perlawanan atas desain pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat (Mardikanto, 2010) seperti

adanya sentralisasi dominasi aspek produksi, terjadi kesenjangan mayarakat pekerja dengan pemilik modal, adanya manipulasi dalam sistem politik, hukum dan idiologi sehingga ada yang berkuasa dan yang dikuasai. Maka perlu terjadi pembebasan dengan pemberdayaan komunitas yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Konsep pemberdayaan merupakan usaha untuk membangun kesadaran, motivasi, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian berdasarkan aspirasi, minat, kemampuan, kebutuhan, potensi dan prospek baik dari sumber daya manusia, alam atau lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan pemberdayaan secara umum untuk mendapatkan pengetahuan, kekuatan, kemampuan atau keterampilan dan akses dalam menciptakan, mengelola serta mengembangkan dirinya, kelompok atau komunitas, lembaga dan organisasi di masyarakat pada bidang sosial, ekonomi dan politik sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian bahkan menjadi pionir dan agen perubahan untuk melakukan pemberdayaan kepada pihak lainnya. Konsep pemberdayaan sebagai tahapan pembangunan di Indonesia dapat diilustrasikan pada gambar 2.

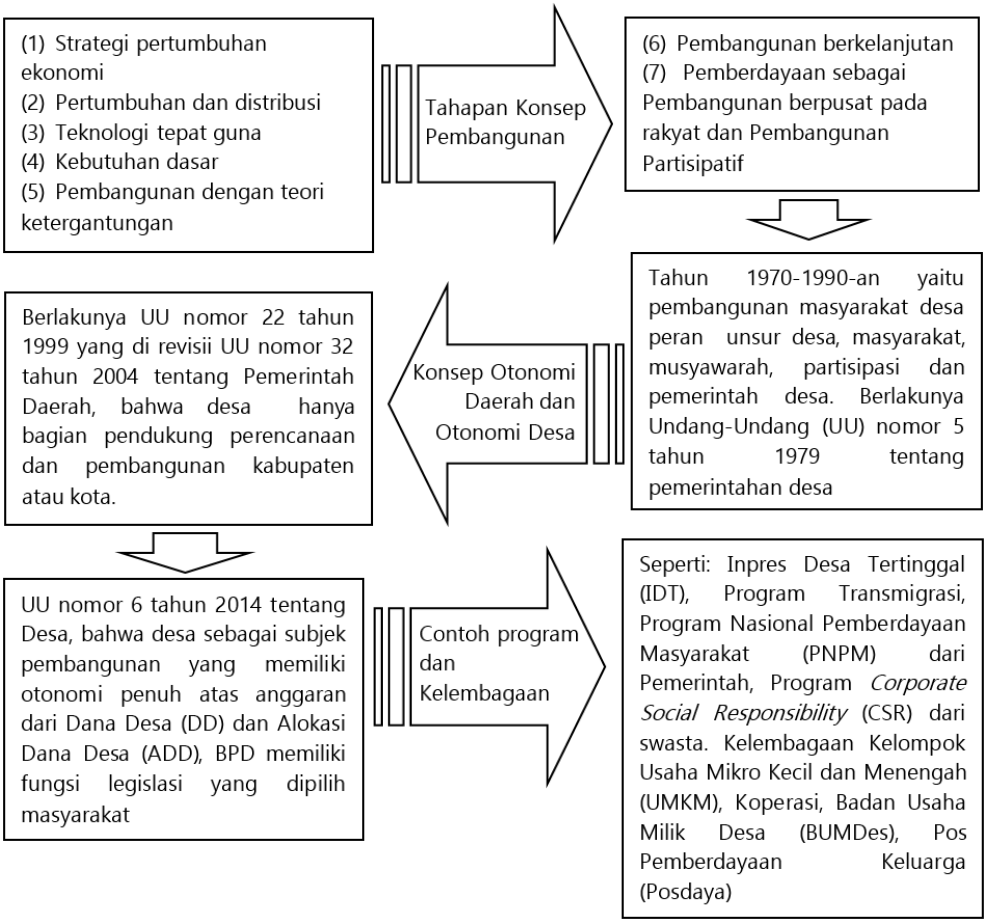

Gambar 2. Konsep Pemberdayaan di Indoensia

BAB 2

PARADIGMA DALAM PEMBERDAYAAN

2.1. Paradigma Dalam Kajian Keilmuan

Aktor dari pembangunan adalah manusia yang mampu mengolah sumber daya yang ada baik ekonomi, alam atau lingkungan, sosial dan budaya. Aktor pembangunan dalam mengolah sumber daya tersebut tergantung cara pandang, berpikir, keyakinan atau idiologi, serta tujuan yang ingin dicapai yang bisa disebut paradigma atau perspektif. Maka setiap aktor, kelompok dan negara dalam proses pembangunan akan memilih, menentukan, mengadospsi dan menjalankan paradigma atau perspektif tertentu.

Pengaruh paradigma sangat penting dan menentukan teori-teori, identifikasi, dan menganalisis fenomena, dikarenakan hakekatnya tidak ada satu perspektif dan teori-teori bidang sosial yang memiliki objektivitas dan independen (netral). Mengutip pendapat Thomas Kuhn bahwa lahir dan berkembangnya keilmuan merupakan proses dan hasil perubahan besar (revolusi) dari paradigma seperti terjadi saling mereduksi dan membantah antar pandangan (paradigma) dan teori untuk menghasilkan kebaruan paradigma serta teori. Paradigma merupakan cara pandang yang hasilnya apakah bermanfaat, atau tidak, baik atau buruk, adil dan tidak adil dalam realitas sosial (Fakih, 2009).

Perbedaan paradigma atau perspektif akan menjadikan kajian atas fenomena realitas faktual menjadi lebih tajam, mendalam, saling melengkapi dan komprehensif. Paradigma dapat dijadikan alternatif dan pilihan dalam mengidentifikasi, menganalisis, merancang dan menentukan penilaian serta

keputusan. Menurut Kerlinger (2010) paradigma berkaitan dengan teori yang terdiri dari konsepsi, pendefinisian, serta proposisi-proposisi yang saling berkaitan dan sistimatis, supaya dapat penjelasan serta prediksi-prediksi suatu realitas faktual. Mulyana (2018) berpendapat bahwa paradigma (*paradigm*) atau perspektif, mazhab pemikiran (*school of thought*) dan pendekatan yang terdiri dari kerangka konseptual, perangkat asumsi, nilai dan gagasan yang mempengaruhi perspesi dan tindakan. Paradigma sebagai cara pandang untuk memahami kompleksitas realitas dan memiliki seperangkat kriteria, serta metode.

2.2. Berbagai Paradigma dalam Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) asal kata dasar "*power"* artinya kekuasaan menjadi dasar perspektif yang dibahas Ife dan Tesoriero (2006) yaitu:

(1) Perspektif pluralis, menekankan individu dan kelompok dalam masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama dalam beraspirasi dan berpartisipasi untuk berkompetisi mendapatkan kekuasaan dalam sistem.

(2) Perspektif elit, pemberdayaan lebih dari sekedar kemampuan berkompetisi tetapi dapat melanggengkan kekuasaan dengan mengontrol permainan dan aturan main yang dibuat serta cenderung menguntungkan elit, sehingga individu dan kelompok dapat ikut bergabung menjadi bagian elit, menjadi sekutu elit dan atau mengurangi kekuasaan elit.

(3) Perspektif struktural, terdapat strata dan kelas yang membedakan dalam masyarakat oleh kelompok dominan, sehingga pemberdayaan mencoba mengimbangi, menentang dan merubah struktur yang ada.

(4) Perspektif post-struktural, mengkonstruksi pengertian, bahasa, dan kontrol pengetahuan di masyarakat sehingga terjadi pemberdayaan untuk perubahan sosial melalui aspirasi, keadilan sosial dan pendidikan.

Terdapat klasifikasi perspektif atau paradigma teori sosial menurut Freire (2008) ke dalam tiga kesadaran yaitu:

(1) Kesadaran magis (*magical consciousness*), tidak sanggup untuk mengetahui keterkaitan dan analisis antar faktor, struktur serta sistem, sehingga masyarakat tidak berdaya menyelesaikan realitas. Masyarakat menerima realitas dan kebenaran secara dogmatik tanpa ada proses untuk

memahami terlebih dahulu makna konsep dan ideologi atas kehidupan masyarakat. Contohnya permasalahan kemiskinan direspons dengan diterima begitu saja dan dianggap suatu ujian dan ketetapan mutlak (takdir) serta tidak ada hubungannya dengan dampak perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi atau pengaruh globalisasi dan modernisasi.

(2) Kesadaran naif (*naival consciousness*), yang menilai penyebab problematika masyarakat adalah manusianya. Sedangkan yang menentukan perubahan sosial yaitu kreatifitas, etika serta penghargaan atas prestasi. Maka melakukan analisis masalah kemiskinan dinilai sebagai kesalahan manusia atau masyarakatnya sendiri, karena tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki motivasi, tidak berjiwa *entrepreneurship*. Sehingga, solusi terhadap itu adalah perubahan dari *man power development* supaya masyarakat dapat menyesuaikan atas sistem dan struktur untuk melakukan perubahan yang bersifat reformatif.

(3) Kesadaran kritis (*critical consciousness*), sebagai perspektif yang cenderung menilai dan mengkritisi struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagai masalah utama, kemudian menciptakan ruang publik untuk memberikan kesempatan berdialog dan berpartisipasi kepada masyarakat dalam mengkritisi dan menciptakan strukturalisasi yang lebih baik atau lebih adil yang disebut kesadaran transformatif. Proyek kapitalisme dan globalisasi dianggap menjadi salah satu penyebab ketimpangan, ketidakadilan, marginalisasi dan kemiskinan. Mengusahakan proyek pengembangan masyarakat, dan advokasi untuk membantu mencari solusi dalam problematika perekonomian, sosial budaya dan politik. Pembangunan memiliki konsekuensi dan problematika seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan atau kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, munculnya kelas sosial yang mapan dan berkuasa dengan yang tertindas dan dikuasai, munculnya konflik sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut memunculkan suatu usaha dalam mengatasinya dengan melakukan, memberikan dan mengembangkan motivasi, pengetahuan dan keterampilan sebagai pemberdayaan baik secara ekonomi, sosial dan budaya terhadap individu dan masyarakat.

Terjadinya dikotomi dalam pembangunan menurut Pranaka dan Vidhyandika (1996) yaitu adanya masyarakat yang dominan berkuasa dan yang dikuasai atau tidak berdaya, sebagai upaya penyelesaiannya dengan melakukan proses pemberdayaan (*empowerment of the powerless*). Beberapa pandangan pemberdayaan sosial dan ekonomi dari hasil pengalaman empirik yaitu:

(1) Pemberdayaan adalah kekuasaan harus dihapuskan atau *power to nobody*, karena kekuasaan telah mengakibatkan ketimpangan eksistensi manusia.

Solusinya yaitu dengan mengembalikan eksistensi dan menyelematkan manusia dari penindasan dan marginalisasi. Namun dinilai hal ini akan menimbulkan konflik, kekacauan atau *chaos* dan anarki.

(2) Pemberdayaan melakukan pembagian atau pendistribusian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*) agar dapat mengaktualisasikan dirinya, karena kekuasaan yang terpusat akan menjadi dominan atau absolut dan cenderung mendegradasi hak normatif kelompok yang dikuasai atau tidak berkuasa.

(3) Pemberdayaan untuk memperkuat pihak lemah atau tidak berdaya namun tidak menghilangkan pihak yang kuat disebut *the power to powerless* sebagai antitesis dua pandangan sebelumnya.

Lebih lanjut tiga pandangan atau paradigma pemberdayaan tersebut berpengaruh terhadap konsep pemberdayaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007) yaitu :

(1) Pemberdayaan konformis yang bersifat 'daun' dan 'ranting' dan disebut *magical paradigm*. Hal ini didasarkan pada tatanan struktural ekonomi dan sosial masyarakat dalam kategori *given*. Sehingga pemberdayaan hanya sebagai usaha penyesuaian dengan yang sudah *given* seperti aksi pemberian santunan, bantuan permodalan, membangun sarana atau fasilitas pendidikan.

(2) Pemberdayaan bersifat reformis dianalogikan seperti batang pohon, disebut juga *naïve paradigm*, bahwa sudah hilang permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, namun terdapat permasalahan dalam kebijakan tataran pelaksanaannya. Maka pemberdayaan yang dilakukan mengembangkan dan memperkuat potensi sumberdaya manusia dan kelembagaan, dengan mengubah dari komunikasi pembangunan teknokratis yang *top down* menjadi komunikasi pembangunan partisipatif atau *bottom up*.

(3) Pemberdayaan struktural yang berkutat di 'akar' yang disebut *critical paradigm*. Disebabkan karena lemahnya atau tidak berdayanya masyarakat untuk mendapatkan akses dan berkesempatan dalam struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya, sehingga kekuatan stuktur tersebut perlu ditinjau kembali, untuk direformasi dan diganti, misalkan dengan mengadvokasi, memfasilitasi dan menyusun *people power* untuk melawan seperti pekerja pada majikan, orang miskin pada orang kaya, rakyat pada penguasa.

Perpsektif pemberdayaan menurut Widayanti (2012) dapat dikelompokan ke dalam dua aliran yaitu:

(1) Perspektif *developmentalisme* (1970-an), yang menilai sumber permasalahan dari tidak berdayanya manusia seperti negara dalam kategori *pheripher*y atau sedang berkembang dimana belum ada kemajuan dan tinggi tingkat keterbelakangan dalam pembangunan yang disebut *the development of underdevelopment* serta melahirkan *dependency* atau ketergantungan kepada negara pusat yang sudah maju, kemudian antara masyarakat terhadap negara atau pemerintah, dan antara petani, nelayan, pekerja, dan usaha kecil terhadap pemilik modal. Maka langkah yang dilakukan pembangunan komunitas (*community development*) dengan model *bottom up, transformative and transactive planning* dan partisipatif (*participative*), menciptakan program pengembangan *home industry*, para pengrajin kreatif meningkatkan penghasilan, pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan, program KB, pemanfaatan inovasi teknologi yang efektif serta efisien. Sehingga pemberdayaan (a) memposisikan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek pembangunan, (b) Pendistribusian *power* (kekuasaan) berdasarkan keadilan dengan membangun dan mengembangkan pendidikan politik rakyat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya.

(2) Perspektif *anti developmentalisme* (1980-an), melakukan penilaian yang kritis seperti terhadap modernisasi (ide-ide baru) dan *developmentalisme* merupakan kemasan baru dari kapitalisme dan produk proyek pencerahan (*enlightenment*), dengan prinsip sekularisasi, rasionalisasi dan individualisasi untuk adanya revolusi ilmu pengetahuan dan industri. Perkembangan selanjutnya adanya sekularisasi dengan penolakan dogma agama dan mitos, maka individu memiliki kebebasan berwawasan rasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengekplorasi realitas bukan berdasarkan kepercayaan. Dampak selanjutnya meningkatkan degradasi moralitas, kriminalitas, pencemaran ekosistem, kemiskinan, dan kekuasaan pada kebudayaan. Pemberdayaan muncul sebagai upaya memberikan aktualisasi dan eksistensi manusia dalam memperoleh keadilan dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga dapat membebaskan diri dari determinisme kekuasaan absolut. Maka pemberdayaan sifatnya tidak netral, dalam relasi sistem dominan-subordinat memiliki keberpihakan terhadap masyarakat yang dirugikan dan termaginalkan (*grass-root*). Perbedaan kedua paradigma tersebut bahwa *developmentalisme* dalam pemberdayaan bertujuan supaya adanya sumber daya dapat berubah ke arah lebih baik dan sanggup beradaptasi dalam sistem, tetapi paradigma *anti-developmentalisme* memperjuangkan adanya perubahan struktur dan sistem sosial, politik, budaya dan ekonomi yang lebih baik serta adil serta terbebas dari kekuasaan absolut .

Menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan dapat dikaji ke dalam tiga perspektif, yaitu: (1) *Enabling perspective*, dengan menciptakan suasana untuk pengembangan potensi dan daya masyarakat (*enabling*) dengan cara membangkitkan kesadaran, motivasi dan dapat mengatasi hambatan-hambatan kultural serta struktural sehingga terciptanya kreatifitas, produktif dan inovatif di masyarakat. (2) *Empowering perspective*, dengan mengembangkan potensi sumber daya masyarakat melalui pengetahuan dan keterampilan; dan (3) *Protecting perspective*, dengan melindungi, menciptakan situasi dan kondisi yang aman, nyaman serta berpihak pada yang lemah seperti mencegah ekploitasi, marginalisasi dan terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

Dengen demikian terdapat paradigma baru dalam pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat yang muncul dan berkembang berdasarkan alternatif solusi kegagalan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada produksi dan industri yang mengakibatkan adanya kesenjangan, masih tingginya kemiskinan, ketergantungan, bersifat *top down* dan dominasi pemodal. Maka pemberdayaan sebagai model pembangunan berpusat pada manusia yang memberikan kesempatan bagi aspirasi dan partisipasi (*bottom up*) serta pengembangan potensi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

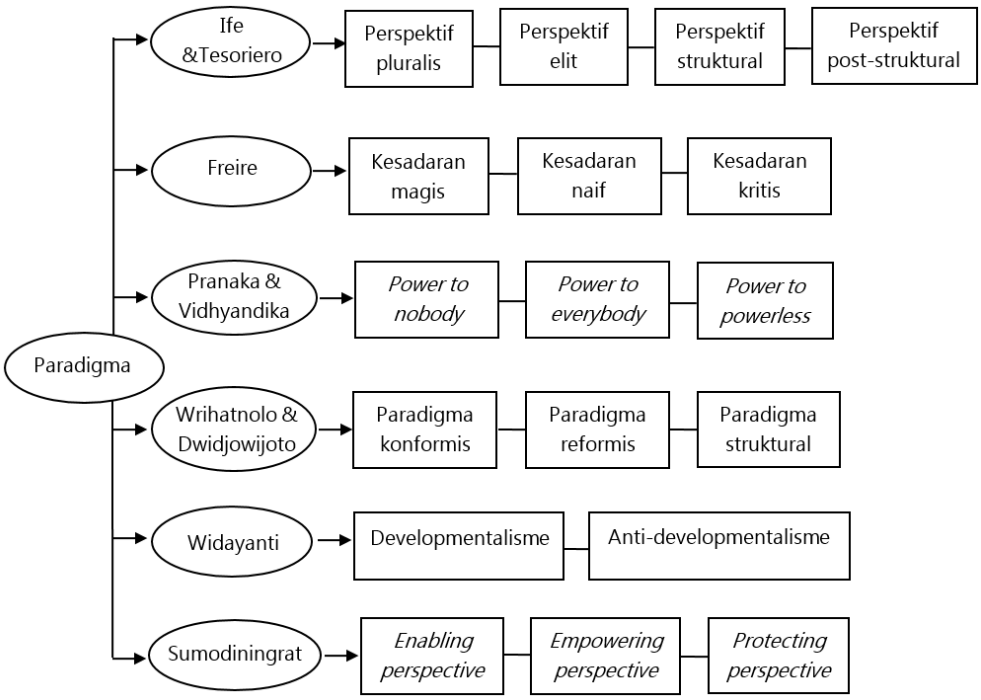

Gambar 3. Paradigma dalam Pemberdayaan

BAB 3

PENDEKATAN TEORI DALAM PEMBERDAYAAN

3.1. Pemberdayaan sebagai Kajian Interdisipliner

Pemberdayaan menjadi bidang pembahasan menarik dan dapat dikaji sesuai konteknya dengan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu atau interdisipliner. Menurut Goldberg dan Larson (2006) fungsi teori ilmiah sangat penting untuk pengembangan suatu disiplin ilmu, Teori menyajikan hipotesis untuk diuji peneliti dan memberikan makna pada data yang dikumpulkan dan memberikan tanggapan terhadap penemuan para peneliti. Hustedde (2009) menyatakan teori sebagai panduan kajian untuk menjelaskan dan memahami kompleksitas peristiwa, perilaku individu serta perubahan sosial ekonomi. Creswell (2014) menyatakan teori merupakan konstruksi dari variabel dengan yang saling berkaitan, asosiasi terhadap proposisi (hipotesis). Teori juga berfungsi sebagai pembahasan dan argumen, memprediksi dan mendeskripsikan realitas faktual. Mulyana (2018) menjelaskan batasan disiplin ilmu sudah tidak tegas, saling beririsan, saling melengkapi dan proses saling melintasi sebagai konsekuensi realitas serta permasalahan yang semakin komplek sehingga memerlukan berbagai perspektif dalam kajian dan memecahkan persoalan. Kemudian teori dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang dianggap sebab dan akibat yang saling berkaitan. Terkadang ada kelaziman kalangan akademis dengan tiga kategori teori yaitu teori besar (*grand theories*), teori menengah (*middle-range theories*) dan teori operasional atau terapan. Penetuan teori juga akan ditentukan paradigma atau perspektif sebagai payung teori dan implikasi metodologisnya dalam penelitian.

McQuail (2009) menyatakan komunikasi sebagai ilmu yang tidak berdiri sendiri dan bebas nilai, dikarenakan komunikasi sebagai sebuah studi awalnya dari berbagai isu yang muncul dan banyak disiplin ilmu, sehingga komunikasi sebagai studi lintas disiplin ilmu dengan menerapkan bermacam-macam perspektif serta metode.

Istilah konsep pemberdayaan merupakan bagian pembahasan teori pembangunan dan komunikasi pembangunan. Menurut Rogers (1989) bahwa komunikasi pembangunan yang bersifat partisipatif telah memberikan kontribusi pada teori pembangunan yang lebih memperhatikan manusia sebagai pelaku pembangunan. Sumodiningrat et al. (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang berbasis kepada rakyat yang menjadi subjek atau pelaku bukan objek dan periferal, kemudian pembangunan bersifat partisipatif dari, oleh dan untuk rakyat mulai dari perencanaan serta pelaksanaan. Mulyana (2007) menegaskan bahwa dalam perkembangannya komunikasi pembangunan sebagai kajian yang lintas disiplin, kemudian perlu pengembangan pembangunan serta komunikasi pembangunan yang humanistik, cirinya bersifat fenomenologis, kritis, dialogis, empati dan partisipatif (*bottom up*). Begitupun menurut Thomas (2014) komunikasi pembangunan (*development communication*) disebut *communication and social change* atau komunikasi dan perubahan sosial yang terbentuk dari berbagai disiplin ilmu dan teori.

Penggunaan pendekatan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu dalam pemberdayaan, ditentukkan pada konteks yang menjadi tujuan kajian atau pembahasan. Pada ilmu sosial yaitu ilmu sosiologi yang didasari teori struktur fungsional, teori konflik, teori perubahan sosial, dan teori ekologi. Ilmu politik dan pemerintahan yang dapat mengkaji dari teori elit dan teori demokrasi. Pada ilmu ekonomi dengan teori-teori pembangunan. Ilmu komunikasi dengan paradigma transaksional dan teori komunikasi konvergen, teori difusi inovasi, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi partisipatif serta komunikasi dalam penyuluhan yang tidak bisa dipisahkan dari pemberdayaan serta menjadi kajian dalam multi disiplin bidang pertanian secara umum.

Pemberdayaan masyarakat menjadi diskursus dan kajian para ilmuan khususnya sosial kemasyarakatan (Chambers, 1995) yaitu sebagai upaya merumuskan konsep dan implementasi program pembangunan pada *the people centered, participatory, empowering,* dan *sustainable* atau pembangunan befokus pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Hutomo (2000) menyatakan diskursus konsep pemberdayaan sebagai jawaban dari pembangunan industrialisasi dengan kurangnya keberpihakan kepada rakyat dan terjadi kesenjangan yaitu: (1) Dominasi kekuasaan bidang produksi sebagai pusat kekuasan; (2) Masyarakat pekerja dan masyarakat yang termarginalisasi lahir dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (3) *Power* (kekuasaan) yang dimilikinya untuk memperkuat legitiminasinya dengan memanipulasi sistem hukum, sistem pengetahuan dan ideologi serta sistem politik; (4) Masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang memiliki kekuatan (berdaya) dan masyarakat yang tidak berdaya sebagai dampak dari kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat.

Dengan demikian diskursus kegagalan pembangunan (*maldevelopment*) dibahas dalam perbedaan perspektif atau paradigma mempengaruhi teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis fenomena. Teori itu sendiri memiliki fungsi yang fundamental yaitu menjelaskan, memprediksi, mengelola serta mengkontrol suatu perubahan. Jika dikaitkan dengan praktik pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk mendeskripsikan peristiwa, menjelaskan kausalitas peristiwa; memprediksi dampak intervensi atau tidak ada intervensi; melakukan pegelolaan dan pengontrolan pada perkembangan di berbagai lapisan kegiatan masyarakat (Mullaly, 2002).

Teori pembangunan merupakan payung besar dari pemberdayaan sebagai pembangunan partisipatif. Menurut Kartasasmita (1996) berkembangnya teori-teori pembangunan khususnya bidang ekonomi yang mengalami pergeseran teori pertumbuhan ekonomi menuju teori yang cenderung pada pembangunan atau pengembangan manusia yang pluralis dan aktor atau subjek pembangunan. Anwar (2007) menjelaskan kajian pembangunan tetap memiliki relevansi terhadap kegiatan partisipasif, *networking*, keadilan serta kemandirian. Hakekatnya memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Pemberdayaan sebagai kegiatan partisipatif memiliki fungsi untuk menciptakan dan mengembangkan jiwa mandiri, sehingga individu atau kelompok harus terlibat dalam proses pemberdayaan supaya lebih menyadari, peduli dan memperhatikan hidupnya dengan memiliki semangat, kepercayaan diri, eksistensi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya yang berkesinambungan hingga menghasilkan partisipasi yang positif dan produktif.

Menurut Hustedde (2009) pemberdayaan sebagai *community development* yang bertujuan untuk membangun solidaritas dan peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui pendekatan teori dapat menjelaskan tentang

perilaku individu dan kelompok yaitu: (1) Kajian tentang hubungan interaksi (*Relationships*) relevan dengan teori modal sosial (*social capital*). (2) Kajian struktur kelembagaan dengan teori struktur fungsional (*structural functionalism*). (3) Kajian Kekuasaan (*power*) dengan teori konflik (*conflict*). (4) Mengkonstruksi dan berbagi pemaknaan (*shared meaning*) dengan teori interaksi simbolik (*symbolic interactionism*). (5) Komunikasi untuk perubahan (*communication for change*) dengan teori tindakan komunikatif (*communicative action*). (6) Motivasi untuk pengambilan keputusan (*motivations for decision making*) dengan teori pilihan rasional (*rational choice theory*). (7) Mengintegrasikan perbedaan kepentingan (*integration of disparate concerns*) dengan teori strukturalisasi (*structuralization*).

Lebih lanjut Phillips and Pittman (2009) menyatakan, bahwa umumnya literatur tentang *community development* mengacu pada modal sosial atau kapasitas sosial (*social capital or social capacity*), yang menjelaskan kemampuan masyarakat untuk mengatur dan mengelola potensi masyarakat dalam mewujudkan harapan dan kebutuhan bersama melalui kolaborasi serta kesepakatan bersama atau konsensus.

3.2. Pendekatan Teori Sosiologi dalam Pemberdayaan

Beberapa teori yang relevan dan dapat dijadikan pendekatan, kajian, dan riset pemberdayaan sebagaimana yang dikutip Haryanto (2012) yang lebih dekat dengan disiplin ilmu sosiologi diantaranya yaitu:

(1) Teori struktur fungsional dari Parson tahun 1937 dengan karya "*Structure of social action*" yang menegaskan terjadinya perubahan karena adanya pergeseran status sosial dalam interaksi, terdapat empat fungsi penting yaitu beradaptasi atas tantangan dan harapan menghadapi situasi (*adaptation*), keinginan mencapai sasaran (*Goal attainment*), mengintegrasikan aturan interaksi atau hubungan (*Integration*) dan pengurangan ketegangan dari sistem budaya (*Laten pattern maintenance*).

(2) Teori perubahan sosial dari Emile Durkheim tahun 1958 perubahan terjadi disebabkan perubahan struktur sosial dari ikatan solidaritas mekanistik yang terjadi pada masyarakat tradisional yang terikat karena kesamaan kepercayaan, emosional, dan komitmen moral serta menghilangkan perbedaaan yang berubah ke arah ikatan struktur pada masyarakat modern seperti adanya diferensiasi dan spesialisasi pada pembagian pekerjaan (*division of labour*).

(3) Teori konflik dari Karl Marx tahun 1867 dengan buku "Das Kapital" yang baru tersebar sekitar 1950-1960 tentang kontradiksi struktural sebagai kritik pada masyarakat kapitalis, sehingga dalam pembangunan ada pertentangan kepentingan (konflik) dan kesenjangan antar kelas pemodal (borjuis) dengan kelas pekerja (proletar). Menurut Schermerhorn et al. (2010) penyebab konflik disebabkan konflik yang sudah ada sebelumnya dan belum terselesaikan, ambiguitas peran karena ketidakjelasan tugas dan harapan, keterbatasan dan alokasi sumber daya, ketergantungan menciptakan tekanan, serta diferensiasi struktural antara tujuan, waktu dan komposisi staf.

(4) Teori pertukaran sosial, muncul pada dekade 1960-an yang menjadi pionirnya George C. Homans seorang Sosiolog Amerika yang intinya dalam interaksi terjadi rangkaian pertukaraan sumber daya antara individu yang berusaha semaksimal mungkin memberikan balasan imbalan dan menekan pembiayaan, kemudian jika seseorang mendapat balasan imbalan yang berasal dari pihak yang lainnya maka akan memiliki kesadaran atau tanggung jawab untuk membalas imbalan tersebut. Bahkan dalam tataran makro terdapat interaksi antar aktor struktural yang menjalankan pertukaran jaringan yang lebih luas untuk dapat mempengaruhi kekuasaan dan pembentukan koalisi atau kerjasama. West dan Turner (2017) mengutip Thibaut dan Kelley bahwa petukaran sosial merupakan hubungan individu atau kelompok yang memperhitungkan unsur pengorbanan (*cost*) yang terkadang ada ketegangan dan tekanan sehingga dapat menimbulkan konflik, dengan unsur penghargaan (*reward*) seperti diindikasikan adanya kesetiaan, kebersamaan, dan keceriaan. Hasil akhirnya apakah meneruskan hubungan atau mengakhirinya. Beberapa asumsi dalam teori pertukaran sosial yaitu manusia pada dasarnya sebagai makhluk rasional, saling ketergantungan, mencari penghargaan daripada hukuman, melakukan evaluasi atas perjuangan dan prestasinya. Terdapat tiga bentuk yaitu: (a) struktur pertukaran untuk satu sama lain membalas imbalan yang telah diberikan dan penghargaan, (b) Pertukaran yang terakumulasi, terjadi saling memberikan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan dengan melibatkan akses jaringan yang luas serta tidak hanya pada relasi personal, (c) Pertukaran yang menciptakan produktivitas, yang masing-masing telah memberikan imbalan serta mendapatkan untung secara berkelanjutan.

(5) Teori ekologi dari Odum tahun 1971 yang membahas hubungan manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial. Perkembangan selanjutnya menurut Adiwibowo (2007) studi ekologi dengan fokus analisis kajian yang bersifat interdisiplin atau berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial sampai pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan rakyat yang berbasis ekologi

dan keadilan sosial, hubungan manusia dengan lingkungannya muncul istilah *green business*, *organic farming*. Kemudian Sumarti (2007) perkembangan ekologi dalam kajian sosiologi lingkungan salah satunya tentang paradigma ekologi baru yaitu manusia meskipun memiliki karakteristik, budaya, dan teknologi namun tetap saling ketergantungan, termasuk dengan ekosistem global. Interaksi manusia tidak hanya dipengaruhi faktor sosial, budaya dan kapasitasnya tetapi erat kaitannya dengan lingkungan, sehingga setiap tindakan akan menimbulkan konsekuensi dan terdapat hukum lingkungan.

3.3. Pendekatan Teori Politik dalam Pemberdayaan

Friedmann (1992) menyatakan pemberdayaan bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi tetapi juga pada bidang politik, supaya masyarakat memiliki kekuatan posisi tawar (*bargaining position*). Begitupun menurut Ife & Tosireiro (2006) bahwa bagaimanapun cara memandang pemberdayaan sebagai kegiatan meraih dan mendistribusikan kekuasaan. Kekuasaan dengan memiliki perspektif pluralis, elite, struktural dan psot-struktural. Mulyawan (2016) kerangka orientasi pemberdayaan tentang *power* atau kekuasaan dan kapabilitas yang memiliki ruang lingkup pada bidang politik, ekonomi, sosial, kelembagaan dan budaya.

Teori-teori dalam ilmu politik yang dapat dijadikan pendekatan kajian dalam pemberdayaan seperti dalam Varma (2001):

(1) Teori elit muncul sekitar 1950-an yang dikembangkan Pareto bahwa masyarakat terbagi ke dalam dua lapisan atau kelompok yaitu lapisan atas atau elit yang merupakan sekelompok kecil orang yang memiliki keunggulan, strategi dan keberhasilan menguasai ekonomi, sosial dan politik sehingga ada elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang diperintah (*non-governing elite*). Kemudian lapisan bukan elit sebagai lapisan bawah atau *grass root* yang dikuasai, tetapi dalam perkembangannya membentuk sub-elit atau elit baru untuk mencoba meraih kekuasaan.

(2) Teori demokrasi partisipasi (*participatory democracy*) dari John Dawey sekitar tahun 1927 bahwa demokrasi bukan sekedar masyarakat dilibatkan untuk mengikuti mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi masyarakat dan individu memiliki kehendak, dapat menolak kekuasaan total dan terdapat konsensus yang didasari atas kebebasan, persamaan dan partisipasi politik.

3.4. Pendekatan Teori Ekonomi dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat juga dikaji melalui pendekatan teori-teori dalam bidang ekonomi, seperti mengutip dari Damanhuri (2010) diantaranya yaitu:

(1) Teori keseimbangan dalam kemiskinan dari Galbraith antara tahun 1958 - 1973 bahwa menegaskan konsep ekonomi yang lebih manusiawi sehingga lebih memperhatikan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dengan peran pemerintah untuk mendisiplinkan perusahaan mendukung pelayanan dan perekonomian masyarakat, kemudian inovasi tetap menghargai produk historis yang khas di masyarakat sehingga terjadi perubahan sistem nilai serta kepercayaan masyarakat.

(2) Teori pembangunan ekonomi tentang *the Stages of Economic Growth* dari Rostow tahun 1960 bahwa tahapannya terdiri dari tahap *the traditional society* atau kondisi masyarakat yang masih tradisional, kemudian *the preconditions for take off* atau pra-kondisi menuju pada tinggal landas, tahapan perkembangan ekonomi tinggal landas (*take off*) dimana hambatan sudah sudah bisa diatasi, dan tahap dorongan kemapanan (*The drive to maturity*) mulainya penggunaan teknologi modern dan tahap tingginya masa konsumsi sebagai tahap masa pertumbuhan dan kemajuan industri yang menciptakan konsumsi tinggi (*The age of high mass cosumption*).

(3) Teori ketergantungan dari Wilber pada tahun 1979 bahwa dalam pembangunan terjadi dominasi negara maju terhadap negara pinggiran (*pheripheries*), sehingga terjadi ketergantungan politik, ekonomi dan militer kepada negara maju.

(4) Teori *Economic growth,* pembangunan berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional yang terpusat pada produksi industri dan *entrepreneur* melalui akumulasi modal dan investasi, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, serta kemajuan teknologi.

(5) Teori *Basic needs,* pembangunan berorientasi kebutuhan dasar, pelayanan publik, kemampuan administrasi dan anggaran serta kesejahteraan dalam penanggulangan kemiskinan.

(6) Teori modernisasi, berawal dari dikotomi masyarakat modern yang diasumsikan negara maju yang positif mentransfer modal dan kemajuan teknologi kepada masyarakat tradisional (negara berkembang). Menurut Comte (dalam Sztompka 2010) ciri modernisasi yaitu adanya urbanisasi, pengorganisasian pekerjaan berdasarkan spesialisasi dan efektivitas, penerapan

rasionalitas, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi, adanya ketimpangan dan ketidakadilan, serta sistem ekonomi bebas dan kompetisi.

(7) Teori *people centered development,* pembangunan yang berpusat pada manusia dengan prinsip kesejahteraan, persamaan dan keberlanjutan melalui pemberdayaan yang didukung pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendorong eksistensi, komitmen, dan aktualisasi dalam berkembangnya kreativitas serta potensi masyarakat. Syahyuti (2006) menyatakan lahirnya konsep pembangunan berpusat pada rakyat merupakan antitesis dari teori pembangunan dengan memfokuskan pada produksi, modernisasi dan industrialisasi. Sehingga yang menjadi pusat perhatian pembangunan adalah manusia yang berdaulat untuk mengontrol, berpartisipasi dan mandiri.

Teori *people centered development* sangat relevan dengan pemberdayaan yang memberikan motivasi, inspirasi, partisipasi, pengetahuan, keterampilan, akses baik informasi, modal dan pemasaran serta jaringan kerjasama atau kemitraan sampai kemandirian. Sebagaimana menurut Lubis (2007) terdapat perbedaan model komunikasi pembangunan yaitu: paradigma modernisasi seperti *top down*, perubahan sosial diarahkan oleh pihak luar, media skala besar (nasional) seperti televisi, surat kabar dan radio, kemudian menciptakan iklim yang kondusif supaya sasaran menerima ide dan inovasi dari luar. Kemudian yang selanjutnya paradigma pemberdayaan seperti berbagi pengalaman antar aktor, partisipatoris dalam mengelola dan melakukan kontrol, media skala kecil atau lokal seperti media tradisional, komunikasi kelompok dan interpersonal, menciptakan iklim kebersamaan atau solidaritas.

3.5. Pendekatan Teori Komunikasi dalam Pemberdayaan

Disiplin ilmu komunikasi juga memiliki banyak teori yang dapat mengkaji pemberdayaan sesuai dengan konteks pembahasan. Menurut Mulyana (2011) fenomena komunikasi yang serba hadir dimana-mana (*omnipresent*). Beberapa teori komunikasi yang dapat dijadikan kajian pendekatan pemberdayaan diantaranya:

(1) Teori tindakan komunikatif (*The theory of communication action*) dari Jurgen Habermas pada tahun 1981 bahwa masyarakat akan berkembang bukan ke arah kekuasaan tetapi ke arah komunikasi rasional bukan lagi teknis dan instrumental. Rasionalitas akan menjadikan tindakan komunikatif dapat mengkonstruksi saling pengertian dan memerlukan akal budi untuk menciptakan komunikasi yang humanistik yang menghilangkan konflik dan

kekerasan. Komunikasi yang emansipatoris yang memiliki kebebasan dan bernilai. Komunikasi yang dibangun untuk menghilangkan ekslusifitas dan diskriminasi dalam meraih kehidupan yang lebih baik (Sumartini, 2010).

(2) Teori komunikasi konvergen menjadi teori yang relevan dalam pemberdayaan (Rogers & Kincaid, 1981); (Kincaid & Figueroa, 2009) bahwa komunikasi bertukar informasi dan makna yang bertujuan adanya pengertian dan kesepahaman bersama (*mutual understanding*) dan bergerak ke arah konvergensi. Teori konvergensi merupakan komunikasi sebagai proses horizontal berbagi informasi antara dua atau lebih partisipan dalam jejaring sosial yang mengarah pada hasil sosial seperti saling pengertian, kesepakatan bersama, dan tindakan kolektif, serta hasil psikologis seperti persepsi, interpretasi, pemahaman , keyakinan, dan tindakan.

(3) Teori difusi inovasi (Rogers & Shoemaker, 1971) merupakan proses penyebarluasan ide atau hal baru dalam sistem sosial yang dapat merubah masyarakat melalui saluran komunikasi. Tahapan proses difusi inovasi selanjutnya memerlukan adopsi inovasi sebagai bentuk penerimaan dengan proses kesadaran (*awarness*), tumbuhnya minat (*interest*), evaluasi atau penilaian (*evaluation*), mencoba (*triall*), dan adopsi (*adoption*). kemudian terdapat kelompok penerimaan (adopsi), inovasi yaitu perintis (*inovators*), penerimaan dini (*early adopter*), mayoritas dini (*the early majority*), mayoritas belakangan (*the late majority*) dan penolak dan atau kaum paling akhir mengadopsi (*laggards*). Unsur berpengaruh dalam kecepatan adopsi inovasi ditentukan sifat inovasi, jenis keputusan inovasi, saluran komunikasi, sifat sistem sosial dan pelayanan penyuluhan.

(4) Komunikasi massa, merupakan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas dengan menggunakan media massa baik media cetak, media elektronik, maupun media teknologi informasi seperti internet. Fungsi komunikasi massa untuk memberikan informasi (*to inform*), persuasi (*to persuade*), hiburan (*to entertain*), edukasi (*to educate*) dan penyebaran budaya (*transmission of the culture*) (McQuail, 2009). Komunikasi massa secara praktis sebagai komunikasi dengan menggunakan media massa elektronik (modern) dan media cetak (konvensional), yang memiliki fungsi lainnya untuk pendampingan (*to guide*) mempengaruhi (*to influence*), dan memberikan kritik (*to criticise*) (Effendy, 2010).

(5) Komunikasi antar budaya (*intercultural communication*) merupakan eksplanatif dari relasi dan praktik komunikasi dengan latar belakang budaya yang berbeda sebagai bentuk representasi mereka dengan mengomunikasikan

identitas budayanya kepada orang lain. Komunikasi lintas budaya (*cross cultural communication*) merupakan perbandingan praktik komunikasi yang sama di berbagai budaya yang berbeda. Kedua kajian tersebut penting seiring faktor mobilitas manusia (*human mobility*), ketergantungan ekonomi (*economical dependency*), kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang, dan perkembangan teknologi komunikasi, pola imigrasi (*human immigration pattern*), dan kesejahteraan politik (Gudykunst & Lee, 2002).

(6) Komunikasi persuasif, berupa pesan yang memotivasi, membangun hubungan baik dan opini dengan individu dan kelompok. Formulasinya AIDDA yaitu *Attention (perhatian*), *Interest* (minat), *Desire* (hasrat), *Decision* (keputusan) serta *Action* (melakukan kegiatan) (Effendy, 2010). Tujuan komunikasi persuasif yaitu membujuk dan memberikan pengaruh atau merubah kepercayaan, pemikiran, persepsi, opini, sikap dan perilaku, hingga perilaku secara verbal maupun non verbal kepada komunikan. Unsur penting yang menentukan komunikasi persuasif yaitu kredibilitas dan kompetensi komunikator, pesan dan informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan rasional supaya dapat diterima dengan mudah oleh komunikan serta pengaruh lingkungan (DeVito, 2011).

(7) Komunikasi kelompok, yang berfungsi dalam mencari solusi dari permasalahan, menetapkan keputusan dan dapat juga menumbuhkan kesadaran sosial politik (Rakhmat, 2012). Komunikasi kelompok merupakan studi yang fokus perhatian pada proses komunikasi dalam kelompok kecil, mendeskripsikan dan menganalisis proses diskusi atau saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil. Komunikasi kelompok terjadi langsung dan tatap muka dalam suasana bisa spontan dan kurang terstuktur dan berorientasi tujuan, namun sebaliknya bisa juga terstruktur yang memiliki kesadaran tentang sasaran bersama (Goldberg & Larson, 2006). Komunikasi kelompok memiliki tujuan untuk pengembangan pengetahuan praktis tentang perilaku kelompok yang membantu anggota kelompok dan fasilitator. Teori kelompok dan aplikasinya mengarahkan pada penelitian yang bertujuan untuk pengelolaan dan pengaturan kelompok terutama pada entitas lembaga pengambilan keputusan (Gastil, 2009).

Terdapat kajian dalam komunikasi kelompok tentang "*groupthink*" atau "pemikiran kelompok" sebagai proses pemecahan masalah yang tidak melakukan pengujian atas gagasan-gagasan yang diterima oleh kelompok, sedangkan terhadap gagasan-gagasan yang berlawanan ditekan. Indikasi lainnya seperti (a) Anggota sama-sama membangun kesan aman dengan menghindari

pembicaraan yang tidak sesuai dengan kelompok. (b) Anggota kelompok yang menyimpang (tidak sejalan) dipaksa untuk patuh (Tubbs & Moss, 2005). *Groupthink* sebagai teori yang identik dengan komunikasi kelompok kecil dalam proses pengambilan keputusan atas dasar keterikatan yang erat (kohesivitas) akan berusaha mempertahankan konsensus kelompok, sehingga kelompok berpikir sama, tidak memiliki pemikiran yang berlawanan, sehingga ide-ide lain serta kemampuan kritisnya tidak muncul atau tidak diungkapkan. Terdiri dari kelompok pemecahan masalah yang tugasnya mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi, kemudian kelompok berorientasi tugas yang bekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Terjadi kohesivitas atau bersatu karena memiliki perasaan dan semangat kebersamaan (*esprit de corps*) (West & Turner, 2017). Menurut Bungin (2008) fungsi komunikasi kelompok diantaranya yaitu: (a) Kelompok dapat mengelola dan menentukan interaksi sosial para anggotanya. (b) Kelompok dapat memecahkan persoalan (*problem solving*) dan (c) membuat keputusan-keputusan (*decision making*).

(8) Komunikasi efektif, menurut Dainty et al. (2006) menyatakan komunikasi efektif dapat memelihara kerjasama tim atau kelompok kerja dan keberhasilan hasil kerja tim, dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Komunikasi efektif menurut Goldhaber (2003), Tubbs dan Moss (2005) dan Effendy (2017) terdiri dari: (a) Aspek kognisi (*cognition)* yaitu sebagai proses mengerti atau mengetahui dan memahami (*process of knowing*) yang menyangkut pikiran, pesan yang diterima, dipahami dan disampaikan kembali sehingga terjadi pertukaran pesan. Tujuannya memiliki pemahaman yang dapat menerima pesan dengan cermat, adanya tambahan informasi, dapat mengatur, menyajikan dan menafsirkan informasi yang didapatkan. (b) Aspek afeksi (*affection*) sebagai perasaan yang ditimbulkan oleh stimulus dari luar yang memiliki sumber-sumber pesan dan terdapat aktivitas komunikasi yang dapat dipercaya, membutuhkan situsi psikologis dengan kepercayaan. Jika interaksi sosial terdapat ketidakpercayaan, maka dampaknya informasi yang diberikan sekalipun oleh komunikator yang dianggap kompeten dapat berbeda pemaknaan dan dideskriditkan. Kepercayaan dalam komunikasi efektif berfungsi untuk memperbaiki hubungan (interaksi). (c) Aspek konasi (*conation*) sebagai unsur psikologis tentang usaha, terdapat peningkatan aliran pesan, yang dapat meningkatkan harapan individu untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi yang mempengaruhi sikap atau bujukan (persuasi) yang penting dalam komunikasi kelompok kecil atau organisasional untuk menciptakan konsensus. Kemudian konasi dapat berupa tindakan sebagai proses akhir dari tahapan memudahkan pemahaman (kognisi) apa yang diharapkan, meyakinkan (afeksi) dan mempertahankan hubungan harmonis.

(9) Komunikasi pemasaran, merupakan proses menawarkan produk atau merek perusahaan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan sarana untuk menginformasikan dan membujuk konsumen supaya tertarik, menciptakan, mengingatkan dan memunculkan penilaian merek serta memperkuat loyalitas konsumen, sehingga konsumen membeli produk dan menjadi pelanggan setia. Aspek penting dalam komunikasi pemasaran yang disebut STP yaitu segmentasi pemasaran (*segmentation*), target pasar (*targeting*), kedudukan dalam hubungan antara perusahan dan konsumen (*positioning*). Kotler dan Keller (2016) mengutip McCarthy tentang empat komponen *marketing mix* atau bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu: *Product* (Produk), *Price* (Harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (Promosi). Sedangkan *integrated marketing communication* (IMC) atau komunikasi pemasaran terpadu sebagai strategi dalam komunikasi pemasaran yang komprehensif ada yang menyusun (a) Aspek *Coverage* tentang cakupan pilihan komunikasi yang berbeda yang disesuaikan dengan target audien atau konsumen. (b) *Contribution* yaitu mengukur respon dan efek komunikasi pemasaran tentang pengaruhnya pada konsumen, membangun kesadaran konsumen, meningkatkan citra dan mendorong penjualan. (c) *Commonality*, menanamkan kesamaan asosiasi citra dan merek dari komunikasi yang berbeda. (d) *Complementarity*, menggunakan berbagai bentuk dan media komunikasi untuk saling melengkapi dalam meningkatkan persepsi kepercayaan serta kredibilitas label produk. (e) *Conformability*, menyesuaikan komunikasi pada tingkat level yang terhadap konsumen yang baru dan yang lama. (f) *Cost*, mengevaluasi untuk menentukan biaya program komunikasi pemasaran yang paling efektif dan efisen. Kemudian mengelola komunikasi massa dalam pemasaran yaitu *advertising* (periklanan), *sales promotion* (promosi penjualan), mengadakan kegiatan yang berkesan menjadi pengalaman (*events and experiences*), dan menjalin hubungan dengan masyarakat atau konsumen (*public relations*).

Komunikasi pemasaran merupakan proses komunikasi dengan tahapan merencanakan, menyatukan dan mengimplementasikan dari berbagai bentuk komunikasi pemasaran seperti promosi penjualan, iklan, pameran, publisitas, dan media sosial. Tujuan komunikasi pemasaran memberikan informasi kepada konsumen terlebih dahulu diidentifikasikan secara jelas untuk menentukan level hierarki komunikasi yang dilakukan dengan pertimbangan (a) *Positioning*, produk yang jelas, unik, ciri khas identitas mereknya dan sulit ditiru. (b) *Personality*, identitas dan figur yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan citra yang baik (c) *Proposition* atau alasan dan penjelasan produk dan merek yang rasional (Widyastuti, 2017).

(10) Komunikasi pembangunan (*development communication*) telah dikaji para pakar secara teoritis dan aplikasinya yang mulai berkembang pada dekade 1960-an awalnya dikenal dengan komunikasi penunjang pembangunan (*development support communication*) berdasarkan Learner, Pye dan Schramm (dalam Effendy, 2017) indikasinya dengan jaringan komunikasi berbasis teknologi (*technology based communication network*) terkadang tidak memperhatikan informasinya dan substansinya. Menurut Rogers (1989) bahwa komunikasi pembangunan perlu dinilai sebagai proses menyeluruh, seperti pemahaman terhadap publik, tuntutan dan kebutuhan publik, proses merancang komunikasi, strategi yang ditentukan, diseminasi, kemudian kesepakatan dalam diskusi tatap muka, saling aktif merespon pada informasi yang disampaikan dan diterima.

Pemberdayaan merupakan perwujudan dari pembangunan partisipatif dengan ciri bersifat dialogis, aspiratif, ada kesempatan dan kesamaan hak yang sama secara setara (egaliter). Sehingga pemberdayaan bagian dari pembangunan yang bersifat partisipatif, kemudian komunikasi pembangunan melahirkan komunikasi pemberdayaan. Menurut Melkote dan Steeves (2001) komunikasi pembangunan tidak hanya pesan atau informasi komunikasi, namun merupakan dialog yang egaliter dari para pelaku pembangunan. Bessette (2004) menjelaskan komunikasi pembangunan partisipatif sebagai kegiatan yang direncanakan berdasarkan proses partisipatif, peran media dan komunikasi antarpribadi, yang memfasilitasi dialog antar stakeholder tentang problematika dan tujuan pembangunan bersama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi program. Terdapat elemen komunikasi dalam pembangunan (Cadiz, 2005) yaitu penyediaan akses informasi, menempatkan pengguna atau penerima manfaat dan masyarakat lokal untuk terlibat dalam mengkontrol, membangun kemampuan komunikasi dan media dalam masyarakat lokal, belajar bersama mitra, bekerja secara kolektif (*collective action*), memanfaatkan dan membangun berdasarkan kebutuhan, menciptakan motivasi dan kenyamanan, memberi pengalaman langsung serta berbagi sumber daya yang dimiliki. Menurut Lubis (2007) terjadi perubahan dari developmentalis-modernis ke pemberdayaan, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi, komunikasi pembangunan model linier yang *top down* dan teknokratik (*transfer of technology*) berubah menjadi komunikasi dua arah atau relasional, dialogis, partisipatif dan konvergen. Servaes (2008) menjelaskan komunikasi partisipatif penting untuk pembangunan yang berpusat pada komunitas (masyarakat) untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan nyata untuk menumbuhkan manajemen diri (*self-management*)

sehingga menyadari hak dan kewajiban serta pembagian dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, produksi isi media, dan pelaksanaan.

Komunikasi pembangunan erat kaitannya dengan pemberdayaan dengan persyaratan adanya dialogis dan egaliter untuk pertukaran pengetahuan, pelatihan khusus, serta menciptakan ruang untuk berpartisipasi secara kooperatif pada tingkat individu, masyarakat atau kelembagaan dalam pengambilan keputusan program kegiatan yang berkelanjutan (Tufte & Mefalopulos, 2009)

Porras dan Steeves (2009) menyatakan praktik komunikasi pembangunan terutama ditandai adanya tatap muka secara setara atau egaliter dengan berdialog, yang melibatkan refleksi dan tindakan, serta tanpa perbedaan hierarki diantara orang-orang yang berdialog. Nasution (2012) menjelaskan komunikasi pembangunan sebagai peran dan fungsi komunikasi sebagai kegiatan saling memberikan dan menerima informasi dari pihak yang terlibat dalam pembangunan secara timbal balik khususnya antara pemerintah dengan masyarakat dalam tahapan merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembangunan. Leeuwis (2006) menegaskan bahwa dalam pembangunan, para stakeholder teribat secara partisipatif, terdapat peluang yang sama untuk beraspirasi, dan secara bersama menyepakati keputusan serta saling menghormati. Menurut Kincaid dan Figueroa (2009) komunikasi pembangunan meneliti masalah-masalah komunikasi terutama di negara-negara yang kurang berkembang. Komunikasi pembangunan didirikan pada 1950-an dan 1960-an ketika negara maju mulai memberikan bantuan ekonomi untuk mengatasi populasi penduduk yang semakin bertambah, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produksi pangan dan kesehatan serta pendidikan di negara yang kurang berkembang dan yang baru berkembang.

Sehingga komunikasi pembangunan merupakan proses pertukaran aspirasi dan kepentingan dari berbagai pihak baik pemerintah, *civil society* dan dunia usaha secara partisipatif serta kolaboratif dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Komunikasi pembangunan memiliki tiga bentuk yang dapat disebut teori komunikasi pembangunan yaitu:

(a) Teori komunikasi pembangunan teknokratis (*top down*), dimana pemerintah memiliki peran dan otoritas lebih besar dalam membuat, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Komunikasi pembangunan teknokratis eksis dan berperan kuat, jika *civil socety* atau

masyarakat belum mampu membuat, memiliki keberanian atau kesempatan dalam mengaspirasikan dan memperjuangkan program pembangunan yang diharapkan. Sehingga pembangunan sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan atas inisiatif, kepentingan serta program dari pemerintah. Keputusan dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikan pemerintah merupakan komunikasi pembangunan teknokratis. Kelebihan komunikasi pembangunan teknokratis dilakukan untuk perumusan dan pelaksanaan program yang lebih cepat dan efektif sesuai target yang direncanakan. Kekurangannya pelibatan masyarakat sebagai sasaran atau penerima manfaat (*beneficiaries*) kurang terakomodasi karena ketidakmampuan masyarakat dalam merancang atau membuat program atau membutuhkan kecepatan pelaksanaan program. Bentuk komunikasi pembangunan teknokratis berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, dan Perda (peraturan daerah) sampai peraturan dan keputusan desa. Idealnya komunikasi pembangunan teknokratis berdasarkan hasil kajian, riset dan aspirasi dari permasalahan, kebutuhan dan sumber daya masyarakat.

(b) Teori komunikasi pembangunan partisipatif (*bottom up*) yaitu peran masyarakat (*civil society*) yang lebih memiliki kesempatan dan aktif mengaspirasikan kepentingan serta kebutuhan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi program pembangunan. Aspirasi masyarakat syaratnya berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat seperti sumber daya manusia, sumber daya sosial budaya, sumber daya ekonomi dan sumber daya alam atau lingkungan. Komunikasi pembangunan partisipatif memiliki persyaratan seperti melibatkan semua unsur masyarakat, tidak ada diskriminasi dan egaliter (sejajar), memiliki kesempatan yang sama, bersifat terbuka, dan dialogis, serta menghasilkan keputusan bersama atau dalam bahasa yang lebih praktis dengan bermusyawarah dan mufakat. Kelebihannya komunikasi pembangunan partisipatif, semua potensi diakomodasi dan semua pihak terlibat serta bertanggung jawab sebagai komitmen untuk dilaksanakan bersama atau *collective action*. Komunikasi pembangunan partisipatif sebagai implementasi konsep demokratisasi dan otonomi di daerah dan masyarakat desa. Kekurangannya membutuhkan pihak *outsider* seperti fasilitator dan pendamping dari luar komunitas dan masyarakat jika tidak memiliki kemauan, pemahaman, dan kemampuan mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan, kebutuhan juga potensi dalam perumusan, pembuatan sampai pelaksanaan program pembangunan. Idealnya hasil komunikasi pembangunan partisipatif dapat diusulkan, didukung

dan diperkuat oleh hasil komunikasi pembangunan teknokratis sehingga akan menuju pada teori komunikasi pembangunan deliberatif.

(c) Teori komunikasi pembangunan deliberatif, yaitu proses menyatukan atau mengkolaborasikan secara dialogis, transparan, dan egaliter dari aspirasi dan kepentingan dari hasil komunikasi pembangunan partisipatif dari *civil society* dengan hasil komunikasi pembangunan teknokratis dari pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pembangunan untuk mencapai kerjasama atau kemitraan serta kesejahteraan bersama. Komunikasi pembangunan deliberatif merupakan proses komunikasi perumusan program menjembatani atau memediasi dan mengkolaborasi dua kepentingan teknokratis dan partisipatif menjadi hasil program yang kolaboratif, komprehensif, berkesinambungan. Para pelaku pembangunan dari teknokratis dan *civil society* yang memiliki kepentingan dapat secara terbuka, sejajar (egaliter) dan harmonis serta bekerja sama untuk saling mendukung, memperkuat, dan membagi tanggung jawab mencapai tujuan bersama. Komunikasi pembangunan deliberatif, juga merupakan perwujudan demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi pembangunan, serta *good governance* yang mensyaratkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat.

(11) Komunikasi partisipatif, merupakan bagian dari komunikasi pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam pendekatan teori pembangunan, bahwa komunikasi pembangunan partisipatif yang bersifat *bottom up* dimana inisiatif, kepentingan dan program pembangunan dari *civil society* atau masyarakat yang mengimbangi komunikasi pembangunan teknokratis yang *top down.*

Komunikasi partisipatif inilah yang disebut komunikasi pemberdayaan, dimana masyarakat mendapat ruang lebih terbuka untuk beraspirasi dan mampu membuat dan melaksanakan pemberdayaan dengan mengolah serta mengembangkan potensi baik sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pihak kelompok, komunitas, kelembagaan dan masyarakat menjadi subjek atau aktor dari pembangunan untuk mengelola potensi sumber daya, sedangkan pemerintah dan dunia usaha berperan sebagai mitra pendukung dalam pemberdayaan masyarakat baik dari segi kebijakan, bantuan modal usaha, dan pendampingan program.

Komunikasi yang bersifat partisipatif merupakan elemen dasar dalam model pemberdayaan dimana orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan

perlu dilibatkan dalam memaknai, merancang, dan melaksanakan proses pembangunan (Melkote & Steeves, 2001). Komunikasi partisipatif sebagai komunikasi pemberdayaan bukan hanya tentang pengambilan keputusan dalam konteks pembangunan, tetapi juga mempengaruhi setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hamijoyo (2005) menyatakan komunikasi partisipatif bersifat humanis yang memposisikan individu sebagai aktor atau subjek yang aktif dan dinamis merespon atau mengelola lingkungan dan kehidupannya. Tufte dan Mefalopulos (2009) menyatakan tujuan komunikasi yang strategis akan membantu mencari solusi dari problematika di masyarakat dan menentukan tujuan dengan komunikasi partisipatif sebagai pemberdayaan masyarakat yang ditandai pelibatan secara aktif, partisipatif, dialogis serta sederajat (egaliter).

Pemberdayaan dengan memfokuskan pada penyadaran dan pendidikan dari Freire (2008) yang memberikan kontribusi pada komunikasi sebagai proses dialog terbuka dan bebas untuk siapa saja serta proses penyadaran sebagai bentuk pembangunan dengan pendekatan hak-hak asasi manusia, dikarenakan selama ini masyarakat termaginalkan atau sebagai *voiceless people* dan tidak menghendaki pembangunan yang bersifat linier, vertikal dan *top-down*. Maka komunikasi partisipatif dalam pembangunan sangat penting yang didasari oleh proses penyadaran dalam membangun diri dan manajemen diri.

Komunikasi untuk pembangunan membantu dalam mengadopsi model yang membutuhkan pengetahuan, partisipasi, dialog, kolaborasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan (Dasgipta, 2009). Komunikasi pemberdayaan memiliki kerangka teoritis yang didasarkan pada komunikasi partisipatif dan pengembangan, tetapi secara khusus diarahkan untuk mendorong agenda penelitian yang memfasilitasi transformasi sosial dan keadilan (McPhail, 2009). Komunikasi partisipatif sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat marjinal yang lemah untuk dapat meningkatkan kekuatan dengan berpartisipasi secara horizontal seperti interaksi sosial di masyarakat dan secara vertikal terutama dengan pemerintah (Rangkuti, 2011).

Pembangunan yang berorientasi pada pengembangan manusia membutuhkan komunikasi sebagai unsur penting keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat atau disebut komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif merupakan komponen inti dari komunikasi untuk model pembangunan partisipatif, yang selama ini pendekatan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Komunikasi untuk model pembangunan partisipatif melampaui dialog sehingga ketika proses mendiskusikan masalah perlu implementasi penuh dari tindakan kolektif yang terorganisir dengan baik.

Sehingga komunikasi partisipasi menyediakan kerangka kerja untuk memandu dan meningkatkan penelitian komunikasi terapan tentang pengembangan (Kincaid & Figueroa, 2009).

Hasim dan Remiswal (2009) pembangunan yang partisipatif memiliki cirinya: (1) Pemberdayaan (*empowering*) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, (2) Partisipasi (*participation*) sebagai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. (3) Keterbukaan (*transparancy*) dalam setiap proses dan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bisa diakses seluruh masyarakat, (4) Akuntabilitas (*accountability*) setiap proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, (5) Keberlanjutan (*sustainability*) proses pembangunan tersebut harus berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil riset dan kajian, komunikasi partisipatif merupakan proses (a) memberikan kesempatan dan mengakomodasi aspirasi atau kepentingan kelompok atau masyarakat, (b) komunikasi dilakukan secara terbuka, dialogis, humanistik dan egaliter, (c) membuat kesepakatan bersama pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kegiatan, (d) program kegiatan berdasarkan identifikasi dan analisis dari permasalahan juga potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial budaya serta sumber daya alam atau lingkungan, (e) tujuan akhir mencapai kemandirian serta menciptakan kader atau pionir pemberdayaan.

3.6. Membangun Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan pendekatan, variabel, indikator dalam kajian, penelitian dan pelaksanaan kegiatan yang aplikatif atau terapan yang didukung berbagai disiplin ilmu atau interdisipliner. Jika persyaratan kemapanan sebuah teori maka pemberdayaan sudah memenuhi kelayakan tersebut, seperti pemberdayaan memiliki sejarah perkembangan sebagai konsep yang memberikan solusi pada dominasi dan ketidakadilan sebagai dampak pembangunan modernisasi industrialisasi sehingga berusaha melakukan perubahan kehidupan untuk membangun kesadaran, motivasi, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian dalam pembangunan. Sehingga muncul kelompok, komunitas dan kelembagaan ekonomi, politik dan sosial di masyarakat sebagai media dalam pemberdayaan.

Lebih lanjut pemberdayaan masyarakat relevan dengan perspektif atau paradigma konstruktivis yang mengkonstruksi realitas alamiah,

kemudian memiliki berbagai konsep, unsur, bentuk, tahapan, model dan strategi pemberdayaan secara praktis dapat diimplementasikan (terapan). Pemberdayaan masyarakat dalam proses kajiannya dapat didukung oleh teori dari berbagai lintas disiplin tergantung konteks, fokus dan tujuan kajian, mulai teori-teori dari sosiologi, politik, ekonomi pembangunan, dan komunikasi.

Pemberdayaan juga memiliki dukungan metode penelitian khususnya dari metode partisipatif yang sangat komprehensif dan aplikatif sehingga bukan saja melakukan penelitian namun hasilnya dapat dijadikan untuk membuat, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan. Metode penelitian yang dimaskud yaitu metode partisipatif seperti *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning and Action* (PLA) dan *Participatory Action Research* (PAR).

Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kekuatan realitas alamiah secara partisipatif, dialogis, dan humanis sesuai dengan perkembangan dan kemunculan konsep dan teori pembangunan *people centered development* atau istilah lainnya pembangunan partisipatif yang menjawab kelemahan teori ekonomi dan pembangunan yang berorientasi produksi, industri dan modernisasi. Pembangunan membutuhkan peran komunikasi, maka lahir konsep dan teori komunikasi pembangunan, yang terjadi perkembangan dari komunikasi pembangunan teknokratis (*top down*) menjadi komunikasi pembangunan partisipatif (*bottom up*). Komunikasi pembangunan partisipatif ini yang disebut komunikasi pemberdayaan yang mensyaratkan: (a) Semua pihak sebagai pelaku pembangunan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat beraspirasi dan melibatkan semua pihak dalam masyarakat tanpa diskriminasi, (b) Proses dialogis, dimana semua saling berpendapat dan mendengarkan, (c) Perumusan dan implementasi program pembangunan yang sesuai dengan permasalahan, kebutuhan dan potensi masyarakat. (d) Mengolah serta mengembangkan potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya alam atau lingkungan di masyarakat. (e) Program direncanakan dan dilaksanakan sebagai komitmen, serta tanggung jawab bersama untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan kemandirian.

Berikut dapat dibuat ilustrasi model membangun teori pemerdayaan masyarakat sebagai kajian lintas disiplin sebagaimana gambar 4.

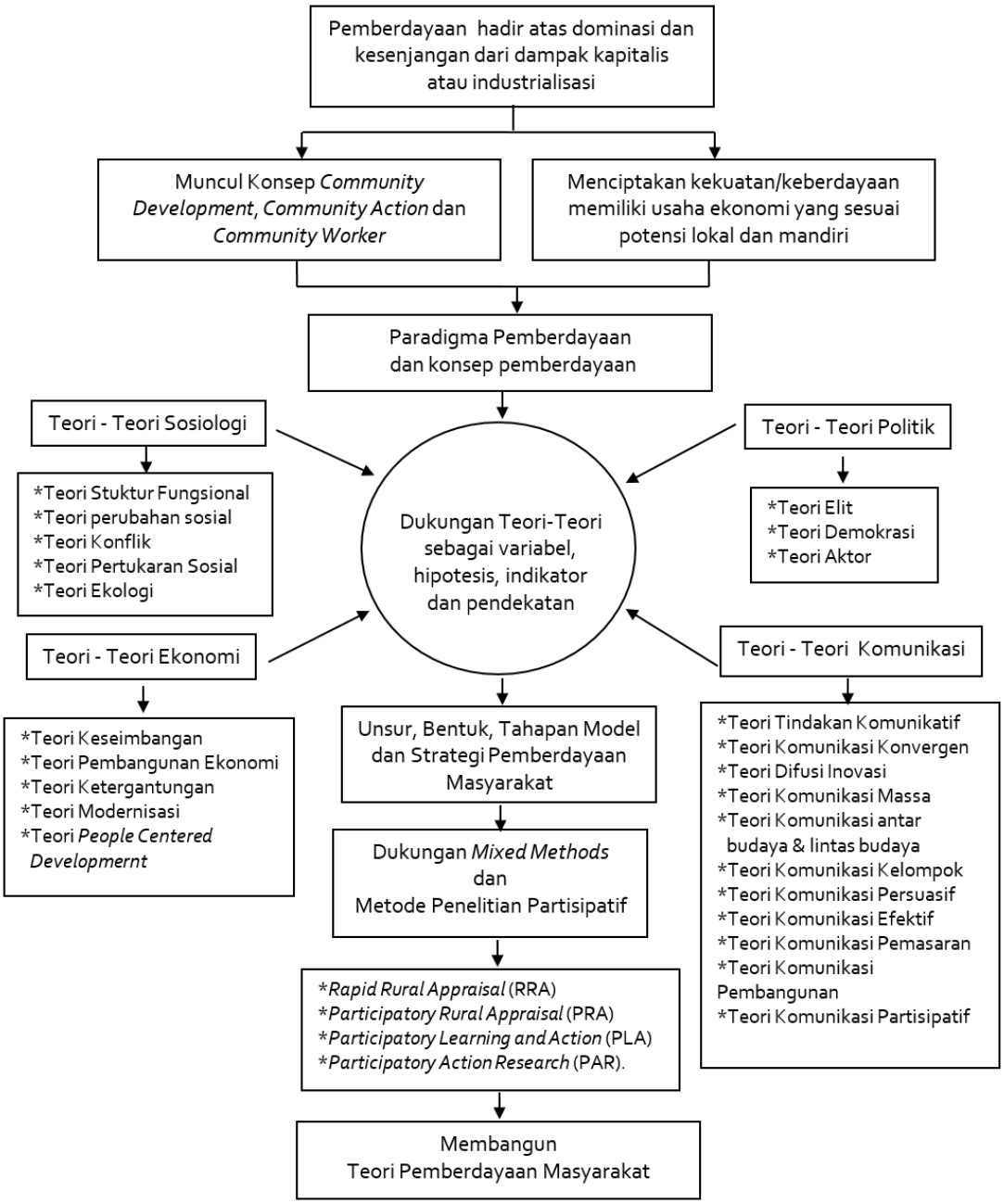

Gambar 4. Membangun Teori Pemberdayaan

BAB 4

KONSEP PEMBERDAYAAN

4.1. Konsep Umum Pemberdayaan

Berdasarkan paradigma atau perspektif dan pendekatan teori-teori multidisiplin yang dapat dijadikan kajian pemberdayaan, maka definisi pemberdayaan juga memiliki keberagaman definisi sebagai tanda perkembangan dan ekstensi dari pemberdayaan sebagai konsep yang mapan serta berperan penting dalam konsep pembangunan dan komunikasi pembangunan.

Pemberdayaan dapat menjadi konsep dan teori yang dapat didukung oleh berbagai disiplin ilmu sebagaimana dalam pendekatan teori-teori dari ekonomi, sosiologi, politik, komunikasi dan pertanian. Namun pemberdayaan dapat menjadi bagian kajian yang lebih dekat dengan teori pembangunan partisipatif dan teori komunikasi pembangunan partisipatif. Karena pemberdayaan merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif atau melalui komunikasi partisipatif yang bersifat dialogis, aspiratif, dan egaliter yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (*insider)* dan atau dari luar masyarakat (*outsider*) yaitu individu, kelompok atau komunitas dan kelembagaan.

Pemberdayaan merupakan usaha untuk membangun dan mengembangkan kesadaran, motivasi, mengidentifikasi dan menganalisis permasaahan serta potensi, memberikan pengetahuan, keterampilan, pembentukan dan pengembangan kelembagaan, *collective action*, solidaritas serta kerjasama atau kemitraan. Implementasi pemberdayaan berupa program penyuluhan, pelatihan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan

kolaborasi secara komprehensif serta berkesinambungan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian serta menjadi pionir atau aktor pemberdayaan. Sebagaimana beberapa definisi pemberdayaan dari Menurut Friedmann (1992) konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul atas kegagalan model pembangunan ekonomi yang masih belum menjawab permasalahan kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Maka kehadiran pemberdayaan sebagai alternatif pembangunan yang mengandung nilai persamaan gender, demokrasi, hak untuk memilih, dan partumbuhan ekonomi.

Chambers (1995) menyatakan pemberdayaan masyarakat sebagai pembangunan masyarakat dan sebagai *community based development* atau pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan paradigma pembangunan bidang ekonomi yang mengintegrasikan nilai sosial yang berpusat pada rakyat (*people centred*), partisipatif (*participatory*) pemberdayaan (*empowering)* dan berkelanjutan (*sustainable)*.

Pemberdayaan sebagai konsep baru dalam pembangunan, dimana masyarakat sebagai subjek bukan lagi sebagai obyek dalam pembangunan (Kartasasmita, 1996). Beberapa definisi pemberdayaan dari para ahli, seperti Sumodiningrat (1999) menjelaskan konsep pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) Perekonomian rakyat, yang dilaksanakan oleh rakyat sebagai akar perekonomian nasional, dengan bersumber dari potensi, perubahan struktural dan pemberdayaan masyarakat. (2) Terjadi perubahan struktural yang awalnya ekonomi tradisional, lemah, subsistem dan ketergantungan menjadi ekonomi yang modern, kuat, dan mandiri. Hal tersebut dengan cara pengalokasian sumberdaya, pengembangan dan penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (3) Pemberdayaan ekonomi rakyat, harus ada program kerjasama dan kemitraan antara pihak yang sudah maju dengan pihak yang lemah atau tidak berkembang. Sehingga pemberdayaan belum cukup dengan meningkatkan produksi, adanya kesempatan berwirausahaa, peningkatan produksi, serta bantuan investasi modal. (4) Pemberdayaan ekonomi rakyat harus didukung dengan kebijakan seperti: (a) Pemetaan potensi dan prospek sumber daya; (b) Pemberian kesempatan dan akses pada aset produksi dan modal; (c) Mengembangkan dan memperkuat transaksi dan kemitraan supaya dapat menentukan harga bukan hanya menerima harga (*price taker*), (d) Memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (e) Menciptakan dan memperkuat industri kecil dan wirausaha baru; (5) Pemberdayaan masyarakat memiliki kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat lokal serta meningkatkan akses jaringan bantuan modal usaha.

Hutomo (2000) menjelaskan secara lengkap beberapa pendapat tentang pemberdayaan, yang mengutip dari Karl Marx sebagai proses perjuangan (politik) kaum tertindas, marginal dan tidak berdaya (*powerless*) untuk memperolah haknya atau kesejahteraan melalui pembagian kekuasaan faktor produksi. Friedmann menyatakan mulainnya pemberdayaan dari unit terkecil danmerupakan penguatan masyarakat yang menyangkut: (1) Aspek psikologis, menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri serta motivasi pada unit sosial. (2) Aspek sosial, artinya rumah tangga yang lemah menjadi mampu memperoleh akses jaringan informasi, pengetahuan, partisipasi, dan ketrampilan, dalam kelembagaan sosial serta keuangan. (3) Aspek politik, unit sosial terkecil yang lemah diberikan akses untuk proses perencanaan, dan pengambilan keputusan yang menentukan kepentingan publik.

Pemberdayaan merupakan mekanisme yang memberikan pada individu, organisasi, dan masyarakat untuk dapat mengelola dan mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi dengan partisipasi demokratis (Melkote & Steeves, 2001)

Pemberdayaan memberikan kesempatan dan kekuatan individu untuk lebih terlibat dalam urusan masyarakat, membangun komitmen dan bekerja sama memprioritaskan kebutuhan secara kolektif dengan mengakses, mengidentifkasi serta mengolah sumber daya atau aset yang dimiliki (Kenny et al. 2018).

4.2. Konsep Khusus Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dapat juga dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) Kelompok developmentalisme mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk mencapai perubahan sosial dan masyarakat memiliki daya atau kekuasaan, ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk memenuhi: (a) Kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan dari kemiskinan dan pembodohan, (b) Menjangkau sumber produktif supaya meningkatkan pendapatannya, (c) Memiliki kesempatan untuk beraspirasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Suharto, 2017).

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment,* asal kata "*empower*" yang berarti: (a) Memberi kekuasaan dan kewenangan (kekuatan) dengan memberikan atau memperoleh keinginan, pengetahuan, dan keahlian (keterampilan) untuk mengidentifikasi, mengkritisi dan menganalisis serta mengambil tindakan dalam merubah situasi yang dihadapi. (b) Memotivasi

individu atau kelompok supaya memiliki optimisme dengan memberikan keterampilan dan kreativitas. (Syahyuti, 2006).

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa pemberdayaan (*empowerment*) yaitu: (a) Memberikan dan mendelegasikan kekuasaan ke pihak lain (*to give power or authority to).* (b) Usaha memberikan kekuatan keberdayaan dan keterampilan (*to give ability to)*. Kedua hal tersebut untuk menciptakan kesempatan dalam berpartisipasi dan aktualisasi keberdayaan individu dan kelompok.

(2) Kelompok anti-developmentalisme yang mereduksi sistem dan dominasi, sebagaimana menurut Friedman (1992) pemberdayaan sebagai pembangunan alternatif (*alternative development)* yang menghendaki inklusifitas dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang sesuai, kesetaraan gender, dan antar generasi. Konsep pemberdayaan sebagai hasil proses interaksi dengan aspek ideologis bahwa pemberdayaan sebagai hasil proses konsep *top down* dengan *bottom up*, kemudian *growth strategy* dengan *people centered strategy* dan unsur praktis melalui proses interaksi dan otonomi. Sehingga pemberdayaan konsepnya memiliki berbagai definisi seperti *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang berpusat masyarakat) yang berhubungan dengan upaya masyarakat bersama pihak lainnya di luar sistem sosial sebagai tatanan dan pola kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan meningkatkan kepedulian dalam memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, mengembangkan ketersediaan fasilitas dan akses teknologi untuk meningkatkan daya kreatif, inisiatif, dan pelayanan sehingga menciptakan kemandirian masyarakat yang dapat menolong diri sendiri dengan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan masyarakat itu sendiri.

Ife dan Tesoriero (2006) menjelaskan pemberdayaan memiliki beberapa kelompok (a) Strukturalis, mendefinisikan pemberdayaan sebagai usaha membebaskan dominasi struktural secara fundamental. (b) Pluralis, memaknai pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya individu dan kelompok untuk dapat sejajar dan berkompetisi. (c) Elitis, menilai pemberdayaan berusaha menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh dan tidak tergantung terhadap elit supaya terdapat perubahan pada struktur yang elitis. (d) Post-strukturalis, bahwa pemberdayaan merupakan upaya menghargai subjektivitas dan sebagai dikursus dalam pemahaman fenomena faktual.

Widayanti (2012) menyatakan konsep pemberdayaan merupakan upaya menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam efektivitas struktur dalam unit sosial terkecil, masyarakat, dan sampai negara, pada bidang ekonomi, politik, dan budaya, perbedaan perspektif tentang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada gambar 5.

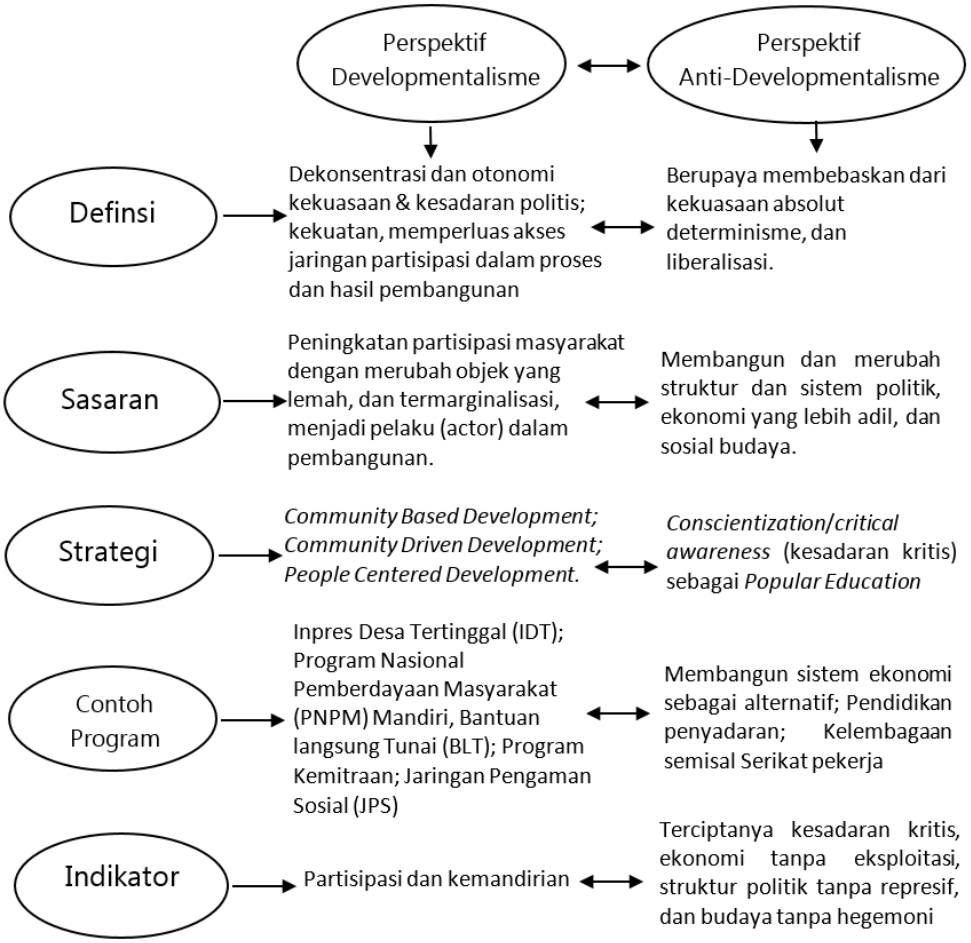

Gambar 5. Perspektif Pemberdayaan
Sumber: Modifikasi dari Widayanti (2012)

Adi (2013) menegaskan bahwa pemberdayaan dilaksanakan untuk dapat membantu klien memperoleh kekuatan (daya), mampu dan berani mengambil keputusan, menentukan tindakan dan mengatasi problematika yang dihadapi. Mulyawan (2016) pemberdayaan berorientasi pada (1) Penguatan pranata atau nilai-nilai karakteristik produktif dan kreatif untuk bekerja

keras, bersifat terbuka, bertanggung jawab dan hemat. (2) Pembaharuan, pengembangan dan pengintegrasian institusi sosial. (3) Peningkatan partisipasi dan budaya demokrasi di masyarakat dalam proses pembuatan dan penetapan keputusan tentang program pembangunan. (4) Melindungi dari persaingan yang tidak seimbang dan kemiskinan. (5) Kemandirian sebagai tujuan akhir yang menghilangkan ketergantungan.

Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses dalam pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia itu sendiri baik sebagai individu, kelompok atau komunitas, kelembagaan dan masyarakat. Pemberdayaan meningkatkan kesadaran, motivasi, pengetahuan dan keterampilan serta memberikan ruang keterlibatan masyarakat untuk berdialog atau komunikasi partisipatif untuk membuat, menjalankan dan mengevaluasi program pemberdayaan atau pembangunan. Pemberdayaan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, potensi dan prospek dari sumber manusia, alam dan lingkungan, ekonomi, sosial serta budaya masyarakat. Pemberdayaan juga melestarikan dan mengembangkan modal sosial (*social capital*), kearifan lokal (*local wisdom*) dan pengetahuan serta teknologi lokal (*indigenous technology*) yang sudah tertanam sejak lama di masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Pemberdayaan dapat menciptakan pionir atau aktor pemberdayaan untuk meneruskan secara berkelanjutan kegiatan baik bagi masyarakatnya sendiri maupun masyarakat lainnya.

BAB 5

TUJUAN DAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN

5.1. Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan beberapa literatur, tujuan pemberdayaan sebagai berikut, menurut Hikmat (2004), tujuan pemberdayaan yaitu: (1) Ditujukan kepada yang membutuhkan dengan merancang program untuk mencari solusi permasalahan di masyarakat. (2) Memiliki efektivitas dalam partisipasi dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan kehendak, kebutuhan dan kemampuan masyarakat, kemudian mengembangkan kapasitas masyarakat untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. (3) Pemberdayaan memiliki keterpaduan dan berkelanjutan.

Tujuan pemberdayaan selanjutnya dari Mardikanto (2014): (1) Perbaikan kelembagaan dan pengembangan kemitraan (*better institution and partnership development*). (2) Perbaikan kegiatan usaha ekonomi (*better economic business*). (3) Perbaikan penghasilan (*better income*). (4) Memperbaiki lingkungan (*better environment*). (5) Perbaikan kehidupan (*better living*). (6) Perbaikan masyarakat (*better community*).

Suharto (2017) pemberdayaan memiliki strategi pendekatan untuk mencapai tujuannya yaitu: (1) Pendekatan mikro, ditujukan untuk melatih dan membimbing kepada penerima manfaat atau klien secara individu yang berpusat pada tugas, bahkan dapat dibantu melalui intervensi kritis dan pengelolaan stres. (2) Pendekatan mezzo, ditujukan pada kelompok klien sebagai penerima manfaat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, melatih

kemauan dan keberanian untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui media intervensi pendidikan dan pelatihan. (3) Pendekatan makro, ditujukan untuk penerima manfaat (klien) dalam kelompok sistem lingkungan yang lebih luas yang memiliki kemampuan memahami situasi, memilih dan menetapkan berbagai alternatif secara tepat memecahkan permasalahannya.

Tujuan pemberdayaan menurut Chambers (1995) yang berpusat pada manusia (*people centered*) untuk memberikan peluang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkelanjutan. Mulyawan (2016) yang mengutip Dubois dan Miley tujuan pemberdayaan sebagai berikut:

(1) Membangun jaringan akses untuk relasi, respon empati, kerjasama, menghargai keunikan, perbedaan dan hak untuk menentukan pilihan.
(2) Membangun komunikasi yang saling menghormati perbedaan dengan fokus pada keberhasilan masyarakat
(3) Melibatkan masyarakat dalam partisipasi dan pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan, membuat keputusan dan mengevaluasi.
(4) Menjalankan nilai dan etika profesi sebagai pekerja sosial melalui, riset dan perumusan kebijakan, mencari solusi atas permasalahan publik seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan.

Berdasarkan praktik kegiatan pemberdayaan secara berkelanjutan dan komprehensif, maka tujuan pemberdayaan masyarakat secara khusus sebagai berikut : (1) Menciptakan dan meningkatkan kesadaran, motivasi dan kerjasama untuk berdialog secara partisipatif dan egaliter untuk mengatasi permasalahan, membuat dan melaksanakan program. (2) Memberikan kesempatan dan kemampuan untuk beraspirasi, berdialog, merumuskan perencanaan program, membangun dan meningkatkan *collective action*, solidaritas serta kerjasama atau kemitraan. (3) Membuat program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif berdasarkan identifikasi dan analisis permasalahan, potensi dan prospek dari sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya alam atau lingkungan termasuk modal sosial (*social capital)*, kearifan lokal (*local wisdom*) serta pengetahuan dan atau teknologi lokal (*indigenous technology*). (4) Melaksanakan program pemberdayaan secara komprehensif dan berkesinambungan (*sustainable*) mulai dari identifikasi, analisis, perancangan, sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pembentukan dan pengembangan kelembagaan. Kemudian melaksanakan pendampingan, studi banding, monitoring, evaluasi, melaksanakan promosi dan pemasaran, berinovasi, serta menjalin kemitraan. (5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan serta meningkatkan peluang usaha, manajemen usaha, produksi, kelembagaan, keuangan, pengemasan, label atau

merek, proses perijinan, sertifikasi dan inovasi produk, strategi promosi serta pemasaran. (6) Menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, menjadi pionir dan agen perubahan (*agent of change*) untuk dapat melakukan pemberdayaan bagi individu, kelompok atau komunitas dan masyarakat lainnya. Sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat memiliki aspek partisipatif, komprehensif dan keberlanjutan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat secara umum berdasarkan permasalahan realitas faktual sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat seperti: (1) Potensi sumber daya desa dapat dikelola dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi rakyat, pemasok utama, pondasi ekonomi daerah dan nasional khususnya tentang ketahanan pangan. Sehingga mengembalikan kekuatan dan kedaulatan atau kemandirian pangan tidak lagi ketergantungan pada impor kebutuhan pangan (2) Menciptakan lapangan pekerjaan dengan pengembangan kelompok atau kelembagaan sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat desa sehingga tidak tergantung untuk mencari pekerjaan di perkotaan. (3) Mengatasi kemiskinan dan rendahnya pendidikan di masyarakat, karena kekuatan ekonomi desa menjadi sumber usaha, penghasilan dan kesejahteraan (4) Menciptakan dan mengembangkan generasi muda sebagai penerus usaha ekonomi dan kewirausahaan dalam kelompok atau lembaga sosial ekonomi di masyarakat. Sehingga generasi muda tidak hanya berorientasi menjadi pegawai karyawan, kantoran, pegawai negeri (birokrasi) dan pekerja industri. (5) Mengurangi mobilisasi masyarakat dari desa yang pindah dan meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan ke perkotaan (urbanisasi) dan ke luar negeri (migran). (6) Mengurangi ketergantungan terhadap industrialisasi yang tidak mendukung ekonomi kerakyatan, dan selalu menjadi andalan dalam menyerap lapangan pekerjaan namun berdampak pada alih fungsi lahan produktif pertanian, makin berkurangnya generasi petani, terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, limbah serta hilangnya ekosistem. (7) Pengembangan dukungan inovasi teknologi dan industri seperti memperbanyak agribisnis serta agroindustri terhadap sektor pertanian sehingga produk-produk pertanian masyarakat dapat secara berkesinambungan menjadi sumber pasokan utama atau dapat memproduksi bahan produk makanan dan minuman. (8) Mewujudkan demokratisasi dan otonomi masyarakat desa seperti adanya kesempatan beraspirasi dan berpartisipasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, merancang, dan melaksanakan program pembangunan di desa. Berbasis pengembangan *social capital*, *local wisdom*, *indigenous technology* dan inklusi sosial.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membuat dan mendukung kebijakan dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi program pemberdayaan atau pembangunan partisipatif, masyarakat tidak meninggalkan desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hakekatnya untuk meningkatkan motivasi, pola pikir, sikap mental, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya untuk kemandirian.

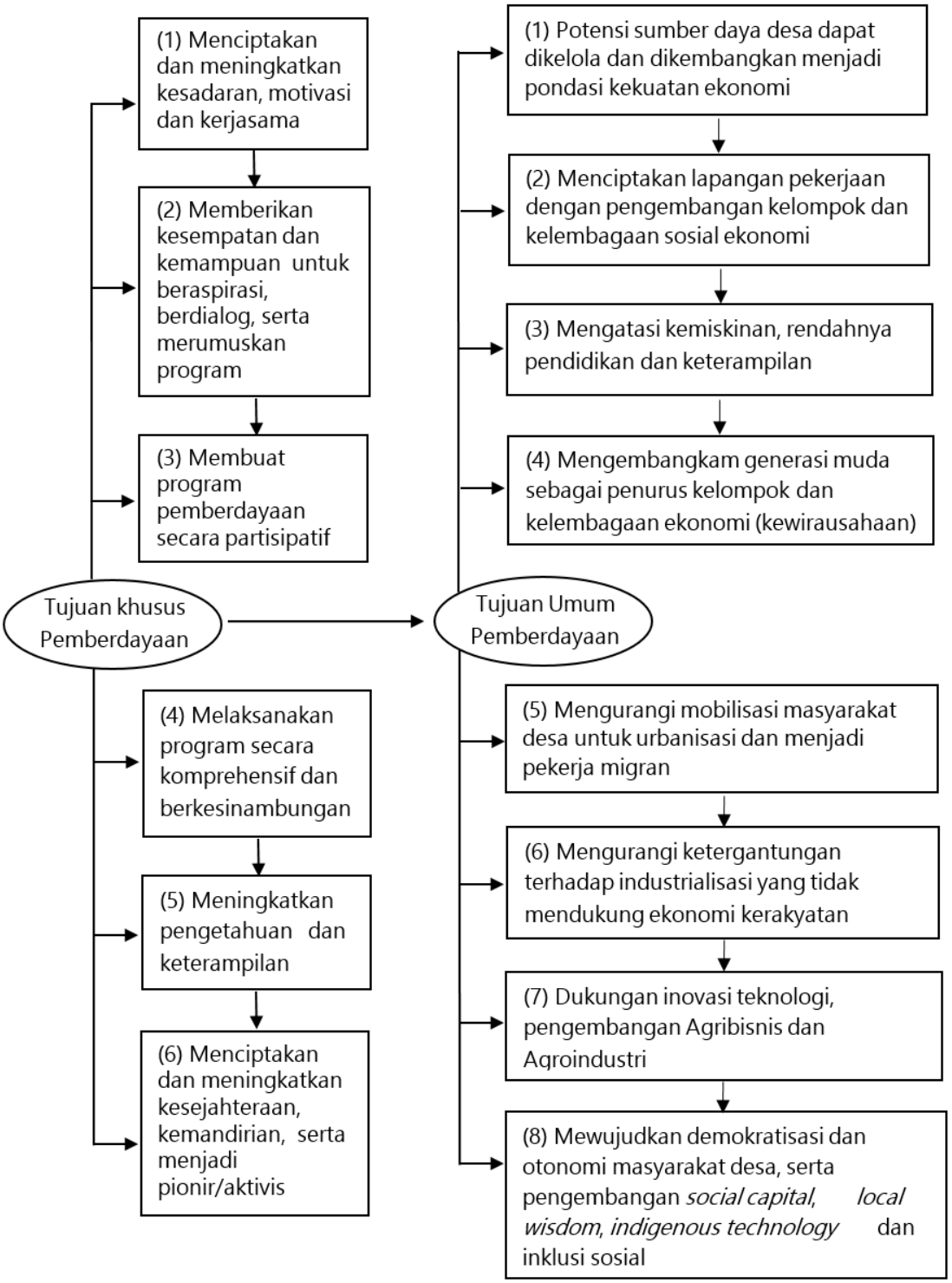

Gambar 6. Tujuan Khusus dan Umum Pemberdayaan Masyarakat

5.2. Tahapan Pemberdayaan

Terdapat beberapa referensi yang menjelaskan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana menurut Sulistiyani (2017) pemberdayaan memiliki tahapan yaitu: (1) Penyadaran dan pembentukan perilaku untuk membangun dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian sehingga perlu meningkatkan juga kapasitas diri. (2) Transformasi wawasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan untuk dapat mengambil peran di dalam pembangunan. (3) Peningkatan inisiatif, membangun kemitraan dan kemampuan berinovasi. Najiyati et al. (2005) menyatakan pemberdayaan memiliki prinsip dasar yang menjadi tahapan yang harus dicapai yaitu: (1) Kesetaraan dan kesamaan antara masyarakat sebagai penerima manfaat atau sasaran dengan pihak yang melakukan program pemberdayaan dengan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keahlian sehingga terjadi saling belajar. (2) Partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Adi (2013) menjelaskan tujuh tahapan pemberdayaan sebagai berikut: (1) Persiapan, dari pelaksana pemberdayaan masyarakat seperti *community woker* dan penyiapan sasaran yang dilakukan secara non-direktif. (2) Pengkajian (*Assessment*) terhadap individu dan kelompok dengan mengidentifikasi masalah, sumber daya serta kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*). (3) Perencanaan alternatif program, *community woker* sebagai agen perubahan (*agent of exchange*) melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk mengatasi permasalahan yang hadapi dengan membuat beberapa alternatif program kegiatan. (4) Formulasi rencana aksi, agen perubahan membantu kelompok atau masyarakat dalam perumusan dan penentuan program kegiatan untuk mengatasi permasalahan. Kemudian membantu program kegiatan untuk diformalkan seperti pembuatan dan usulan proposal kepada pihak lain termasuk pemberi dana. (5) Mengimplemantasikan program pemberdayaan dan masyarakat sudah berperan sebagai kader yang dapat mengelola dan melanjutkan program kegiatan yang telah dikembangkan dengan bekerjasama (kemitraan). (6) Evaluasi dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dan agen perubahan terhadap program pemberdayaan masyarakat untuk membentuk komunitas dan sistem pengawasan dan komunikasi partisipatif. (7) Terminasi sebagai proses berakhirnya proyek pemberdayaan, sehingga ada pemutusan hubungan formal dengan komunitas sebagai sasaran pemberdayaan.

Suharto (2017) menyebutkan tahapan pemberdayaan seperti: (1) Prosesnya berawal dari pembangunan individu menuju pada perkembangan

perubahan sosial yang lebih luas. (2) Membangun dan mengembangkan kepercayaan diri dan mampu mengelola serta mengontrol dirinya, orang lain dan lingkungannya (psikologis). (3) Membangun pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan untuk gerakan sosial pembebasan dan perubahan struktur.

Dengan demikian, tahapan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sebagai upaya dalam menentukan program dan pelaksanaan secara partisipatif dan berkelanjutan berdasarkan permasalahan, potensi sumber daya serta prospek yang ada di masyarakat itu sendiri. Tahapan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

(1) Studi pendahuluan dengan melakukan pengumpulan dan analisis data dari literatur buku, hasil riset dan jurnal ilmiah serta media massa yang kredibel. Hal tersebut sebagai bahan dalam melakukan tahapan pembukaan akses, pendekatan dan perijinan kepada pihak pemerintah desa, kelompok atau komunitas serta masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan atau penerima manfaat (*beneficiaries*). Tahapan berikutnya melakukan wawancara atau dialog secara informal, observasi ke lokasi bersama kelompok atau komunitas dan masyarakat itu sendiri. Kemudian setelah diterima dan disepakati maksud serta tujuan kegiatan pemberdayaan, dapat dilakukan kegiatan sarasehan dan sambung rasa atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan penerima manfaat (*beneficiaries*). Kegiatan tersebut sekaligus dapat menyebarkan angket dengan cara *interview guide* seperti informan mengisi angket sambil didampingi oleh tim pemberdayaan supaya lebih jelas, mudah dipahami dan data yang dihasilkan lebih alamiah. Tujuan dari studi pendahuluan tersebut untuk dapat mengidentifikasi, dan menganalisis permasalahan, potensi, dan prospek dari sumber daya yang dimiliki masyarakat baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya serta sumber daya alam dan lingkungan seperti jenis atau komoditas usaha atau produksi, sumber daya sosial dan budaya seperti *social capital*, *local wisdom* dan *indigenous technology*.

(2) Mengolah, mengidentifikasi, menganalisis dan merancang program pemberdayaan sesuai hasil studi pendahuluan dengan melibatkan masyarakat secara partispatif. Rencana program pemberdayaan untuk jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang lebih dari 5 tahun. Tahapannya mengidentifikasi berdasarkan masalah dan potensi dari sumber daya manusia, ekonomi, alam atau lingkungan dan sosial budaya di masyarakat, kemudian melakukan analisis solusi berupa program pemberdayaan.

(3) Melakukan forum dialog (sarasehan dan sambung rasa) untuk membahas, menyepakati dan mensosialisasikan program pemberdayaan

dengan pendekatan komunikasi partisipatif (aspiratif, dialogis, dan egaliter) bersama masyarakat, kelembagaan dan kelompok usaha, sehingga jelas tentang fokus bidang kegiatan, anggaran, waktu, tempat, peserta, target, dan prioritas pelaksanaan pemberdayaan.

(4) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terdiri dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan terbagi dalam dua fokus (a) Kegiatan *softskill* untuk membangun dan mengembangkan (i) Pola pikir atau kerangka berpikir (*mindset*) dan sikap mental (karakter), hal ini sebagai tahapan awal yang penting serta menentukan untuk dapat mengikuti dan meneruskan kegiatan. (ii) Motivasi, kesadaran, kepedulian, dan inpirasi untuk melakukan usaha ekonomi berdasarkan potensi sumber daya yang ada dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan desa. (iii) Komunikasi interpersonal, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok untuk dapat menjalin interaksi dan dialog yang baik, harmonis serta produktif dengan orang lain di dalam kelompok atau dengan kelompok lainnya. (iv) Dinamika kelompok dan membangun kerjasama tim (*Team building*) supaya kompak, peduli, kohesif, bekerjasama, dan saling menguatkan. (v) Manajemen konflik dan *problem solving* untuk menyelesaikan permasalahan, kesalahpahaman dan menghasilkan berbagai solusi. (vi) Teknik rapat dan pengambilan keputusan, supaya dapat mengelola situasi dan kondisi dalam forum musyawarah atau rapat sampai menghasilkan serta menetapkan keputusan. (vii) Teknik analisis dan evaluasi serta membuat program pemberdayaan, sebagai proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi sumber daya yang dimiliki serta prospek yang diwujudkan dalam perencanaan program. (viii) Observasi, studi banding, *on job training*, dan akses kemitraan untuk lebih memotivasi, menginspirasi, belajar dari pengalaman dan dapat menjalin kerjasama dengan kelompok yang sudah berhasil atau sukses.

(b) Kegiatan *hardskill* seperti (i) Manajemen usaha, kewirausahaan, kelompok usaha, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (ii) Pembentukan dan pengembangan kelompok atau kelembagaan usaha ekonomi masyarakat. (iii) Manajemen kepengurusan dan keanggotaan. (iv) Manajemen administrasi dan keuangan. (v) Manajemen pascapanen untuk pengolahan produk, peningkatan kualitas dan kuantitas produk berbasis inovasi. (vi) Manajemen pengemasan, label, perijinan, standarisasi dan sertifikasi produk perdagangan. (vii) Manajemen dan strategi promosi serta pemasaran melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (viii) Manajemen kemitraan dan investasi usaha. (ix) Manajemen pegembangan usaha, standarisasi dan pelaksanaan ekspor.

(5) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berbasis *collective action*, solidaritas serta kerjasama. Fasenya dengan membentuk kelompok usaha dan atau beberapa kelompok usaha disatukan dan ditentukan secara partisipatif tentang nama kelompok atau kelembagaan, struktur, tugas dan fungsi kepengurusan, fokus bidang program usaha. Kemudian manajemen kelembagaan mulai dari pengelolaan keanggotaan, pengurus, administrasi, keuangan, promosi, pemasaran dan kemitraan. Fase berikutnya mengembangkan kelembagaan yang sudah ada atau yang sudah terbentuk untuk memiliki peran yang lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat seperti pengembangan jenis atau bidang usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas serta inovasi produksi, teknik pengemasan dan label, strategi pengembangan promosi dan pemasaran serta kemitraan. Kemudian kelembagaan usaha dapat juga diusulkan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapat perijinan resmi serta akan diberikan haknya mendapat bantuan modal usaha, pendampingan, terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan kelembagaan dari pemerintah dan swasta. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan sebagai implementasi persyaratan pemberdayaan dan komunikasi partispatif berupa *collective action* dan solidaritas.

(6) Pelaksanaan pendampingan, dilakukan oleh fasilitator, penyuluh atau pendamping, instruktur, aktivis, penggiat tim ahli, dan praktisi, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga dan aktivis penggiat pemberdayaan dari *civil society,* dan pihak swasta atau dunia usaha. Tim pendaping tersebut memiliki pedoman dan indikator keberhasilan kegiatan supaya sesuai dengan target atau tujuan. Pendampingan dilakukan secara partisipatif, dialogis, persuasif, dan berkesinambungan mulai dari manajemen pengelolaan dan pengembangan kelembagaan, proses produksi, pasca panen, promosi dan pemasaran, adopsi inovasi serta kemitraan. Pendampingan juga melakukan kaderisasi dari kelompok masyarakat untuk menjadi aktivis penggiat dan fasilitator pemberdayaan sehingga tidak lagi adanya ketergantungan terhadap pendamping dari luar desa (*outsider*).

(7) Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) program pemberdayaan. Tahapan ini diperlukan untuk menilai dan mengukur capaian keberhasilan target atau tujuan, mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dan kendala yang masih dihadapi, masukan bagi perbaikan dan pengembangan program serta strategi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Monev dapat dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner, wawancara mendalam (dialog), observasi langsung, *Focus Group Discussion* (FGD), verifikasi dan triangulasi serta validitas data. Hasil monev selanjutnya diolah dan dianalisis untuk rekomendasi

perbaikan serta peningkatan program kegiatan yang lebih baik. Kegiatan Monev dapat dilakukan oleh dari luar komunitas atau masyarakat dan tim pelaksana pemberdayaan (*outsider*), kemudian monev dapat juga dilakukan oleh komunitas atas masyarakat sendiri dan pelaksana pemberdayaan (*insider*) serta gabungan keduanya antara *outsider* dan *insider.* Indikator yang dievaluasi yaitu pelaksanaan kegiatan mulai dari peran penyuluh, fasilitator dan narasumber atau instruktur yang memberikan materi dan pelatihan serta pelayanan panitia penyelenggara, kemudian evaluasi substansi materi kegiatan, pelatihan dan manfaat kegiatan, metode, fasilitas serta evaluasi dampak kegiatan tentang pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Evaluasi kuantitas dan kualitas produk, jumlah modal dan keuntungan, produk yang dipasarkan dan terjual, tingkat kesejahteraan, status kelembagaan. Kegiatan monitoring dan evaluasi bisa di setiap selesai materi dan pelatihan kegiatan, diakhir kegiatan, ketika pendampingan untuk dinilai perkembangannya, serta setelah semua rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

(8) Peningkatan kualitas dan inovasi produk, pengemasan (*packaging*) dan lebel merek (*brand label*) dengan memenuhi standar perijinan, kualitas, dan sertifikasi produk. Hal tersebut dengan mendaftarkan produk dan lebelnya ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapat ijin resmi dalam pemasaran produk serta mengajukan sertifikasi Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka dapat dilaksanakan pelatihan tentang pengemasan (*packaging*) dan lebel merek (*brand label*), serta pendampingan untuk mendapat ijin pemasaran dengan PIRT (Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga) dan cek produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikat halal, standarisasi dan perijinan eksport produk, serta perijinan badan hukum Koperasi.

(9) Pelaksanaan dan pengembangan strategi promosi serta pemasaran berbasis inovasi. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan penjualan produk dan mereka lebih dikenal publik, sehingga dapat meningkatkan penghasilan, keuntungan dan kesejahteraan kelompok usaha. Strategi promosi merupakan bagian dari pemasaran dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti pameran, membuka stand di tempat keramaian umum yang diijinkan seperti pasar, mini market, super mall, terminal, alun-alun dan ikut serta dalam berbagai kegiatan *event* yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, supaya lebih dikenal dan diminati publik. Strategi pemasaran dapat juga dengan penjualan langsung (*direct selling*), atau dengan pesan antar langsung (*delivery order*), membuat iklan di media sosial, brosur, dan pamflet.

(10) Pelaksanaan kemitraan atau kerjasama, hal ini dapat dilakukan jika kelembagaan usaha sudah menjalankan proses produksi dengan konsistensi kualitas dan kuantitas produk, memiliki segmentasi pasar dan prospektif. Namun kemitraanpun dapat juga dilakukan ketika baru tahap proses produksi, jika mitra memiliki pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan dan dipasarkan memiliki nilai jual dan permintaan pasar yang tinggi, serta prospektif.

(11) Kemandirian merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan pemberdayaan dengan indikator mampu mengelola dan mengembangkan hasil pemberdayaan, tidak ada ketergantungan, serta tingkat kesejahteraan meningkat. Selanjutnya dapat menjadi pionir dan penggiat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan, sehingga bisa memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman keberhasilan pada kelompok, komunitas dan masyarakat lainnya.

5.3. Strategi Pemberdayaan

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan membutuhkan strategi sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis permasalahan, potensi sumber daya serta kebutuhan masyarakat yang dapat dibagi ke dalam empat strategi yaitu: (1) Strategi intervensi, perumusan dan pelaksanaan program pemberdayaan dapat langsung dilakukan oleh pihak dari luar komunitas atau masyarakat (*outsider*) tanpa banyak melibatkan masyarakat secara partispatif. Namun tetap melalui persyaratan: (a) Jika masyarakat sebagai *beneficiaries* belum mampu, berani atau terbiasa dalam mengkaji dan merancang program pemberdayaan. (b) Membutuhkan keputusan dan pelaksanaan yang cepat karena darurat, dan penting seperti dalam situasi bencana alam, pandemi virus, krisis ekonomi dan kemiskinan. (c) Sekalipun masyarakat tidak terlibat dalam perumusan program pemberdayaan, namun tetap melaksanakan studi pendahuluan seperti studi literatur, kajian diskusi dan riset untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan dan potensi sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya serta lingkungan, sampai proses membuat solusi program pemberdayaan. (d) Pelibatan masyarakat hanya pada sosialisasi dan kesepakatan jadwal pelaksanaan program pemberdayaan. (e) Mendapat dukungan kebijakan program dan anggaran dari lembaga penyelenggara untuk melaksanakan pemberdayaan.

(2) Strategi partisipasi, pelibatan seluruh unsur masyarakat (*insider*) sebagai komunitas *beneficiaries* seperti kelompok usaha atau kelompok

ekonomi kecil dan menengah, lembaga sosial ekonomi masyarakat. Pelibatan komunitas mulai dari tahapan identifikasi dan analisis permasalahan, potensi serta prospek sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Hasilnya dirancang, disepakati dan dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat. Persyaratan tahapan partisipasi dalam pemberdayaan yaitu: (a) Masyarakat sangat aktif, antusias, memiliki semangat dan kepedulian dalam ikut serta mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan serta potensinya. (b) Dapat dilakukan inisiatif proses pemberdayaan oleh komunitas dari luar (*outsider*) dan dari dalam komunitas (*insider*). (c) Masyarakat memiliki swakarsa atau kehendak dan tujuan yang sama, swadaya seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar serta pengalaman untuk pengembangan produk dan kelembagaan. Kemudian swadana, dengan rela berkorban untuk investasi dan penggalangan dana sebagai modal pengembangan usaha ekonomi. (d) Mendapat dukungan dari semua komunitas *beneficiaries*, pemerintahan lokal dan tokoh masyarakat dalam merumuskan serta pelaksanaan program pemberdayaan.

(3) Strategi pelaksaan aksi dan perubahan sosial, dapat diciptakan di masyarakat dengan persyaratan (a) Masyarakat sudah melakukan tahapan partisipatif sehingga memilik idealisme, semangat yang tinggi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan. (b) Pemberdayaan dilaksanakan secara komprehensif mulai dari penyuluhan, pelatihan, pendampingan, studi banding, peningkatan akses informasi, permodalan dan pasar. (c) Peningkatan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produk, labeling atau merek, pengemasan serta inovasi produk, kemudian melaksanakan strategi promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi. Bahkan produk dan lembaganya telah memiliki ijin, standarisasi dan sertifikasi sehingga dapat tembus pasar luas termasuk ekspor. (d) Masyarakat menyadari dan ikut terlibat dalam proses serta pelaksanaan keputusan dan program pemberdayaan. (e) Kelompok atau komunitas telah secara mandiri berhasil dalam usaha ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dapat menjadi pionir, percontohan serta aktor pemberdayaan untuk masyarakat lainnya.

(4) Strategi kolaborasi, pemberdayaan merupakan kegiatan *collective action* dari komunitas, komunal dan lembaga ekonomi, sosial serta budaya sehingga perlu melakukan tahapan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak. Persyaratannya melaksanakan kewajiban antar *stakeholder* yang dikolaborasikan dan tidak ada lagi ego sektoral, seperti: (a) Pemerintahan (*government*) yang bukan hanya melakukan pembangunan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik, namun harus juga melakukan pemberdayaan masyarakat (*empowering community*). Sehingga pemerintah

tidak bersifat pasif hanya melakukan pelayanan publik, mengeluarkan kebijakan publik dan menunggu laporan atau aspirasi dari publik. Namun terjun ke daerah atau desa, daerah pelosok dan terpencil untuk melakukan survei, evaluasi, studi atau riset, sosialisasi dan pelaksanaan program pemberdayaan. (b) *Civil society*, seperti aktivis, penggiat, pemerhati, pendamping atau fasilitator dan komunitas pemberdayaan menjalankan kewajiban atas kepedulian, solidaritas dan keinginan perubahan yang lebih baik dengan mengkaji, memfasilitasi, memediasi, mengadvokasi, memberikan akses dan mengedukasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Bidang ekonomi, sosial dan budaya. (c) Pihak swasta atau perusahaan (*corporate* atau *enterprise*) dengan melakukan kewajiban sosialnya seperti bantuan sosial, sumbangan, beasiswa, workshop pelatihan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di masyarakat. Harapannya bantuan dan sumbangan termasuk CSR dilaksanakan untuk menumbuhkan serta mengembangkan potensi, kemampuan dan keterampilan dalam usaha ekonomi kecil di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memiliki usaha, penghasilan, kesejahteraan dan kemandirian atau tidak ketergantungan pada sumbangan atau bantuan yang sifatnya sesaat jangka pendek. (d) Terdapat perjanjian kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan kebijakan dan anggaran program dengan *civil society* komunitas dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki swakarsa, swadaya dan swadana seperti produk hasilnya didukung oleh permodalan, dan pemasaran yang jelas. Kemudian dengan pihak swasta dengan kegiatan CSR-nya atau perjanjian sistem pembinaan bisnis kontingensi hasil-hasil produk masyarakat akan memasok dan dibeli sesuai standarisasi yang sudah ditetapkan, serta sistem *franchise,* dimana masyarakat menjadi sub usaha dan memasarkan produk yang sudah ada. Bahkan dapat menciptakan dan mengembangkan konsep agribisnis dan agroindutri yang memberdayakan produk serta ekonomi masyarakat dari hulu sampai hilir.

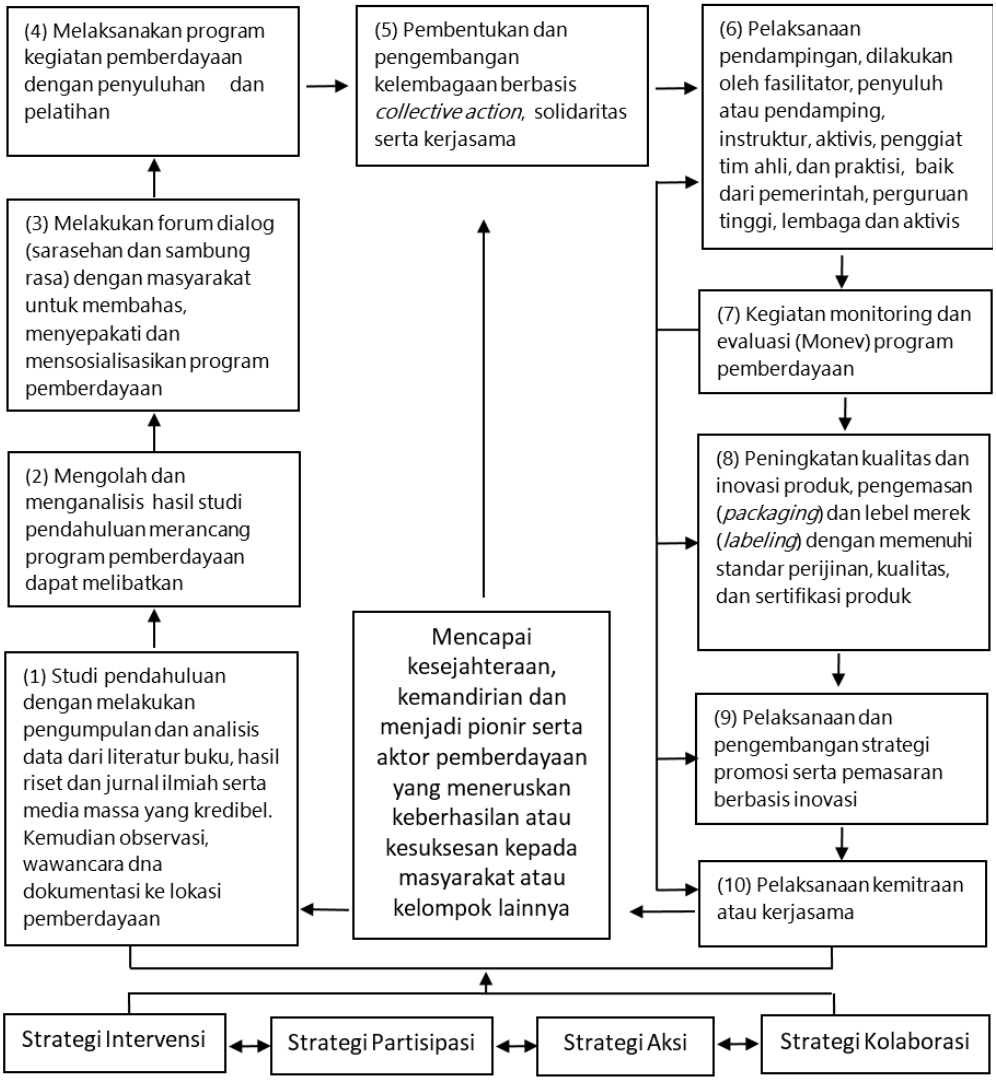

Gambar 7. Tahapan dan Strategi Pemberdayaan

BAB 6

UNSUR DAN BENTUK PEMBERDAYAAN

6.1. Unsur Penting Dalam Pemberdayaan

Tubbs dan Moss (2005) mengutip pendapat Fisher yang memfokuskan pada pemberdayaan pekerja untuk diberikan fungsi dari unsur otoritas untuk dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya, informasi penting dan akuntabilitas atas keputusan yang dibuat dan dilaksanakannya. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pemberdayaan = f(O x SD x IA)

Keterangan O = Otoritas
SD = Sumber Daya
I = Informasi
A = Akuntabilitas

Terdapat unsur-unsur dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan kajian, penelitian dan pelaksanaan pemberdayaan terdiri dari :

(1) Aktor pelaku yang melakukan pemberdayaan, artinya siapa yang menjadi pelaksana pemberdayaan, apakah *insider* individu dan kelompok di dalam masyarakat atau komunitasnya, kemudian *outsider* individu dan kelompok dari pihak luar masyarakat atau komunitasnya. Aktor pelaku pemberdayaan dapat juga disebut sebagai *community worker,* aktivis dan penggiat, pendamping,

fasilitator, penyuluh, agen pembaharu (*agent of change*), dan pionir. Pelaku atau aktor pemberdayaan yang memiliki inisiatif untuk membuat dan melaksanakan program pemberdayaan yaitu: (a) Pemerintah (*government*) yang memiliki kebijakan, program, anggaran, fasilitas dan kewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus lebih memiliki inisiatif untuk menjadi inisiator, kreator, pelaksana dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. (b) Masyarakat (*civil society*) baik dalam bentuk kelompok, komunitas, lembaga atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan serta mengembangkan potensi, sumber daya baik sumber daya manusia, alam dan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat dijadikan modal untuk membuka serta mengembangkan usaha bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Masyarakat perlu memiliki kesadaran, kemauan, kepedulian dan semangat yang tinggi dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat juga berinisiatif untuk mengajukan dan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan dunia usaha dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. (c) Pihak dunia usaha atau swasta yang juga memiliki kewajiban melaksanakan pertanggungjawaban sosial untuk mendukung dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan program *Corporate Social Reponsibility* (CSR). Pelaksanaan program pemberdayaan melalui CSR dapat dilaksanakan berdasarkan riset atau kajian untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, potensi dan prospek yang ada di masyarakat. Kemudian dapat juga bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat (*civil society*) untuk mensinergikan pelaksanaan program pemberdayaan serta dapat dibuat desa binaan sebagai percontohan bagi pengembangan kegiatan pemberdayaan berikutnya. Ketiga aktor tersebut dalam menjalankan pemberdayaan berperan sebagai penyelenggara, penyuluh, narasumber atau pemateri, fasilitator, instruktur, dan pendamping serta mitra bagi masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*).

(2) Komunikasi dalam proses pembuatan perencanaan program pemberdayaan. Komunikasi merupakan aspek penting dalam proses pembangunan termasuk pemberdayaan, sebagaimana dalam tahapan penting dalam pemberdayaan mulai dari studi pendahuluan untuk membuka akses, riset kajian dan pendekatan ke penerima manfaat atau sasaran. Kemudian kegiatan penyamaan persepsi dan tujuan, sosialisasi, pelaksanaan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan studi banding, selanjutnya monitoring dan evaluasi sampai kepada kemitraan. Komunikasi pembangunan partispatif merupakan komunikasi yang sesuai atau relevan dengan pemberdayaan adalah komunikasi partisipatif yang bersifat *bottom up,* dialogis, dan egaliter sehingga

masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai evaluasi pembangunan.

Tahapan ini pihak pemerintah daerah dan desa perlu lebih memiliki inisiatif dengan membuat forum komunikasi secara terbuka, partisipatif, dialogis, dan egaliter dengan melibatkan semua pihak di masyarakat. Sehingga aspirasi, permasalahan dan potensi masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat program pemberdayaan, kemudian dibahas, disepakati dan disosialisasikan. Forum kamunikasi pemberdayaan dapat pula memanfaatkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun bukan hanya merancang tetapi mengevaluasi pemberdayaan masyarakat sebagai masukan perbaikan serta peningkatan kualitas program dan pelaksanaan. Kemudian dapat pula mengadakan forum khusus untuk merancang dan mengevaluasi pemberdayaan melalui forum sarasehan, rembug warga, dan musyawarah sesuai kearifan lokal.

(3) Program pemberdayaan masyarakat yang dirancang dan disepakati bersama sebagai hasil dari proses komunikasi pemberdayaan yang partisipatif, dialogis, dan egaliter dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi. Program pemberdayaan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hasil kajian atau riset dengan mengidentifikasi permasalahan, potensi dan prospek dari masyarakat itu sendiri baik tentang sumber daya manusia (SDM), sumber daya ekonomi (SDE), sumber daya sosial dan budaya (SDSB) dan sumber daya alam dan lingkungan (SDAL). Pelaksanaan program pemberdayaan juga memperhatikan dan mengembangkan modal sosial (*social capital*), kearifan lokal (*local wisdom*) dan pengetahuan dan teknologi yang sudah tertanam lama di masyarakat (*indigenous technology*).

(4) Media pemberdayaan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk merancang, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pemberdayaan seperti (a) Media Interaksional seperti forum komunikasi rembug warga, sambung rasa, sarasehan, musyawarah, dialog, workshop, lokakarya, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan studi banding. (b) Media konvensional seperti memanfaatkan media untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan akses informasi, promosi serta pemasaran melalui media papan pengumuman, brosur, spanduk, buletin, majalah, siaran radio dan televisi. (c) Media teknologi informasi untuk mendukung dan mempercepat baik proses transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, produksi, teknologi, promosi dan pemasaran sebagai bentuk adopsi inovasi seperti pemanfaatan teknologi informasi melalui internet atau media sosial.

(5) Pemberdayaan masyarakat memiliki unsur penting lainnya yang sudah tertanam sebagai pola kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan menjadi unsur utama dalam pemberdayaan ataupun pembangunan selain sumber daya alam dan ekonomi yang bersifat fisik, serta permodalan keuangan. Unsur penting yang dimaksud yaitu: (a) Modal sosial (*social capital*), menurut Bhandari dan Yasunobu (2009) merupakan konsep multidimensi yang komplek, populer dan mencakup sistem nilai budaya, hubungan, jaringan dan kebijakan sosial, keterlibatan sipil, serta kepercayaan umum suatu masyarakat atau komunitas untuk menjelaskan dampak sosial ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan. Usman (2015) mengutip Woolcock tentang bentuk modal sosial berdasarkan tipe ikatan jaringan sosial yakni: (i) Modal sosial yang mengikat (*bonding social capital*), artinya terdapat ikatan antara individu pada situasi yang sama, ikatan keluarga dekat, tetangga dan teman dekat. (ii) Modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*), terdapat ikatan yang lebih longgar dari beberapa individu, seperti kolega, teman kerja dan teman jauh. (iii) Modal sosial yang menghubungkan (*linking social capital*), dapat menjangkau individu-individu dalam situasi yang berada di luar komunitas, maka memotivasi anggotanya untuk memanfaatkan banyak sumber daya yang tersedia di dalam komunitas.

Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran kolektif individu untuk penyelesaian masalah, pengembangan potensi dan peluang bagi kepentingan dan perubahan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Modal sosial terdiri dari sekumpulan sumberdaya aktual dan potensial, entitasnya dari struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu dalam struktur, asosiasi-asosiasi yang bersifat horisontal, kemampuan aktor untuk menjamin manfaat, informasi, norma-norma, nilai-nilai, resiprositas, kerjasama, dan jejaring. Modal sosial sebagai praktik kelompok dalam masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya dengan menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri (Widjanarko, 2016). Modal sosial memiliki relevansi dengan inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam konteks pembangunan inklusif berkelanjutan. Kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah komunitas dengan cara pemerintah mampu mengidentifikasi potensi dan mau bermitra dengan semua kekuatan komunitas (Fathy, 2019).

(b) Kearifan lokal (*local wisdom*), merupakan nilai kebaikan, ilmu pengetahuan dan strategi yang sudah tertanam dan ditaati masyarakat untuk mengatasi problematika kehidupan dan mewujudkan kebutuhan bersama (Jundiani 2012). Begitupun menurut Marfai (2013) kearifan lokal sebagai bentuk

respons masyarakat lokal berupa tata nilai, persepsi, sikap, perilaku dalam berinteraksi dengan sistem kehidupan baik alam dan lingkungannya secara arif berdasarkan pengetahuan dan pemahaman kolektif, serta kebijaksanaan yang akan menentukan penyelesaian masalah kehidupan. Fajarini (2014) menjelaskan kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan berbagai strategi kehidupan masyarakat lokal dalam menjawab permasalahan dan pemenuhan kebutuhan. Kearifan atau kebijakan setempat "*local wisdom*" sebagai bentuk pengetahuan setempat "*local knowledge* " atau kecerdasan setempat" *local genious*. Mawardi (2018) menegaskan bahwa konsep dan prinsip kearifan lokal dapat beradaptasi secara berdampingan dengan budaya modern serta menjadi acuan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal.

(c) *Indigenous technology*, merupakan pengetahuan, keterampilan dan peralatan yang sudah dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat secara turun temurun, memiliki ciri khas serta unik sebagai warisan budaya untuk produktivitas dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana halnya kearifan lokal, *indigenous technology* dapat dilestarikan, dikembangkan dan berdampingan bahkan didukung oleh teknologi modern tanpa menghilangkan ciri khasnya untuk kemanfaatan masyarakat walaupun membutuhkan adaptasi. Sebagaimana menurut Gumbo (2014) *indigenous technology* dinilai sebagai pengetahuan teknologi asli atau orisinil dari warisan budaya suatu bangsa berdasarkan keterampilan, dan sumber daya yang ditransformasikan dari masyarakat adat masa lalu ke masa kini sebagai generasi penerus untuk memenuhi kebutuhan dengan cara melakukan investigasi atau penelitian, merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk, proses, serta sistem yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan tetap memelihara interaksi serta harmoni dengan lingkungan. Parmin et al. (2017) terdapat pengetahuan asli atau alami dari suatu komunitas yang disebut *indigenous knowledge* sebagai sumber dan strategi pembelajaran bagi masyarakat untuk mengelola serta melestarikan sumber daya yang menjadi ciri khas komunitas atau bangsa (*ethnoscience*).

(d) Inklusi sosial menurut MacKinnon (2012) yang mengutip Pierson, memerlukan pendekatan dan program multidimensi untuk meningkatkan penghasilan, memperkuat akses jejaring sosial dan layanan umum serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Inklusi sosial, memberikan setiap orang untuk memiliki hak dasar, akses jaringan sosial dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di masyarakat

(Wirutomo, 2013). Indikator dari konsep inklusif terdapat partisipasi difabel, upaya pemenuhan hak-hak difabel, terjaminnya aksesibilitas dan sikap inklusif warganya (Maftuhin, 2017). Inklusi sosial sebagai upaya untuk mendorong masyarakat membangun relasi sosial dan solidaritas, sehingga dapat membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa pengecualian, serta dilakukan cara sukarela tanpa paksaan.

Inklusi sosial memiliki cakupan yaitu: (i) Hak kelompok marjinal yang meliputi hak berpartisipasi, mendapatkan pelayanan dan informasi, serta hak mengawasi. (ii) Kewajiban pemerintahan desa diantaranya menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan dengan prinsip demokratis serta nondiskriminatif, keharusan berkoordinasi serta melibatkan semua kelompok kepentingan dalam desa. (iii) Proses pembangunan terdapat keterlibatan warga desa dalam perencanaan lewat masyawarah desa, menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan informasi terkait perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa, termasuk dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (iv) Pembuatan peraturan desa, melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok marjinal dengan memberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan peraturan desa (Ra'is, 2017).

(6) Metode pemberdayaan meliputi: (a) Metode ceramah dan tanya jawab (interaktif) yang dipergunakan untuk lebih menekankan aspek pengetahuan supaya peserta mengetahui dan memahami materi. (b) Metode *brainstorming* atau umumnya disebut metode curah pendapat yang memberikan kesempatan lebih terbuka dengan memotivasi para peserta untuk mengemukakan pendapatnya secara dialogis, partisipatif dan egaliter. (c) metode gabungan (*mixed method*) dengan melakukan metode kuantitatif melalui penyebaran, pengolahan dan analisis kuesioner terlabih dahulu untuk mendapat identifikasi permasalahan serta potensi sebagai data awal, termasuk dapat dipergunakan juga dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang akan diperdalam dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam (dialogis), observasi, diskusi dan analisis dokumentasi. (d) Metode interaktif, memotivasi dan mendesain komunikasi atau dialog dari peserta untuk lebih aktif bertanya dan menjawab atas materi pembahasan. (e) Metode diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan memberikan bahan kajian berupa permasalahan atau kasus yang harus dicari solusinya secara intensif dari tiap peserta dan kelompok yang akan saling berargumentasi, berbagi, memberikan masukan dan saling melengkapi atas pembahasan serta solusi yang harus dihasilkan. (f) Metode simulasi dan praktik, peserta diberikan

contoh terlebih dahulu, untuk mengujicoba dan latihan dengan didampingi supaya memiliki pengalaman dan keterampilan tertentu yang terukur. (g) Metode observasi dan studi banding, peserta dilibatkan langsung untuk melakukan pengamatan dan mengeksplorasi serta belajar dari kelompok, komunitas, atau kelembagaan dan produk tertentu yang sudah bagus, maju dan berkembang supaya mendapat pengalaman, dapat mencontoh dan ada akses kerjasama. (h) Metode penelitian yang relevan dengan pemberdayaan menggunakan penelitian partisipatoris seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan dan potensi desanya secara partisipatif sehingga masyarakat dapat mengontrol serta mengembangkan dirinya sendiri. Metode *Participatory Learning and Action* (PLA), merupakan penelitian aksi yang dilaksanakan sekaligus melakukan kegiatan belajar bersama dengan masyarakat, kelompok dan kelembagaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta potensi sampai menghasilkan program dan pelaksanaan pemberdayaan. *Participatory Action Research* (PAR) melakukan penelitian dengan implementasi program, strategi dan model kegiatan yang telah dirancang dan disepakati bersama.

(7) Kelompok penerima manfaat (*beneficiaries*) adalah individu, kelompok, komunitas, kelembagaan dan masyarakat secara keselurahan yang menjadi peserta sekaligus pelaku pemberdayaan yang harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat. *Beneficiaries* diharapkan dapat berkembang menjadi mandiri, pionir dan agen perubahan (*agent of change*) yang melanjutkan keberhasilan pemberdayaan kepada pihak lainnya untuk menjadi pionir baru. Sehingga adanya keberlanjutan dan keberlangsungan secara terue menerus menjadi siklus pemberdayaan.

(8) Pelaksanaan program pemberdayaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan kelompok, komunitas, kelembagaan dan masyarakat sebagai peserta dan penerima manfaat (*beneficiaries*) yaitu: (a) Agenda, prioritas dan materi kegiatan. (b) Sasaran, waktu dan lokasi kegiatan. (c) Tim pelaksana, instruktur, narasumber atau pemateri, pendamping dan fasilitator kegiatan, (d) perlengkapan dan sarana kegiatan. (e) Pendanaan, permodalan dan bantuan kegiatan. (f) Pelaksanaan pemberdayaan dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pembentukan kelompok atau kelembagaan, pendampingan, studi banding, monitoring dan evaluasi, adopsi inovasi, pengembangan kelembagaan, promosi dan pemasaran serta kemitraan. (g) Indikator dan evaluasi kegiatan untuk menilai serta memberikan perbaikan.

(9) Bantuan dan permodalan, prinsip pemberdayaan membangun motivasi, sikap mental dan partisipasi aktif (swakarsa) untuk mengelola dan mengontrol (swakelola) sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, ekonomi, alam atau lingkungan, dan sosial budaya (swadaya) menuju kesejahteraan dan kemandirian (swadana). Namun tetap dapat didukung oleh bantuan seperti sarana, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi, adopsi dan difusi inovasi teknologi. Termasuk permodalan baik dalam bentuk hibah, bantuan pinjaman lunak, dan investasi, serta kerjasama. Bantuan dan permodalan bisa didapatkan dari pihak pemerintah yang memiliki kebijakan program dan anggaran, kemudian pihak perusahaan swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk mendukung dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Kuncinya pemberdayaan tidak menciptakan ketergantungan tetapi mengembangkan sumber daya dan kemandirian.

(10) Dampak pemberdayaan, ini menjadi indikator pembuatan, pelaksanaan, evaluasi dan keberhasilan pemberdayaan yaitu: (a) Aspek afektif, yang paling mendasar dan penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesadaran, motivasi, dan jiwa pantang menyerah atau bekerja keras untuk dapat merubah serta meningkatkan usaha. (b) Aspek kognitif, setelah dibangun dan dibangkitkan kesadaran dan motivasi maka dikembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber potensi dalam kegiatan pemberdayaan. (c) Aspek Konatif memberikan dan meningkatkan keterampilan atau keahlian dalam menajemen usaha, administrasi keuangan, pengorganisasian, pengemasan, membuat label, perijinan, sertifikasi produk, promosi, pemasaran dan kemitraan.

Hasil akhir dampak pemberdayaan adalah kemandirian dan dapat menjadi pionir sebagai aktor yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat lainnya. Kemandirian berarti tidak lagi ketergantungan dan memiliki kekuatan (berdaya), otoritas, dan kemampuan dari berbagai bidang yang berdasarkan peningkatan motivasi, sikap mental, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, potensi sumber daya, serta kerjasama. Bidang ekonomi dapat mencapai kesejahteraan dan bisa bekerjasama atau menolong pihak lain. Bidang politik dengan memiliki kewenangan secara formal dalam struktur dan kebijakan serta non formal yang dapat mempengaruhi dan menentukan proses pembuatan keputusan serta menggerakan partisipasi masyarakat. Bidang sosial dan budaya dapat meningkatkan peran kelembagaan masyarakat, kohesifitas, solidaritas dan kerjasama masyarakat berbasis modal sosial dan kearifan lokal.

Keberhasilan pemberdayaan bukan hanya dapat menciptakan kemandirian masyarakat dari berbagai bidang, namun dapat juga menjadi pionir atau aktor yang melaksanakan pemberdayaan untuk masyarakat lainnya. Pionir yang memiliki semangat untuk mengembangkan keberhasilan atau kesuksesannya pada kelompok dan masyarakat lainnya, sehingga pemberdayaan menjadi program keberlanjutan dan kemandirian tidak sukses sendirian tapi sukses bersamaan.

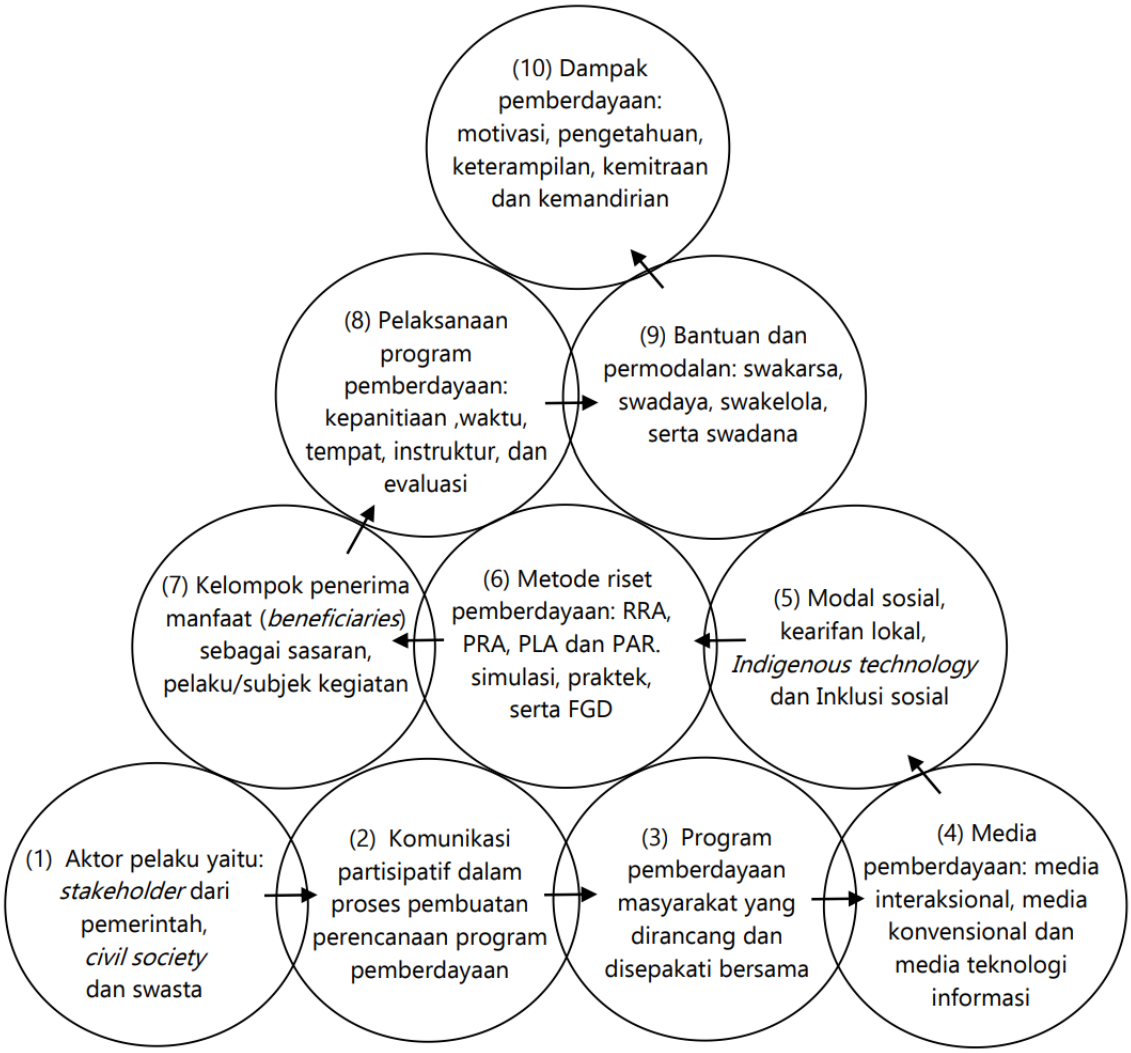

Gambar 8. Unsur Penting dalam Pemberdayaan

6.2. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan berkesinambungan supaya menghasilkan dampak pemberdayaan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terdiri dari :

(1) Studi pedahuluan, dengan kajian literatur dari referensi buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, kajian media massa yang diolah serta dianalisis. Melakukan pembukaan akses, perijinan dan pendekatan kepada sasaran atau penerima manfaat (*beneficiaries*), kemudian wawancara mendalam (dialog), observasi dan pengumpulan dokumentasi yang dibutuhkan.

(2) Melakukan dialog seperti sarasehan atau sambung rasa tentang hasil studi pendahuluan, membahas dan menyepakati rancangan program pemberdayaan secara partisipatif dan egaliter dengan masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat (*beneficiaries).*

(3) Sosialisasi program pemberdayaan merupakan proses penyampaian informasi yang biasanya berupa pemaparan dan penjelasan tentang peraturan, ketentuan, pedoman, dan program pemberdayaan. Sehingga *beneficiaries* mengetahui dan memahami bahkan dapat menjadi agen untuk melakukan sosialisasi kepada pihak atau kelompok lainnya di masyarakat.

(4) Penyuluhan, merupakan pemaparan dan penjelasan materi, berbagi pengalaman, menjelaskan tata cara, prosedur atau mekanisme kerja secara persuasif, dialogis, dan interaktif supaya menambah dan mengembangkan motivasi, pengetahuan serta pemahaman. Kegiatan penyuluhan sebetulnya tetap dilaksanakan di setiap bentuk kegiatan pemberdayaan mulai studi pendahuluan, perancangan, pelaksanaan dan pelatihan, pendampingan sampai kemitraan. Dengan demikian penyuluhan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di setiap proses pemberdayaan.

(5) Pelatihan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan materi yang telah disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk mendapat dan menambah keterampilan dan keahlian, sehingga akan menghasilkan suatu kemampuan baik pengelolaan (manajemen), proses dan peningkatan produksi, adopsi inovasi, pasca panen atau pasca produksi berupa pengolahan, pengemasan, label, merek, iklan, promosi dan pemasaran serta kemitraan.

(6) Pembentukan kelembagaan, dilaksanakan apabila dalam masyarakat atau komunitas belum terdapat kelompok atau kelembagaan. Tujuannya untuk menyatukan potensi dan kekuatan baik dari segi manajemen pengurus keanggotaan, administrasi dan keuangan, serta pengembangan usaha. Mengeliminir persaingan dan konflik antar individu atau kelompok, yang dirubah dengan kuatnya kerjasama dan kekompakan untuk memajukan bersama. Meningkatkan semangat untuk saling memperkuat, membantu dan mendukung proses serta hasil usaha, karena pemberdayaan sebagai pembangunan dan komunikasi partisipatif yang mensyaratkan *collective action,* solidaritas serta kerjasama.

(7) Pendampingan, dilakukan oleh penyuluh, instruktur ahli dan praktisi, aktivis pemberdayaan, dan fasilitator untuk lebih membantu dan memfasilitasi dalam proses dan hasil produksi, promosi dan pemasaran supaya sesuai dengan target hasil penyuluhan serta pelatihan, kemudian menjaga keberlangsungan proses pemberdayaan. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan tujuan serta indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Pendampingan dapat mengkader pendamping lokal atau internal dari kelompok, komunitas, kelembagaan dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mandiri serta tidak mengandalkan atau ketergantungan dengan pihak luar.

(8) Studi banding sebagai bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengamalan, membuka dan menjalin akses informasi serta kerjasama, dapat belajar dari pengalaman atau keberhasilan dan kesuksesan kelompok atau lembaga lainnya.

(9) Pengembangan dan penguatan kelembagaan, dilakukan setelah kelembagaan dibentuk atau sudah ada untuk meningkatkan kualitas manajemen usaha, proses dan hasil produksi, kepengurusan, keanggotaan, administrasi, keuangan dan promosi serta pemasaran. Kemudian pengembangan kelembagaan dilaksanakan jika di masyarakat sudah terbentuk kelompok dan gabungan kelompok serta lembaganya seperti kelompok usaha, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(10) Monitoring dan evaluasi (Monev), dilaksanakan secara bertahap pada pertengahan ketika proses kegiatan pemberdayaan semisal di setiap tahapan akhir materi penyuluhan dan pelatihan, kemudian pada akhir kegiatan secara keseluruhan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode gabungan (*mixed methode*) seperti metode kuantitatif terlebih dahulu melalui penyebaran dan pengolahan kuesioner dan diperdalam

serta diklarifikasi dengan metode kualitatif melalui wawancara (dialog), observasi dan diskusi. Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memberikan masukan dan perbaikan bagi perencanaan serta pelaksanaan pemberdayaan.

(11) Promosi dan pemasaran dalam pemberdayaan dilaksanakan setelah proses dan hasil produk dapat mencapai serta mempertahankan kualitas dan kauntitas secara konsisten juga keberlanjutan. Kegiatan ini dapat memfasilitasi dan memanfaatkan media sosial serta *event* kegiatan publik sehingga lebih meningkatkan penjualan, penghasilan dan kesejahteraan.

(12) Kemitraan, merupakan kerjasama antara kelompok usaha, komunitas dan kelembagaan usaha yang ada di masyarakat dengan pihak pemerintah, swasta atau dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan, proses produksi dan hasil produksi, permodalan, promosi serta pemasaran.

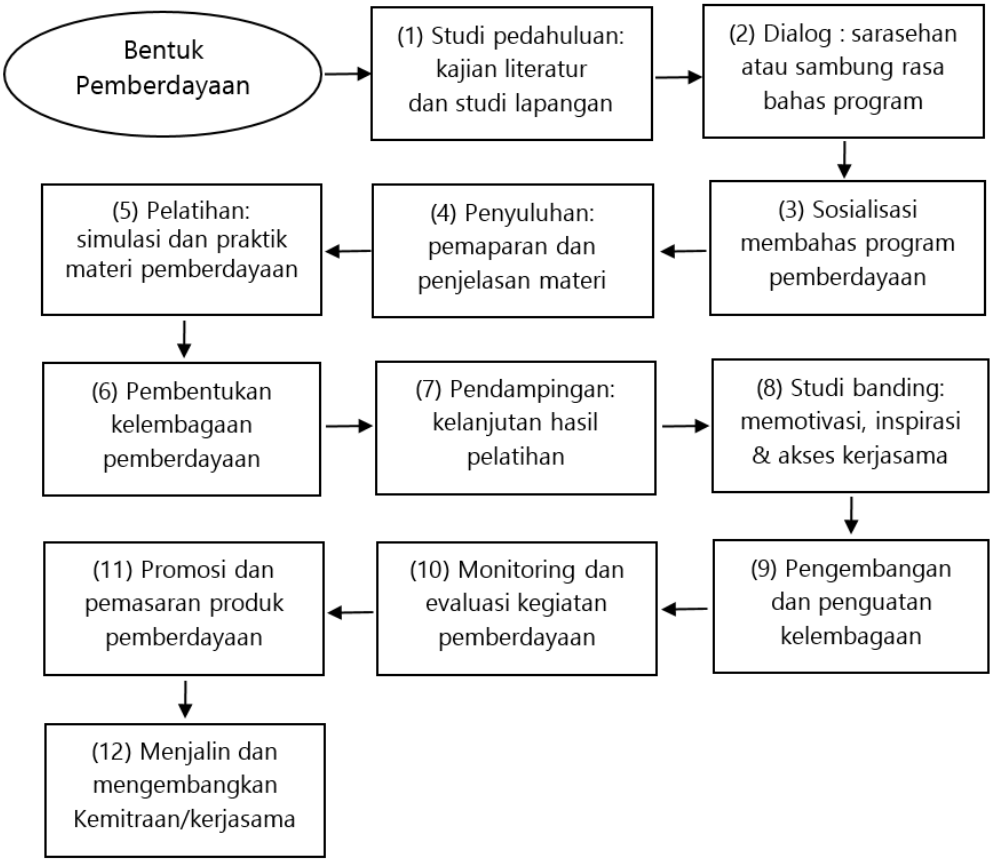

Gambar 9. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Bentuk program pemberdayaan secara umum dalam bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik di masyarakat seperti (1) Pemberdayaan ketahanan pangan komoditas organik dan produk pertanian. Program pemberdayaan ketahanan pangan dapat berupa: (a) Ketahanan pangan lokal dengan memanfaatkan pekarangan rumah. (b) Melakukan program penghijauan lingkungan desa, perumahan dan perkantoran seperti program *eco green city*. Program desa bibit yang membudidayakan bibit tanaman baik tanaman hias atau hortikultura. (c) Mengembangkan produk tanaman sehat atau herbal seperti budidaya tanaman obat keluarga (Toga), pengolahan herbal atau jamu menjadi obat alternatif serta budaya hidup sehat. (d) Pengolahan pasca panen dan inovasi produk makanan dan minuman baik dari buah-buahan dan sayuran menjadi produk siap konsumsi yang unik dan sehat. (e) Menumbuhkan generasi muda untuk menjadi generasi petani mulai dari penanaman, pengolahan, promosi dan pemasaran produk pertanian. (f) Bidang pertanian lainnya seperti pengembangan, pengolahan dan akses pemasaran dari peternakan dan perikanan seperti sapi serta domba sebagai komoditas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

(2) Pemberdayaan kelompok atau kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat seperti (a) Pembentukan dan pengembangan ekonomi misalkan gabungan kelompok (Gapok), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Bank Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Bank sampah. (b) Pembentukan dan pengembangan sosial misalkan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), kelompok radio komunitas, kelompok siaga atau tanggap bencana, kelompok pelestarian lingkungan, dan kelompok belajar mandiri. (c) Pembentukan dan pengembangan bidang politik, misalkan forum komunikasi masyarakat, lembaga advokasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, kelompok pengawas pemilu, kelompok pengawas korupsi, kelompok sadar dan peduli lingkungan, kelompok jurnalis warga (*citizen journalism*). (d) Pembentukan dan pengembangan budaya misalkan komunitas adat atau budaya, kelompok seni baik seni tari, musik, lukisan, batik, dongeng rakyat dan seni benda atau peralatan.

(3) Pemberdayaan sebagai rehabilitasi psikologis, sosial dan ekonomi seperti melaksanakan pemberdayaan untuk membangun kembali motivasi, melakukan terapi dan menghilangkan rasa traumatik, ketidakharmonisan dan konflik sosial dengan memberikan media interaksi sosial dan ekonomi melalui kegiatan pengembangan potensi dan kebutuhan. Pemberdayaan dimulai dengan rehabilitasi psikologis dan sosial dengan konseling, mediasi, dan rekonsialiasi, seperti di wilayah konflik, dampak relokasi akibat pembangunan, dan lokasi

bencana alam. Kemudian dapat juga melakukan konseling, rehabilitasi medis dan nonmedis bahkan sampai spiritual untuk mengatasi penyalahgunaan dan kecanduan Narkotika, *phubbing* dan *conduct disorder*. Maka tahapan pertama rehabilitasi psikologis dan sosial supaya mengembalikan konsep, motivasi dan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara terbuka dengan orang lain. Tahap berikutnya baru melakukan pemberdayaan usaha atau kewirausahaan sesuai kebutuhan dan potensi sumber daya yang dimiliki sebagai rehabilitasi sosial ekonomi. Sehingga dapat berbaur, berinteraksi dan diterima lagi oleh lingkungan sosialnya,

(4) Pembentukan, pelestarian, pengembangan dan percontohan kawasan seperti agrowisata, eduwisata, ekowisata, agroindustri, pesisir, perbatasan, desa wisata, desa adat, desa mina padi dan mina ikan, desa migran kreatif (Desmigratif), desa konservasi hutan, desa batik, desa kawasan jamu, desa kuliner, desa internet, desa ketahanan pangan, dan desa inovasi.

(5) Membuat media promosi dan pemasaran dengan inovasi teknologi seperti membuat agrimart atau mini market produk pertanian dan olahan atau pasca panen. Membuat promosi dan pemasaran produk serta destinasi wisata dengan radio komunitas, dan media sosial seperti *market place* serta *e-commmerce*.

(6) Pengembangan inovasi teknologi, seperti: (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dengan rekayasa pertanian dan adopsi inovasi dengan rekayasa hidroponik atau *urban farming*, serta *green house*. (b) Rekayasa lahan padi terapung menggunakan media botol atau drum plastik untuk membuat lahan pertanian di daerah yang banjir atau sungai. (c) Teknik pengemasan (*packing*), labeling, dan pemasaran media sosial seperti melalui *e-commerce* serta *market place*. (d) Pengembangan industri dan teknologi yang mendukung serta mengolah produk-produk pertanian atau agoindustri. (e) Menerapkan dan mengembangkan energi baru terbarukan (*renewable*) sebagai proses alam yang didaur ulang yang pemanfaatannya menjadi energi baru yang dapat diperbaharui dengan tetap ramah lingkungan atau menjaga pelestarian lingkungan. Jenis energi baru terbarukan seperti pemanfaatan dan pengembangan tenaga air dan angin serta sinar matahari untuk dibuat kincir angin, kincir air, dan tenaga surya (*solar energy*) dengan panel surya, ketiga energi tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian energi baru terbarukan lainnya seperti Bioenergi, menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bahwa Bioenergi terdiri dari Biomassa, Biodiesel, Bioetanol, dan Biogas. Biomassa mengolah bahan-bahan dari sisa nabati yang dianggap sebagai sampah seperti bioarang sebagai bahan bakar dan

batok kelapa sawit, serbuk kayu, serbuk gergaji, arang sekam menjadi briket. Biodiesel yang memanfaatkan lemak hewani dan nabati untuk menghasilkan bahan bakar (*biofuel*) seperti pengolahan kelapa sawit. Bioetanol pemanfaatan dari bahan nabati seperti jagung, tebu, ubi jalar, sagu, dan ubi kayu untuk meningkatkan angka oktan dan efisiensi pembakaran mesin. Biogas seperti pemanfaatan kotoran sapi menjadi gas untuk bahan bakar.

Kemudian bentuk pemberdayaan secara mikro yang bersifat teknis substansial dalam perumusan dan pelaksanaan program pemberdayaan khususnya pada bentuk kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Bentuk pelaksanaan pemberdayaan ini sifatnya sistimatis atau urut, sehingga bentuk kegiatan dan materi tidak dapat secara acak, dimulai dari tahapan yaitu:

(1) Materi mengembangkan diri untuk merubah, membangun dan mengembangkan pola pikir (*maindset*), motivasi, orientasi dan karakter yang lebih positif, optimis, produktif, dan kreatif. Materi penyuluhan dan pelatihan yang dimaksud seperti psikologi manusia dalam konsep diri (*self concept*) dan manajemen diri. Manajemen waktu, psikologi komunikasi, komunikasi personal dan interpersonal.

(2) Materi inspirasi dan motivasi dengan menayangkan cuplikan video kisah sukses para pelaku pemberdayaan (*success stories*) pada bidang usahanya, dan atau mendatangkan langsung sehingga dapat berinteraksi serta menjalin akses dengan *beneficiaries,* bahkan bisa menjadi fasilitator atau pendamping kegiatan.

(3) Pengetahuan dan pemahaman melalui pemberian materi-materi yang relevan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat seperti materi mewujudkan usaha ekonomi atau kewirausahaan yang sukses, membangun usaha ekonomi, manajemen usaha ekonomi, budidaya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengolahan produk pasca panen, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, manajemen kelembagaan, manajemen Koperasi dan BUMDes, manajemen administrasi dan keuangan, strategi promosi serta pemasaran.

(4) Materi simulasi dan pelatihan atau praktik, setelah mendapatkan materi pengetahuan dan pemahaman seperti manajemen kelembagaan semisal kelompok usaha, Koperasi, BUMDes, bank desa dan bank sampah, pasar rakyat, pasar kuliner, warung dan rumah makan sampai cafe. Manajemen keanggotaan dan kepengurusan, manajemen administrasi dan keuangan baik secara manual atau digital. Manajemen produksi, budidaya pertanian, perkebunan, perikanan

dan peternakan. Pengolahan produk pasca panen, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pengolahan inovasi produk, adopsi inovasi dan rekayasa dalam budidaya.

(5) Materi standarisasi dan sertifikasi produk, setelah pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, maka diberikan pelatihan tentang teknik pengemasan (*packaging*) dan label merek (*labeling*) yang sesuai standar mutu yang berkualitas dan higenis. Prosedur perijinan formal dan badan hukum kelembagaan, standarisasi produk dari kesehatan, ijin perdagangan, dan sertifikasi halal serta standarisasi ekspor.

(6) Materi pelatihan promosi dan pemasaran seperti pelatihan teknik dan strategi promosi serta pemasaran di media sosial dan atau media digital seperti *market place* dan *e-commerce*. Pelatihan membuat desain iklan, menjadi admin pengelola media sosial dan media digital, komunikasi persuasif, komunikasi pemasaran, teknik promosi serta komunikasi pemasaran di pameran atau *event expo*.

(7) Materi simulasi dan praktik dalam membangun dan mengembangkan kelompok atau tim kerja (*team work*), dalam pemberdayaan diperlukan kerjasama, kekompakan dan kemitraan sebagai bentuk *collective action*, materi yang diberikan berupa komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa dan komunikasi pemasaran. Membangun kerjasama kelompok (*team building*), dinamika kelompok, manajemen konflik, pemecahan masalah (*problem solving*), teknik identifikasi dan analisis, teknik musyawarah dan rapat, pengambilan keputusan, manajemen organisasi, teknik lobi dan negosiasi, proses dan perjanjian kemitraan.

(8) Materi strategi studi banding dan kemitraan dengan berkunjung secara langsung ke lokasi komunitas pemberdayaan yang sukses dan perusahaan sebagai percontohan, menjalin akses kerjasama, pendampingan dan kemitraan. Prosedur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat.

(9) Materi simulasi dan pelatihan tentang menjadi pionir pemberdayaan seperti teknik komunikasi persuasif, komunikasi kelompok, manajemen organisasi atau kelembagaan, cara melakukan presentasi, membuat media presentasi, catatan laporan kegiatan, dan metode penyuluhan serta pendampingan.

BAB 7

METODE PENELITIAN DALAM PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam tahapannya harus berdasarkan kajian dan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, potensi dan prospek di masyarakat, sehingga program serta pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat kesamaan target sasaran lokasi untuk kegiatan riset dan pelaksanaan pemberdayaan yakni: (1) Lokasi desa dan masyarakat berbasis masalah seperti adanya kemiskinan (Desa miskin), akses informasi dan infrastuktur yang sulit (Desa plosok atau terpencil), tingkat pendidikan yang rendah, bencana alam, konflik sosial dan ekonomi. (2) Lokasi dan masyarakat yang unik, memiliki ciri khas dan menarik seperti masyarakat dan desa adat, desa wisata, desa transmigrasi, desa hutan, desa agrowisata, desa mina padi, desa batik, desa inovasi, desa pekerja migran, desa migran kreatif (Desmigratif), agroindustri, desa agropolitan dan desa minapolitan. (3) Lokasi desa dan masyarakat yang berprestasi atau unggul seperti desa yang memiliki predikat dan juara bidang kebersihan, usaha ekonomi kecil, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat (Posyandu), pemberdayaan keluarga, dan desa inovatif.

Kesamaan target sasaran penerima manfaat (*beneficiaries*) seperti masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis penggiat pembangunan, pengurus dan anggota kelompok usaha atau kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pos Pemberdayaan Keluraga (Posdaya), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kajian dan penelitian pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan beberapa metode penelitian baik metode kualitatif dan metode kombinasi (*mixed methods*). Beberapa literatur lebih memfokuskan pada penelitian dengan metode kualitatif partisipatif (*participatory qualitative method*) atau serta riset aksi (*action research*), karena lebih relevan dengan pemberdayaan yang merupakan pembangunan partisipatif dan menggunakan komunikasi partisipatif. Namun metode penelitian kuantitatif juga dapat melengkapi dan mendukung metode kualitatif partisipatif dengan menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*).

7.1. Metode Kombinasi *(Mixed Methods)*

Menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) yang menggunakan gabungan metode kuantitatif dengan metode kualitaif yang dipergunakan dalam suatu kegiatan penelitian secara bersama-sama, untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, reliabel, objektif, serta valid (Creswell, 2014) dan (Sugiono, 2011). Penggunaan *mixed methods* dalam penelitian pemberdayaan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang umumnya dipergunakan seperti deskriptif, uji beda, uji korelasi, dan uji pengaruh (regresi). Pengumpulan data dengan membuat, menyebarkan dan mengolah kuesioner atau angket yang berisikan pertanyaan tertutup atau dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner diberikan pada awal kegiatan setelah tahapan pembukaan akses, sekaligus melakukan pendekatan, dan perijinan kepada sasaran di lokasi penelitian.

Tujuan menggunakan metode kuantitatif untuk melakukan identifikasi dan analisis permasalahan serta potensi sumber daya di masyarakat. yang akan mendukung dan melengkapi bahan kajian metode kualitatif seperti penelitian partisipatoris yang akan lebih dipertajam serta diperdalam, hal ini dapat dilakukan untuk merancang dan menyusun program pemberdayaan.

Penyebaran kuesioner dapat menggunakan survei dengan mengambil semua dalam populasi, dapat juga dengan *probability sampling* seperti *simple random sampling* (sampel acak sederhana), *proportionate stratified random sampling* (teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan

berstrata pada sub populasi), *disproportionate stratified random sampling* (sampel acak berstrata proporsional) dan *cluster sampling* (sampel kluster).

Mekanisme penggunaan metode penelitian kuantitatif dalam pemberdayaan sama dengan penelitian bidang lain yang disesuaikan sesuai dengan kaidah penelitian, seperti pengujian validitas dan reliabilitas data serta hipotesis. Analisis data penelitian kuantitatif seperti umumnya seperti analisis deskriptif, survei, uji beda, uji korelasi dan uji regresi, analisis jaringan komunikasi, dan analisis SWOT tergantung kebutuhan yang ingin diharapkan.

Metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (dialog), observasi, analisis dokumentasi, curah pendapat (*brainstorming)* diskusi interaktif atau *Focus Group Discussion* (FGD), *Participatory Decision Making* (PDM). Jenis metode penelitian kualitatif seperti metode studi kasus dan penelitian partisipatoris seperti *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning and Action* (PLA) dan *Participatory Action Research* (PAR). Pemilihan atau penentuan informan dapat dilakukan dengan *nonprobability sampling* seperti sampling kuota (*quota sampling*), sampling sistematis (*systematic sampling*), sampling aksidental (*accidental sampling*), purposif sampling (*purposive sampling*), *snowball sampling* dan sampling jenuh.

Selanjutnya menggunakan analisis data yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan misalkan analisis deskriptif, analisis interaktif, analisis studi literatur, analisis media, dan analisis partisipatif.

Hasil penelitian dengan metode kualitatif akan diperkuat atau dilengkapi oleh hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan di pertengahan dan di akhir kegiatan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hal ini dilakukan pada pertengahan kegiatan maksudnya dalam rangkaian kegiatan semisal ada dua atau tiga tahapan kegiatan, maka dapat disebarkan kuesioner disetiap akhir tahapan, dapat pula kuesioner disebarkan pada akhir kegiatan selesai. Menggunakan metode kuantitatif tujuannya untuk mendapatkan evaluasi dan penilaian dampak kegiatan pemberdayaan supaya sesuai dengan indikator target kegiatan, sebagai masukan dan perbaikan program pemberdayaan selanjutnya.

Terdapat bentuk *mixed methods* menurut Creswell (2014) yang umumnya dipergunakan yaitu:

(1) Sequential mixed methods sebagai metode campuran sekuensial atau bertahap, sebagai metode penelitian yang menggabungkan data yang

dihasilkan dari metode kualitatif kemudian dengan metode kuantitatif.Terdapat beberapa strategi: (a) Strategi eksplanatoris sekuensial, yang memprioritaskan pada penelitian dan analisis kuantitatif sebagai kajian utama yang dilaksanakan pada tahapan awal penelitian, tahap berikutnya menggunakan metode dan analisis kualitatif. (b) Strategi eksploratoris sekuensial, yang memprioritaskan pada tahap awal dengan penelitian dan analisis kualitatif, tahap berikutnya menggunakan metode dan analisis kuantitatif. (c) Strategi transformatif sekuensial yang menggunakan perspektif teori dalam mendesain prosedur penelitian dengan tahap pertama memilih salah satu metode yang hasilnya atau bobot nilainnya dapat ditentukan diantara kedua metode dan atau memberikan secara merata pada tahapan-tahapan penelitian di dua metode tersebut.

(2) Concurrent mixed methods sebagai metode campuran konkuren atau sewaktu waktu sebagai penelitian dengan menyatukan data hasil metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam satu waktu. Memiliki beberapa strategi penelitian: (a) Strategi triangulasi konkuren, melakukan pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu yang bersamaan, selanjutnya dibandingkan kedua data tersebut untuk mengetahui kombinasi dan perbedaan. (b) Strategi *embedded konkuren* yang pelakasanaanya secara bersamaan dua metode penelitian namun data primer menjadi prioritas utama dan data sekunder sebagai pendukung ditargetkan (*embedded*) supaya lebih dominan. (c) Strategi transformatif konkuren, pelaksanaan pengumpulan data hasil metode kualitatif dan metode kuantitatif secara bersamaan berdasarkan pada perspektif teoritis tertentu.

Analisis data dalam *mixed methods* yaitu: (1) Transformasi data, seperti pada strategi konkuren, peneliti dapat menghitung dan mengklarifikasi data kuantitatif. (2) Mengeksplorasi topik seperti pada strategi sekuensial didapatkan terlebih dahulu hasil dari analisis data kuantitatif kemudian ditindaklanjuti dengan hasil data kualitatif untuk melengkapi dan memperdalam. (3) Membuat instrumen melalui salah satu strategi sekuensial dari hasil data kualitatif yang selanjutnya dibuat skala dan instrumen survei kuantitatif. Tahap selanjutnya memvalidasi instrumen dengan sampel yang representative dari populasi. (4) Menguji level ganda, seperti menerapkan strategi *embedded konkuren*, dengan melakukan survei untuk pengumpulan data hasil metode kuantitatif yang pada waktu bersamaan melakukan metode kualitatif melalui wawancara untuk mengeksplorasi fenomena realitas. (5) Membuat tabel matrik, seperti menggunakan salah satu strategi konkuren dengan mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tabel matrik.

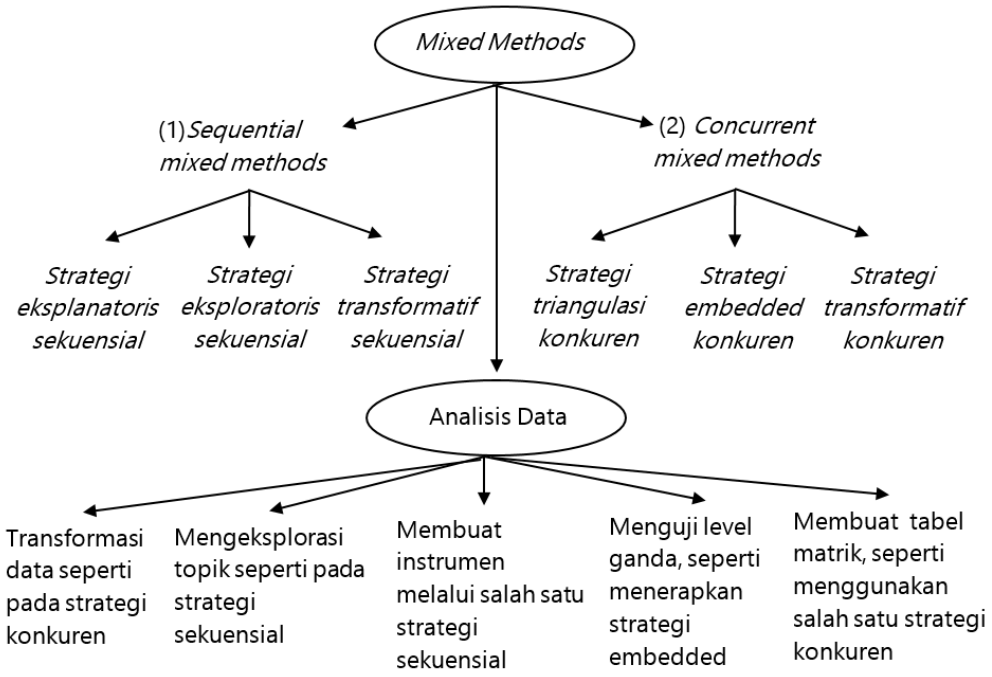

Gambar 10. *Mixed Methods* dan Analisis Data

7.2. Metode Penelitian Partisipatif (*Participatory Research Methods*)

Pemberdayaan masyarakat dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga program pemberdayaannya harus berbasis penelitian dan kajian. Dalam penelitian pemberdayaan dapat menggunakan penelitian *mixed methods* dan dapat juga menggunakan metode penelitian partisipatif, kedua metode ini sebetulnya saling berkaitan. Terutama ketika menggunakan *mixed methods* yang salah satu metodenya bisa menggunakan metode penelitian kualitatif partisipatif yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk pembangunan partisipatif dan menggunakan komunikasi partisipatif. Penelitian partisipatoris merupakan penelitian kualitatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat masyarakat. Chambers (2008) menyebutnya dengan metode partisipatoris (*participatory method*) sejak pertengahan 1970-an sebagai akselerasi metodologi partisipatif dalam praktik pembangunan, salah satu bagiannya dikenal dengan akronimnya penilaian pedesaan secara cepat atau *Rapid Rural Appraisal* (RRA), penilaian pedesaan secara partisipatif atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA), kemudian pembelajaran partisipatif dan tindakan atau *Participatory Learning and Action*

(PLA). Ini adalah serangkaian pendekatan, metode, perilaku dan hubungan untuk mencari tahu tentang konteks dan kehidupan lokal. Ketiganya terus dipraktikkan dalam berbagai cara yang saling melengkapi. Terdapat beberapa metode partisipatoris, sebagai betikut:

7.2.1. Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Berdasarkan tulisannya Chambers (1992); (1994); (2008) secara lengkap menjelaskan metode partisipatoris dan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang juga dibahas Bhandari (2003). Metode partisipatoris meliputi pemetaan, alur rencana yang sistimatis dan hasil observasi, pemodelan, penilaian matrik, kalender musiman, analisis isu utama dan perubahan, memberikan peringkat prioritas dan pengelompokan status ekonomi dan diagram analitik. Munculnya metode RRA dan PRA yang merupakan jawaban dari kelemahan yang dimiliki metode survei dimana masyarakat dijadikan objek dan kurang terlibat atau kurang partisipatif dalam identifikasi masalah, penyusunan program dan kebijakan sehingga sering tidak relevan, kurang dipahami serta kurang diterima masyarakat. Persamaan RRA dan PRA memiliki kontribusi dalam riset yang sistimatis, pemetaan lokasi, pembuatan diagram seperti kalender musim, penilaian skala urutan dan ide-ide baru. Praktik RRA dan PRA sebagai aplikasi metode penelitian yang tidak kaku dan belajar dilapangan dengan hidup menetap di desa, memaknai sikap, perilaku dan hubungan serta alamiah.

RRA dimulai sebagai perpaduan metode yang dirancang dan digunakan untuk menjadi lebih cepat dan lebih baik untuk tujuan praktis dengan survei kuesioner besar atau antropologi sosial yang mendalam. Pengumpulan data lainnya dengan wawancara semi-terstruktur, observasi, pemetaan dan pembuatan diagram, semua ini dilakukan oleh para profesional luar. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an PRA berkembang dari RRA.

RRA, orang luar (*outsider*) bermusyawarah dan memfasilitasi masyarakat lokal, terutama yang lebih miskin dan terpinggirkan yang dijadikan sebagai aktor utama untuk memetakan, membuat diagram, mengamati, menganalisis, dan melakukan tindakan kolektif. Sedangkan PLA yang diperkenalkan pada 1995 terkadang seperti PRA tetapi lebih luas dan mencakup pendekatan dan metode lain yang serupa atau terkait.

Perbedaan yang mendasar RRA berkembang antara akhir tahun 1970-1980 merupakan metode untuk memahami desa secara cepat yang lebih banyak informasi diperoleh dan dimanfaatkan oleh orang luar (*outsiders*) melalui intervensi dengan belajar dari luar, sumber utama pengetahuan masyarakat, pelaku inovator dominan dari universitas sebagai tim manajemen yang menggunakan metode riset, pengguna utama universitas dan lembaga bantuan, manfaat yang dihasilkan rancangan program dan publikasi.

PRA berkembang sekitar akhir tahun 1980 - 1990 inovator utamanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah dan penggiat organisasi, sumber daya utama kemampuan masyarakat untuk difasilitasi dan diberdayakan dengan keberlanjutan aksi lokal. PRA merupakan metode untuk memahami desa secara cepat dengan partisipatif, sehingga lebih banyak informasi didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri (*insiders*) dan orang luar sebagai fasilitator. PRA meliputi manajemen sumber daya alam, pertanian, program kemiskinan dan sosial, kesehatan serta ketahanan pangan. PRA memiliki sumber dari aktivis riset partisipatif, analisis agroekosistem, antropologi terapan, penelitian lapangan tentang sistem pertanian, dan penilaian cepat tentang pedesaan

Ada lima kunci utama dalam mendesain penelitian PRA (Syahyuti, 2006) yaitu: (1) Partisipasi (*participation),* data yang bersumber dari aspirasi atau masukan dari masyarakat lokal sebagai suatu yang bernilai dan esensial dalam penelitian dan perencanaan melalui proses pembangunan dengan pendekatan partisipatif. (2) Tim kerja (*teamwork),* validitas data penelitian didapatkan dari interaksi atau komunikasi informal dan *brainstroming* di dalam kelompok. (3) Fleksibel (*fleksibilitas*), pelaksanaan agenda program kegiatan ditentukan keterampilan tim, sumber daya, ketersediaan waktu, dan pilihan tema serta lokasi kegiatan. (4) Ketidakpedulian (*optimal ignorance*) seperti anggaran dan waktu dirancang secara efisien dengan ketersediaan informasi yang cukup untuk pembuatan rekomendasi dan keputusan. (5) *Triangulasi*, pelaksanaan dengan data kualitatif, untuk menjamin validitas setidaknya menggunakan tiga metode dalam mengkaji topik yang sama.

Metode RRA dan PRA dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam proses penelitian partisipatif sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan RRA dan PRA

No	Persamaan RRA dan PRA
1.	Jawaban dari kekurangan penelitian survei (metode kuantitatif) yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang dijadikan sebagai objek bukan subjek penelitian.
2.	Memberikan kontribusi penelitian yang sistimatis, pemetaan lokasi, pembuatan diagram seperti kalender musim, penilaian skala urutan dan ide
3.	Praktik ilmu pengetahuan dan penelitian yang fleksibel, terbuka, harmonis atau ada kedekatan, mendalam untuk menyatu dengan kehidupan masyarakat untuk memaknai sikap, perilaku dan hubungan serta alamiah.
4.	Memfasilitasi masyarakat lokal atau komunitas untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan berdasarkan permasalahan, potensi , minat dan sumber daya yang dimiliki.

Perbedaaan RRA dan PRA

No	*Rapid Rural Appraisal* (RRA)	*Participatory Rural Appraisal* (PRA)
1.	Aktor pelaku orang luar komunitas (*outsider*) dari profesional	Aktor pelaku pemerintah, penggiat atau aktivis, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2.	Dipergunakan untuk mendapatkan data secara cepat melalui angket atau wawancara	Data diperoleh dengan cepat namun lebih partisipatif dan mendalam
3.	Hasil penelitian lebih dimanfaatkan untuk kepentingan *outsider*	Hasil penelitian lebih dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sendiri (*insider*)
4.	Program dilaksanakan untuk kepentingan proyek *outsider* dengan intervensi	Program dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat sendiri (*insider*)

No	*Rapid Rural Appraisal* (RRA)	*Participatory Rural Appraisal* (PRA)
5.	Kurang adanya kedekatan dan keberlangsungan interaksi antara periset (*outsider*) dengan masyarakat (*insider*)	Terjalin kedekatan dan keberlangsungan interaksi antara periset (*outsider*) dengan masyarakat (*insider*)
6.	Dipergunakan untuk mendapatkan hasil awal dan atau pelaksanaan yang cepat, serta dapat dilakukan penelitian lanjutan.	Dipergunakan sebagai kelanjutan dari RRA dan lebih mendalam, partisipatif dan keberlangsungan riset

7.2.2. Metode *Participatory Learing and Action* (PLA)

PLA sebagai bagian dari metode partisipatoris untuk keberlanjutan pengembangan program dengan cirinya menurut Pretty et al. (1995) sebagai berikut (a) Mengajar dan belajar, syaratnya berperan sebagai pembelajar, memotivasi untuk belajar, menghilangkan hambatan komunikasi, banyak mendengar dan membantu. (b) Membentuk trainer atau fasilitator yang kompeten dengan cara mengggantikan manipulasi dengan memfasilitasi, pentingnya umpan balik serta daftar penilaian pada trainer atau fasilitator. (c) Persiapan pelaksanaan, dengan tentukan tujuannya, identifikasi karakteristik partisipan atau sasaran, pilih lokasi dan rungan yang sesuai dan representatif, penentuan waktu dan sesi kegiatan, pengaturan proses kegiatan seperti posisi duduk peserta yang melingkar seperti huruf "U", segitiga dan bentuk "O", diskusi kelompok, dan diskusi panel. (d) Metode kegiatan atau pelatihan dengan menggunakan metode pengajaran (ceramah), diskusi kelompok, pengumpulan ide dengan curah pendapat (*brainstorming*), bermain peran (*role plays*), studi kasus, menggunakan media catatan dan visual, teknik komunikasi, simulasi dan permainan, kerja kelompok, manajemen konflik, *problem solving*, dinamika kelompok, membangun kerjasama tim, teknik analisis, teknik pengambilan keputusan, teknik membuat program, teknik pemetaan program, membuat diagram dan model program, teknik laporan dan presentasi laporan, evaluasi dan penilaian program, serta pelatihan bagi pelatih (*traning of trainers*). Menurut Appel et al. (2012) metode PLA merupakan pendekatan, alat, sikap, dan perilaku yang berkembang untuk memberdayakan individu atau kelompok dengan cara mempresentasikan, berbagi, menganalisis dan meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan dan kondisi, kemudian merencanakan, bertindak, memonitor, mengevaluasi, merefleksikan dan meningkatkan aksi

masyarakat. PLA dapat diterapkan di berbagai bidang seperti program untuk pengelolaan sumber daya alam dan pertanian, pemerataan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan, kesehatan, hak asasi manusia, dan keamanan.

PLA menurut Adi (2013) sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat serta mendapat pemahaman yang mendalam tentang situasi suatu komunitas sebagai *community worker* yang menganalisis dan mengambil keputusan dari permasalahan yang dihadapi. PLA juga melaksanakan *assessment*, proses belajar, mengoptimalisasikan aspirasi dan partisipasi dari masalah, potensi yang dihadapi dari, dengan dan untuk masyarakat. Prinsip utamanya yaitu: (a) Mengutamakan yang kurang beruntung untuk mengetahui realitas masalah yang sebenarnya. (b) Menekankan pada proses *assessment* sebagai proses pemberdayaan (pembelajaran dan penguatan) untuk masyarakat dan *community worker*. (c) Prinsip belajar dan menghargai perbedaan. (d) Proses pengecekan ulang atau triangulasi (*check and re-check*) pada data yang didapatkan baik dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara serta FGD. (e) Pelaksanaan bersifat informal, mengoptimalkan hasil, berkelanjutan, orientasi praktis dan terbuka.

7.2.3. Metode *Participatory Action Research* (PAR)

Participatory Action Research (PAR) permulaannya terkait erat dengan kritik terhadap ilmu-ilmu sosial khususnya kajian positivis dan empiris, PAR dianggap sebagai gerakan revolusioner dalam penelitian. Sejarahnya ketika diselenggarakan kongres dunia tentang konvergensi partisipatif dalam pengetahuan di Cartagena tahun 1997, menemukan setidaknya 32 sekolah atau asosiasi yang terkait dengan gagasan partisipasi dalam penelitian sosial, ekonomi dan politik (Swantz, 2008).

PAR hadir sebagai metodologi yang memungkinkan para peneliti untuk dapat bekerja dan bermitra dengan masyarakat melalui cara yang mengarah pada tindakan untuk perubahan. PAR mengacu pada paradigma teori kritis dan konstruktivisme dengan menggunakan metode kualitatif serta dapat juga metode kuantitatif seperti survei untuk penilaian kebutuhan partisipatif akan mencakup keterlibatan luas masyarakat lokal dalam proses partisipatif. PAR sebagai metode penelitian kolektif dengan (1) Refleksi diri yang dilakukan peneliti dan komunitas sehingga dapat memahami dan meningkatkan partisipasi, menemukan serta mengontrol situasi yang telah ditemukan sendiri. Proses

reflektif terkait langsung dengan tindakan, dipengaruhi pemahaman tentang sejarah, budaya, dan kontek lokal yang sudah tertanam dalam hubungan sosial. Proses PAR harus memberdayakan untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka. (2) PAR melibatkan yang diteliti secara aktif terlibat dalam seluruh proses penelitian seperti memilih topik penelitian, pengumpulan dan analisis data serta memutuskan tindakan dari hasil temuan penelitian. (3) PAR melakukan advokasi dan memberikan relasi kekuasaan tanpa batasan sehingga menjadi setara antara peneliti dan yang diteliti sebagai mitra (Baum, et al., 2006).

PAR merupakan praktik reflektif dalam proses penelitian dengan model yang demokratis melalui cara: (1) Upaya kolaboratif di setiap tahap dengan berdiskusi. (2) Melakukan tindakan kolektif atau bekerjasama dan menggabungkan keterampilan. (3) Memperbaiki masalah yang sedang diteliti, membangun dan menghasilkan teori. (4) berkontribusi pada reformasi pendidikan (Kindon et al., 2007).

Metode penelitian partisipatif tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan situasi, kondisi dan orientasi penelitian, jika mengawali penelitian dan membutuhkan hasil yang cepat dapat menggunakan metode RRA, dan jika menghendaki ada ikatan hubungan baik dan berkelanjutan dengan metode PRA. Setelah memiliki akses, kedekatan, penerimaan dari subjek penelitian serta bermaskud untuk melakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam untuk berpartisipasi dan ingin mengukur dampak penelitian dengan metode PLA, yang selanjutnya dapat menggunakan PAR untuk melakukan penelitian terapan, penelitian aksi yang membutuhkan penanganan situasi dan kondisi yang mendesak sangat penting (darurat), kemudian untuk penelitian implementasi strategi serta model.

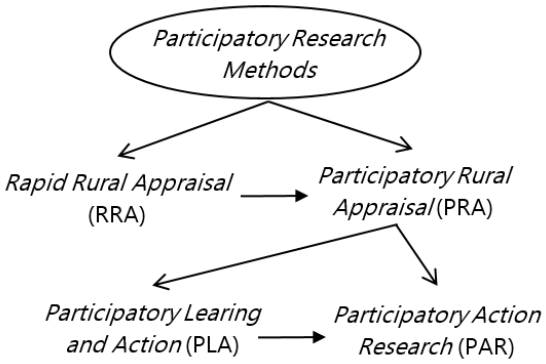

Gambar 11. *Participatory Research Methods*

7.3. Penentuan Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dalam pemberdayaan masyarakat dapat dipilih sesuai target sasaran dengan pertimbangan (1) Terdapat permasalahan di masyarakat seperti konflik sosial, kemiskinan, pengangguran, diskriminasi sosial dan gender, rehabilitasi sosial ekonomi pasca bencana, masalah kesehatan, penyalahgunaan Narkoba dan kegagalan dalam pertanian serta pasca panen, kemudian kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, lahan semakin sempit, sedikitnya generasi petani dan kewirausahaan serta dampak industrialisasi yang harus mendapat solusi kongkrit dan perubahan yang lebih baik. (2) Keunikan dan daya tarik suatu lokasi atau komunitas seperti desa adat, desa wisata, desa masyarakat hutan, ekowisata, eduwisata, minapolitan, agropolitan, agrowisata dan agroindustri, kemudian tentang kemandirian dan kedaulatan pangan, serta produk-produk inovatif pasca panen. (3) Prestasi yang telah dicapai suatu masyarakat atau komunitas baik tingkat lokal maupun nasional seperti juara ketahanan pangan dan pertanian, kampung bibit, kampung bersih, kampung sehat, inovasi produk, dan kampung kuliner. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi berprestasi, juara kelompok usaha inovatif, dan juara kelompok wanita tani.

Subjek penelitian dapat ditentukan sesuai kaidah penelitian baik yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif ataupun *mixed methods* melalui penentuan pengambilan sampel. Namun secara karakteristik yang dipilih menjadi subjek penelitian atau informan (penelitian metode kualitatif) dan responden (penelitian metode kuantitatif) seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Koperasi, BUMDes, kelompok usaha kecil, kelompok wanita tani, kelompok peternak dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok kewirausahaan, lembaga sosial, ekonomi dan

pendidikan, Pesantren, kelompok marginal, dan kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam penelitian.

7.4. Studi Pendahuluan Penelitian

Penelitian dalam pemberdayaan khususnya yang menggunakan metode penelitian partisipatif (*Participatory Research Methods*) terdapat bias proses penelitian yang harus dihindari. Sebagaimana menurut Chambers (1992) yaitu: (1) Bias lokasi penelitian yang kurang relevan karena dipilih yang mudah terjangkau, sedangkan realitas yang membutuhkan pemberdayaan adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman, jauh dan aksesnya yang sulit. (2) Bias proyek, banyak masyarakat yang sebetulnya belum pernah mendapatkan pemberdayaan, namun yang mendapatkan riset dan kegiatan pemberdayaan pada masyarakat yang sudah sering mendapatkan sehingga pelaksanaan dan hasil menjadi bias tidak asli. (3) Bias kepentingan, dalam pemberdayaan seringnya memilih kepentingan instansi atau elit sebagai lembaga yang memberi tugas pendampingan atau yang memfasilitasi daripada kepentingan masyarakat. (4) Bias belas kasihan, di lapangan sering terjebak rasa belas kasihan kepada komunitas orang miskin, sehingga akan memberikan bantuan modal secara karitatif (*charity*) tanpa mempertimbangkan kesiapan dan ketepatan yang menerima bantuan sehingga menjadi tidak berkembang atau tidak produktif. (5) Bias kelompok sasaran, sering mendahulukan individu dan komunitas yang dominan seperti bisa dan pandai berkomunikasi, status sosial ekonomi yang cukup dan mapan, memilih kaum laki-laki dari prempuan, memilih yang aktif daripada yang diam hal tersebut karena dinilai lebih bisa diajak kompromi. (6) Bias musim, dalam proses penelitian dan pelaksanaan pemberdayaan lebih cenderung memilih musim kemarau semisal habis panen. Padahal dapat datang ketika musim banjir, hama, dan kesulitan bibit dan pupuk serta infrastruktur akses jalan dan komunikasi yang sulit. (7) Bias diplomatis, fasilitator atau pendamping dan periset dalam proses penelitian dan pendampingan, selalu mempertimbangkan sopan santun dan tidak memberikan masukan atau mengkritik supaya menciptakan kenyamanan dan tidak tersinggung daripada menyampaikan pendapat yang sebenarnya. (8) Bias profesi, fasilitator atau pendamping dan periset dalam memahami dan menilai permasalahan yang tetapkan berdasarkan standar keilmuannya daripada mengkonstruksi realitas nyata.

Dengan demikian dalam penelitian partisipatif harus dapat menghindari bias penelitian supaya dalam proses pelaksanaannya dapat sesuai

dengan target, metode, mekanisme dan indikator keberhasilan. Menurut Bhandari (2003) terdapat persyaratan dalam melaksanakan riset dan kegiatan pemberdayaan yakni: (1) Mengidentifikasi, merespon dan memberikan solusi pada permasalahan masyarakat dan lingkungannya. (2) Tindakan kolektif akan dapat diwujudkan jika adanya kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan masyarakat memahami permasalahan di masyarakat. Dengan syarat (a) Mempelajari isu atau masalah secara partisipatif dan menyeluruh, (b) mengkonstruksi pengalaman dan evaluasi pengetahuan yang didapatkan di masyarakat, (c) Mengadopsi ilmu pengetahuan sebagai pola kehidupan masyarakat dalam berpartisipasi. (d) Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan oleh fasilitator untuk meningkatkan kemampuan serta partisipasi komunitas.

Kemudian menurut Najiyati et al. (2005) terdapat perencanaan partisipatif yang dapat dilakukan juga pada kegiatan riset dengan konsep SMART yaitu: (1) *Specific* (spesifik), rencana didesain dengan fokus dan jelas sehingga tidak akan ada interpretasi yang berbeda. (2) *Measurable* (terukur), perencanaan memiliki indikator yang dapat diukur pencapaiannya. (3) *Attainable* (dapat dicapai) dan *agreed* (disepakati). (4) *Realistic* (realistis), sesuatu yang nyata, fakta dan objektif bukan fiktif. (5) *Time bound* (batasan waktu).

Berdasarkan kajian, penelitian dan pelaksanaan pemberdayaan, bahwa terdapat hal yang mendasar dan penting dalam riset pemberdayaan untuk mendesain perencanaan sebagaimana dalam tahapan kegiatan pemberdayaan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Pada intinya desain perencanaan penelitian partisipatif melalui:

(1) Studi pendahuluan dilaksanakan sebagai tahapan awal untuk mendapatkan data, informasi dan fakta, termasuk membuka akses di lokasi penelitian. Studi pendahuluan tahap pertama dapat melalui studi literatur dari hasil-hasil penelitian terutama di jurnal ilmiah sebagai sumber primer, kemudian dari sumber media massa yang kredibel baik cetak maupun online, video dokumenter, analisis dokumen seperti paraturan hukum dan kebijakan.

(2) Studi pendahuluan tahap kedua dengan pembukaan akses ke lokasi penelitian untuk mencari data langsung seperti pengusulan perijinan, pembukaan akses sekaligus melakukan wawancara atau dialog, pengumpulan dokumen dan observasi ke lokasi penelitian. Menurut Alwasilah (2015) dalam penelitian kualitatif dikenal dengan *gaining entry* yang identik dengan "*Kulo nuwun*" atau melakukan perijinan ke lokasi penelitian, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, melakukan pendekatan serta

menjalin pendekatan kepada informan atau responden, sampai membahas dan menyepakati perencanan penelitian.

Pembukaan akses di lokasi penelitian secara akademis metodologis merupakan persyaratan utama dan penting dalam proses penelitian. Karena penerimaan, kedekatan dan keharmonisan antara peneliti dengan subjek penelitian (yang diteliti) menjadi sangat menentukan dalam pelaksanaan penelitian seperti wawancara, penyebaran angket, *Focus Group Discussion* (FGD) atau dirancang dalam bentuk forum dialog yang tidak formal seperti sarasehan, sambung rasa dan musyawarah. Selanjutnya melakukan observasi, mengumpulkan dokumentasi, penerimaan dan kedekatan dengan informan atau responden akan menghasilkan data hasil wawancara yang alamiah. Sehingga dalam penelitian akan terjalin penerimaan, hubungan, keterbukaan dan kerjasama antara penelitian dengan yang diteliti, apalagi untuk penelitian kualitatif dan penelitian partisipatif yang mensyaratkan tidak adanya jarak antara peneliti dengan yang diteliti.

Pembukaan akses juga penting dalam proses penelitian kuantitatif sekalipun mensyaratkan ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti untuk mendapatkan data secara objektif. Namun penerimaan, dukungan dan keterbukaan responden untuk menjawab kuesioner atau angket juga harus diciptakan supaya mendapat data dari hasil jawaban yang jujur dan terbuka.

Jalinan hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus berkesinambungan, artinya interaksi dan relasi terus terjalin sebagai mitra yang bisa saling membantu serta mendukung kegiatan. Hal ini sangat penting dalam rangka memelihara dan memperluas akses jaringan untuk kebutuhan penelitian lanjutan, kegiatan pengabdian masyarakat dan promosi institusi dalam rangka pengembangan pencitraan positif kelembagaan seperti perguruan tinggi untuk lebih dikenal dan terkenal.

Tim peneliti harus dapat menjaga kredibilitas dan menjalin hubungan baik sebagai komunitas yang netral, independen, akomodatif, dan memberikan solusi kongkrit serta membantu menjalin akses dengan berbagai pihak.

Pembukaan akses dan pendekatan humanistik bukan saja sebagai persyaratan awal studi pendahuluan proses penelitian, namun untuk dapat menjaga keberlanjutannya, mengingat proses penelitian memiliki proyeksi jangka panjang dalam penelitian lanjutan dan kegiatan lainnya seperti praktikum, magang, kerja praktik, Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta pengabdian masyarakat. Hasil studi pendahuluan dan pembukaan akses selanjutnya

dibahas atau didiskusikan seperti melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tim, teman sejawat, praktisi dan ahli untuk menghasilkan identifikasi awal, merancang proses dan tujuan penelitian. Desain penelitian pemberdayaan dapat diilustrasikan pada gambar 12 dan gambar 13, serta pembukaan akses pada gambar 14.

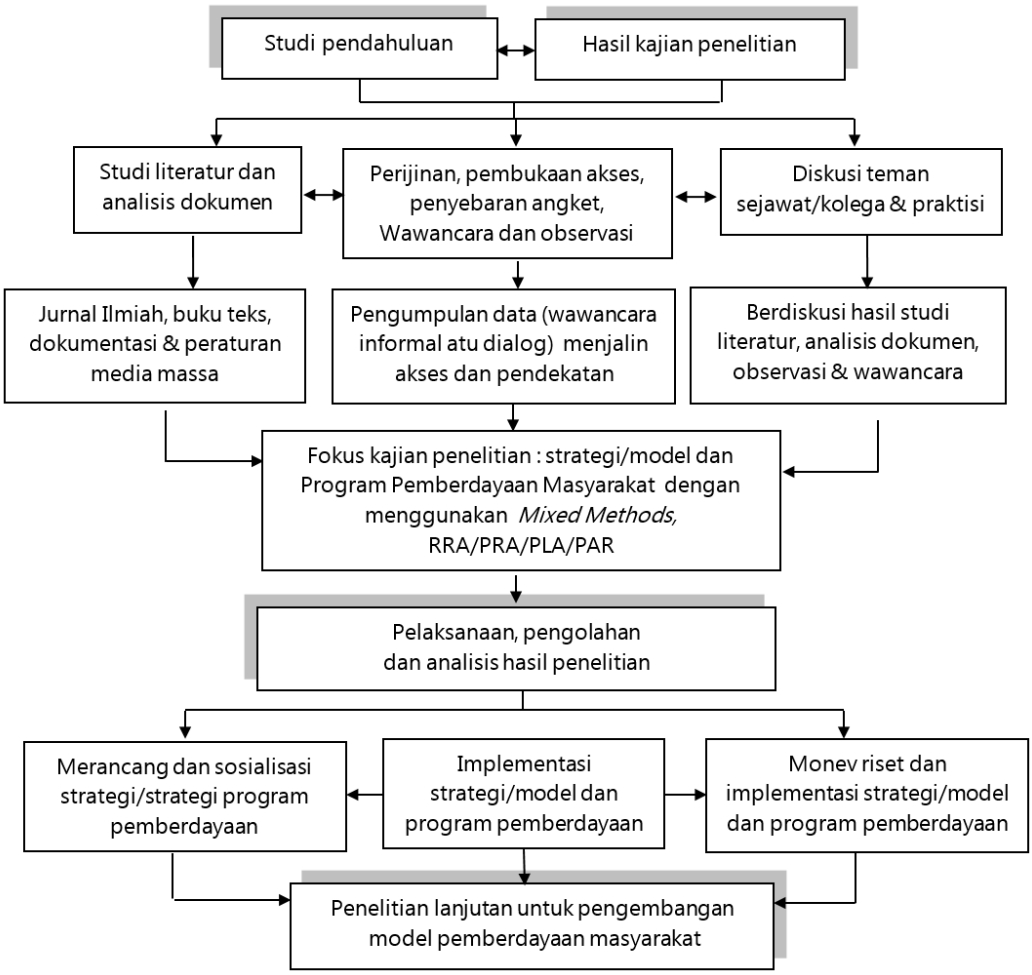

Gambar 12. Desain Penelitian Pemberdayaan 1

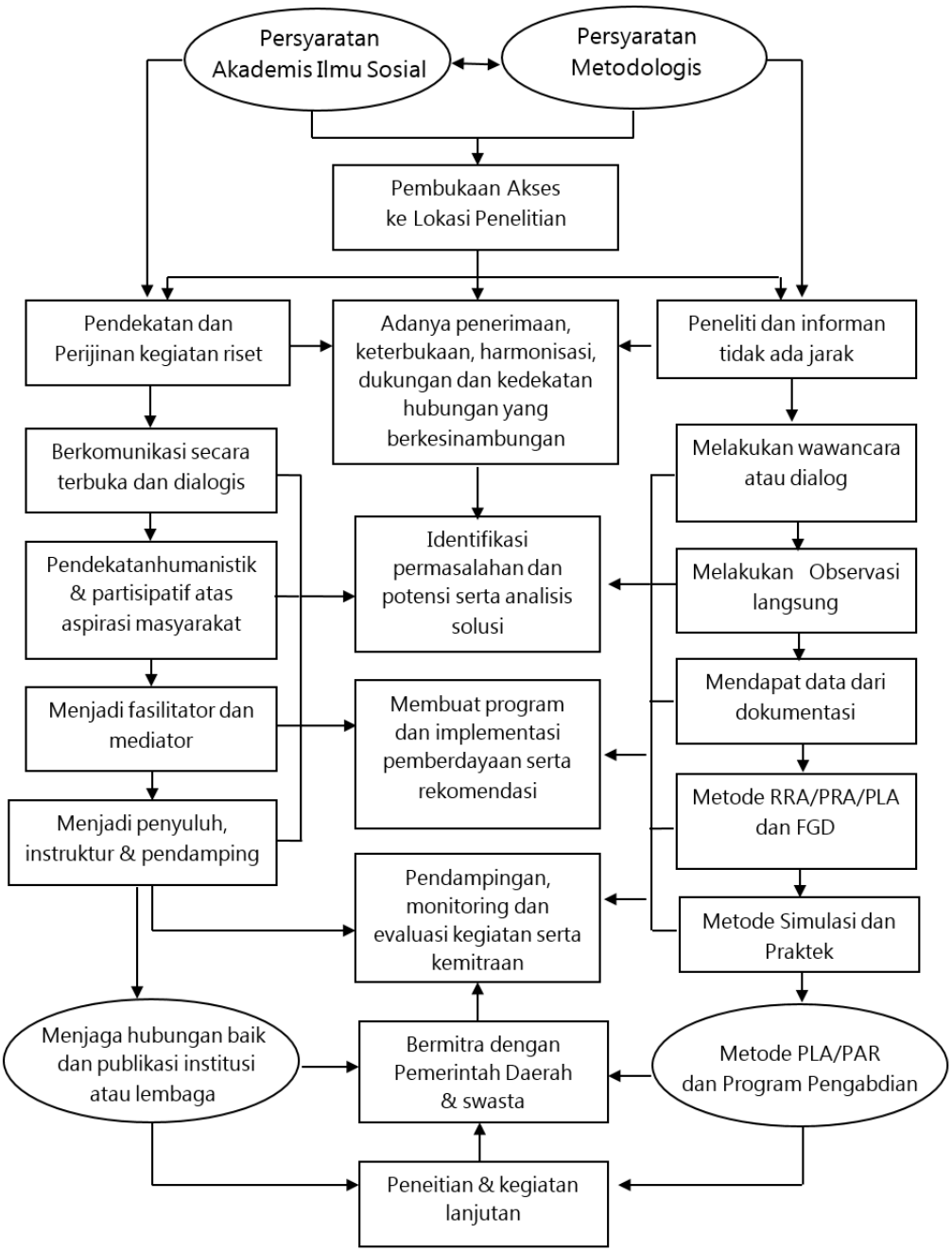

Gambar 13. Desain Penelitian Pemberdayaan 2

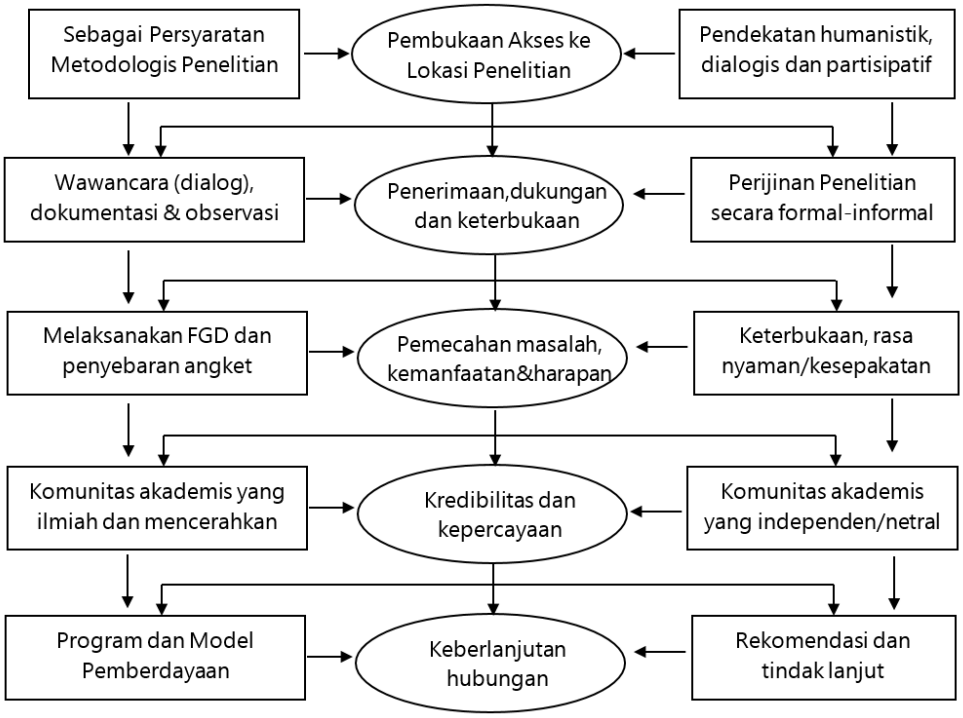

Gambar 14 . Pembukaan Akses Penelitian

7.5. *State of The Art* dan Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Penelitian yang dirancang dan dilakukan terlebih dahulu perlu mengkonstruksi realitas, fakta dan data baik dari studi literatur kemudian di perdalam serta dipertajam oleh kajian hasil studi pendahuluan di lokasi penelitian. Tahapan tersebut merupakan upaya mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan persamaan serta perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu biasanya minimal 5 sampai 10 tahun terakhir yang terbaru (tergantung kebutuhan kedalaman penelitian), sehingga dapat mengkonstruksi rancangan penelitian yang disebut *state of the art,* dan menentukan fokus, rumusan, serta tujuan penelitian sebagai kebaruan dalam penelitian atau *novelty*. Mengkonstruksi rancangan penelitian (*state of the art)* dan menentukan kebaruan penelitian (*novelty*) menjadi penting serta tidak dapat dipisahkan, karena penelitian hakekatnya melakukan pencarian kembali (*re-search*) dengan kata lain mengindentifikasi dan menganalisis temuan penelitian dengan tujuan:

(1) Memiliki bahan referensi yang dapat mendukung dalam perancangan dan studi pendahuluan serta menyusun penelitian.

(2) Menghindari penjiplakan (*plagiarisme*) atas hasil penelitian atau karya orang lain yang sudah ada dan terpublikasi baik disengaja maupun tidak disengaja.
(3) Mengklarifikasi, memperdalam, memperkuat, membandingkan serta menghasilkan temuan-temuan lanjutan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Menentukan persamaan, perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian terdahulu, karena penelitian tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dirancang dan dibangun atau dikonstruksi berdasarkan konsep, teori, metode dan hasil temuan sebelumnya yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan.
(5) Mendukung pada penentuan tujuan penelitian mulai dari mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis, membuat strategi, model, dan program pemberdayaan, implementasi model serta pengembangan model pemberdayaan.
(6) Menentukan keberlanjutan rancangan penelitian dengan membuat peta arah fokus kajian penelitian atau *roadmap* semisal dari 5 tahun terakhir menuju perencanaan penelitian 3, 5 dan sampai 10 tahun kedepan.
(7) Membangun kerjasama penelitian lintas disiplin, lintas institusi, dan lintas generasi sehingga keberlanjutan hasil serta kemanfaatan penelitian dapat saling melengkapi, memperkuat dan lebih bermanfaat.
(8) Membangun etika dan kredibilitas penelitian dan hasil karya yang bermanfaat untuk perkembangan secara akademis berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun bermanfaat secara praktis untuk rekomendasi stakeholder dalam membuat kebijakan sosial dan kebijakan publik, menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

State of the art dan *novelty* penelitian dilaksanakan dengan melakukan tahapan

(1) Studi literatur dengan melakukan review, kajian dan mengumpulan data dari hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen penting dan media pemberitaan yang kredibibel serta *mainstream*. Tahapan ini bisa saja diawali dengan studi pendahuluan ke lokasi riset, sehingga menemukan ketertarikan pada rencana topik, fokus dan permasalahan yang akan diperkuat serta diperdalam studi literatur.

(2) Studi pendahuluan ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data dokumen penting berdasarkan ketertarikan atau minat peneliti pada topik, fokus dan permasalahan yang dirancang dari hasil tahapan studi literatur.

(3) Kajian hasil studi literatur dan studi pendahuluan dengan melaksanakan diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD) dalam tim peneliti, atau dapat melibatkan tim ahli, praktisi, aktivis atau penggiat, informan kunci dan periset lain yang relevan dengan rencana penelitian. Tujuannya mendapatkan informasi, data tambahan, data penting, rekomendasi dan menambah akses jaringan penelitian yang diperlukan dalam menyusun perencanaan penelitian. Proses pembuatan *state of the art* dan *novelty* seperti dalam contoh gambar 15 sampai 16.

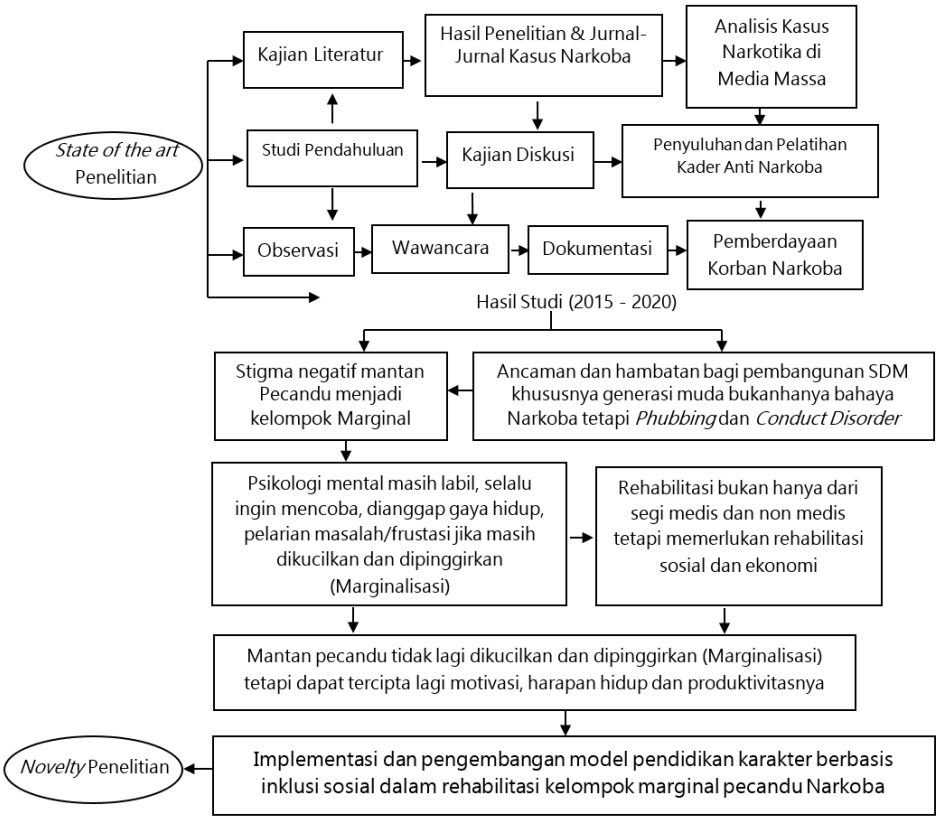

Gambar 15. Contoh *State of the art* dan *Novelty* Penelitian 1

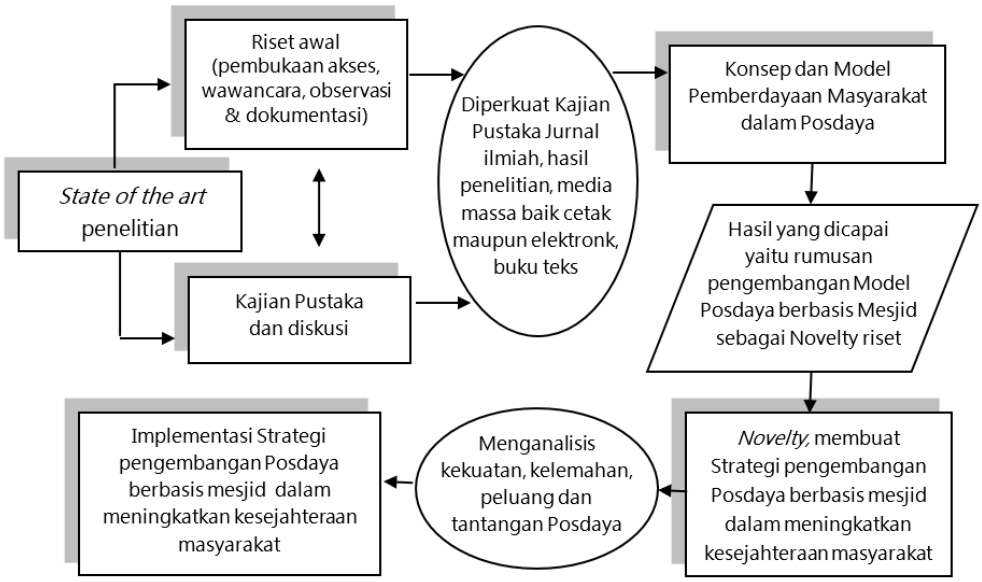

Gambar 16. Contoh *State of the art* dan *Novelty* Penelitian 2

Pembuatan *state of the art* dan *novelty* penelitian dapat dalam bentuk deskripsi dan matrik yang disusun mulai dari hasil penelitian (jurnal ilmiah) tahun paling lama sampai paling terbaru, terdiri dari: (1) Judul, nama penulis atau peneliti dan tahun penelitian, (2) Tujuan penelitian, (3) Teori yang dipergunakan dalam penelitian, (4) Metode penelitian (5) Kesamaan penelitian, (6) Perbedaaan penelitian. (7) Menentukan kebaruan penelitian (*novelty*) yang dideskripsikan pada akhir hasil deskripsi dan matrik penelitian terdahulu. Adapun contoh matrik analisis penelitian terdahulu untuk menyusun *state of the art* dan *novelty* penelitian sebagaimana pada tabel tabel 2.

Tabel 2. Contoh Matrik Analisis Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis, judul dan tahun Jurnal	Tujuan penelitian	Toeri yang dipergunakan	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.						
dst						

Kemudian di akhir matrik ditegaskan kebaruan penelitian (*novelty*) yang akan dihasilkan penelitian berdasarkan *state of the art* dari analisis penelitian terdahulu.

7.6. Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dilaksanakan sepanjang proses penelitian mulai dari studi pendahuluan baik ketika tahapan studi literatur, pembukaan akses, pembahasan dan diskusi hasil tahapan studi pendahuluan. Tahap selanjutnya melakukan pengumpulan data setelah mendapatkan hasil awal, mendapat akses dan dukungan masyarakat sebagai pemetik manfaat di lokasi penelitian. Sebagaimana penelitian lainnya pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

(1) Wawancara mendalam atau lebih tepatnya dialog terbuka dapat menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan (terstruktur) supaya sesuai target yang ingin didapatkan. Namun dalam pelaksanaan wawancara lebih baik secara alamiah berlangsung cair atau tidak kaku, dialogis atau tidak seperti interview dan dapat melakukan komunikasi informal yang lebih terbuka, dekat, dan humanis. Supaya data hasil wawancara lebih orisinil atau alamiah, rekaman visual dan audio visual disembunyikan terlebih dahulu, supaya menghindari pengelolaan pesan dan kesan dari informan. Proses wawancara tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi informan, meminta ijin dan waktu terlebih dahulu untuk dialog. Pembentukan tim wawancara untuk mendapatkan data lebih efektif, seperti satu atau dua informan dilakukan tim pewawancara sebanyak tiga sampai empat orang, supaya ada yang bertugas bertanya dan mencatat hasil wawancara. Tim harus melakukan respon baik yang ramah, sopan, perhatian dan komunikatif. Hindari mengawali wawancara dengan menanyakan data pribadi seperti umur, status pendidikan, penghasilan, tetapi yang ditanyakan adalah pengalaman informan terlebih dahulu supaya terapresiasi, menjadi terbuka dan harmonis, baru identitas informan dapat ditanyakan. Wawancara dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan data, bahkan bisa dilakukan sambil observasi dan ngopi atau makan bersama. Keperluan untuk dokumentasi photo dan video ketika wawancara dapat dilakukan pada tahapan berikutnya setelah data utama didapatkan secara alamiah, bahkan kemasannya dapat berupa liputan wawancara.

(2) Penyebaran angket, dapat dilakukan ketika sebelum wawancara kepada responden, supaya hasilnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan wawancara mendalam atau dialog sebagai verifikasi. Pembuatan angket dapat disesuaikan kalimat yang lebih mudah dipahami oleh responden, dikaji ulang oleh tim dan disimulasikan. Kemudian proses penyebaran angket tetap menggunakan etika interaksi dengan memohon ijin waktu dan kesediaan kepada responden. Angket dibacakan langsung oleh tim peneliti yang sudah ditargetkan pembagian respondennya, angket tidak disimpan atau dititipkan

kepada responden untuk diambil kembali pada waktu yang dikomitmenkan. Hal ini untuk menghindari kualitas data yang tidak akurat, asal mengisi dan tidak tepat sasaran karena yang mengisi bukan responden yang dituju. Sehingga perlu membuat tim penyebaran angket yang ditunjuk dan diberikan sosialisasi petunjuk teknis dalam penyebaran, target waktu serta ditentukan jumlah responden setiap anggota tim. Kecuali responden yang sudah kita anggap mampu memahami atau terbiasa dan kita percayai karena menyangkut kredibilitas baik personal maupun institusional atas nama lembaga, kuesioner dapat diambil kembali sesuai janji, dapat juga melalui email, dan *google form* melalui media sosial dengan syarat sudah diketahui alamat media sosialnya.

(3) Pengumpulan dokumentasi, untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian dengan penelusuran dan perolehan data-data sebagai bukti atau fakta seperti dokumen tertulis, hasil rapat atau kegiatan, peraturan perundang-undangan, dokumen foto atau rekaman gambar (audio visual). Pengumpulan dokumentasi dilakukan setelah peneliti sudah menjalin interaksi, diterima dan didukung sebagai hasil tahapan pembukaan akses dan wawancara. Jika pengumpulan dokumentasi dilakukan di awal kegiatan sebelum ada penerimaan dan kedekatan maka peneliti tidak akan mendapat dokumentasi yang lengkap sesuai kebutuhan.

(4) Pengamatan atau observasi di lokasi penelitian dengan ikut terlibat langsung pada kegiatan penerima manfaat atau informan penelitian seperti proses perencanaan dan pembahasan, kegiatan bercocok tanam, panen, proses pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk. Selanjutnya ada observasi tidak langsung ikut berpartisipasi, artinya peneliti hanya mengamati, menyimak, dan menyaksikan. Kegiatan observasi dapat dilakukan diawal ketika studi pendahuluan, sehingga obervasi dilakukan untuk mendapatkan data awal, mengetahui situasi dan kondisi sebagai bahan penting untuk menyusun serta melaksanakan penyebaran angket dan wawancara. Kegiatan observasi dapat dilakukan ketika proses dan setelah wawancara, penyebaran angket, pengumpulan dokumentasi dan forum dialog atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memverifikasi dan melengkapi data.

(5) Forum dialog dan diskusi dapat dijadikan media untuk pengumpulan data dengan kondisi dan situasi yang informal, penuh keakraban dan keharmonisan dalam bentuk kegiatan sarasehan, sambung rasa dan musyawarah, semua peserta duduk dibawah dan atau menggunakan kursi dengan posisi melingkar yang menandakan kesetaraan, keakraban serta kebersamaan. Hal ini dapat dilaksanakan pada informan penerima manfaat atau komunitas

khususnya di pedesaan, sehingga proses penelitian mengadaptasi kearifan lokal yang sudah ada. Kemudian forum dialog dapat juga dibuat formal dengan istilah *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Participatory Decision Making* (PDM) (Wood, 2008) yang biasanya terdapat peran moderator, panelis, narasumber, dan audiens atau peserta. Namun dalam penelitian partisipatif atau pemberdayaan bentuk forum dialog dan diskusi dapat dilakukan secara informal sekalipun pada komunitas perkotaan, supaya merasakan situasi baru dan seperti di perdesaan yang lebih akrab serta harmonis. Forum dialog dan diskusi dilaksanakan setelah studi pendahuluan, penyebaran angket, wawancara, dan observasi hal ini untuk mendapat data dan informasi lebih komprehensif serta verifikasi data yang telah didapatkan untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Jika forum dialog di FGD dilaksanakan beberapa tahap, maka tahap pertama bisa dilaksanakan untuk penyebaran angket identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan pelatihan dari penerima manfaat atau komunitas. Pelaksanaan FGD tahap dua membahas hasil identifikasi dan analisis FGD tahap pertama. FGD tahap ketiga dapat juga dilakukan PDM untuk membuat dan menyepakati program pemberdayaan, rancangan model serta strategi pemberdayaan. FGD tahap empat dapat dilakukan PDM untuk membahas perencanaan implementasi program, model dan strategi pemberdayaan. FGD kelima mengevaluasi pelaksanaan dan dampak program pemberdayaan. FGD dilaksanakan secara dialogis, partisipatif dan interaktif supaya membangun situasi yang harmonis, terbuka, dan dinamis untuk lebih banyak memberikan kesempatan pada peserta untuk mengungkapkan secara terbuka tanpa paksaan dan merasa nyaman. Desain tempat FGD pada ruangan dan posisi duduk sesuai riset aksi yang partisipatif dan dialogis harus diposisikan dekat, sejajar dan berbentuk melingkar atau seperti huruf "U". Hal ini untuk menumbuhkan situasi kebersamaan, keharmonisan dan kedekatan serta tidak ada jarak antar peserta dengan peserta dan instruktur atau peneliti. Pihak peneliti atau instruktur lebih banyak menjadi fasilitator dan moderator yang mengeksplorasi apa yang menjadi masalah dan potensi sumberdaya, serta kebutuhan dari masyarakat.

Rancangan pelaksanaan forum dialog atau FGD dapat dilihat pada gambar 17.

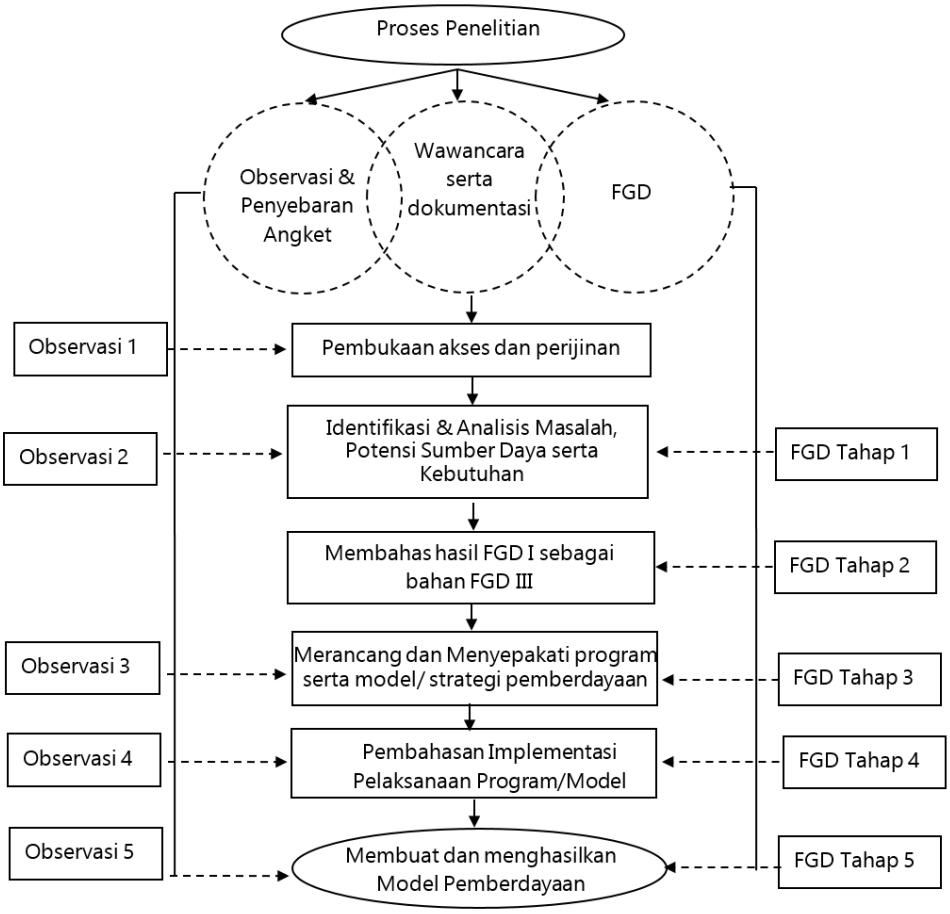

Gambar 17. Proses Penelitian

7.7. Analisis Data Penelitian

Tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan penelitian adalah analisis data penelitian yang sudah didapatkan melalui pengumpulan, pengolahan dan identifikasi data. Namun analisis sementara (mikro) penelitian tetap dapat dilakukan bertahap pada pertengahan proses penelitian supaya tidak menumpuk terlalu banyak data yang harus dianalisis dan dapat mengecek ulang serta membantu pada kompilasi analisis tahap akhir (makro). Analisis penelitian disesuaikan dengan metode penelitiannya, jika menggunakan metode penelitian kuantitatif maka analisisnya bisa berupa analisis deskriptif kuantitatif, analisis dari uji beda, uji korelasi dan regresi. Termasuk analisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya penelitian

partisipatif dalam pemberdayaan dapat dilakukan sebagaimana pada Gambar 19. Tahapan analisisnya yaitu: (1) Mengidentifikasi unsur atau faktor yang menjadi problematika dan potensi sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya alam atau lingkungan. (2) Mencari dan menentukan persamaan serta perbedaan hasil temuan untuk dibuat kategorisasi. (3) Mengecek ulang data dengan verifikasi dan triangulasi sampai data betul-betul akurat dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan riset khususnya dalam metode penelitian kualitatif dan partisipatif, sedangkan dalam metode penelitian kuantitatif menggunakan validitas kecermatan dan keakuratan pengukuran (validitas data) kemudian keunggulan dan konsistensi (reliabilitas data) serta uji hipotesis dengan menggunakan rumus statistik. (4) Verifikasi dan triangulasi terus dilaksanakan sepanjang proses penelitian pada tahap ke-1 pengumpulan data menuju tahap ke-2 pengolahan serta reduksi data. Jika pada tahap ke-3 hasil penelitian sudah sudah didapatkan, maka peneliti melakukan verifikasi dan triangulasi pada subjek penelitian jika masih dinilai kurang atau ingin dilengkapi maka prosesnya kembali pada tahap ke-1 pengumpulan data lalu ke tahap ke-2 untuk menuju tahap ke-3. Analisis data penelitian ini disebut "analisis partisipatif konstruktif", yang mengutamakan pengumpulan data melalui yang dialogis, humanis, terbuka dan egaliter. Proses pengumpulan data melalui wawancara ini, menghindari subjek penelitian atau informan merasa sedang diinterview dengan komunikasi yang dilakukan cenderung formal dan kaku (kurang terbuka), sehingga periset hanya bertanya dengan daftar pertanyaannya dan informan menjawab seperlunya. Data yang diperlukan dari hasil wawancara berupa data yang alamiah atau apa adanya dan jujur, maka rekaman suara dan video tidak diperlukan atau perlu disembunyikan supaya tidak diketahui oleh informan serta mengeliminasi pengelolaan kesan dan pesan dari informan yang cenderung tidak alamiah. Jika tahap ini sudah dapat dilaksanakan, ada kedekatan dan keterbukaan antara periset dengan subjek penelitian, selanjutnya dapat melakukan pengumpulan data melalui FGD dan PDM (5) Menentukan dan menjelaskan sebab dan akibat (kausalitas) sebagai kelanjutan melakukan identifikasi serta deskripsi data. (6) Mengadopsi analisis SWOT untuk menentukan faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, kemudian faktor eksternal tentang peluang dan ancaman atau lebih tepat sebagai tantanggan. (7) Membuat rangking urutan prioritas utama dari hasil identifikasi, membuat aspek-aspek penting, dan kategorisasi. (8) Membuat strategi dan model, kemudian membuat desain program yang melanjutkan strategi dan model yang dihasilkan, serta implemementasi strategi dan model berupa materi, metode serta indikator kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, studi

banding, kemitraan, dan rekomendasi hasil penelitian untuk kebijakan sosial serta kebijakan publik.

Menurut Syahyuti (2006) dalam analisis penelitian partisipatif dilakukan: (1) Prinsip triangulasi, dipergunakan pada metode penelitian, sumber dan disiplin teori serta kajian. (2) Melakukan pencarian kesamaan dan perbedaan. (3) Investigasi dengan identifikasi dan analisis secara langsung bersama masyarakat lokal. Sebagaimana menurut Given (2008) dalam penelitian khususnya metode kualitatif terdapat verifikasi data sebagai proses memastikan representasi data dengan cara memeriksa dan menyesuaikan data yang telah dihasilkan dengan kelengkapan hasil wawancara seperti bukti catatan atau rekaman transkrip wawancara, mengonfirmasi kembali, dan melakukan kajian diskusi sebagai analisis kelompok terarah. Kemudian melakukan triangulasi sebagai cara untuk mendukung dalam pengumpulan dan menganalisis data, menyatukan data (konvergensi) serta membuat kesimpulan. Terdapat empat jenis triangulasi yaitu: (1) Triangulasi metode untuk membandingkan data yang dihasilkan metode penelitian yang berbeda seperti dari metode kualitatif dan kuantitatif. (2) Triangulasi antar peneliti dengan cara membentuk tim periset yang memiliki pengalaman dan bebas dari konflik kepentingan untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang nantinya akan didiskusikan hasilnya sehingga dapat saling mengoreksi, melengkapi serta menyepakati hasil temuan dan analisisnya (3) Triangulasi teori, khususnya dalam penelitian kualitatif menghasilkan konstruksi data dan informasi atau *thesis statement* yang selanjutnya dikaji dan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk mendukung pendalaman pemahaman, kajian dan menghindari bias temuan atau kesimpulan yang dihasilkan peneliti. (4) Triangulasi sumber data dengan mengumpulkan, mengolah dan memeriksa data serta informasi untuk saling melengkapi bukti hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai cara pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumen atau catatan tertulis dan gambar atau foto. Analisis yang sering dipergunakan dalam metode penelitian kualitatif dengan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2014) dengan tiga unsur yaitu: (1) Mereduksi data yang dihasilkan dengan memilih, memusatkan, menyederhanakan dan mengklasifikasikan data dari catatan riset secara tertulis di lokasi riset, yang berlangsung secara berkesinambungan selama proses kegiatan riset. (2) Menyajikan data, sebagai kegiatan mengumpulkan informasi yang dibuat secara tersusun untuk dapat membuat kesimpulan dan penentuan tindakan. (3) Melakukan verifikasi dan menyusun kesimpulan, mulai dari pencarian data, pencatatan keteraturan, model atau pola-pola, dan penjelasan. Kesimpulan juga diverifikasi ulang

selama penelitian dari catatan lapangan, dan hasil diskusi teman sejawat untuk membangun serta mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Analisis data lainnya terdapat dalam Creswell (2013) berupa analisis data model spiral dengan tahapan (1) Melakukan pengumpulan data (*data collection*) yang telah disimpan dan dipilah unit secara teratur atau tersusun dari data primer dan sekunder. (2) Melakukan proses membaca (*reading*) data yang terkumpul dan membuat catatan-catatan (*memoing*) supaya sebagai refleksi dari sejumlah jawaban dari pertanyaan penelitian dan catatan penting supaya mudah diingat. (3) Mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menginterpretasi semua data yang telah dicatat berdasarkan konteks, kategori serta perbandingan. (4) Melakukan representasi dengan merangkum inti hasil temuan dan melakukan visualisasi yang dapat dibuat dalam bentuk matriks, diagram pohon, serta membuat proposisi.

Analisis data model spiral dapat dilihat dalam gambar 18.

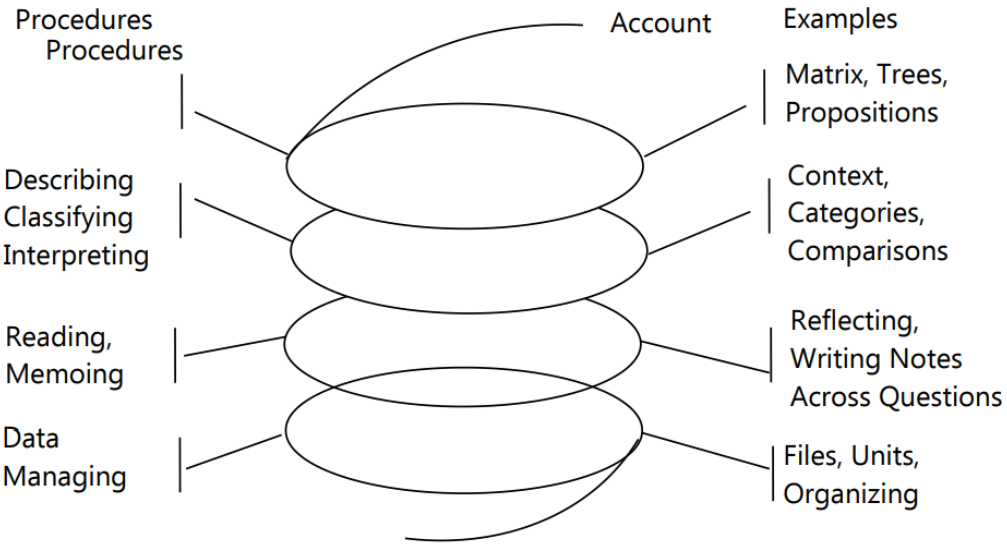

Gambar 18. Analisis Data Model Spiral
Sumber : Creswell (2013)

Berdasarkan dari beberapa konsep, tujuan dan hasil analisis data, maka dapat didesain sebuah model analisis data konstruktif yang diharapkan dapat menjadi rujukan lain untuk model analisis data yang selama ini ada khususnya dalam penelitian kualitatif, sebagaimana pada gambar 19.

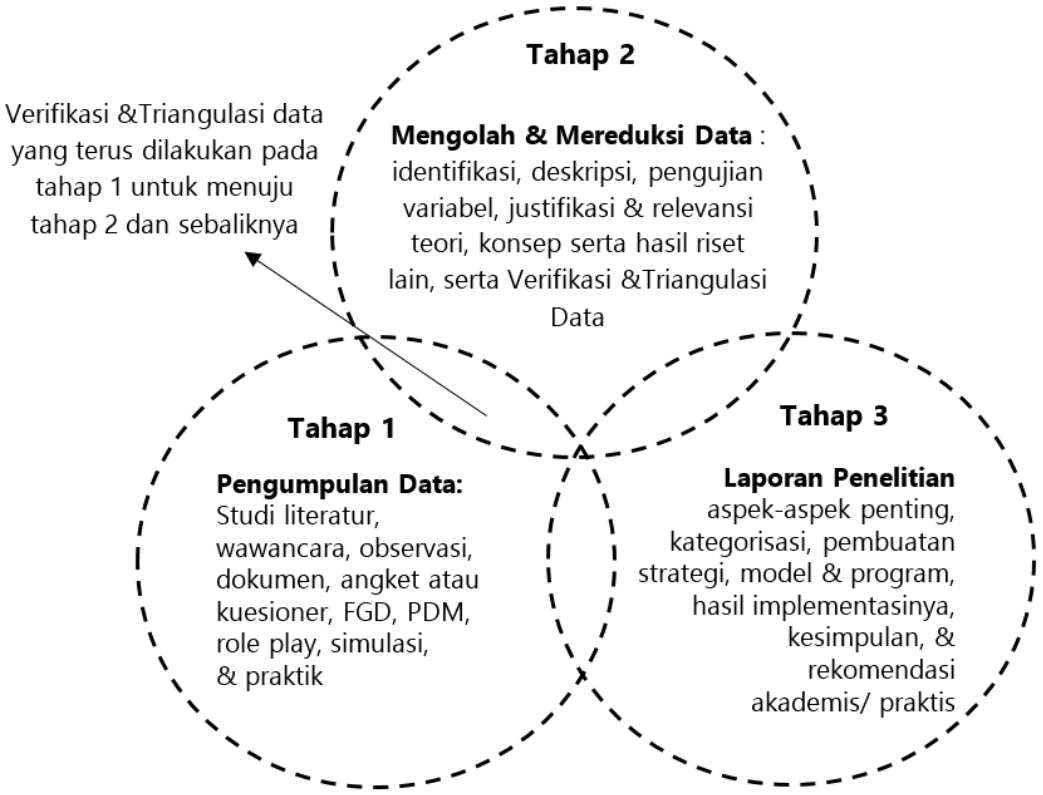

Gambar 19. Model Analisis Data Partisipatif Konstruktif

7.8. Penyajian Laporan

Laporan penelitian pemberdayaan secara prosedur sama dengan penelitian lainnya, namun yang menjadi ciri khas yang membedakan luarannya (*output*) selain berupa deskripsi, eksplorasi dan eksplanasi dan strategi, namun menghasilkan desain atau model pemberdayaan serta program pemberdayaan yang kongkrit dan implementatif. Adapun penyajian laporan secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yaitu: (1) Hasil penelitian umumnya dalam bentuk penjelasan deskriptif yang dilengkapi tabel, matrik, gambar dan grafik hasil pengolahan data kuantitatif dari kuesioner dan atau data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi lembaga serta instansi, dan website resmi. Kemudian deskripsi lokasi penelitian yang bisa bersumber dari data kualitatif semisal hasil observasi dan wawancara atau dialog. (2) Hasil penelitian diawali dari karakteristik geografis seperti letak, luas dan potensi wilayah dan masyarakat. Karakteristik potensi wilayah atau alam seperti luas

lahan pertanian, komoditas pertanian, luas lahan perdagangan, lahan milik desa dan masyarakat. Karakteristik potensi masyarakat atau sumber daya manusia secara umum seperti jumlah penduduk, komposisi penduduk dari jenis kelamin dan usia, status pekerjaan atau mata pencaharian, status pendidikan, bentuk dan jumlah lembaga ekonomi.

(3) Hasil penelitian berupa karakteristik secara khusus yang membahas subjek penelitian (responden atau informan) seperti jumlah subjek penelitian, komposisi jenis kelamin dan umur, mata pencaharian utama dan sambilan, jumlah pendapatan, komoditas atau jenis segmen usaha, lama melakukan usaha, dan pengalaman mengikuti program pemberdayaan.

(4) Hasil penelitian berupa deskripsi proses penelitian mulai persiapan penelitian, studi pendahuluan, pembukaan akses, proses penelitian. Hal ini sebagai konstruksi realitas pengalaman peneliti yang menjadi bukti catatan kegiatan proses penelitian dari awal sampai akhir. Hasil penelitian akan menjadi menarik dan unik karena berisikan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian untuk mencurahkan ekspresi dan situasi dan kondisi selama proses penelitian. Hal inipun dapat menjadi bahan pelajaran dan catatan penting bagi peneliti lainnya jika akan melakukan proses penelitian pendahuluan ataupun penelitian lanjutan di tempat yang sama atau berbeda. Penjelasan hasil penelitian dapat diperkuat dokumentasi photo peneliti ketika proses penelitian.

(5) Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat sub bahasan dari indikator kuesioner dan atau dari hasil wawancara dan FGD yang dilengkapi hasil dokumentasi dan observasi melalui proses analisis, verifikasi dan triangulasi data. Hasil penelitian dapat disajikan secara terpisah antara hasil dengan pembahasan, atau disatukan tergantung ketentuan penyusunan laporan. Jika terpisah maka teknis penyajiannya tetap seperti penyajian hasil penelitian karakteristik wilayah dan subjek penelitian. Sehingga nanti pembahasan penelitian dibuat sub bab tersendiri atau dapat pula disatukan hasil dan pembahasan. Perbedaannya kalau pembahasan memberikan penjelasan atau argumentasi sebab serta akibat dari hasil penelitian yang dilengkapi dan diperkuat kutipan referensi seperti konsep, teori dan hasil penelitian lain terutama jurnal ilmiah.

(6) Pembahasan penelitian dalam pemberdayaan dapat menghasilkan analisis dan strategi program pemberdayaan yang sudah serta akan dirancang atau dilaksanakan berupa identifikasi dan analisis serta strategi, desain atau model program pemberdayaan dari segi (a) Aktor pelaku pemberdayaan, (b)

Proses komunikasi dalam merancang dan melaksanakan pemberdayaan, (c) Sumber daya baik manusia, ekonomi, sosial budaya, alam dan lingkungan, (d) Program materi dan metode pemberdayaan, (e) Media yang dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan, (f) Penerima manfaat (*beneficiaries*) atau sasaran pemberdayaan, (g) Dampak dari pemberdayaan masyarakat.

(7) Daftar pustaka yang berisikan kutipan referensi yang dipergunakan, terutama jurnal ilmiah menjadi sumber primer yang sudah diprioritaskan selain buku teks.

(8) Lampiran penelitian dapat berupa transkrip wawancara atau dialog, kuesioner, dokumentasi photo hasil observasi, dokumen penting dan catatan penelitian.

BAB 8

MODEL DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat memiliki fokus kajian dan pelaksanaan di berbagai bidang untuk menciptakan dan mengembangkan motivasi, pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta kemauan supaya memiliki kekuatan atau berdaya. Pemberdayaan mencakup berbagai kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi, sosial, kesehatan, politik, pertanian, dan budaya, yang dapat dikaji dari pendekatan paradigma, teori dan konsep yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu atau interdisipliner. Sehingga konteks, strategi, model dan program pemberdayaan juga mencakup segala bentuk kehidupan masyarakat.

Model dibuat untuk lebih memahami fenomena komunikasi. Model merupakan representasi suatu fenomena baik yang nyata maupun abstrak dengan menonjolkan unsur terpenting suatu fenomena (Mulyana, 2018). Model sebagai desain atau strategi yang berisikan gambaran tahapan dan unsur penting seperti: (1) Refleksi realitas yang diteliti. (2) Tahapan proses membuat program. (3) Metode dan program yang dihasilkan dan diimplementasikan. (4) Dampak atau hasil yang akan ditargetkan. Berikut ini beberapa contoh program, strategi dan model pemberdayaan berdasarkan hasil kajian, riset dan pelaksanaan pemberdayaan.

Berikut ini beberapa contoh model dan program pemberdayaan sebagai hasil penelitian penulis dan tim peneliti selama 2013-2019.

8.1. Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana

Pemberdayaan masyarakat pasca bencana merupakan deskripsi dari hasil riset Masrukin et al. (2013). Perguruan tinggi sebagai salah satu agen pembaharu (*agent of change)* bagi pembangunan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Tri Dharma perguruan tinggi, salah satunya dengan ikut peduli bencana dan pasca bencana alam baik melalui kegiatan pengabdian masyarakat maupun riset kajian. Sebagaimana menurut Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan adanya pemberdayaan perguruan tinggi sebagai strategi yang mampu memfasilitasi peningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dan pengembangan pengetahuan serta teknologi kebencanaan di tingkat pusat dan daerah serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi diharapkan turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Sebagaimana menurut Lassa et al. (2009) penanggulangan bencana dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab semua pihak secara bersama antara masyarakat dan pemerintah melalui melalui pemberdayaan berbasis komunitas atau masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program.

Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan (Payne, 2014). Realitas kebencanaan seperti contohnya peristiwa bencana erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah, terjadi serangkaian letusan tahun 2011-2013 menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah sebagai bencana nasional dan terbesar sejak letusan 1872, selain mengakibatkan korban luka-luka dan korban jiwa, juga terjadi kerusakan serta mengalami kerugian besar khususnya pada Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten, Boyolali, Magelang dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah.

Peran perguruan tinggi dalam hal ini sebagai contoh pada pasca bencana erupsi gunung merapi dengan program pemberdayaan sebagai berikut: (1) Membentuk dan mengirimkan tim relawan untuk membantu pusat mitigasi bencana perguruan tinggi. Tim relawan melibatkan sukarelawan dosen dan mahasiswa beserta pembentukan tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik mitigasi bencana ke lokasi bencana Gunung Merapi.

(2) Tim relawan merupakan pelaku atau aktor pemberdayaan yang betugas melakukan: (a) Penggalangan sumbangan dana, pengumpulan dan

memberikan bantuan pakaian, kebutuhan pokok sehari-hari dengan melibatkan lembaga yang ada di masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Karang Taruna dan pemerintah desa (rehabilitasi sosial - ekonomi). (b) Membuka posko kesehatan untuk klinik dan konsultasi pengobatan (rehabilitasi kesehatan) yang melibatkan lembaga Posyandu dan Puskesmas. (c) Membuka konseling atau penyuluhan pemulihan trauma *(trauma healing*) sebagai rehabilitasi psikologi dan pendidikan dengan membantu penyelenggaraan proses pengajaran khususnya untuk tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang melibatkan lembaga pendidikan dan pelajar SMP dan SMA atau generasi muda di masyarakat. (d) Membantu dalam proses rehabilitasi fisik khususnya dalam pembangunan di hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) para pengungsi yang bekerjasama dengan BNPB, BPBD dan pemerintah daerah, serta pihak swasta. (e) Membentuk kelompok waspada atau sadar bencana dari masyarakat khususnya generasi muda untuk diberikan penyuluhan dan pelatihan tanggap bencana yang bekerjasama dengan BNPB dan BPBD provinsi ata kabupaten. (f) Melatih dan membentuk tim relawan pusat informasi bencana dari masyarakat yang Poskonya bertempat di rumah warga atau di kantor desa, termasuk penyediaan peralatan dan perlengkapan pemancar akses komunikasi telpon dan internet serta radio komunitas. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan BNPB, BPBD dan Dinas komunikasi dan informasi.

(3) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian tentang penanggulangan bencana dan pasca bencana dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder sehingga menghasilkan rekomendasi dan agenda kegiatan yang dapat dijadikan kegiatan rehabilitasi bencana yang berbasis partisipatif. Penelitian dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, kebutuhan dan potensi masyarakat pasca bencana. Hasil penelitian bermanfaat untuk ditindaklanjuti kegiatan riset lanjutan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

(4) Perguruan tinggi melaksanakan kerjasama untuk rehabilitasi psikologi, sosial dan ekonomi pasca bencana dengan berbagai pihak baik pemerintah dalam hal ini dari BNPB, BPBD, dan dinas terkait seperti dinas kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, koperasi dan usaha kecil. Kemudian dengan aktivis dan pemerhati lembaga relawan mitigasi bencana dari *civil society*, termasuk pihak swasta untuk menyalurkan bantuan. Rehabilitasi tersebut dapat berupa kegiatan pemberdayaan khususnya bidang sosial dan ekonomi berdasarkan hasil penelitian serta kajian. Program pemberdayaan yang dilakukan seperti membentuk dan menumbuhkan lagi lembaga-lembaga sosial ekonomi di masyarakat supaya melanjutkan kegiatan produktivitas

pertanian, peternakan, ekonomi dan perdagangan. Maka strategi pemberdayaan dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan kemitraan.

(5) Perguruan tinggi membuat materi kurikulum dan merekomendasikan kepada dinas pendidikan dan sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memasukkan mata pelajaran kebencananaan dan manajemen mitigasi bencana ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran tambahan atau muatan lokal. Sehingga masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kewaspadaan terhadap bencana.

(6) Perguruan tinggi membuat materi penyuluhan dan pelatihan tentang kebencanaan dan manajemen kebencanaan di lokasi rawan bencana yang bekerjasama dengan BPBD dan aktivis penggiat mitigasi bencana untuk diberikan pada organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kelompok sadar bencana di desa, organisasi masyarakat (Ormas), Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Pecinta Alam (PA) dan lain sebagainya.

(7) Perguruan tinggi dapat melakukan kajian ilmiah seperti seminar nasional dan internasional, diskusi publik, dan workshop tentang kebencanaan sehingga hasil kajian dapat dijadikan laporan dan rekomendasi penting untuk penelitian dan pengabdian masyarakat lanjutan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini contoh penelitian dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam konteks pasca bencana dengan melalui proses penelitian diantaranya pembukaan akses, perijinan, studi pendahuluan, dan merancang program, kemudian implementasi kegiatan. Berikut ini contoh proses penelitian mulai dari studi pendahuluan, pembukaan akses dan desain pelaksanaan penelitian, kemudian strategi dan model kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca bencana.

Adapun contoh proses penelitian pemberdayaan selama 3 tahapan atau 3 tahun kegiatan sebagai berikut:

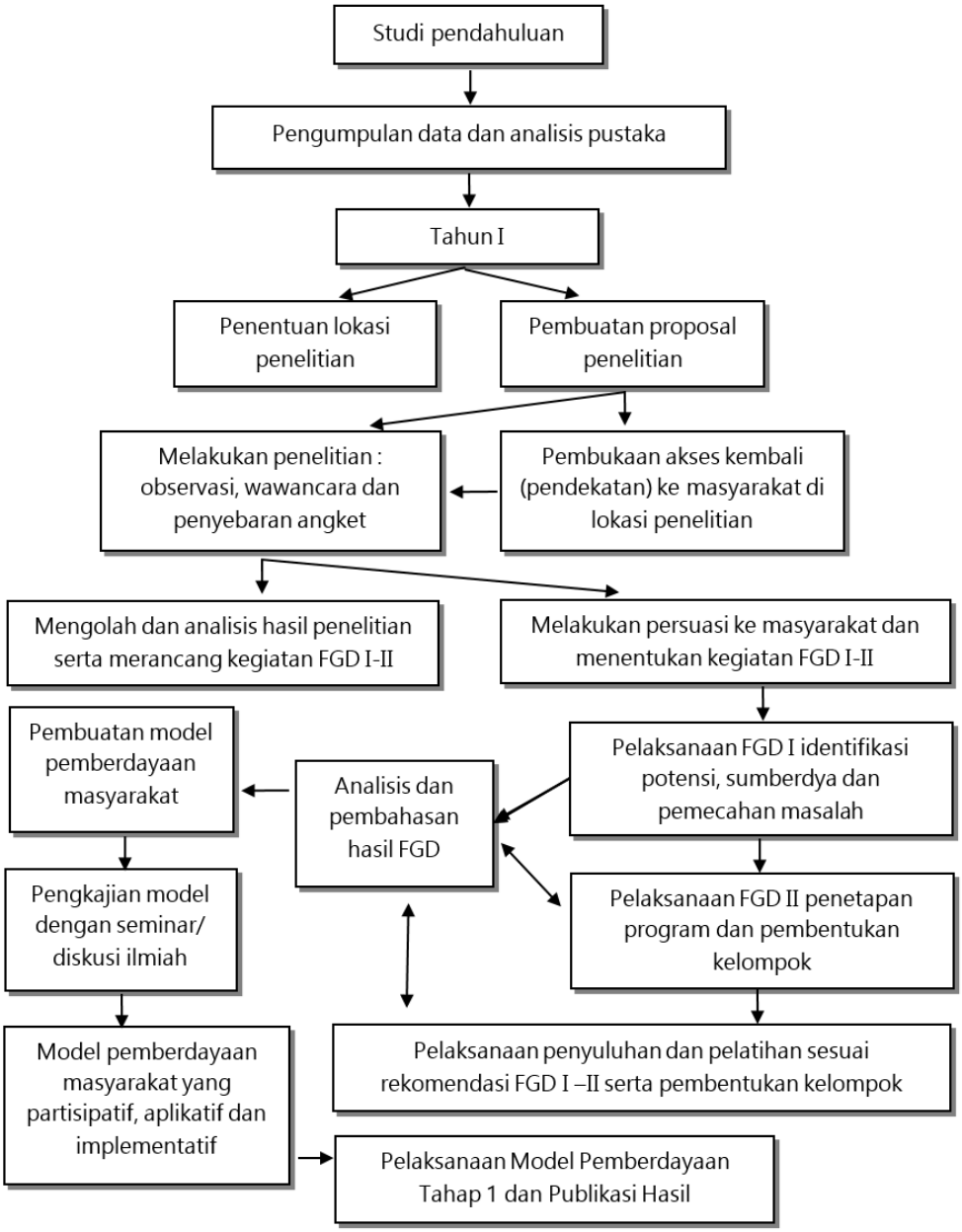

Gambar 20. Proses Penelitian Pemberdayaan Tahap I

Tabel 3. Indikator Kegiatan Penelitian Tahap I

No	Kegiatan Penelitian	Indikator
1.	Studi pendahuluan dan kajian pustaka	• Lokasi penelitian dapat ditentukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. • Proposal dapat dibuat dengan metodologi yang tepat
2.	Pembukaan akses kembali dan atau pendekatan ke lokasi penelitian	• Peneliti dapat diterima dan berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka dan akrab • Respons masyarakat sangat menyambut baik tujuan dan maksud peneliti
3.	Melakukan wawancara, observasi dan penyebaran angket	• Peneliti dapat berdialog (wawancara) dan menyebarkan angket dengan masyarakat secara intens dan terbuka • Masyarakat bersedia dan bersedia diwawancara dan mengisi angket
4.	Mengolah dan menganalisis hasil penelitian	• Hasil penelitian berupa identifikasi, motif, potensi, masalah dan sumberdaya dapat dilaporkan • Menghasilkan konsep/program untuk merancang kegiatan FGD tahap I dan II
5.	Melakukan persuasi kepada masyarakat melaksanakan FGD I-II	• Masyarakat memahami dan bersedia mengikuti kegiatan FGD I dan II • Kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan FGD I dan II
6.	Pelaksanaan FGD I	• Masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan FGD I • Diperoleh identifikasi motif, masalah, potensi dan sumber daya masyarakat
7	Analisis hasil pelaksanaan FGD I	• Diperoleh identifikasi motif, masalah, potensi dan sumber daya masyarakat • Dapat merancang kegiatan FGD II dan hasil untuk model pemberdayaan
8	Pelaksanaan FGD II	• Menghasilkan program pemberdayaan masyarakat yang disepakati • Pembentukan kelompok pemberdayaan • Masyarakat termotivasi (semangat) dan terjalin kekompakan

No	Kegiatan Penelitian	Indikator
9.	Pengolahan dan analisis formulasi hasil FGD I dan II	• Diperoleh program pemberdayaan yang diusulkan masyarakat • Terbentuknya kelompok pemberdayaan • Dihasilkan model pemberdayaan masyarakat
10.	Penyuluhan dan Pelatihan	• Peserta (kelompok pemberdayaan) mengerti, dan memahami hasil penyuluhan dan pelatihan • Peserta termotivasi untuk melakukan program pemberdayaan
11.	Pembuatan laporan penelitian dan model pemberdayaan	• Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan • Didapat masukan dan rekomendasi atas hasil seminar untuk penyempurnaan model pemberdayaan • Laporan hasil model pemberdayaan yang partisipatif, aplikatif dan implementatif untuk dilaksanakan tahun ke-2
12.	Publikasi dan rekomendasi hasil penelitian	• Hasil penelitian dapat dibuat dan diajukan jurnal dan dipresentasikan di seminar dan menghasilkan prosiding • Hasil penelitian dipublikasi di media seperti webiste, Youtube, dan media pemberitaan • Audiensi dengan stakeholder untuk merekomendasikan kebijakan sosial dan kebijakan publik

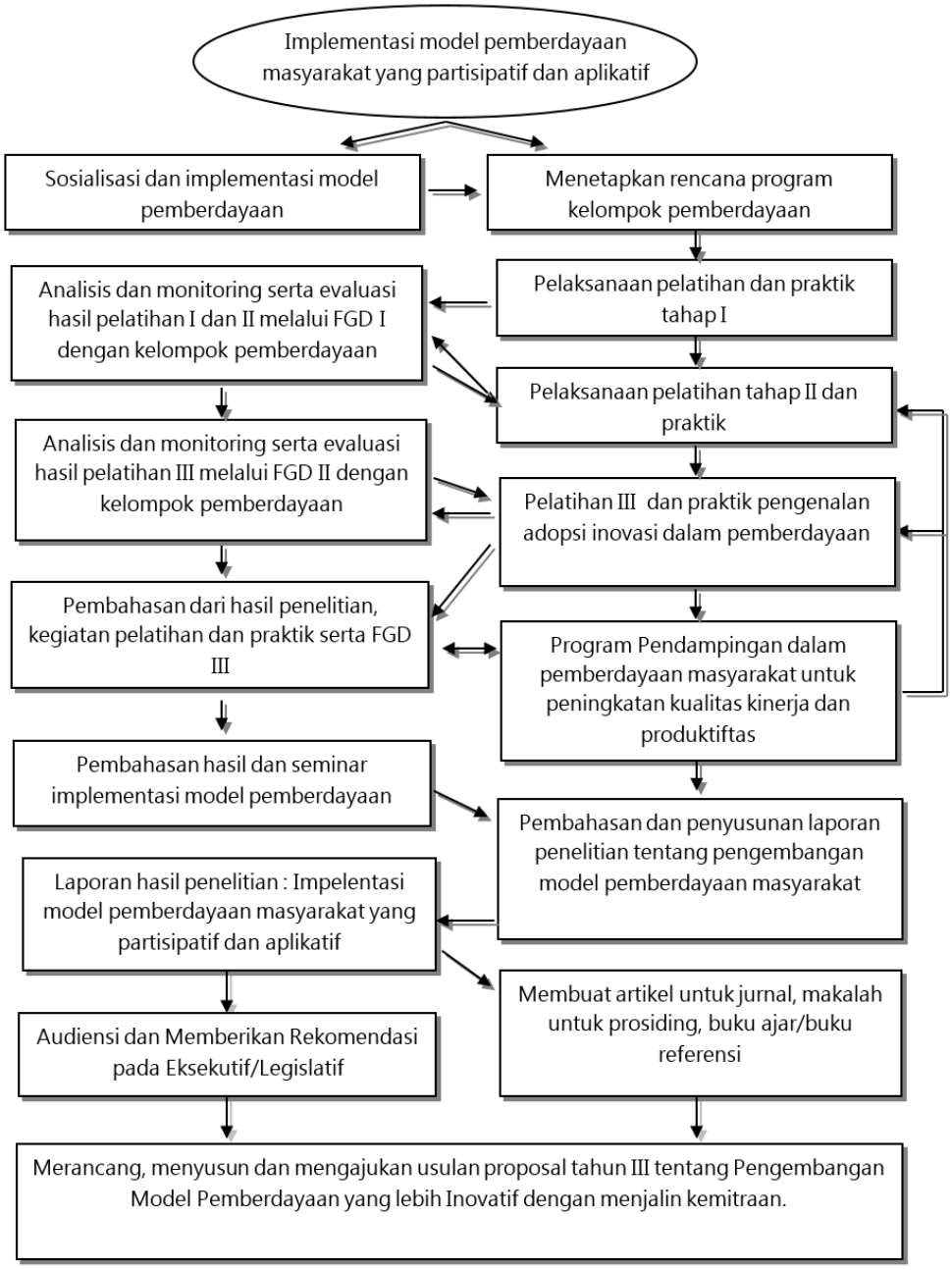

Gambar 21. Proses Penelitian Pemberdayaan Tahap 2 dan 3

Tabel 4. Indikator Kegiatan Penelitian Tahap 2 dan 3

No	Kegiatan Penelitian	Indikator
1.	Sosialisasi implementasi model pemberdayaan dan pelaksanaan FGD I	Kelompok pemberdayaan (peserta) dapat mengetahui, mengerti dan memahami program-program model pemberdayaan yang dihasilkan dan ditawarkan Peserta bersedia untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tahap I dan II sesuai program model pemberdayaan
2.	Pelaksanaan pelatihan dan praktik tahap I	Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Peserta berpartisipasi, termotivasi, terinspirasi dan memahami program yang akan dan sedang dijalankan
3.	Mengolah dan menganalisis hasil pelatihan dan praktik tahap I	Hasil pengolahan dan analisis serta evaluasi pelaksanaan pelatihan tahap I Merancang dan membuat program pelatihan dan praktik tahap II
4.	Pelaksanaan pelatihan dan praktik tahap II	Peserta selain dapat mengerti dan memahami juga dapat melakukan pelatihan yang dibutuhkan bagi pemberdayaan Peserta menghasilkan produk hasil kelompok kerja dan dapat meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan Peserta mendapatkan modul pelatihan untuk pegangan peserta (kelompok kerja) dalam menjalankan kerja pemberdayaan
5.	Mengolah dan menganalisis hasil pelatihan dan praktik tahap II	Hasil pengolahan dan analisis serta evaluasi pelaksanaan pelatihan tahap dan praktik II untuk laporan penelitian Program pelatihan dan praktik III pengenalan adopsi inovasi dapat diimplementasikan

No	Kegiatan Penelitian	Indikator
6.	Melaksanakan FGD II	Peserta memahami dan bersedia mengikuti kegiatan FGD II Peserta dapat mengevaluasi dan menganalisis perkembangan kualitas dan produktivitas program pemberdayaan Peserta dapat menentukan kebutuhan adopsi inovasi untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat
7.	Pelaksanaan pelatihan tahap dan praktik tahap III pengenalan adopsi inovasi	Peserta hadir dan berpartisipatif dalam kegiatan pelatihan dan praktik III Peserta memiliki peningkatan kualitas kemampuan produktivitas Peserta dapat lebih mengerti, memahami dan mempraktikan pengenalan adopsi inovasi Penghasilan dan kesejahteraan masyarakat meningkat
8	Pelaksanaan pendampingan program pemberdayaan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi perkembangan program pemberdayaan dapat dibuat Peningkatan kualitas dan produktivitas kelompok kerja dalam program pemberdayaan masyarakat Peningkatan kesejahteraan kelompok pemberdayaan dan masyarakat secara umum
9	Pelaksanaan FGD III	Masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan FGD III Masyarakat dapat melaporkan dan memahami perkembangan kualitas serta produktivitas program pemberdayaan
10.	Pengolahan, analisis dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan FGD II dan formulasi pelatihan serta praktik Tahap I, II dan III	Hasil pengolahan dan analisis dapat dijadikan laporan penelitian Model pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan secara partisipatif, aplikatif, dan inovatif

No	Kegiatan Penelitian	Indikator
11.	Pengkajian dan laporan hasil pengembangan model pemberdayaan masyarakat	Menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan model pemberdayaan Laporan penelitian dapat dibuat untuk pengembangan model pemberdayaan yang partisipatif, aplikatif, dan inovatif untuk penelitian lanjutan
12.	Publikasi hasil penelitian	Menyelenggarakan seminar hasil penelitian Hasil penelitian dapat dibuat dan diajukan ke Jurnal, media pemberitaan online, dan buku
13.	Audiensi dan Rekomendasi	Melakukan audiensi kepada pihak terkait baik pemerintah daerah, BPBD, maupun legislatif untuk berdiskusi/berdialog tentang hasil penelitian Memberikan rekomendasi hasil penelitian kepada pihak pemerintah daerah
14.	Penyusun dan Pengajuan penelitian lanjutan	Merancang, menyusun dan mengajukan usulan penelitian lanjutan tentang pengembangan model pemberdayaan yang lebih Inovatif dengan menjalin kemitraan.

Berikut ini contoh model dan realisasi program pemberdayaan masyarakat pasca bencana erupsi gunung merapi (Masrukin et al., 2013).

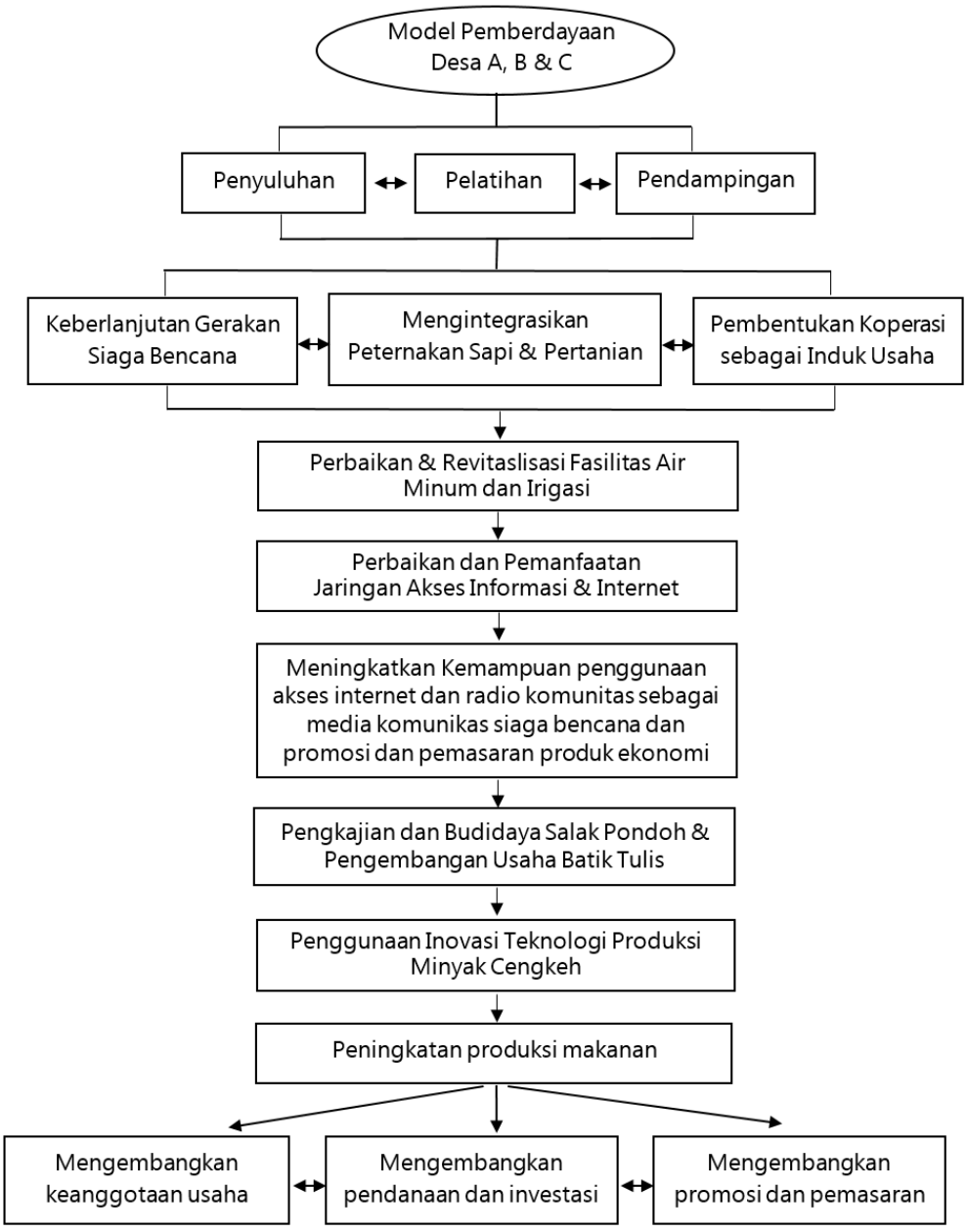

Gambar 22. Model Pemberdayaan Desa A, B & C
Sumber: Dimodifikasi dari Masrukin et al. (2013)

Tabel 5. Realisasi Bentuk Pemberdayaan Desa A

Prioritas	Program Pemberdayaan	Bentuk Program Kegiatan di Desa A
Pertama	Keberlanjutan Gerakan Kelompok Siaga Bencana	Melakukan (1) penyuluhan dan pendekatan yang lebih komprensif, mulai dari unsur psikologis, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat yang masih menolak untuk direlokasi; (2) Penyuluhan dan pelatihan lanjutan secara periodik Kelompok Siaga Bencana tentang pendeteksian dan peringatan dini terhadap bencana
Kedua	Mensinergikan bidang usaha peternakan dan pertanian organik mulai dari proses produksi sampai pemasaran	Melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang : (1) peternakan sapi seperti penggemukan dan pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik dan bio gas sebagai inovasi bagi pertanian; (2) pertanian organik sayur mayur seperti peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil, label, pengemasan dan pemasaran
Ketiga	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi sebagai induk lembaga ekonomi masyarakat	Melakukan pelatihan, pembentukan dan pendampingan koperasi kepada kelompok usaha seperti : (1) Manajemen administrasi dan keuangan Koperasi; (2) Strategi pengembangan keanggotaan dan produk yang akan dipasarkan
Keempat	Rekomendasi dan mengusulkan kepada pihak pemerintah dan DPRD	(1) Mendapat Pendampingan dan pembinaan siaga bencana di tingkat desa secara periodik; (2) Mendapat pendampingan dan bantuan (produksi serta pemasaran) bagi peternak sapi dan petani sayur organik; (3) Pendampingan atau pembinaan pembentukan koperasi;
Kelima	Revitalisasi infrastuktur fasilitas umum seperti irigasi, air bersih, dan air minum	Memfasilitasi pengusulan perbaikan fasilitas air bersih dan irigasi lahan pertanian kepada pemerintah dan DPRD melalui Desa atas rekomendasi hasil riset

Prioritas	Program Pemberdayaan	Bentuk Program Kegiatan di Desa A
Keenam	Perbaikan dan Pelatihan pemanfaatan jaringan internet bagi kelompok usaha dan perangkat desa serta bagi Tim Siaga Bencana	Melakukan pelatihan pemanfaatan fasilitas jaringan internet untuk (1) Komunikasi (penyuluhan dan media informasi) siaga bencana; (2) Membantu pemasaran (3) Membentuk radio komunitas dan media komunikasi masyarakat

Tabel 6. Realisasi Bentuk Pemberdayaan Desa B

Prioritas	Agenda Pemberdayaan	Bentuk Program Kegiatan di Desa B
Pertama	Pembentukan Koperasi sebagai induk kegiatan usaha ekonomi bersama	Melakukan pelatihan, pembentukan dan pendampingan di tingkat desa seperti (1) Pelatihan Manajemen administrasi dan keuangan Koperasi; (2) Pendampingan dan pengusulan Koperasi yang berbadan hukum (3) Pelatihan manajemen strategi pengembangan (promosi) untuk peningkatan jumlah keanggotaan dan produk yang akan dipasarkan; (4) Penggalangan dana untuk modal perkoperasian
Kedua	Pengkajian dan reboisasi lahan untuk budidaya salak pondoh	Melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang : (1) Fungsi lahan untuk salak pondoh (2) Budidaya salak pondoh
Ketiga	Pemanfaatan jaringan serta manajemen radio komunitas bagi Tim Siaga Bencana dan perangkat desa	Melakukan pelatihan dan pendampingan manajemen radio komunitas seperti (1) Manajemen organisasi, produksi siaran radio (2) Teknik penyiaran (3) Strategi promosi (Periklanan) produk usaha dan kampanye untuk tangggap siaga bencana

Prioritas	Agenda Pemberdayaan	Bentuk Program Kegiatan di Desa B
Keempat	Revitalisasi air bersih, jalan dan irigasi	Memfasilitasi pengusulan perbaikan fasilitas air bersih, irigasi dan jalan umum kepada pemerintah dan DPRD melalui pemerintah desa berdasarkan rekomendasi hasil riset
Kelima	Pengembangan usaha batik tulis khas lokal	Memberikan pelatihan tambahan dan pendampingan tentang (1) Peningkatan kemampuan membatik baik variasi motif maupun kualitas produk dari segi pewarnaan dan finsihing; (2) Label dan pengemasan produk batik. (3) Strategi pemasaran batik (3) Membantu akses permodalan dan pemasaran kepada investor dan pangsa pasar yang lebih luas. (4) Pengembangan pewarnaan alami. (5) Manajemen limbah pewarnaan batik supaya lebih ramah lingkungan (6) Mengikutsertakan dalam pameran-pameran di perkotaan. (7) Pemasaran melalui media sosial

Tabel 7. Realisasi Bentuk Pemberdayaan Desa C

prioritas	Agenda Pemberdayaan	Bentuk Program Kegiatan di Desa C
Pertama	Inovasi teknologi produksi pengolahan, label, pengemasan dan pemasaran minyak cengkeh	Melakukan pelatihan dan pendampingan (1) Teknik penyulingan minyak cengkeh ; (2) Teknik pengemasan dan pemasaran minyak cengkeh (3) Proses sertifikasi resmi uji laboratorium minyak cengkeh
Kedua	Produksi pakan untuk peternakan sapi	Melakukan program sosialisasi, penyuluhan, simulasi, pelatihan serta pendampingan tentang : (1) Proses memproduksi pakan sapi (2) Peningkatan kuantitas ternak sapi; (3) Penyediaan alat produksi pakan sapi

prioritas	Agenda Pemberdayaan	Bentuk Program Kegiatan di Desa C
Ketiga	Peningkatan produksi usaha makanan olahan khusus untuk kaum perempuan atau ibu rumah tangga	Melakukan pelatihan dan pendampingan (1) Peningkatan produksi makanan olahan dari pisang dan umbi-umbian; (2) Label, pengemasan dan pemasaran produk makanan olahan; (3) Penyediaan bahan baku makanan olahan; (4) Pendampingan dan memfasilitasi untuk mendapat modal tambahan (5) Pendampingan pemasaran produk melalui media sosial
Keempat	Pembentukan Koperasi sebagai induk kegiatan usaha ekonomi bersama	Melakukan Pelatihan, pembentukan dan pendampingan di tingkat desa seperti (1) Pelatihan manajemen organisasi, administrasi dan keuangan Koperasi; (2) Pelatihan manajemen strategi pengembangan keanggotaan, unit usaha dan produk yang akan dipasarkan;

Berdasarkan model dan program pemberdayaan dari tiga lokasi tersebut, dapat digabungkan untuk mendeskripsikan secara umum tentang contoh model pemberdayaan masyarakat pasca bencana erupsi gunung merapi sebagai berikut:

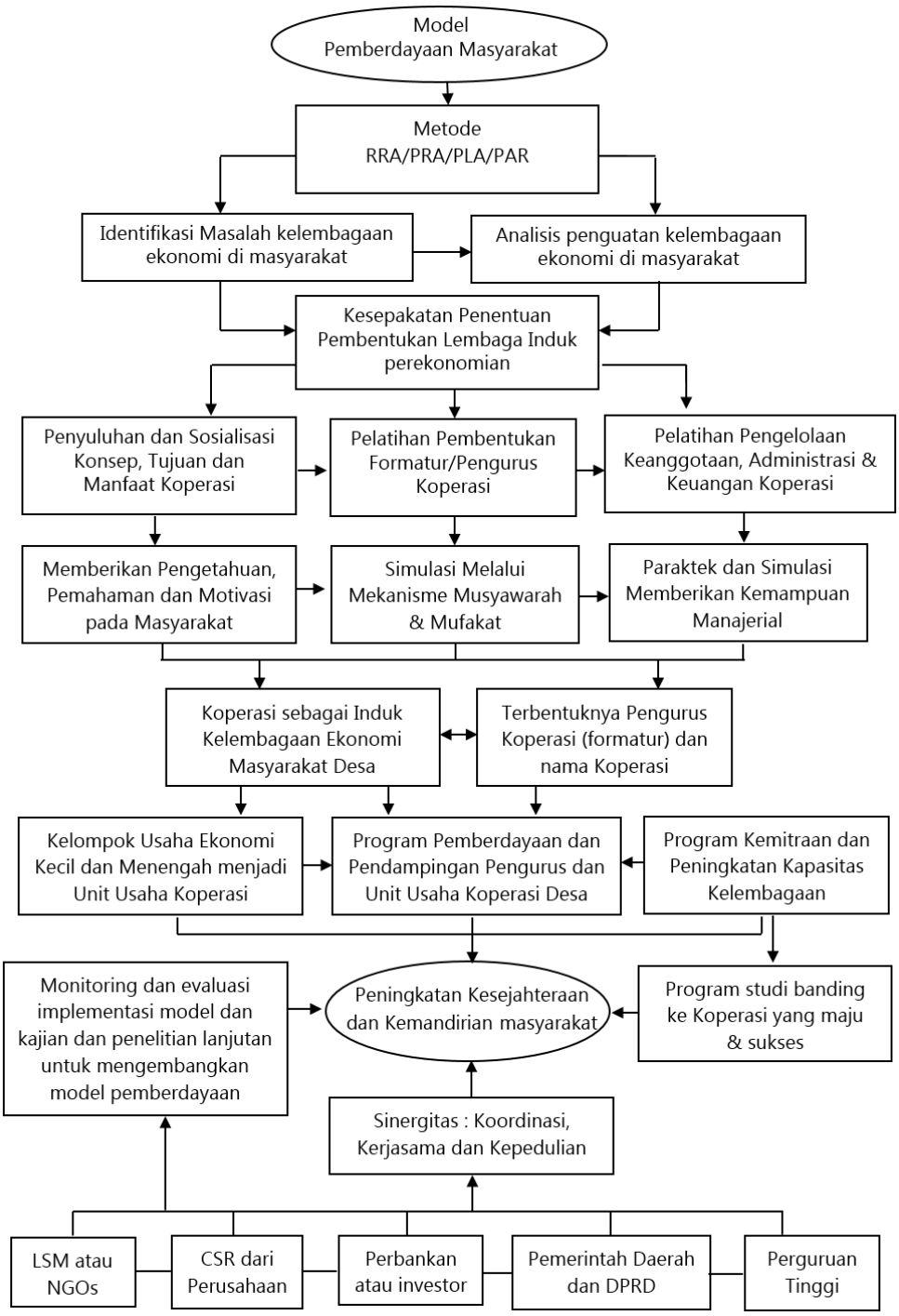

Gambar 23. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelembagaan Koperasi

8.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Relokasi Pembangunan

Proses pembangunan infrastruktur seperti membuat bendungan akan memiliki konsekuensi yang tidak sederhana, seperti timbulnya konflik karena merelokasi memiliki konsekuensi memindahkan masyarakat dengan segala bentuk kehidupannya, baik secara fisik seperti rumah sebagai tempat tinggal, lahan produktif sebagai penghidupan ekonomi, semua fasilitas umum dan infrastuktur. Kemudian secara non fisik seperti aspek sejarah kehidupan yang sudah sejak lama yang berhubungan dengan aspek perasaan dan emosi masyarakat yang sudah tertanam sejak lama sebagai tempat dilahirkan dan penghidupan dengan keluarga, kelompok dan masyarakat secara umum (aspek psikologis dan historis), termasuk aspek ekonomi seperti sumber mata pencaharian dari bertani, berkebun, berternak, dan berdagang (aspek sosial ekonomi). Dengan demikian membutuhkan pembangunan relokasi dengan pendekatan yang harmonis, partisipatif dan bersinergi antara masyarakat yang terkena dampak pembangunan, pemerintah, dan *civil society* dalam hal ini perguruan tinggi serta aktivis penggiat dalam proses pembangunan kembali secara fisik dan non fisik.

Pendekatan pembangunan yang tepat melalui pemberdayaan atau pembangunan partisipatif. untuk menghindari konflik antar masyarakat dan konflik dengan pemerintah, dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik di lokasi atau wilayah desa yang baru. Maka dalam melakukan relokasi masyarakat perlu memperhatikan aspek keterbukaan dan partisipatif, supaya program dapat bermanfaat untuk masyarakat, berkelanjutan dan dipertangungjawabkan. Indikasinya masyarakat aktif melibatkan diri dalam identifikasi, perumusan, dan membuat solusi alternatif pembangunan.

Bentuk pembangunan partisipatif dalam kasus relokasi dengan adanya tuntutan masyarakat dan pemerintah desa menuntut ada hak untuk mengusulkan dan menentukan dalam proyek pembangunan relokasi seperti semua situs budaya yang ada dapat dipertahankan dan dilestarikan, menjadi percontohan kelompok adat yang berhasil melindungi hutan adat dan ekosistem yang ada di dalamnya.

Relokasi secara prinsip telah disepakati antara masyarakat dengan pemerintah bahwa prinsip relokasi adalah ganti untung bukan ganti rugi. Masyarakat memahami prinsip ini dapat meminimalisir kerugian relokasi, yang tidak mudah dapat menggantikan apa yang telah dimiliki dan dibangun selama ini baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan bendungan

jangan menimbulkan resistensi dan kemiskinan baru bagi masyarakat yang terkena dampak. Beberapa prinsip penting dalam rencana relokasi adalah mempertimbangkan potensi lokasi pindahan warga yang sebelumnya sudah memiliki kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Masyarakat yang terkena relokasi pembangunan sudah beberapa kali melakukan musyawarah dalam forum komunikasi antar warga dan dengan pemerintah, karena belum ada kepastian waktu dan kesepakatan. Maka masyarakat membuat surat pernyataan sikap yang telah dikirimkan ke pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang intinya: (1) Pemerintah diminta untuk melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan rencana pembangunan yang hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat. (2) Pemerintah dapat memastikan waktu pembangunan dan relokasi kepada masyarakat supaya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian. (3) Penggantian tanah, sawah, kebun, dan tanaman produksi bukan di hitung jumlah dan masa produksinya. Penggantian pekarangan, bangunan rumah, bangunan milik desa, bangunan perusahaan milik warga, yang digunakan akses jalan, lahan perkantoran, dengan harga disesuaikan dengan kesepakatan pemerintah daerah dengan warga masyarakat. (4) Tempat relokasi sebagai tempat pemukiman baru dapat juga menyediakan lahan produktif yang baru. (5) Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek agar mengutamakan warga setempat yang dapat menjadi pekerjanya. (6) Proses pembayaran penggantian kepada masyarakat agar dapat langsung antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tidak melalui calo yang memiliki kepentingan mendapat keuntungan. (7) Warga masyarakat yang terkena dampak relokasi pembangunan diberikan ijin tempat usaha di sekitar lokasi bendungan dan pariwisata.

Pada prinsipnya, masyarakat yang telah mengetahui sejak lama dari informasi orang tua tentang perencanaan relokasi dan pembangunan bendungan secara turun temurun. Masyarakat sebetulnya sudah bersedia dan mendukung pembangunan bendungan yang diharapkan akan dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Masyarakat juga telah memahami manfaat dan fungsi dari bendungan seperti untuk irigasi pertanian, perkembangan usaha perikanan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan tempat objek pariwisata. Realitasnya karena masih berlatut-larutnya proses penggantian yang belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat, maka masyarakat menjadi khawatir dan cemas karena belum ada kepastian kapan realisasi proses pembangunan bendungan. Masyarakat menjadi ragu dan tidak berani untuk memperbaiki atau merenovasi, membangun dan pindah rumah, serta lahan perkebunan, karena

khawatir tergusur proses pembangunan bendungan. Sehngga membutuhkan pendekatan khusus untuk membuka forum komunikasi (dialog) dalam bentuk sarasehan supaya lebih bernuansa kekeluargaan dan harmonis antara pihak pemerintah, anggoata legislatif dengan masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan proses relokasi dan pergantian tempat tinggal dan lahan produktif milik masyarakat.

Pemerintah harus lebih aktif melakukan pendekatan yang lebih kooperatif kepada masyarakat dan menyelenggarakan forum dialog terbuka atau musyawarah secara kekeluargaan dengan warga masyarakat. Pembentukan tim negosiator atau mediator resmi yang mewakili pihak masyarakat desa dengan pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari pencaloan yang membuat harga lahan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah, yang mengakibatkan lamanya proses kesepakatan karena harga lahan ditawarkan terlalu tinggi.

Pemerintah juga secara terus menerus melakukan sosialisasi manfaat dibangunnya bendungan, sehingga masyarakat tidak hanya terfokus pada harga ganti untung yang akan diterima, tetapi memiliki harapan adanya peningkatan kesejahteraan dengan adanya pengembangan kawasan bendungan seperti ekowisata dan agrowisata untuk membuka lahan pekerjaan atau kewirausahaan masyarakat.

Pembangunan relokasi masyarakat dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan dapat dicontohkan pada tabel 8 tentang matrik identifikasi dan analisis hasil penelitian.

Tabel 8. Identifikasi dan Analisis Penelitian

No	Identifikasi		Analisis Solusi
	Masalah	Potensi	
1.	Terdapat dampak dari rencana pembangunan bendungan terutama masalah relokasi lahan pertanian, lahan tempat tinggal dan bangunan dan fasilitas umum.	Masyarakat sudah lama mengetahui informasi sebagai cerita dongeng orang tua tentang rencana pembangunan bendungan Masyarakat sudah setuju dan memiliki semangat adanya pembangunan bendungan	Memerlukan kegiatan forum dialog atau musyawarah secara berkesinambungan membahas proses rencana pembangunan bendungan yang didukung dan difasilitasi pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten

No	Identifikasi		Analisis Solusi
	Masalah	Potensi	
2.	Harga ganti untung tempat tinggal rumah dan tanah, fasilitas umum dan lahan pertanian belum ada kesepakatan.	Masyarakat sebetulnya sudah memiliki kesediaan dan menunggu kepastian untuk musyawarah atau negosiasi tentang kesepakatan penentuan harga lahan dengan untung rugi dengan bukan ganti rugi	Musyawarah diselenggarakan secara berjenjang dan periodik antar masyarakat, kemudian perwakilan masyarakat dengan pemerintah desa serta pemerintah daerah Tim negosiator atau fasilitator yang ditunjuk resmi di tingkat desa perlu dibentuk untuk menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan memediasi dengan pihak pemerintah
3.	Terdapat potensi konflik terselubung dan terbuka yang disebabkan ketidakpastian, ketidakjelasan penggantian rumah, tanah dan lahan pertanian serta fasilitas umum	Masyarakat sudah bersedia dan menunggu untuk bermusyawarah membahas penggantian lahan Mayarakat tidak terpengaruh isu penyelewengan atau konspirasi kelompok tentang dana penggantian.	Pihak pemerintah dan tim negosiator atau negosiator dari masyarakat perlu lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan forum dialog supaya cepat menghasilkan kesepakatan ganti untung bagi warga

No	Identifikasi		Analisis Solusi
	Masalah	Potensi	
4.	Harga penggantian bukan saja lahan, rumah dan tanah. Namun masyarakat menginginkan penggantian pohon dihitung dengan masa produktifnya	Lahan produktif masih tersedia di lokasi relokasi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Tanaman produktf dapat ditanam di lahan relokasi oleh masyarakat secara bertahap sebelum relokasi total	Pemerintah dan tim fasilitator mensosialisasikan adanya lahan produktif yang bisa ditanam komoditas yang sama. Menginventarisasi produk tanaman produktif warga supaya dapat dihitung berapa ganti untung yang akan diberikan kepada masyarakat pemilik dan dibuat program pembibitan sedini mungkin di lahan relokasi.
5.	Belum terjalin komunikasi, koordinasi dan kekompakan antar masyarakat yang terkena dampak relokasi terutama dengan masyarakat yang berbeda desa	Ada beberapa desa yang terkena dampak pembangunan bendungan yang juga sudah siap dan bersedia berdialog serta menyetujui adanya pembangunan bendungan untuk relokasi, tinggal menungu kepastiannya.	Mengagendakan pelaksanaan kegiatan dialog atau musyawarah secara berjenjang antara warga sesama desa, kemudian membentuk perwakilan atau fasilitator desa untuk musyawarah antar desa.

No	Identifikasi		Analisis Solusi
	Masalah	Potensi	
6.	Lamanya ketidakpastian realisasi proses pembangunan bendungan sehingga membuat masyarakat mengalami kebingungan dan kekhawatiran jika ingin melanjutkan pengolahan lahan dan merenovasi rumah serta fasilitas umum	Terdapat komunitas akademis yang memiliki tugas untuk dapat menjadi mediator/fasilitator antar warga dan warga dengan pemerintah dengan menggunakan pendekatan komunikasi persuasif, komunikasi pemberdayaan, komunikasi kelompok dan komunikasi konvergen.	Melaksanakan musyawarah secara berjenjang dan periodik antar masyarakat, kemudian perwakilan masyarakat dengan pemerintah desa serta pemerintah daerah Membentuk tim negosiator atau fasilitator resmi di tingkat desa untuk memediasi dengan pemerintah dan menjadi sumber informasi bagi warga masyarakat

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah serta potensi untuk dibuat solusi program, maka dapat dibuat contoh model pembangunan partisipatif dalam relokasi pembangunan bendungan pada gambar 24.

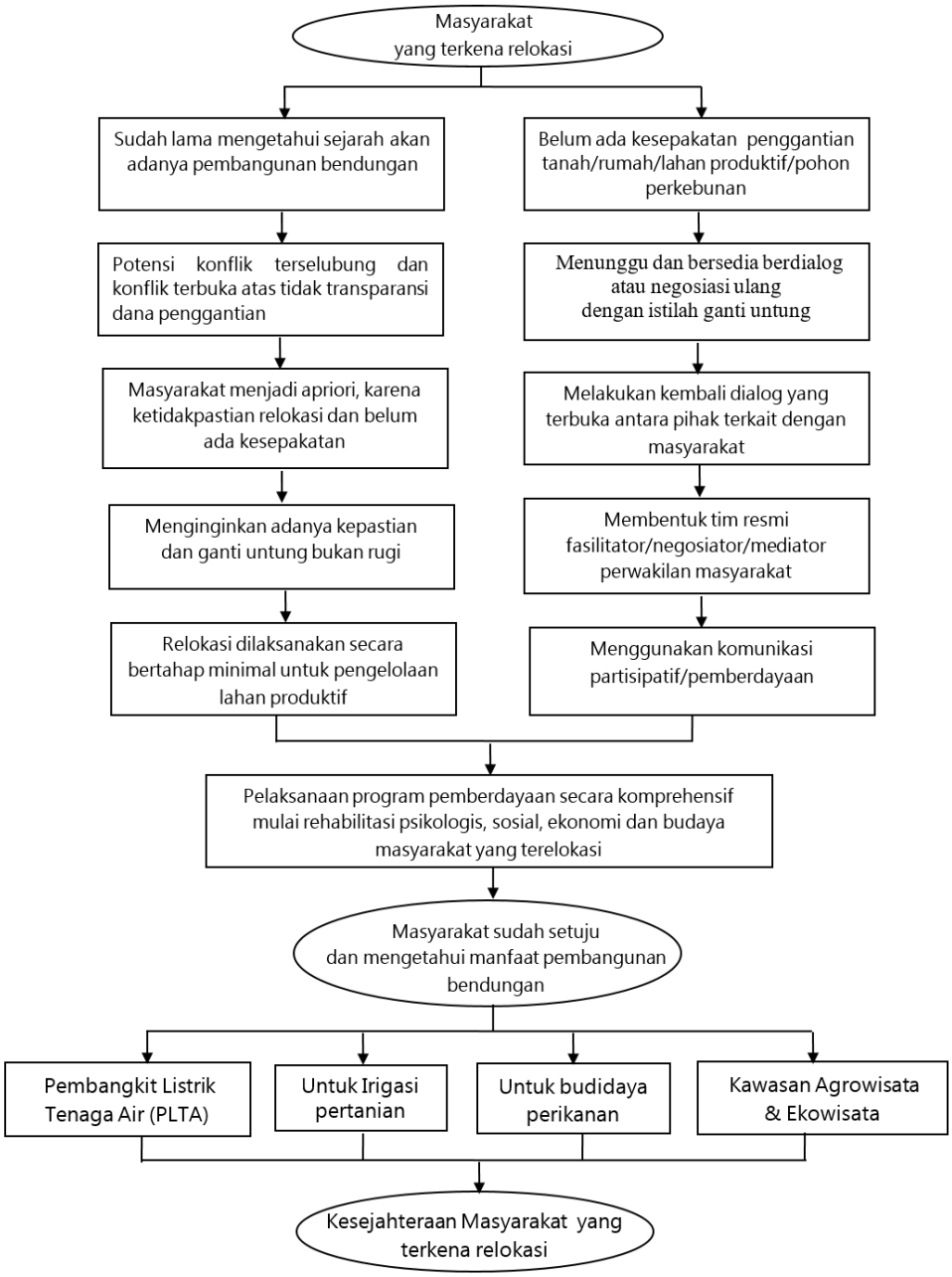

Gambar 24. Model Pemberdayaan dalam Relokasi Desa

8.3. Pemberdayaan Masyarakat Eks Pekerja Migran

Pemberdayaan masyarakat eks pekerja migran dideskripsikan sebagai hasil riset dalam Sugito et al. (2018). Fenomena masyarakat menjadi pekerja migran dikarenakan masih kuat persepsi bahwa menjadi pekerja migran merupakan profesi yang sangat menjanjikan untuk lebih cepat menghasilkan pendapatan yang sangat besar dan menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga. Realitas tersebut sudah menjadi budaya secara turun temurun masyarakat yang menjadi kantong-kantong pekerja migran yang hampir setiap keluarga ada yang sedang dan menjadi eks pekerja migran.

Dampak adanya pekerja migran dan urbanisasi mengakibatkan desa ditinggalkan masyarakatnya yang mencari nasib di perkotaan dan luar negeri sehingga sumber daya serta potensi ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya desa tidak dikelola, dipertahankan, dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Desa hanya menjadi kampung halaman tempat dilahirkan dan menjadi tujuan mudik lebaran, bukan menjadi tempat menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian pilihan menjadi pekerja migran yang dianggap lebih menjanjikan dampaknya masyarakat memiliki mental untuk tidak berjuang meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti ke perguruan tinggi, kurang maksimal dalam pemberdayaan potensi ekonomi desa khususnya bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Bahkan masyarakat menjadi objek sasaran para penyalur tenaga kerja baik yang legal maupun ilegal dengan mudah membujuk serta menjadikan pekerja migran. Pemerintah desa pun nyaris seperti tidak berdaya dalam membendung animo masyarakat untuk menjadi pekerja migran, sehingga potensi dan sumber daya desa menjadi kurang terkelola karena masyarakat meninggalkan desa menjadi pekerja migran. Belum lagi persoalan menjadi pekerja migran yang komplek mulai dari proses pemberangkatan, ketika menjadi pekerja migran dan kepulangan seperti kasus pemalsuan administrasi (ilegal), menjadi korban penipuan, pemaksaan, pemerkosaan, penyiksaan, bahkan kasus kriminalitas sampai kematian. Padahal menurut sasaran dan capaian dari MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025 bahwa Indonesia bisa mendapat keuntungan banyak dengan membangun daya saing kemaritiman dan memperkuat kedaulatan, ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional dengan strategi dan kebijakan penguatan konektivitas diantaranya yaitu: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas mulai dari pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*). (2) Menghubungkan pusat pertumbuhan

ekonomi berbasis prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui *inter-capital supply chains systems*.

Implementasi kebijakan pemerintah tersebut dapat didukung dengan program pemberdayaan ekonomi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pendampingan dan kemitraan. Permasalahan secara umum dalam dunia pekerja migran yaitu: (1) Remitan dari hasil pekerja migran habis untuk konsumtif dan kurang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif. (2) Masalah sosial di keluarga seperti perselingkuhan dan perceraian sehingga muncul masalah keluarga pendidikan dan pola asuh anak menjadi kurang perhatian yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi. (3) Eks dan calon pekerja migran kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha ekonomi dan adopsi teknologi informasi serta modal usaha habis. (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) belum partisipatif sehingga eks dan calon pekerja migran kurang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan di desa, termasuk kurang maksimal dalam melindungi dan mencegah masyarakatnya menjadi pekerja migran. (5) Program pemberdayaan ekonomi calon dan eks pekerja migran belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, baru tahap penyuluhan dan pelatihan keterampilan, kemudian kegiatan pendampingan serta kemitraan. (6) Eks dan calon pekerja migran belum memiliki keterampilan dalam menggunakan media digital seperti komputerisasi pembuatan label produk dan pengemasan (*packaging*), media promosi serta pemasaran produk usaha atau daerah wisata.

Tabel 9. Analisis Permasalahan dan Potensi Pekerja Migran

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
1.	Kelompok eks pekerja migran belum mengetahui program pemberdayaan di pemerintah desa	• Terdapat kelompok Usaha kecil dan Kelompok Usaha tani • Eks pekerja migran memiliki semangat yang tinggi untuk memiliki dan meningkatkan usaha ekonomi di desa • Eks pekerja migran memiliki kemauan untuk dilakukan pelatihan budidaya peternakan seperti kambing dan sapi serta proses pembuatan pupuk organik	Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan komprehensif melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan kemitraan.
2.	Remitan pekerja migran masih dipergunakan untuk konsumtif	• Banyaknya remitan yang ditransfer oleh pekerja migran kepada keluarganya di desa • Remitan dapat dijadikan modal usaha atau investasi usaha	• Melakukan pemberdayaan melalui penyuluhan dan pelatihan manajemen keuangan keluarga dan bisnis • Pemberdayaan ekonomi dengan penyuluhan dan pelatihan jenis usaha yang sesuai minat serta bakat baik untuk keluarga dan eks pekerja migran

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
3.	Pemerintah desa belum memiliki program pemberdayaan ekonomi bagi warga desa secara berkesinambungan hanya pemberdayaan rutin seperti dalam PKK dan Posyandu	• Anggaran dana desa yang sudah mencapai kurang lebih 1 Milyar dapat dimanfaatkan untuk memiliki dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat • Banyak potensi sosial ekonomi di masyarakat desa untuk membuka lahan pekerjaan dan kesejahteraan	• Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serius merencanakan dan menganggarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Musrenbang desa • Kelompok usaha dan tokoh masyarakat dapat mengusulkan dan memperjuangkan program pemberdayaan ekonomi
4.	Kelembagaan pemberdayaan masih pasif, belum solid dan berkembang.	• Kelompok usaha dapat mengembangkan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait • Banyaknya calon anggota dan anggota di masyarakat dapat menjadi pengurus baru di kelompok pemberdayaan • Anggaran modal usaha terdapat di anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)	• Membuat program peningkatan kapasitas pengurus lembaga pemberdayaan • Mengagendakan pertemuan secara rutin minimal setiap 2 bulan sekali untuk bermusyawarah membahas perkembangan usaha ekonomi masyarakat

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
5.	Kaderisasi untuk kepemimpinan dan kepengurusan kelompok usaha ekonomi masyarakat	• Banyaknya calon anggota dan anggota di masyarakat yang potensial bisa menjadi pengurus baru di kelompok pemberdayaan • Peluang permintaan terhadap hasil usaha dan pangsa pasar cukup terbuka • Banyak generasi muda potensial menjadi wiraswasta atau kelompok ekonomi	• Membuat program kegiatan peningkatan kapasitas pengurus kelompok pemberdayaan • Kegiatan workshop kaderisasi generasi muda khususnya yang memiliki potensi dan minat untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
6.	Masih terbatas akses permodalan, dan kemitraan	• Kelompok usaha dapat berkembang dan menjalin kerjasama • Terdapat permodalan yang berasal dari program APBDes yang cukup besar untuk membantu perkembangan usaha ekonomi masyarakat desa • Perbankan cukup banyak untuk dapat membantu permodalan bagi usaha kecil dan menengah • Kelembagaan ekonomi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk membuka akses terhadap perbankan dalam membantu permodalan	• Memberikan modal usaha untuk membantu kelompok ekonomi masyarakat • Memfasilitasi kelompok usaha untuk mendapat permodalan usaha kecil • Membentuk kelembagaan kelompok usaha di masyarakat desa • Mengadakan pelatihan/ praktik membuat proposal pengajuan kredit usaha kecil dan menengah

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
7.	Kelompok pemberdayaan masih belum mengetahui dan memahami prosedur mengajukan pinjaman usaha perbankan	• Perbankan cukup banyak yang menawarkan bantuan pinjaman modal untuk usaha kecil dan menengah • Terdapat jaminan yang bisa diajukan untuk persyaratan kredit modal usaha kecil • Masyarakat memiliki semangat yang tinggi mengembangkan usaha ekonomi	• Kelembagaan ekonomi dan pemerintah desa dapat menfasilitasi kelompok usaha untuk mengajukan pinjaman modal usaha kecil dengan pihak perbankan • Menyelenggarakan pelatihan tentang penyusunan proposal untuk pengajuan kredit usaha kecil
8.	Pemerintah desa masih kurang proaktif merencanakan program pemberdayaan masyarakat desa	• Banyak kelompok usaha kecil dan usaha tani • Terdapat Kelompok usaha yang telah mengikuti tahapan program pemberdayaan baik dari pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swasta dan sosial	• Kelembagaan ekonomi dapat menfasilitasi kelompok usaha untuk mendapat modal bagi usaha kecil dari pemerintah desa dengan mengadakan kegiatan musyawarah dengan pemerintah desa • Menyelenggarakan penyuluhan, simulasi, dan pelatihan membuat program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
9.	Akses pemasaran dan kemitraan produk usaha ekonomi	• Pangsa pasar sangat terbuka dan prospektif dengan akses yang dekat dan mudah ke pasar-pasar • Usaha ekonomi sudah berjalan cukup lama, perlu meningkatkan produktivitas supaya dapat memenuhi kebutuhan pemasaran di tempat lain • Memanfaatkan jaringan usaha dengan kelembagaan ekonomi dan pasar lainnya	• Melakukan survei pasar untuk kuantitas dan kualitas produk yang dibutuhkan • Melakukan survei pasar ke tempat pusat penjualan seperti pasar-pasar • Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar • Melakukan pertemuan rutin atau dialog untuk membahas pemasaran dan memperkuat kemitraan • Melakukan pelatihan adopsi teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran produk usaha

8.3.1. Pemberdayaan dalam Forum Komunikasi Perempuan (FKP)

Masyarakat di desa khususnya kaum perempuan di daerah pusat pekerja migran memiliki persepsi dan tradisi bahwa menjadi pekerja migran adalah profesi yang paling menjajikan, cepat mendapat penghasilan yang besar dan mensejahterakan. Walau masih terdapat permasalahan yang komplek seperti dari proses persiapan berangkat, ketika sedang bekerja dan selesai bekerja dengan pulang ke kampung halaman. Sehingga memiliki dampak pembangunan jangka panjang di desa menjadi kurang berkembangnya potensi yang dimiliki dari berbagai sumber daya misalnya dari sumber daya ekonomi pertanian,

perkebunan, perikanan serta peternakan. Desa akhirnya hanya menjadi tempat dilahirkan dan dibesarkan serta mudik ketika lebaran dan musim libur panjang. Maka penting untuk melakukan pemberdayaan dengan pendekatan komunikasi partisipatif khususnya dalam menghadapi permasalahan seperti adanya penyaluran pekerja migran yang terdapat oknum di desa sebagai penyalur. Kasus penipuan investasi saham yang dilakukan orang luar sehingga banyak remitan kerja migran serta masyarakat desa mengalami kerugian. Kurangnya keterlibatan khususnya calon dan eks pekerja migran dalam forum komunikasi atau dialog untuk merumuskan perencanaan pembangunan desa sehingga permasalahan, potensi, minat dan aspirasi kurang mendapat perhatian. Pemerintah desa masih ada yang belum begitu terbuka dalam menerima partisipasi dari perguruan tinggi tentang pemberdayaan calon dan eks pekerja migran.

Proses kegiatan pemberdayaan dapat melalui pendekatan komunikasi secara persuasif dengan tetap menggunakan etika komunikasi yang sopan dan lebih memberikan ruang apresiasi serta berempati dari pengalaman para eks dan calon pekerja migran dan pemerintah desa. Menciptakan keterbukaan, keharmonisan dan keakraban supaya mendapat informasi, fakta dan data yang dibutuhkan serta merumuskan program pemberdayaan ekonomi secara bersama-sama.

Kemudian dalam proses kegiatan pemberdayaan komunikasi formal tidak dapat dipisahkan atau tetap membutuhkan komunikasi informal. Tahapannya melakukan komunikasi informal seperti membuka akses melalui informan kunci dari kolega, dapat juga secara kekeluargaan, baru setelah itu dapat mengajukan surat resmi dan menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan dengan komunikasi formal untuk mendapatkan ijin kegiatan. Dukungan dari pihak calon peserta pemberdayaan dan pihak pemerintah desa kemudian menyepakati dialog bersama atau musyawarah dalam bentuk sarasehan supaya lebih terbuka, cair dan harmonis, kegiatan tersebut secara metode pengumpulan data disebut *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, kebutuhan dan potensi masyakarat untuk dibuat rencana program bersama serta kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pihak luar sebagai *outsider* seperti penyuluh, pendamping, instruktur, dan fasilitator dapat melakukan intervensi secara konstruktif untuk mengawali dan mempelopori kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan dimulai membangun dan mengembangkan semangat dan kesadaran dari masyarakat,

menginisiasi untuk identifikasi dan analisis permasalahan serta potensi sumber daya sampai menghasilkan program pemberdayaan. Pemberdayaan juga dapat dilakukan insider atau masyarakat desa.

Pemberdayaan tidak hanya menciptakan dan mengembangkan kesadaran, motivasi, keterampilan dan kesejahteraan ekonomi. Namun pemberdayaan dapat juga pada bidang kebutuhan akan hak asasi, aspirasi dan ikut terlibat menentukan keputusan program pemberdayaan atau pembangunan sebagai pemberdayaan pada bidang politik.

Tifa Foundation dan *Japan Social Development Fund* memiliki program pemberdayaan dan advokasi bagi pekerja migran khususnya kaum perempuan beserta keluarga sebagai berikut: (1) Pemberdayaan pekerja migran perempuan (PMP) dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman, hak-hak serta kapasitasnya (*Access to justice)*. (2) Peningkatan kapasitas PMP tentang pengelolaan remitan atau keuangan serta mengelola usaha ekonomi kecil (*Access to finance)*. (3) Kepastian PMP memperoleh akses dan jaringan informasi, sehingga mengantisipasi penipuan, penyelundupan manusia, dan memperluas informasi mengenai prosedur administrasi resmi, tujuan penempatan kerja, dan media interaksi (*Acces to information*).

Problematika yang masih dialami para pekerja migran yaitu: (1) Umumnya masih menilai menjadi pekerja migran sebagai profesi yang sangat prospektif dan cepat mendatangkan kesejahteraan, sehingga para pemuda sudah direncanakan tidak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi, tetapi ingin menjadi pekerja migran. (2) Pengawasan yang kurang ketat terhadap para biro atau agen penyalur dan calo calon pekerja migran terutama pada yang tidak berijin resmi dengan leluasa dan mudah membujuk dan menyalurkan pekerja migran di desa, karena menjadi penyalur pekerja migran akan sangat menguntungkan. (3) Akibatnya potensi sumber daya desa tidak dapat dikelola dengan maksimal misalkan usaha ekonomi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan karena masyarakat terutama generasi muda kebanyakan menjadi pekerja migran. (4) Rusaknya interaksi di unit sosial terkecil seperti terjadi peningkatan perceraian yang tinggi di daerah pekerja migran, sehingga keberlangsungan dan pendidikan anak kurang terperhatikan. (5) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa masih belum memberikan kesempatan yang lebih terbuka dan partisipatif khususnya untuk calon dan eks pekerja migran perempuan. (6) Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang desa untuk kaum perempuan hanya diwakili oleh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK), namun

keterwakilan atas nama komunitas eks pekerja migran perempuan belum diperhatikan.

Pemberdayaan eks dan calon pekerja migran khususnya kaum perempuan dapat diidentifikasi dan dianalisis sebagai berikut: (1) Memiliki motivasi, kesadaran dan kemauan dalam mengetahui dan memahami aturan hukum tentang ketenagakerjaan. Kemudian memiliki keinginan mengelola potensi sumber daya manusia, ekonomi, dan lingkungan melalui program pemberdayaan di desa untuk menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta dapat mengurangi pemikiran dan tekad untuk menjadi pekerja migran. (2) Mendirikan prosedium dan memilih pengurus forum komunikasi untuk calon dan eks pekerja migran perempuan membuat, mengusulkan dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan yang diusulkan di Musrenbang desa dan pemerintah daerah sampai wakil rakyat seperti DPRD (3) Forum komunikasi perempuan calon dan eks pekerja migran perempuan dilatih dan difasilitasi mengelola media sosial seperti website, Facebook dan Instagram sebagai media aspirasi, informasi, sosialisasi, publikasi, promosi dan pemasaran bagi semua aktivitas dan produk hasil pemberdayaan.

Berikut ini dapat dibuat contoh model forum komunikasi dan program pemberdayaan untuk calon dan eks pekerja migran perempuan sebagaimana pada gambar 25 serta tabel 10 dan 11.

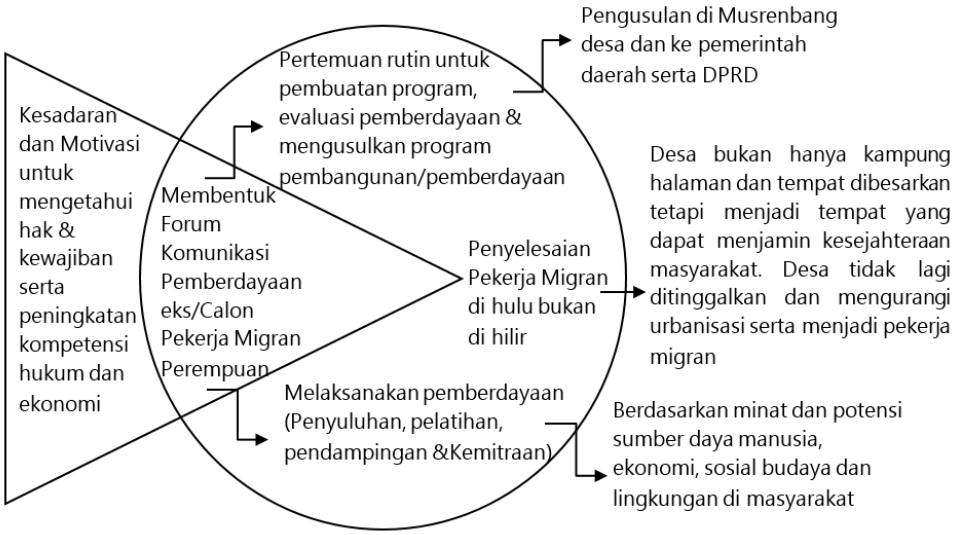

Gambar 25. Model Forum Komunikasi Pemberdayaan eks/Calon Pekerja Migran Perempuan

Sumber : Dimodifikasi dari Sugito et al. (2018)

Tabel 10. Program Prioritas Pemberdayaan

No	Prioritas Permasalahan	Solusi untuk Kelompok Sasaran Pemberdayaan Masyarakat		Luaran Pemberdayaan Masyarakat
		Tahap 1	Tahap 2	
1.	Masalah produktivitas dan keberlanjutan usaha ekonomi serta lemahnya kelembagaan ekonomi eks pekerja migran	(1) Penyuluhan tentang peningkatan motivasi dan pengetahuan wirausaha dalam kelompok usaha ekonomi berbasis potensi lokal eks pekerja migran (2) Pelatihan peningkatan keterampilan dalam produktivitas usaha ekonomi	(1) Penyuluhan dan pelatihan manajemen Koperasi usaha ekonomi pekerja migran, administrasi, keuangan keanggotaan dan kepengurusan (3) Pelatihan manajemen promosi. labeling dan packaging serta strategi pemasaran produk ekonomi (4) Menjalin kemitraan usaha produk pasca panen	(1) Menghasilkan modul materi manajemen usaha ekonomi dan koperasi serta strategi promosi & pemasaran (2) Menghasilkan kelompok usaha ekonomi dan pengurus koperasi (3) Publikasi di media massa cetak atau online tentang hasil kegiatan pengabdian
2.	Masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan keluarga dan masyarakat desa	(1) Penyuluhan tentang kesadaran pengetahuan dan kepedulian kebersihan keluarga dan lingkungan (2) Penyuluhan Manajemen bank sampah menjadi berkah	(1) Pelatihan tentang manajemen pemilihan/pemilahan dan pengolahan sampah menjadi usaha komersil (mendatangkan pendapatan tambahan) (2) Pelatihan manajemen sampah menjadi berkah (adminstrasi,pembukuan/pencatatan keuangan, keanggotaan dan pengembangan usaha) (3) Menjalin kemitraan dalam manajemen Bank sampah menjadi berkah	(4) Rekaman video kegiatan pengabdian yang dipublikasikan (5) Audiensi dengan stakeholder supaya mendapat dukungan kegiatan pemberdayaan Menghasilkan modul pemberdayaan masyarakat pekerja migran (6) Terjalinnya kemitraan kelompok usaha dengan stakeholders

Tabel 11. Program Pemberdayaan dan Partisipasi Mitra

<table>
<tr><th colspan="2">Tahapan Kegiatan, Solusi atas Permasalahan dan Partisipasi Mitra dalam Kegiatan Program Pemberdayaan</th></tr>
<tr><td>Tahap 1</td><td>Partisipasi Mitra</td></tr>
<tr><td>• Kajian pustaka, hasil riset, jurnal, kajian media massa, diskusi publik dan seminar
• Pembukaan akses, perijinan dan berdialog untuk menyepakati agenda serta program pengabdian masyarakat
• Brainstorming dan Problem Based Learning untuk identifikasi dan analisis masalah serta potensi
• Penyuluhan dan Pelatihan manajemen kewirausahaan ekonomi
• Penyuluhan dan Pelatihan Produktivitas kewirausahaan ekonomi
• Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta mengolah hasil
• Monev & analisis hasil kegiatan tahap I dan Kesepakatan kegiatan tahap II dengan metode PLA</td><td rowspan="3">• Pemerintah desa memberikan dukungan dan mengijinkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk eks pekerja migran perempuan
• Komunitas pekerja migran perempuan menjadi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai beneficiaries Komunitas pekerja migran perempuan menjadi lembaga yang bukan hanya melakukan advokasi kasus hukum, administrasi dan ketenagakerjaan pekerja tetapi menjadi lembaga ekonomi wirausaha seperti Koperasi yang memiliki unit kelompok usaha
• Komunitas pekerja migran perempuan setelah kegiatan pemberdayaan masyarakat tindak lanjutnya menjadi pionir dan pelaku serta pendamping atau fasilitator pemberdayaan untuk komunitas lainnya
• Dinas perdagangan dan UKM, lembaga swasta dan aktivis bisa menjadi narasumber/instruktur dalam kegiatan pemberdayaan
• Komunitas pekerja migran perempuan, stakeholder pemda dan swasta serta perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan bersinergi dan kolaborasi dalam program pemberdayaan yang berkesinambungan.</td></tr>
<tr><td>Tahap 2</td></tr>
<tr><td>• Penyuluhan dan pelatihan strategi promosi dan pemasaran usaha ekonomi serta pendampingan
• Pelatihan Manajemen usaha dan pendampingan
• Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
• Luaran berupa modul materi pemberdayaan dan publikasi kegiatan di media cetak & online serta video ke web atau di media sosial
• Menjalin kemitraan dengan stakeholder dan lembaga lainnya
▪ Merekomendasikan kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan</td></tr>
</table>

8.3.2. Pemberdayaan Eks Pekerja Migran di Era Digital

Partisipasi dalam pemberdayaan tidak akan lepas dari pengaruh dan tantangan di era globalisasi dengan pesatnya perkembangan industri serta teknologi media komunikasi. Maka dalam penyajian media informasi juga mengalami perubahan adanya digitalisasi dari industri jurnalisme konvensional

menjadi jurnalisme online yang disajikan lebih menarik, kreatif, inovatif dan cepat dalam penyajian beritanya. Kegiatan produksi dan publikasi media biasanya dengan pengumpulan informasi dan data melalui liputan langsung dengan wawancara dengan narasumber dan atau ke lokasi liputan, namun di era digitalisasi lebih cepat, mudah dan menarik dalam penyajiannya hal ini sebagai media baru.

Berdasarkan perumusan masalah yang difokuskan pada pemberdayaan pekerja, eks dan calon pekerja migran di era digital terdapat tiga permasalahan yang harus diselesaikan yaitu: (1) Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pekerja migran dalam pemanfaatan media digital masih rendah. (2) Pengemasan, labeling, strategi promosi dan pemasaran produk usaha eks serta calon pekerja migran masih terbatas dan belum memaksimalkan pemanfaatan media digital. (3) Forum komunikasi, informasi, aspirasi, konsultasi dan advokasi pekerja migran belum memaksimalkan penggunaan media digital melalui website dan aplikasi media sosial lainnya yang selama ini yang hanya untuk mencari informasi belum dapat menjadi media promosi dan pemasaran. Berikut ini contoh program pemberdayaan eks pekerja migran berbasis digital untuk meningkatkan literasi media, pemanfaatan media sosial dan membentuk kelembagaan jurnalis warga (*citizen journalism*).

Tabel 12. Program Pemberdayaan Eks Pekerja Migran Di Era Digital

No	Program Pemberdayaan	Metode dan waktu	Indikator Kegiatan
1.	Penyuluhan 1: Harapan dan Tantangan di Era Digital	Ceramah dan *brainstorming*. 2 jam kegiatan: Pemaparan materi 60 menit. Tanya jawab/dialog 45 menit dan kesimpulan 15 menit	Meningkatkan motivasi, serta pemahaman eks dan calon pekerja migran untuk dapat berperan dan memanfaatkan teknologi media digital atau media sosial (internet) Mengetahui bentuk dan manfaat media digital

No	Program Pemberdayaan	Metode dan waktu	Indikator Kegiatan
2.	Penyuluhan 2 dan Simulasi: Penggunaan media digital yang sehat (edukatif) dan menangkal berita atau informasi Hoax	Ceramah, dan *Problem Based Learning*. 2 jam kegiatan: Materi dan simulasi 60 menit. Diskusi kelompok 45 menit. Kesimpulan 15 menit.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk memilah dan memilih (identifikasi) informasi yang sehat (edukatif) di media digital (media sosial) bukan Hoax Mampu menganalisis konten berita Hoax serta mengetahui mekanisme melaporkan berita/informasi Hoax.
3.	Penyuluhan 3 dan Simulasi: Penggunaan media digital dalam perspektif hukum	Ceramah dan *brainstorming*. 2 jam kegiatan: pemaparan/simulasi materi 60 menit. Tanya jawab/dialog 45 menit dan kesimpulan 15 menit	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang ITE, etika, konsekuensi hukum di media digital (media sosial)
4.	Pelatihan 1 dan 2: Penggunaan media digital yang sehat (edukatif) dan menangkal berita/informasi Hoax	Simulasi dan praktik menggunakan media sosial di Email, Website, Face Book, Blog dan Youtube pada smartphone/ laptop 3 jam x 2 kegiatan: masing-masing simulasi 45 menit, praktik kelompok mengakses media 120 menit, dan kesimpulan 15 menit.	Mampu menggunakan email, media sosial, Website, Face Book, Blog dan Youtube Mempu memilah dan memilih di media sosial informasi dan berita yang sehat (edukatif) Mampu mengidentifikasi berita Hoax dan konsekuensi hukumnya

No	Program Pemberdayaan	Metode dan waktu	Indikator Kegiatan
5.	Penyuluhan 4 dan Simulasi : Penggunaan media digital yang produktif secara sosial dan ekonomi	Ceramah dan *Problem Solving* 2 jam kegiatan: Materi dan simulasi 60 menit. Diskusi kelompok 45 menit. Kesimpulan 15 menit.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman memanfaatkan media digital (media sosial) untuk kegiatan produktif seperti promosi dan pemasaran dalam usaha ekonomi/kewirausahaan /bisnis serta menjalin kemitraan bisnis
6.	Pelatihan 3 dan 4: Penggunaan media digital yang produktif secara sosial dan ekonomi	Simulasi dan praktik menggunakan media sosial (*e-commerce* dan *Marketplace*) pada smartphone/ laptop 3 jam x 2 kegiatan: masing-masing kegiatan simulasi 45 menit, praktik kelompok mengakses media 120 menit, dan kesimpulan 15 menit.	Mampu menggunakan media *e-commerce* dan *marketplace* untuk Memilah dan memilih sumber berita/informasi tentang peluang usaha, tips berbisnis dan contoh sukses berbisnis di era digital Mampu menyimpan dan menyebarkan berita atau informasi yang produktif
7.	Penyuluhan 5 dan Simulasi Penggunaan media digital yang partisipatif, transparan dan akuntabilitas	Ceramah, dan *Problem Based Learning*. 2 jam kegiatan: Materi dan simulasi 60 menit. Diskusi kelompok 45 menit. Kesimpulan 15 menit.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman memanfaatkan media digital (media sosial) untuk kegiatan : Forum komunikasi, aspirasi, konsultasi, advokasi, kontrol atau evaluasi dengan fakta serta data yang jelas/valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui media daring (internet)

No	Program Pemberdayaan	Metode dan waktu	Indikator Kegiatan
8.	Penyuluhan 6 dan Simulasi: Peran dan menjadi *Citizen Journalism*	Ceramah dan Problem Solving 2 jam kegiatan: Materi dan simulasi 60 menit. Diskusi kelompok 45 menit. Kesimpulan 15 menit.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman memanfaatkan media digital (media sosial) untuk *Citizen Journalism* Bentuk dan manfaat *Citizen Journalism* yaitu: Peliputan (Video-Blogging atau Vlog) dan penulisan berita online, artikel, cerpen, dan opini (*Feature*) secara online di media digital
9.	Penyululuhan 7 dan Simulasi: Manajemen media dan Jurnalis	Ceramah, dan *Problem Based Learning*. 2 jam kegiatan: Materi dan simulasi 60 menit. Diskusi kelompok 45 menit. Simpulan 15 menit.	Mengetahui dan memahami Peran dan etika jurnalisme Bentuk dan teknik menulis berita dan *Feature* Tupoksi tim redaksi dalam media
10.	Pelatihan 5 dan 6. Teknik mengelola media Website dan Blog pekerja migran	Simulasi dan praktik menggunakan media Website 3 jam x 2 kegiatan: masing-masing kegiatan simulasi 30 menit, praktik kelompok mengakses media 120 menit, dan kesimpulan 15 menit.	Mampu mengelola (menjadi admin) media Website dan Blog pekerja migran sebagai Forum komunikasi, memberikan informasi, media aspirasi, konsultasi, advokasi, kontrol atau evaluasi dengan fakta serta data yang jelas/valid dan dipertanggung jawabkan.

No	Program Pemberdayaan	Metode dan waktu	Indikator Kegiatan
11.	Pendampingan dan Monev 1: Teknik mengelola media Website dan Blog pekerja migran	Wawancara, monitoring, angket dan *Problem Based Learning* 2-3 kali kegiatan x 5 jam	Dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Dapat meningkatkan motivasi, poduktivitas dan keberlanjutan media Website dan Blog
12.	Pelatihan 7 dan 8 Menjadi *Citizen Journalism*	Simulasi dan praktik menggunakan media Website 3 jam x 2 kegiatan: masing-masing kegiatan simulasi 30 menit, praktik kelompok mengakses media 120 menit, dan kesimpulan 15 menit.	Mampu membuat/ memproduksi Peliputan (Vlog) Penulisan berita online, Pembuatan artikel, cerpen, dan opini (*Feature*) secara online di media digital baik website dan blog atau youtube (untuk Vlog)
13.	Pendampingan dan Monev 2: Menjadi *Citizen Journalism*	Wawancara, monitoring, angket dan *Problem Based Learning* 2-3 kali kegiatan x 5 jam	Dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Dapat meningkatkan motivasi, poduktivitas dan keberlanjutan menjadi *Citizen Journalism*
14.	Studi banding dan Akses Kemitraan: Profesionalisme dalam Manajemen Media Digital (Ke media pekerja migran yang sukses atau media lembaga lain)	Komparasi, kunjungan, FGD dan *Problem Based Learning* 2-4 hari kegiatan kunjungan	Dapat meningkatkan motivasi dan terjalin kemitraan dengan media digital yang sudah maju, sukses dan profesional

Program pemberdayaan dibuat berdasarkan riset partisipatif yang dialogis, aspiratif dan egaliter secara bersama dengan eks dan calon pekerja migran untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi serta membuat kesepakatan program pemberdayaan.

Tahapan program pemberdayaan pekerja migran di era digital yang Komprehensif dan Keberlanjutan yaitu: (1) Penyuluhan, (2) Simulasi dan Pelatihan, (3) Pendampingan, (4) Monev, (5) Studi Banding, dan (6) Kemitraan.

Program pemberdayaan pekerja migran di era digital tentang: (1) Harapan, Tantangan, dan Pemanfaatan Penggunaan Media Digital (Web, Blog, Face Book, Youtube, Medsos lainnya dalam perspektif sosial, hukum dan ekonomi bisnis (seperti *e-commerce dan marketplace*). Tujuan kegiatan pemberdayaan untuk mengetahui, memahami dan terampil dalam memilah, memilih dan memanfaatkan media digital untuk mencari, menyebarkan, dan membuat informasi, pengetahuan, interaksi sosial dan bisnis ekonomi (Promosi dan pemasaran produk serta kemitraan bisnis). (2) Manajemen *Citizen Journalism* untuk mengelola, memproduksi, dan pembentukan komunitas media informasi, aspirasi, konsultasi, advokasi, dan evaluasi. Sehingga pekerja dan eks pekerja migran dapat mengetahui, memahami dan terampil dalam memproduksi dan mempublikasi tentang peliputan video (Vlog), penulisan berita online, pembuatan artikel, cerpen, dan opini (*Feature*) secara online di media digital baik website dan blog atau youtube (untuk Vlog). (3) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan media pekerja dan eks pekerja migran yang tujuannya mampu membuat program pemberdayaan secara partisipatif, dapat meningkatkan produktivitas, mencapai kesejahteraan dan kemandirian, serta menjadi pionir bagi pembangunan atau pemberdayaan komunitas lainnya.

Model program pemberdayaan di era digital yang diadopsi dan dimodifikasi dari model forum komunikasi dalam Sugito et al. (2018)

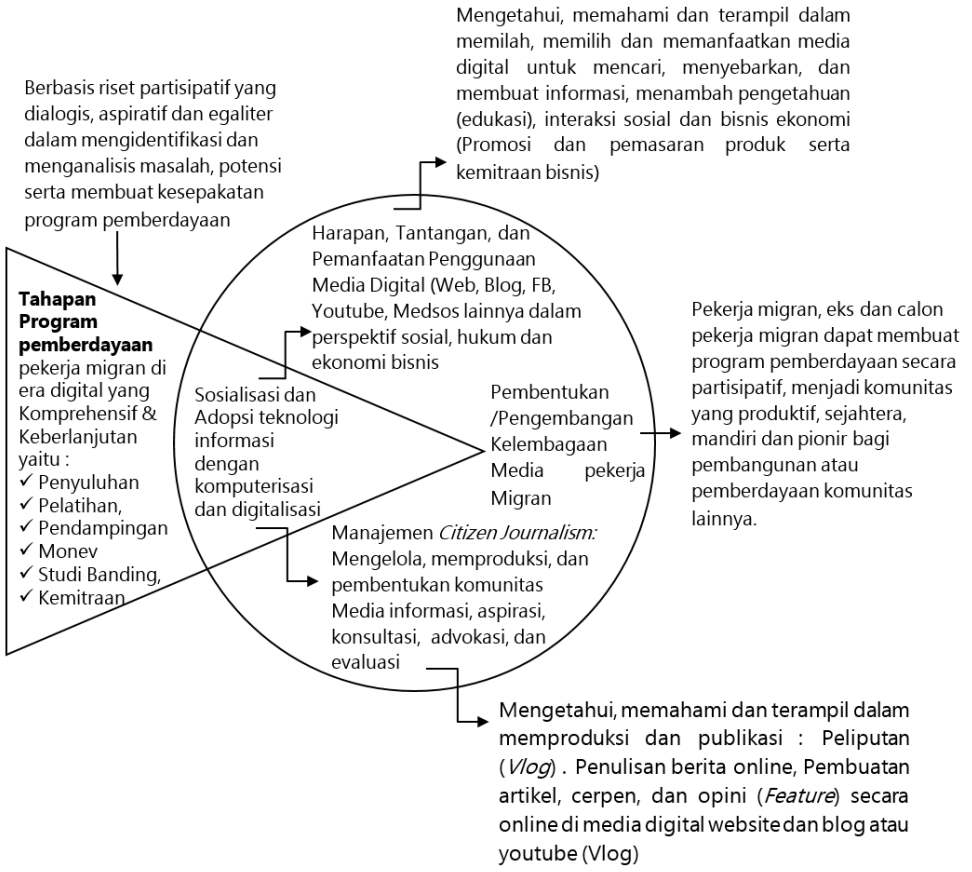

Gambar 26. Program Pemberdayaan Pekerja Migran di Era Digital
Sumber : Dimodifikasi dari Sugito et al. (2018)

8.4. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa

Demokratisasi dan otonomi daerah sudah menjadi tuntutan dan tantangan di era pasca reformasi, hal tersebut melalui proses pembangunan yang tidak lagi didominasi dan ditentukan pemerintah saja (*top down*) yang bersifat sentralistik. Akan tetapi pembangunan sudah bersifat partisipatif *(bottom up*) yang memberikan ruang untuk beraspirasi dan melibatkan partisipasi masyarakat (*civil society*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sehingga pembangunan menjadi milik dan tanggung jawab bersama dengan bersinergi serta memberdayakan (*empowerment)* berbagai potensi dan sumber daya masyarakat *(resource based development*)

untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan partisipatif diimplementasikan pada tingkat lokal atau desa yang merupakan pemerintahan yang terdekat untuk melayani dan membangun masyarakatnya. Pembangunan di perdesaan menjadi penentu dan pondasi pembangunan daerah dan perkotaan. Beberapa kelompok ekonomi masyarakat di desa yang dapat menjadi aktor penentu dalam melaksanakan pembangunan partisipatif atau pemberdayaan sebagai pengembangan masyarakat (*community development*) seperti kelompok peternak, kelompok tani, kelompok usaha pengrajin, dan Koperasi.

Bentuk pengembangan masyarakat seperti dalam pengembangan kewirausahaan dan Koperasi memiliki proses tahapan yang sistimatis dan berkelanjutan mulai dari identifikasi dan analisis masalah, potensi serta prospek dari sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan, dan sumber daya sosial budaya. Tahapan tersebut merupakan proses perencanaan pemberdayaan, yang perlu ditindaklanjuti tahap pelaksanaan pemberdayaan seperti penyuluhan, pelatihan, dan studi banding. Tahapan selanjutnya program pendampingan, monitoring, evaluasi, penguatan dan pengembangan kelembagaan, serta kemitraan. Semua tahapan tersebut merupakan manajemen pemberdayaan masyarakat yang sangat penting dan menentukan dalam proses pembangunan di masyarakat desa menjadi pondasi yang mendukung dan menentukan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Pembangunan desa menjadi miniatur dan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, karena desa adalah wilayah paling dekat dan nyata dirasakan masyarakat. Desa menjadi pendukung pembangunan dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan pokok untuk perkotaan dan daerah sekitarnya dari hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, tenaga kerja, produk kreatif, serta wilayah pariwisata. Manajemen pemberdayaan masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan komunitas atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa menjadi subjek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa. Subjek pembangunan desa melakukan manajemen pemberdayaan sebagai "*agent of change*" atau "*community development*" yang memberikan ruang untuk partisipasi secara terbuka bagi semua pihak (*stakeholder*) baik masyarakat, pemerintah dan lembaga ekonomi (swasta) yang peduli pada kemajuan, inovasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hakekatnya pembangunan adalah milik bersama untuk memberdayakan (*empowerment*) berbagai potensi dan sumber daya masyarakat (*resource based development*) mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Aktor *community development* melakukan inisiatif untuk menciptakan media dan melakukan partisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan. Program pemberdayaan dalam realitasnya masih terdapat permasalahan diantaranya: (1) Perumusan perencanaan dan keputusan kurang melibatkan masyarakat desa, sehingga masih *top down* dan kurang aspiratif tetapi lebih banyak ditentukan pemerintah daerah dan desa yang memiliki program serta anggaran kegiatan. Sehingga program pemberdayaan dalam pelaksanaannya masih kurang berhasil karena tidak bersifat partisipatif berdasarkan aspirasi dan identifikasi di masyarakat. (2) Tahapan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara sistimatis dan komprehensif, seperti kelompok masyarakat seharusnya dibangun dan ditingkatkan motivasi, pola pikir dan kekompakannya dalam berwisrausaha, serta pemberdayaan langsung ke pengembangan produksi dan atau pemasaran produk. (3) Pemerintah desa kurang memiliki inisiatif untuk membuat program pemberdayaan bagi masyarakatnya, cenderung pasif menunggu program dari pemerintah daerah. Media komunikasi pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kurang dimanfaatkan untuk membuat program pemberdayaan. (4) Masyarakat masih belum memiliki keberanian untuk beraspirasi dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan karena kelembagaan ekonomi belum terbentuk dan atau tidak dapat mengembangkan kelembagaan, serta tidak memiliki akses untuk bermitra dalam mencapai tujuan bersama. (5) Evaluasi pemberdayaan masyarakat masih jarang dilakukan sebagai bagian dari analisis dampak keberhasilan pemberdayaan, sehingga program pemberdayaan terputus atau terhenti pada tahapan tertentu seperti tahap penyuluhan dan pelatihan tetapi tahap pendampingan, monitoring, evaluasi dan kemitraan tidak dilakukan.

Manajemen pemberdayaan masyarakat setelah melaksanakan dialog atau musyawarah dengan pendekatan komunikasi partisipatif untuk memberikan kesempatan keterlibatan secara terbuka dari semua pihak untuk merumuskan program pemberdayaan sesuai permasalahan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Maka tahap berikutnya pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan tentang kelembagaan koperasi, manajemen kepengurusan, administrasi, keuangan, keanggotaan, permodalan, dan pembagian sisa hasil usaha, serta mekanisme rapat. Jika belum ada kepengurusan, dilakukan simulasi pembentukan formatur pengurus dan nama Koperasi. Formatur pengurus Koperasi sebagai tim perintis yang mengawali pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan mengajak masyarakat dan kelompok kewirausahaan untuk menjadi anggota dan pengurus. Kemudian mengagendakan rapat pengurus dan anggota untuk memilih kepengurusan yang resmi selama satu

periode. Pembentukan Koperasi sangat cocok dengan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih memiliki sifat gotong royong, solidaritas dan kepedulian yang tinggi.

Tahap selanjutnya, penguatan kelembagaan Koperasi selain diberikan kegiatan pendampingan, juga melakukan studi banding kepada Koperasi yang sudah maju untuk meningkatkan motivasi, inspirasi dan akses jaringan kemitraan. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui observasi, dialog secara non formal dan musyawarah pengurus serta anggota Koperasi. Indikator monitoring dan evaluasi berupa kelengkapan administrasi, catatan dan laporan keuangan, sirkulasi penjualan, banyaknya modal, produk dan keuntungan, kemudian catatan dan kelancaran pinjaman, jumlah, keaktifan dan administrasi keanggotaan. Hasil dari monitoring dan evaluasi perlu menggabungkan kelompok usaha ekonomi yang sudah ada di masyatakat untuk menjadi anggota, pengurus dan unit usaha yang berada dalam struktur Koperasi.

Hasil evaluasi merekomendasikan program pendampingan Koperasi untuk menjadi Koperasi yang berbadan hukum supaya dapat melakukan kerjasama secara formal khususnya dalam memperoleh pinjaman permodalan dari pihak Bank, dan bantuan-bantuan dari pihak pemerintah serta kemitraan swasta.

Tahap penguatan dan pengembangan Koperasi dan kewirausahaan masyarakat dilaksanakan dengan membuka akses kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan untuk berdialog tentang perkembangan Koperasi di masyarakat desa. Tindak lanjut dari dialog tersebut, diharapkan pihak pemerintah daerah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang sudah dibuat dan dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Kemudian membuka akses dan memfasilitasi supaya Koperasi dapat berbadan hukum, serta mendapat sosialisasi program pinjaman kredit usaha rakyat dari Bank pemerintah untuk membantu permodalan kewirausahaan dan Koperasi. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi, perumusan, dan pencarian alternatif dari masalah. Kemudian menyusun agenda pemecahan dan proses pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut contoh identifikasi, analisis dan hasil monitoring pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang dapat disajikan pada gambar 27.

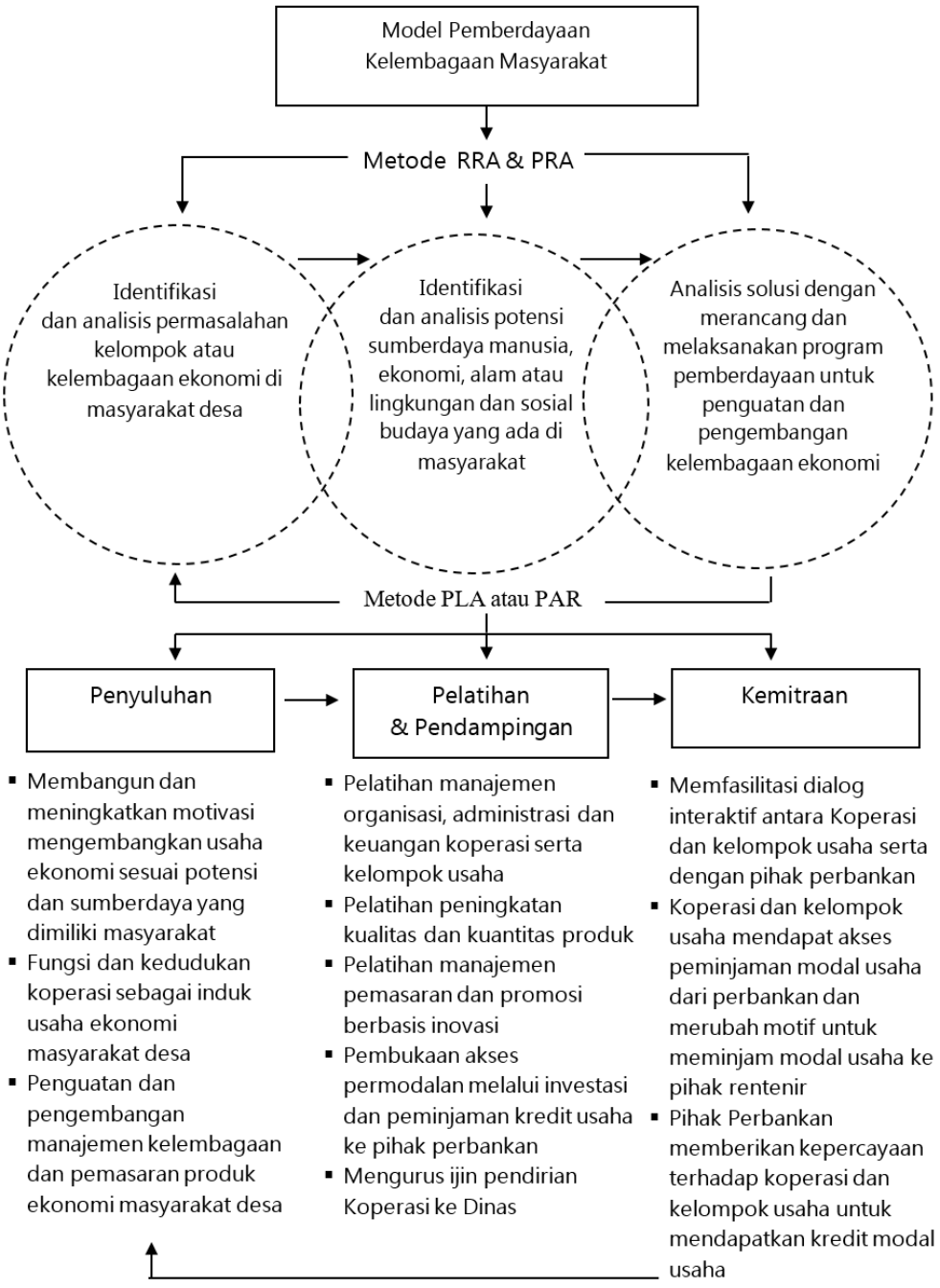

Gambar 27. Model Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

8.5. Pemberdayaan Ketahanan Pangan dalam Agrowisata dan Eduwisata

8.5.1. Permasalahan dan Potensi Ketahanan Pangan

Pemberdayaan ketahanan pangan dalam agrowisata dan eduwisata merupakan hasil penelitian Sulaiman dan Kuncoro (2018). Dinamika pembangunan memiliki permasalahan yang saling berkaitan, seperti bertambahnya jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan, kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang rendah, lemahnya kedaulatan dan ketahanan pangan mandiri, ketergantungan pemenuhan bahan pokok pada impor, serta industri yang kurang mendukung potensi ekonomi kerakyatan. Sehingga masih semakin tingginya harga bahan pokok, karena sedikitnya generasi petani yang kurang berminat meneruskan usaha pertanian, lebih memilih urabisasi dan menjadi pekerja migran. Kemudian lahan pertanian semakin sempit terutama dampak industrialisasi skala besar yang seharusnya sesuai dengan persyaratan dan hasil uji analisis dampak lingkungan, tidak terjadi kesalahan alih fungsi lahan pertanian produktif, kemudian menghindari lingkungan yang tercemar seperti pencemaran tanah dan air dengan limbah dan polusi udara.

Problematika tersebut menjadi catatan penting dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa semakin adanya peningkatan jumlah penduduk, berkembangnya sektor ekonomi dan industrialisasi, akibatnya terjadi alih fungsi lahan dan penurunan luas lahan khususnya dalam pertanian untuk pangan yang dapat menjadi ancaman untuk daya dukung wilayah secara lokal, regional serta nasional dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan pangan.

Lemahnya ketahanan pangan telah mengakibatkan impor berbagai macam produk pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional. Terus meningkatnya jumlah penduduk serta produksi pangan yang terancam, sehingga menimbulkan kekhawatiran rawan pangan di masa depan, sehingga memerlukan penambahan lahan pangan dan kesediaan pangan.

Dinamika pembangunan, salah satu bidang terpenting adalah mengatasi permasalahan kedaulatan dan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa kedaulatan pangan merupakan hak bangsa serta negara untuk mewujudkan kemandirian dan menetapkan kebijakan tentang pangan supaya adanya jaminan hak dan sistem pangan untuk masyarakat berdasarkan kekuatan sumber daya lokal yang dimiliki. Sehingga kemandirian pangan sebagai kekuatan (kemampuan) bangsa

untuk melakukan produksi berbagai macam pangan di dalam negeri yang memiliki kemampuan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan pangan mulai tingkat individu berdasarkan pemanfaatan berbagai potensi seperti sumber daya manusia, ekonomi, sosial, kearifan lokal, dan alam. Ketahanan pangan merupakan kemampuan pemenuhan pangan dari segi kualitas mutu, keamanan, gizi, terjangkau dan merata dari negara sampai individu, maka terjaminnya kehidupan yang aktif, produktif, dan sehat secara berkelanjutan.

Keunggulan dimiliki Indonesia dengan potensi sumber daya manusia yang cukup besar, sebagai negara agraris dengan sumber daya alam, beragamnya sumber pangan, pantai dan lautan yang luas dapat berdaulat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebagaimana menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2013, dengan menempatkan stabilisasi produksi dan ketahanan pangan yang keberlanjutan sebagai prioritas utama serta strategis dalam pembangunan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Laporan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2016, bahwa ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang fokusnya untuk meningkatkan tersedianya pangan, percepatan berbagai macam pangan, pengawasan keamanan pangan serta pemantapan distribusinya. Tujuannya terjadi peningkatan bidang ekonomi, pengembangan sosial budaya dan dapat menurunkan jumlah kelompok miskin.

Terdapat permasalahan ketahanan pangan unggulan yang potensial seperti produk hortikultura di kawasan agrowisata yaitu: (1) Buah stroberi sebagai hasil panen unggulan oleh kelompok tani langsung jual kepada tengkulak yang sudah berlangganan secara turun temurun (tradisi) yang sudah terjalin ikatan kekeluargaan. Penjualan langsung juga tidak ada resiko beban distribusi dan langsung dapat menerima keuntungan. Sedangkan pengolahan pasca panen seperti menjadi produk minuman sirup, selai, dan sambel, dan manisan dinilai kurang praktis serta efisien, karena waktu yang lebih lama dari segi proses pembuatan sampai penjualan.

(2) Kelemahan produk buah stroberi terkadang tidak bisa mempertahankan keberlanjutan jumlahnya dikarenakan serangan hama dan lamanya curah hujan. Antisipasinya dengan mengajukan bantuan dinas pertanian, peneliti dan ahli seperti dari perguruan tinggi serta praktisi untuk penanggulangan hama, supaya petani mendapat pemberdayaan dengan penyuluhan dan pelatihan adopsi inovasi dalam mengelola *greenhouse* serta diberikan bantuan bangunannya atas kerjasama perguruan tinggi dan

pemerintah supaya dapat merekayasa budidaya stoberi dan komoditas holtukultura lainnya.

(3) Pemerataan program pemberdayaan bagi masyarakat, supaya semua pihak dapat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Masih kurangnya keterlibatan kelompok perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan program pemberdayaan dan pengambilan keputusan.

(4) Program pendampingan perlu ditingkatkan untuk peningkatan produksi khususnya pengolahan produk pasca panen berupa minuman serta makanan yang bisa menghasilkan produk yang unik, menarik dan memiliki nilai tambah serta sebagai produk khas. Hal tersebut dikarenakan keindahan sumber daya alam yang asli dan asri sebagai lokasi ekowisata dan agrowisata sudah dinilai sangat cukup mendatangkan keuntungan yang lebih cepat serta praktis.

(5) Program pemberdayaan sudah sering diberikan dari berbagai lembaga, tetapi kurang berkelanjutan dan komprehensif, tidak ada monitoring serta evaluasi kegiatan. Artinya banyak penyuluhan dan pelatihan yang diberikan tetapi kurang menyeluruh, kurang terpadu (sinkronisasi), serta kurang ada perhatian pada audit hasil atau audit dampak dari lembaga penyelenggara program pemberdayaan. Sehingga masing-masing lembaga mengadakan pemberdayaan secara parsial sesuai kepentingannya, kurang melakukan evaluasi hasil, kurang ada kerjasama, pendampingan dan kemitraan antar lembaga. Pihak pemerintah desa perlu memberikan perhatian pada keberlanjutan program pemberdayaan yang telah diberikan, sehingga ketika ada pihak yang menawarkan dan melakukan program pemberdayaan dapat melaksanakan program yang dibutuhkan tetapi belum dilaksanakan, atau dapat melaksanakan lagi program yang sudah diberikan pihak lain karena masih diperlukan keberlanjutan. Pihak yang memberikan program pemberdayaan seharusnya dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil program pemberdayaan yang sudah diberikan pihak lain, kemudian dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak yang telah melakukan program pemberdayaan.

(6) Faktor penghambat adanya pengembangan agrowisata khususnya untuk komoditas pasca panen seperti minuman dan makanan khas tetapi belum ada pusat kuliner, atau warung makan, rumah makan dan Agrimart secara terintegrasi dalam satu area kawasan dengan menjaga kenyamanan, kebersihan dan estetika yang menarik pengunjung. Hal ini membutuhkan

kemitraan untuk mendatangkan investasi membangun infrastruktur baik jalan akses ke lokasi yang lebih luas dan bagus, pusat jajanan kuliner, Agrimart dan rumah makan yang khas bersumber dari ketahanan pangan di lokasi Agrowisata.

Berdasarkan permasalahan dalam ketahanan pangan dan pengembangan agrowsiata dapat diantisipasi dengan merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di tingkat desa dan mewujudkan kedaulatan serta kemandirian pangan. Dengan demikian desa dan masyarakatnya bukan objek pembangunan, tidak semua meninggalkan desa untuk mencari kerja keluar daerah (urbanisasi) yang membuat perkotaan semakin padat serta menjadi pekerja migran dengan kompleksitas permasalahannya mulai dari keberangkatan, proses bekerja sampai kepulangan. Program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat desa terlibat secara penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan.

8.5.2. Pemberdayaan Agrowisata dan Eduwisata Berbasis Kearifan Lokal

Pemberdayaan agrowisata dan eduwisata berbasis kearifan lokal sebagai hasil penelitian dari Sulaiman dan Kuncoro (2018). Bentuk pembangunan yang mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ketahanan pangan seperti pemberdayaan wisata yang berbasis pertanian atau Agrowisata dan wisata yang menjadi pendidikan pertanian atau ketahanan pangan disebut eduwisata.

Keunikan desa wisata daerah pegunungan dengan potensi ketahanan pangan hortikultura dan memiliki kegiatan rutin tahunan berupa festival budaya sebagai kearifan lokal yang dapat mendukung serta menjadikan daerah agrowisata. Perkembangan selanjutnya agrowisata selain mengandalkan keindahan alam, budaya dan hasil produksi ketahanan pangan, juga dapat menyediakan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), pendidikan dan pelatihan (Diklat), perkemahan, *outbond*, permainan ketangkasan, praktikum dan riset pertanian dari berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swadaya masyarakat dan swasta. Hal tersebut merupakan bentuk pengembangan agrowisata menjadi kawasan eduwisata atau wisata yang memberikan wahana serta materi pendidikan alam atau pertanian. Beberapa fasilitas pendukung yang dapat disediakan lokasi agrowisata dan eduwisata seperti taman bunga,

taman labirin, taman bermain, lahan perkemahan, *outbond* atau permainan ketangkasan, *homestay activity*, *trekking*, *agrokids*, *atv bike, high rop*e, petik buah, *flying fox*, dan berkuda.

Desa agrowisata yang memiliki kearifan lokal *(local wisdom*) indikasinya: (1) Memiliki budaya menanam misalkan hortikultura yang sudah turun termurun sebagai ketahanan pangan lokal baik di sekitar pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun komoditas unggulan secara massal untuk komersial dalam bentuk usaha bersama. (2) Proses pengambilan keputusan selalu dilakukan secara musyawarah antara masyarakat dengan kepala desa dalam menyepakati dan menetapkan jenis komoditas tanaman hortikultura yang bersifat massal dan komersil. (3) Masyarakat memiliki kohesifitas atau guyub untuk bekerjasama dan meminimalisir persaingan, dengan cara penentuan komoditas unggulan hortikultura, proses penanaman dan pemeliharaan, panen raya serta penjualan hasil panen dilakukan bersama-sama. Keuntungan dan kerugian dari hasil panen menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada satu kelompok yang untung dan mengalami kerugian sendiri dengan istilah kearifan lokal orang Jawa "*Tuna Satak Bathi Sanak*" artinya rugi sedikit tidak masalah yang penting ikatan persaudaraan tetap terjaga. (4) Memiliki ikatan persaudaraan yang saling percaya dan saling menguntungkan sudah terjalin sejak lama antara masyarakat dengan pengepul atau tengkulak untuk bertransaksi hasil panen raya komoditas hortikultura. Masyarakat tidak mau membuka atau menerima akses baru dalam pemasaran produk hortikulturanya, karena tidak mau merusak ikatan persaudaraan dengan tengkulak. (5) Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani memiliki dana sukarela dengan menyerahkan dana dalam jumlah tertentu setiap setiap petani setiap bulannya sebagai dana tabungan sosial jika terjadi kerugian dalam panen. Mempertahankan tradisi menanam tanaman hortikultura baik di pekarangan rumah untuk mencukupi kebutuhan harian, maupun di lahan luas yang bersifat komersial, selain sebagai sumber mata pencaharian juga sebagai kearifan lokal yang menjadi ciri khas dan daya tarik yang dapat mendukung terhadap perkembangan agrowisata dan eduwisata. Ketahanan pangan lokal dengan menanam komoditas hortikultura di sekitar halaman rumah bahkan bisa menjadi solusi untuk menghadapi krisis moneter, kenaikan harga sembako, dan kenaikan bahan bakar minyak, karena masyarakat mampu bertahan dan mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri tidak terpengaruh krisis moneter.

Eduwisata adalah daerah yang memiliki potensi kawasan wisata berupa keindahan alam dan lingkungan, ciri khas secara sosial kemasyarakatan dan

produk ekonomi yang dihasilkan yang bisa menjadi objek atau tempat kegiatan pendidikan, pelatihan, kajian, riset dan praktikum. Eduwisata merupakan kegiatan wisata pendidikan yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengeksplorasi dan mengkonstruksi realitas faktual secara langsung pada objek keindahan lingkungan alam, pola ciri khas sosial budaya masyarakat, proses pembuatan keputusan, kelembagaan masyarakat, kearifan lokal, kegiatan ekonomi dan proses produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan, pemasaran serta adopsi inovasi.

Program pemberdayaan pendidikan wisata atau eduwisata dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian, adopsi dan difusi inovasi dalam rekayasa pertanian, seperti budidaya dengan hidroponik dan mengelola *greenhouse*. Pemberdayaan dalam membuat pupuk organik, penanggulangan hama tanaman, serta pembibitan produk unggulan. Kemudian pengolahan dan pengemasan produk hasil panen sebagai produk kreatif serta inovatif selain mengembangkan program petik langsung di kebun stroberi. Produk sayuran dan buah-buahan dapat menjadi produk yang dijual langsung dengan kemasan yang menarik, dapat juga disajikan seperti makanan sayuran aneka olahan dan buah-buahan dibuat minuman juice yang disajikan di kedai, rumah makan atau dengan mini market Agrimart.

Pengembangan agrowisata dan eduwisata membutuhkan pendampingan untuk menjalin dan memperluas jaringan komunikasi dan peluang (*networking*) kemitraan serta investasi dari pihak pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi. Kemitraan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta pemasaran, seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi (Saprodi) pertanian seperti bibit, pupuk, peralatan dan perlengkapan pertanian. Penyediaan alat mesin pengemasan, label produk, pembangunan Agrimart dan *Greenhouse*. Peningkatan dan penambahan fasilitas tempat wisata, *outbond*, perkemahan, permainan, penginapan, warung atau rumah makan, dan infrastruktur jalan.

Berdasarkan tahapan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengembangan agrowisata dan eduwisata, dapat dibuat model pada gambar

28.

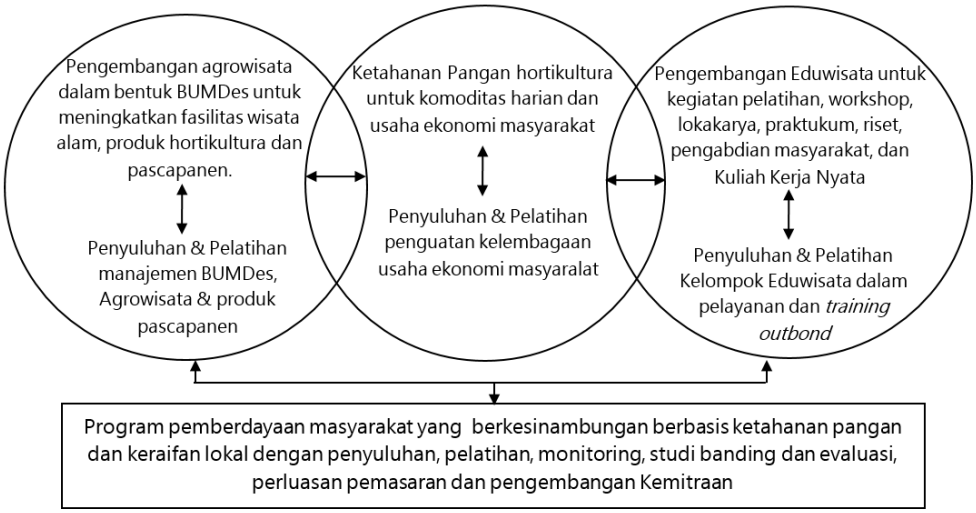

Gambar 28. Model Pemberdayaan Ketahanan Pangan dalam Agrowosata dan Eduwisata
Sumber: Sulaiman & Kuncoro (2018)

Tahapan terakhir dari program pemberdayaan adalah adanya kemandirian dari individu, kelompok dan kelembagaan dari masyarakat petani, sehingga tidak ada ketergantungan dengan mendambakan program pemberdayaan secara terus menerus dari pihak luar. Kemandirian bisa menjadi percontohan dan penggiat atau aktor pemberdayaan untuk daerah lainnya supaya bisa sama-sama berkembang, maju, dan mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dimulai proses studi atau kajian pendahuluan, membuka akses ke lokasi dan sasaran pemberdayaan, pembuatan serta kesepakatan program penyuluhan, implementasi pemberdayaan dalam bentuk memberikan penyuluhan, pelatihan-pelatihan, studi banding, dan pendampingan sampai tahapan tujuan terakhir menciptakan kemandirian. Maka dapat dibuat contoh model pengembangan agrowisata dan eduwisata berbasis ketahanan serta kearifan lokal sebagaimana gambar 29.

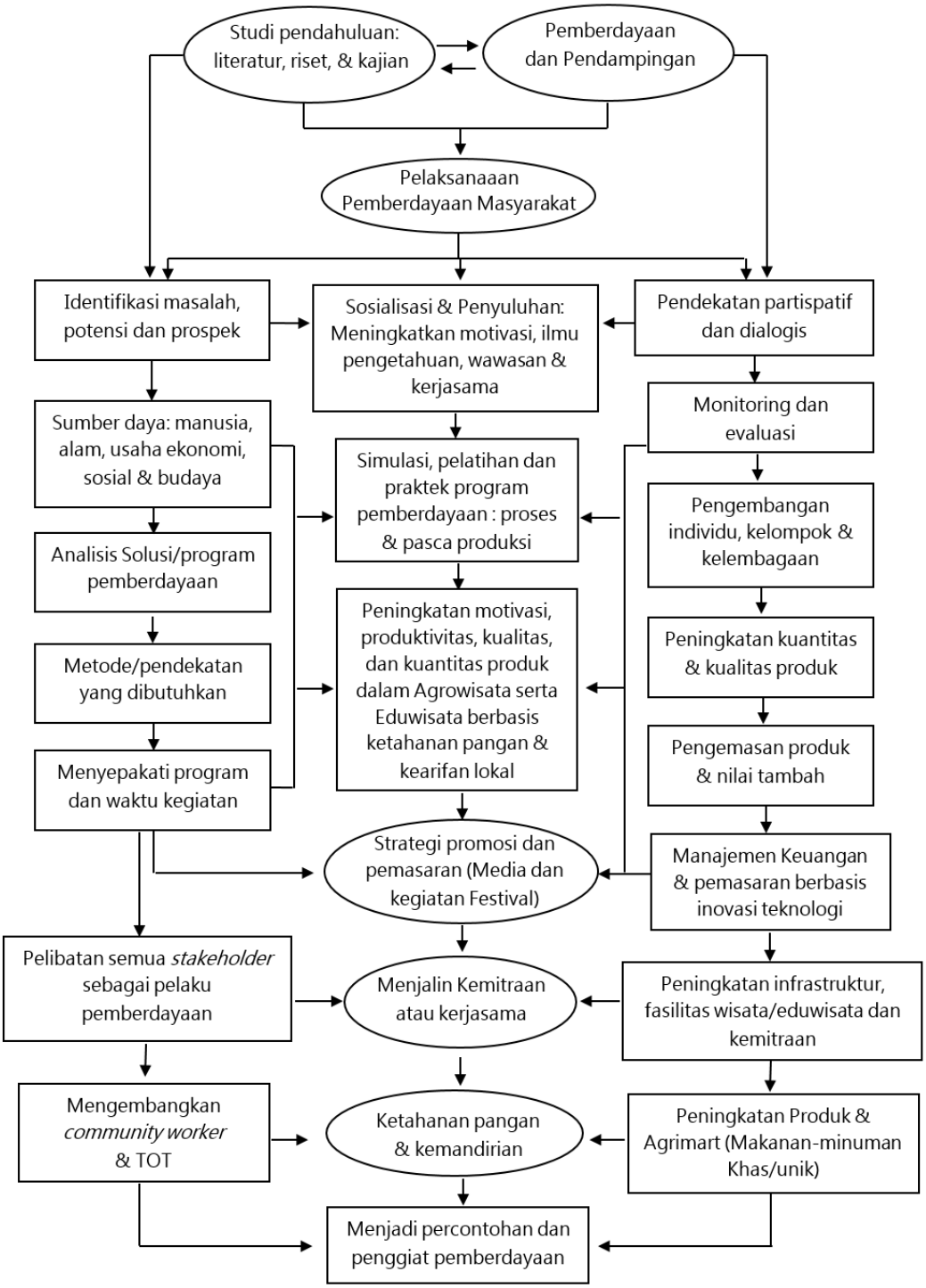

Gambar 29. Model Pemberdayaan Pengembangan Agrowisata dan Eduwisata
Sumber: Sulaiman et al. (2019a)

8.6. Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

8.6.1. Problematika Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian Sulaiman et al. (2016) salah satu hasilnya tentang problematika penyalahgunaan Narkoba, bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi unsur penting dan menentukan dalam pengelolaan serta pengembangan sumber daya seperti sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya dan alam atau lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam pembangunan. Terdapat hambatan dan ancaman dalam pembangunan khususnya pada SDM salah satunya dari penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak psikologi, motivasi, kreativitas, kesehatan, produktivitas dan moralitas individu.

Berdasarkan Press Release BNN (2016) menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika sebagai *extraordinary crime* atau kejadian luar biasa, sebagai ancaman dunia dan bisa sebagai senjata yang dipergunakan untuk menyerang serta mengalahkan suatu bangsa sebagai bentuk *proxy wair*. Penyalahgunaan Narkoba yang rentan menjadi sasaran atau korban umumnya generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang disebabkan faktor (1) Lemahnya pengawasan orang tua dan (2) Labilnya psikologi remaja sehingga mudah terjerumus menggunakan Narkotika.

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai zat atau obat yang sebetulnya diperlukan dan sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi, apabila terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan standarisasi pengobatan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sehingga mengakibatkan kerugian bagi individu, kelompok dan masyarakat, terutama generasi muda. Dampak kerugian akan semakin besar seperti merusak tatanan nilai, moral dan budaya bangsa yang melemahkan ketahanan nasional. Selanjutnya realitas menunjukkan pelanggaran tindak pidana Narkotika di masyarakat memiliki kecenderungan yang semakin meningkat secara kualitatif dan kuantitatif termasuk jumlah pengguna dan atau korban khususnya kalangan pelajar, remaja, serta generasi muda pada umumnya.

Era teknologi komunikasi dan media informasi melalui internet yang sudah mudah diperoleh, menarik dan tanpa batas ruang, jarak dan waktu selama akses serta perangkat internetnya tersedia, maka proses interaksi dan pengaruhnya bagi perkembangan ramaja akan semakin cepat. Pelajar atau remaja umumnya menilai media teknologi internet memiliki fungsi sebagai media interaksi, media hiburan, dan media untuk mencari referensi yang

mendukung ilmu pengetahuan. Namun pada sisi lain media teknologi internet memiliki dampak negatif seperti *phubbing* atau ketergantungan menggunakan perangkat smartphone dan *game online*, pornografi, pengaruh atau adopsi aksi kekerasan, sehingga menjadi lupa waktu, dan menghabiskan waktu belajar. Penyebab dari penyalahgunaan dan kecanduan Narkoba, media sosial dan perilaku menyimpang khususnya generasi muda karena ingin coba-coba dan ada pengakuan hebat atau berani dari temannya, salah pergaulan, pengaruh negatif teman, pelarian dari masalah pribadi dan keluarga atau lingkungan, frustasi, depresi, pengaruh bebas dan mudahnya akses media sosial serta kurang perhatian keluarga dan lemahnya kontrol sosial.

Berdasarkan Puslitdatin atau Pusat Penelitian Data dan Informasi dari Badan Narkotika Nasional tahun 2016, bahwa tingkat pengetahuan publik tentang Narkotika sebetulnya sudah cukup baik, tetapi masih rendahnya tingkat pemahaman untuk pencegahan Narkoba. Hal tersebut memerlukan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi yang lebih optimal khususnya dalam penguatan pencegahan yang efektif dari ancaman bahaya narkoba.

Berikut ini deskripsi dari motif penyebab dan dampak penyalahgunaan Narkoba sebagaimana pada gambar 30.

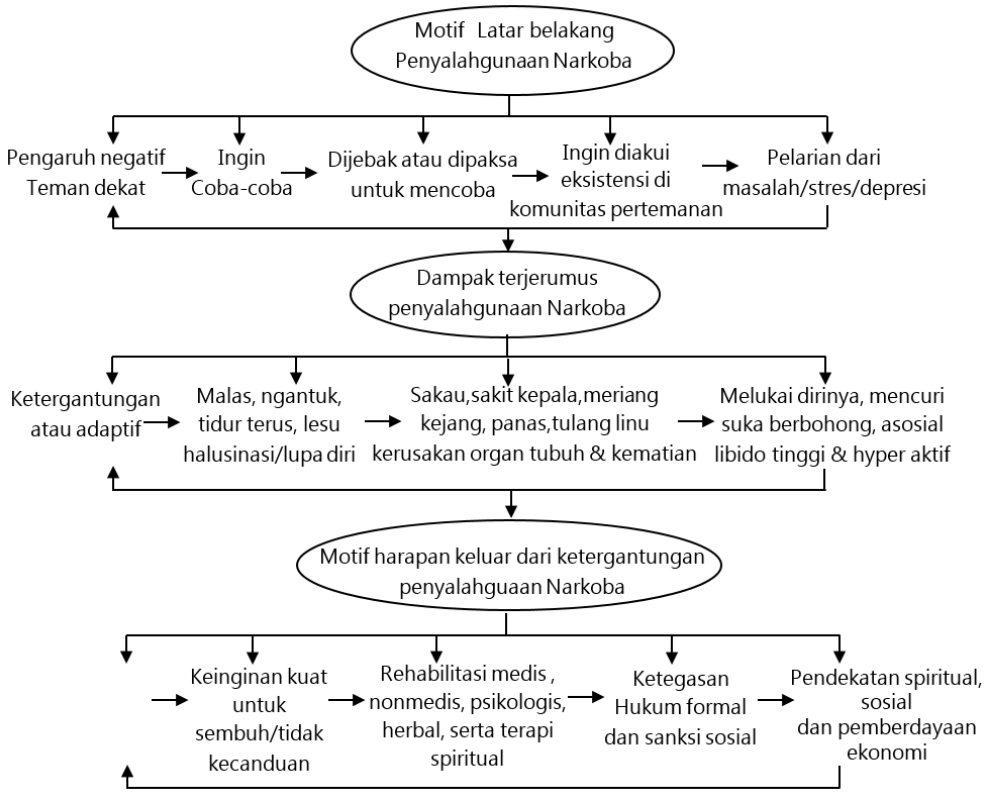

Gambar 30. Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba
Sumber: Sulaiman et al. (2016)

Menghadapi penyalahgunaan Narkoba selain melalui pemberantasan dan penegakan hukum yang tegas, juga ada upaya pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat dan rehabiltasi sebagaimana menurut Jakstranas P4GN atau kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada tahun 2011-2015 yang meliputi: (1) Bidang pencegahan, (2) Bidang pemberdayaan masyarakat, (3) Bidang rehabilitasi, dan (4) Bidang pemberantasan.

Rehabilitasi untuk pecandu Narkoba dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 1 Ayat (16) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Kemudian pada ayat (17) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis dan sosial dapat didukung dan dilengkapi dengan konseling psikologi untuk memulihkan mental dan kejiwaan, kemudian dengan konseling dan terapi religi atau spiritual (keagamaan). Kasus rehabilitasi Narkoba di daerah yang ditanggulangi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dengan memberikan rekomendasi rehabilitasi secara medis yang telah secara ilmiah kedokteran dapat dipertanggung jawabkan. Tempat rehabilitasi yang biasa direkomendasikan untuk rawat jalan ke RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah dan untuk rawat inap contohnya ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Jl. Kaliurang KM 17 Pakem, Sleman Yogyakarta. Masih terdapat permasalahan dalam rehabilitasi seperti: (1) Pasien narkoba terkadang sengaja ingin terus mengikuti rehabilitasi medis karena ingin mendapatkan dan atau mengonsumsi obat gratis, maka aturan untuk penurunan dosis secara teratur supaya tidak kecanduan Narkoba lagi menjadi tidak berhasil. (2) Masih terdapat apotek yang melakukan penyalahgunaan perijinan untuk menjual obat-obatan tertentu yang diresepkan dokter untuk rehabilitasi pasien Narkoba. (3) Modus pasien narkoba yang ingin direhabilitasi untuk rawat nginap di Rumah Sakit yang memiliki rekomendasi, tetapi motifnya supaya tidak dituntut hukum, bahkan menghindari untuk memberikan informasi penting penyalahgunaan dan penyebaran jaringan Narkoba. (4) Transaksi narkoba ternyata terus berlangsung melalui jaringan pengedar yang dilakukan pasien yang sedang direhabilitasi dan narapida.

BNNK merekomendasikan proses rehabilitasi dengan komprehensif, selektif, serta melalui monitoring yang ketat untuk meraih capaian kesembuhan dengan dirawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN Lido Jalan H.R. Edi Sukma, Watesjaya, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk rehabilitasi yang dilakukan oleh panti atau yayasan sosial keagamaan milik masyarakat BNNK kurang merekomendasikan karena (1) Berdasarkan struktur dan fungsi BNNK dalam proses rehabilitasi harus berkordinasi dengan rumah sakit daerah yang direkomendasikan secara resmi. (2) Penilaian rehabilitasi di panti atau yayasan sosial menggunakan metode non medis dengan spiritual religius dan herbal yang tidak memiliki standarisasi secara medis dan ilmiah. Akan tetapi BNN di daerah tetap bermitra dengan yayasan sosial dan atau keagamaan dalam rehabilitasi, penanggulangan, dan kampanye penyebaran narkoba, membentuk kelompok kader-kader anti penyalahgunaan Narkoba khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda. (3) Kedua yayasan panti rehabilitasi berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial sehingga mendapat bantuan tenaga konselor atau pendamping seperti Pekerja Sosial (Peksos) dan bantuan dana program kegiatan rehabilitasi.

Terjadinya penyalahgunaan Narkoba khususnya pada generasi muda yaitu: (1) Pecandu Narkoba dapat dikatakan sebagai korban yang harus mendapat perhatian, pertolongan, dan pemulihan dengan cara rehabilitasi. Namun penegakan hukum kepada pecandu Narkoba sekaligus pengedar tetap harus ditegakkan proses hukum. (2) Latar belakang motif pasien Narkoba umumnya dikarenakan adanya ketidakharmonisan dalam keluarga seperti terjadi konflik berkepanjangan, kurang kasih sayang, dan perhatian sehingga Narkoba dijadikan pelarian rasa kecewa serta frustasi. Motif lainnya karena rasa penasaran ingin mencoba, pengaruh negatif teman dan lingkungannya. (3) Niat dan tekad yang kuat untuk keluar dari jeratan Narkoba menjadi faktor yang menentukan dalam rehabilitasi untuk tidak lagi ketergantungan Narkoba. (4) Kesembuhan pasien Narkoba sangat susah, maka memerlukan rehabilitasi dengan konseling, pengobatan baik medis maupun non medis, melakukan pendampingan serta kegiatan pemberdayaan peningkatan potensi sumber daya. Kemudian rahabilitasi medis, non medis dan sosial ekonomi ditunjukan untuk menumbuhkan kemandirian supaya kembali lagi dapat diterima, dan bersosialisasi atau berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.

Begitupun menurut hasil riset Puslitdatin BNN (2016) alasan mengunakan Narkoba pertama kali ingin mencoba, ajakan teman, masalah keluarga, lingkungan keluarga dan pertemanan, paksaan, bersenang-senang, stres (tekanan masalah), dan mudah didapat atau dibeli.

Berikut ini ilustrasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ekonomi sebagai kegiatan pemberdayaan untuk pasien Narkoba supaya tidak ketergantungan atau sakau Narkoba, perubahan pola pikir dan sikap mental yang lebih positif serta produktif dengan memiliki semangat untuk bekerja dan berwirausaha. Kemudian dapat bersosialisasi lagi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Berikut ini gambar 31 rehabilitasi medis dan sosial ekonomi sebagai pemberdayaan bagi pasien Narkoba.

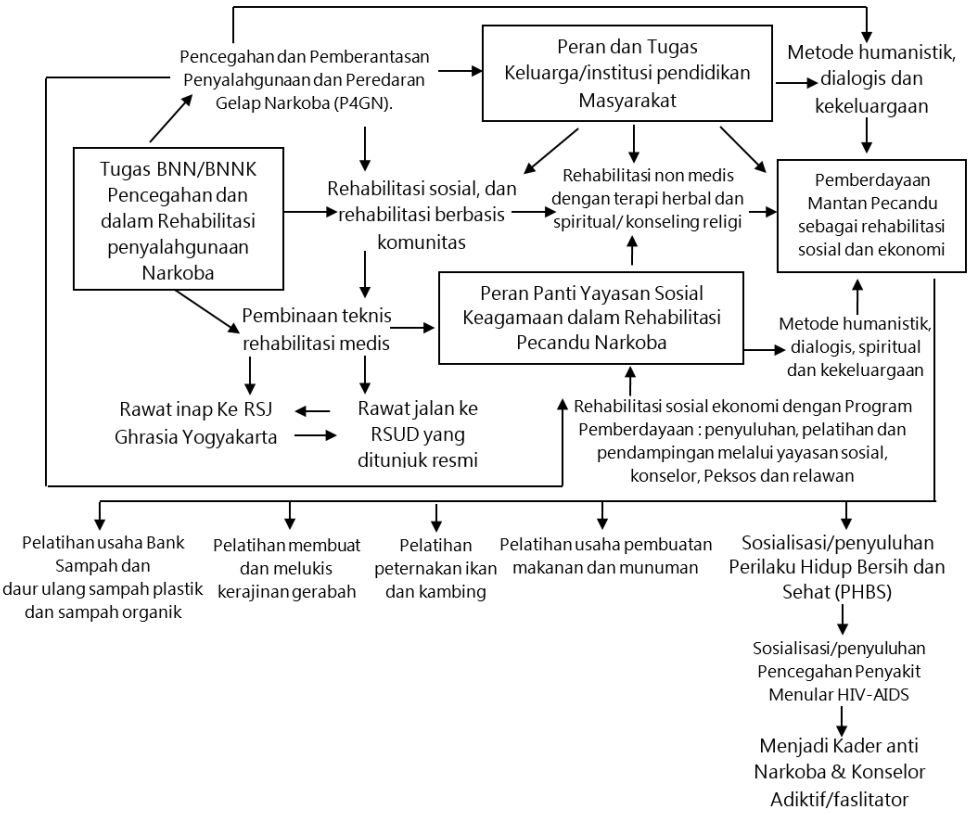

Gambar 31. Rehabilitasi Medis dan Pemberdayaan sebagai Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi bagi Eks Pecandu Narkoba
Sumber: Dimodifikasi dari Sulaiman et al. (2016)

8.6.2. Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Spiritual dan Sosial

Pemberdayaan dalam rehabilitasi spiritual dan sosial dikutip berdasarkan hasil penelitian Noegroho et al. (2018). Terdapat Yayasan sosial keagamaan yang memiliki peran pada bidang ekonomi, pendidikan serta sosial khususnya melakukan rehabilitasi terhadap pasien Narkoba yang sangat membantu khususnya BNN di daerah serta masyarakat untuk turut serta mencegah dan merehabilitasi pasien Narkoba. Pada awalnya yayasan sosial keagamaan berperan sebagai tempat rehabilitasi bagi pasien yang terkena gangguan jiwa seperti depresi dan stres. Penanganan rehabilitasi pasien Narkoba tidak hanya tanggung jawab secara formal ditangani rumah sakit yang dirujuk dengan pendekatan medis untuk merehabilitasi pasien Narkoba.

Yayasan sosial keagamaan menjadi tempat alternatif untuk merehabilitasi kecanduan Narkoba walaupun dengan pendekatan yang dilakukan secara religius (agama) dan non medis, karena dinilai lebih nyaman dan aman terutama dari sanksi sosial dan stigma negatif di masyarakat.

BNN, BNNK dan Kementerian sosial memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi pengedaran serta penyalahgunaan Narkoba, namun dapat dibantu oleh semua pihak untuk ikut berpartisipasi lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan. Walaupun pemerintah memiliki program dan anggaran dalam pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA tetapi tetap saja memerlukan kepedulian dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan segala potensinya seperti mewujudkan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RSBM) (Depsos, 2005). Kepedulian dan partisipasi dari semua pihak terhadap pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba menjadi sebuah kewajiban untuk berbuat kebaikan bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negera.

Proses konseling dan terapi religi sebagai rehabiltasi terhadap pasien Narkoba setelah fase kecanduan pulih, dapat dilanjutkan pada tahap program pemberdayaan sebagai rehabilitasi sosial dan ekonomi berupa penyuluhan, pelatihan dan pendampingan serta jika memungkinkan ada program studi banding untuk mengembangkan memotivasi dan pengembangan diri seperti untuk pembentukan kelompok usaha ekonomi berdasarkan minat, serta bakat atau potensi dari pasien Narkoba. Bekal keterampilan, kemampuan dan motivasi tinggi berwirausahaa ekonomi dapat dijadikan media untuk diterima kembali dan bersosialisasi dengan keluarga serta masyarakat, kemudian dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan serta dijauhkan lagi dari pengaruh pergaulan penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan Press Release BNN (2016) menjelaskan di daerah rawan pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika, BNN melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sebagai implementasi program pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensinya. Pemberdayaan masyarakat dapat membangun karakter individu yang memiliki semangat etos kerja dan mandiri, sehingga Narkotika tidak lagi dijadikan objek bisnis.

Proses rehabilitasi pasien Narkoba di yayasan lembaga sosial keagamaan sebagai berikut: (1) Pendekatan, praktik dan konseling religi untuk mengembalikan jati diri manusia yang memiliki ketauhidan, keimanan dan ketaqwaan. Maka semua kegiatan kehidupan merupakan ibadah dengan melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta menjadi manusia yang

membawa rahmat bagi lingkungan atau seluruh alam. (2) Proses rehabilitasi dengan konseling religi melalui ritual keagamaan untuk memperkuat kembali keimanan dengan melaksanakan ibadah seperti salat lima waktu, salat sunnah, berdzikir, dan mengaji. Kemudian berinteraksi melalui pengajian, ceramah, renungan malam, tadabbur alam atau menikmati keindahan alam, dan wisata religi. (3) Menanamkan mentalitas bahwa kesembuhan yang menentukan adalah Alloh (Tuhan) tetapi kuncinya harus berawal dari niat dan tekad yang kuat dalam diri pasien narkoba dan menanamkan rasa takut berdosa, dampak negatif yang dapat merusak terhadap dirinya baik kesehatan, akal pikiran, mental, kehidupan keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi di yayasan sosial keagamaan ada yang menggunakan metode campuran secara medis dan non medis (pendekatan religi) dengan prinsip bahwa ada tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan yaitu: (a) Bersifat ilmiah dengan melakukan prosedur medis terlebih dahulu dalam menangani pasien Narkoba, sehingga ada pengecekan kesehatan atau diagnosa, laboratorium, dan penanganan secara medis (pengobatan). (b) Bersifat alamiyah dengan menggunakan lingkungan alam yang asri, bersih, sehat dan indah sebagai media terapi atau rehabilitasi dengan memanfaatkan keberadaan tempat dan lingkungan sekitar panti dan membawa pasien ke lokasi tempat wisata alam. (c) Bersifat Ilahiyyah dengan melakukan pendekatan konseling religi untuk mengembalikan manusia ke dalam kebutuhan spiritual atau rohaninya melalui ritual-ritual keagamaan atau beribadah salat, berdzikir dan siraman rohani.

Proses rehabilitasi lainnya dengan pendekatan konseling religi secara non medis dan didukung herbal dan spiritual dengan proses penyembuhan melalu media ibadah salat, zikir, salawat serta siraman rohani. Semua unsur medis seperti obat-obatan dan diagnosa kesehatan secara medis tidak dilakukan. Namun tidak menutup diri terhadap penyuluhan dan pengecekan secara medis seperti dari fakultas kesehatan dan kedokteran atau dinas kesehatan.

Proses rehabilitasinya seperti: (1) Konseling dengan pendekatan kekeluargaan dan persahabatan antara para konselor atau pendamping kepada pasien Narkoba. Sehingga terciptanya kedekatan, dialog, keterbukaan dan saling pengertian, yang menghasilkan identifikasi konsep diri atau motif latar belakang terjerumus Narkoba. Konseling religi dilakukan setiap saat dengan melihat situasi dan kondisi pasien, tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya, terbuka, dekat dan mau saling berbagi cerita, mengetahui motif terjerumus Narkoba, masalah-masalah yang dihadapi serta harapan yang diinginkan. Kemudian jika

fase tersebut sudah diciptakan, maka secara bertahap memberikan konseling reiligi supaya pasien memiliki kepercayaan dan keyakinan lagi pada dasar agama. (2) Melakukan konseling religi melalui pendekatan konsep pendekatan keluarga seperti mengingatkan kembali jasa seorang ibu telah berjuang untuk melahirkan dan membesarkan. Konsep berbakti dan hormat kepada ibu dan bapak yang mencari nafkah serta kepada anggota keluarga yang mencintai serta menyayangi. Hal ini untuk merekonstruksi lagi kognisi, afeksi dan konasi positif atau menata kembali manajemen diri. (3) Media herbal untuk merehabilitasi para pasien yang kecanduan Narkotika dengan diberi ramuan minuman dari bahan herbal seperti air kelapa muda, daun sirih wulung, madu tawon, kunyit, kapulaga, dan kurma Ajwa. Bahan tersebut diramu menjadi minuman seperti jamu sebagai pengganti terapi obat-obatan yang khasiatnya dapat mengobati pasien yang mengalami sakau atau kecanduan, memulihkan stamina, vitalitas dan imunitas tubuh. (4) Terapi religi melalui salat berjamaah, berdzikir, dan ceramah rohani dengan pengajian oleh ketua lembaga yayasan dengan metode dialogis sebagai media terapi religi. Tujuannya supaya ada pengalihan konsentrasi, pemikiran dan aktivitas pasien supaya tidak kecanduan Narkotika serta memperdalam kembali akan keimanan untuk kembali mensyukuri dan merenungi kebesaran Tuhan (Allah SWT), mensucikan dari perbuatan dosa yang telah diperbuat, mengembalikan lagi peran atau tujuan dapat berbuat baik dan beribadah. (5) Melakukan ruqyah yang dilaksanakan semisal dua kali dalam seminggu secara massal yang diikuti pasien sendiri, kerabat atau keluarga pasien. Proses ruqyah dapat dilakukan malam hari dimulai setelah salat Isya berjamaah, shalat sunnah, pembacaan dzikir, dan pemberian tausiah, kemudian proses ruqyah dimulai dengan bacaan-bacaan doa dan ayat suci Al Qur'an. Kegiatan ruqyah ada juga yang dilakukan dengan media terapi air panas sebagai cara pengobatan merebus tubuh pasien pecandu Narkotika ke dalam tempat yang dapat menampung air dan dapat memuat satu orang sebagai tempat mandi seperti drum kaleng. Tempat berisi air yang direbus dan diberi ragi, ramuan daun jambu biji, daun kamijara dan daun salam, sudah di beri doa. Kemudian pasien masuk ke tempat berisi air panas yang direbus untuk merendam sampai batas dada pasien dengan posisi duduk. Waktu perebusan pasien selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Pelaksanaan terapi godog ini pada waktu sehabis maghrib hingga malam hari. Pasien yang telah direbus dilarang mandi air biasa, agar racun Narkotika dalam tubuh keluar dari pori-pori kulit berupa keringat. Metode ruqyah lainnya dengan terapi mandi malam yaitu pengobatan dilakukan dengan cara pasien pecandu Narkotika mandi secara mitos di tempat pertemuan tiga aliran sungai di sungai pada waktu tengah malam bisa seminggu sekali. Manfaatnya ruqyah mandi malam

di sungai terhadap pasien untuk melawan sakau dengan dinginnya air sungai dan memperlancar asupan oksigen yang didapatkan di alam sekitar lingkungan sungai yang masih bersih serta alami yang juga dapat dipergunakan pendekatan religi atau spiritual untuk lebih mendekatkan diri dan mengakui kebesaran Allah SWT serta meningkatkan kebersamaan. (6) Terapi lingkungan dengan mengunjungi lokasi tempat wisata alam seperti pegunungan, bukit, air terjun, sungai, pantai dan kolam renang sebagai media terapi religi untuk mendekatkan diri dan menguatkan keimanan pada Allah SWT melalui ciptaan-Nya berupa keindahan alam dengan kegiatan tadabbur alam, kemudian untuk menghibur, beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat serta lingkungannya supaya dapat mengurangi situasi dan kondisi yang terisolasi dari masyarakat umum, juga membangun kebersamaan, kekompakan dan keharmonisan bersama.

Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba secara non medis baik herbal maupun spiritual dapat dideskripsikan pada gambar 32 dan 33.

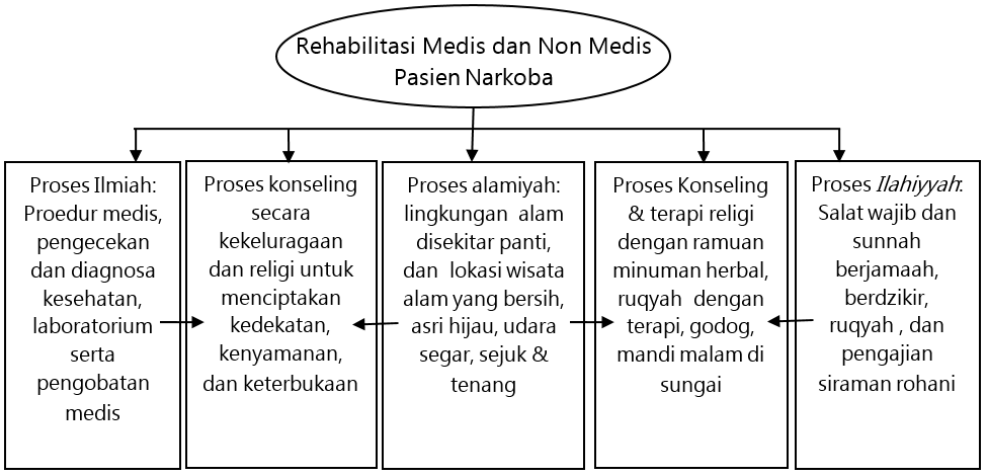

Gambar 32. Rehabilitasi Medis dan Non Medis Pecandu Narkoba
Sumber : Modifikasi dari Noegroho et al. (2018)

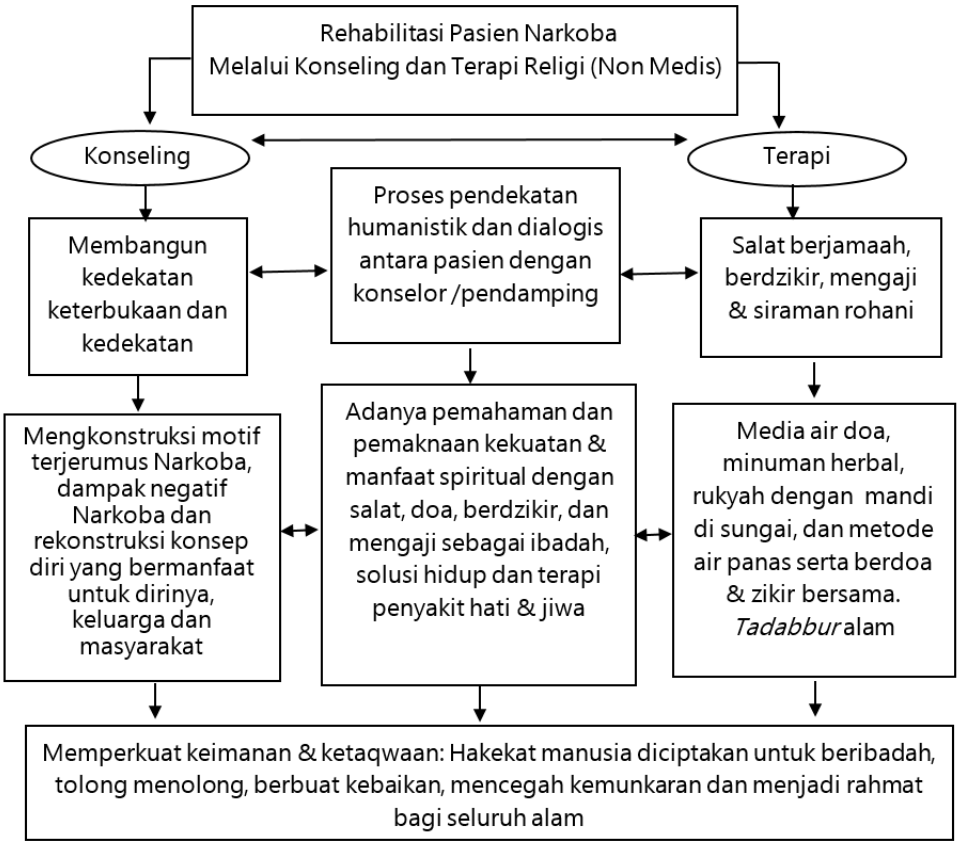

Gambar 33. Rehabilitasi Konseling dan Terapi Religi Pecandu Narkoba
Sumber : Dimodifikasi dari Noegroho et al. (2018)

8.6.3. Model Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Holistik

Model pemberdayaan dalam rehabilitasi holistik merupakan hasil penelitian Sulaiman et al. (2019a). Kepedulian dalam mengatasi dan merehabilitasi penyalahgunaan Narkoba bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh *civil society* seperti yayasan pendidikan sosial keagamaan. Dalam perkembangannya lembaga sosial keagamaan beradaptasi dengan dampak teknologi informasi dan komunikasi sehingga bukan saja melakukan rehabilitasi kecanduan Narkoba tetapi dampak negatif lainnya adanya kecanduan media sosial terutama game di internet. Pasien yang kecanduan media sosial seperti *game online* dan *chating* di internet secara berlebihan, sampai lupa waktu, lupa tugas atau hak dan kewajibannya,

jarang berinteraksi secara langsung dan tidak pernah beraktivitas di dunia nyata (*real world*).

Gejala kecanduan media sosial tersebut sudah termasuk penyakit berbahaya sama halnya dengan kecanduan Narkoba yang disebut *Phubbing*. *Phubbing* mengindikasikan individu yang tidak mau berinteraksi dan berbaur dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan aktivitas keseharian di dunia nyata dikarenakan merasa asik menyendiri di dunia maya (*virtual world*) dengan media sosial melalui jaringan internet seperti *handphone* dan komputer atau laptop. Menurut Hanika (2015), Youarti dan Hidayah (2018), dan Guazzini, et al. (2019) *Phubbing* merupakan singkatan dari *phone* dan *snubbing* sebagai sikap dalam interaksi yang menyakiti pihak lain secara berlebihan dengan menggunakan *smartphone* karena sudah kecanduan (adiktif) mengabaikan interaksi sosial secara langsung dan dapat merusak interaksi dengan orang lain, hal ini sebagai dampak dari media baru dengan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi budaya masyarakat. Al-Saggaf dan O'Donnel (2019) *Phubbing* merupakan dampak negatif dari kecanduan menggunakan *handphone* sehingga melanggar kebutuhan dasar manusia untuk berinteraksi sosial secara normal sehingga mempengaruhi pada perubahan sosial di era teknologi modern.

Dampak dari *phubbing* mengindikasikan kenakalan anak-anak yang sudah tidak terkontrol atau menyimpang sebagai bentuk ancaman bahaya kejiwaan dan interaksi sosial yang harus direhabilitasi yang disebut *Conduct Disorder. Conduct Disorder* merupakan gangguan sikap dan perilaku yang menyimpang sehingga melanggar etika dan norma baik di lingkungan keluarga dan sekolah, seperti berbohong, mencuri, melakukan tindakan kekerasan, dan merusak. *Conduct Disorder* umumnya dilakukan anak pada lingkungan pertemanannya sendiri dibandingkan di keluarganya, penyebabnya karena mental kejiwaan yang labil, kurang perhatian dan kasih sayang, salah pergaulan, pelampiasan karena dendam atau kecewa. *Conduct Disorder* dapat juga disebabkan karena pemikiran dan sikap mentalnya dipengaruhi bebasnya tontonan di media sosial terutama film, *youtube* dan *game* atau *online game*. Sehingga pembentukan karakter yang bebas tanpa aturan nilai, jarangnya komunikasi atau interaksi langsung dengan keluarga dan orang lain, kebebasan yang nyaris tanpa batas untuk melampiaskan ekspresi dan emosi secara bebas di dunia maya (internet), maka akan cenderung memberontak dan tidak akan melaksanakan aturan dalam berinteraksi di dunia nyata yang berlaku norma, etika, hak dan kewajiban. Sebagaimana menurut Kearney (2003) *Conduct Disorder* merupakan perilaku anak atau remaja yang berulang-ulang melakukan

penyimpangan yang melanggar nilai kebenaran, norma, dan etika yang sudah berlaku di masyarakat. Rini (2010) menjelaskan perilaku *Conduct Disorder* yang melanggar etika dan norma, bahkan hukum yang dilakukan anak anak dan remaja seperti emosi yang tidak terkontrol dengan memukul dan merusak (vandalisme), berkelahi, dan mengejek. Kemudian Wenar dan Kerig (2011) *Conduct Disorder* indikasinya sikap dan perilaku agresif terhadap manusia dan hewan, merusak, berbohong, mencuri serta pelanggaran aturan.

Berdasarkan hal tersebut ancaman pengembangan sumber daya manusia bagi proses pembangunan bukan saja dari bahaya penyalahgunaan dan kecanduan Narkoba, tetapi kecanduan media sosial (*Phubbing*), dan perilaku menyimpang anak dan remaja (*Conduct Disorder*) sebagai gejala penyakit sosial, psikis dan psikologis yang harus diantisipasi, ditanggulangi dan direhabilitasi secara serius. Penyebabnya *Phubbing* dan *Conduct Disorder* hampir sama dengan kecanduan Narkoba seperti ingin coba-coba, pengaruh negatif ajakan teman dan kelompok pergaulan, kurang dapat menahan diri, kurang adanya kontrol sosial baik di keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan aktivitas lainnya seperti di sekolah atau tempat bekerja, memiliki masalah pribadi, stres dan frustasi, lari dari kenyataan, dampak negatif pengaruh dan kebebasan bermedia sosial.

Pencegahan pada pecandu Narkoba, *Phubbing* dan *Conduct Disorder* (NPC) selain membutuhkan terapi mental melalui rehabilitasi psikologi, kemudian rehablitasi kesehatan dengan cara pengobatan medis, namun penting juga memberikan rehabilitasi sosial ekonomi dalam bentuk kegiatan program pemberdayaan sampai pendampingan untuk membangun kembali memberikan semangat, produktivitas dan harapan hidup. Permasalahan lain pasien dan eks penyalahgunaan Narkoba mendapat stigma negatif dan terpinggirkan sehingga mengakibatkan frustasi dan merasa menjadi kelompok marginal serta potensial untuk kembali lagi ke dunia Narkoba. Proses rehabilitasi NPC yang dilakukan yayasan sosial keagamaan yaitu:

(1) Proses pengujian (*assessment*), setiap calon pasien atau klien pecandu Narkoba yang akan direhabilitasi diperiksa dulu melalui medis di rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rujukan penanganan atau rehabilitasi Narkoba biasanya Rumah Sakit Daerah di kabupaten.

(2) Pasien setelah mendapat keterangan medis, lalu dilakukan pendekatan dan dialog (wawancara). Memeriksa bukti klien sudah melakukan pengecekan secara medis dibuktikan dengan membawa surat keterangan dokter dari rumah sakit daerah yang ditunjuk resmi, tujuannya supaya lebih

jelas, rinci dan pasti diagnosis keadaan klien menggunakan jenis Narkoba, lamanya menggunakan Narkoba dan dampak yang telah dialami. Sehingga mendapat catatan penting untuk proses rehabilitasinya. Walaupun ciri-ciri secara fisik dari klien pecandu Narkoba dapat diketahui seperti dari kondisi tubuh, mata dan tangan serta bahasa tubuh, termasuk dari pengakuan orang terdekat klien dan dokter yang memeriksa.

(3) Pendekatan personal dan dialogis yang dilakukan para pendamping, konselor, dan fasilitator melakukan pendekatan, komunikasi yang dialogis dan persuasif dengan klien serta orang terdekat klien yang mengetahui riwayat dan peristiwa klien terjerumus penyalahgunaan NPC. Prosesnya mulai dari identifikasi klien tentang personaliti atau karakter kepribadian, keadaan keluarga, pertemanan atau kelompok teman, penyebab dan motif penggunaan Narkoba, media sosial serta gangguan jiwa sampai dampak yang selama ini dialami dan proses penyembuhan yang sudah diupayakan.

(4) Komunikasi yang dialogis, persuasif dan komunikasi terapeutik menjadi salah satu kunci keberhasilan melakukan proses rehabilitasi NPC yang perlu dilakukan para pendamping, konselor, dan fasilitator kepada klien atau pasien untuk membuka perkenalan dan pendekatan supaya ada keterbukaan, saling mengenal, menerima serta dekat atau akrab serta membangun solidaritas.

Pada proses tahapan ini sekaligus melakukan komunikasi terapeutik untuk memberikan motivasi, pengertian dan kepedulian sehingga muncul keterbukaan, rasa nyaman, aman dan dekat antara klien dengan pendamping, konselor, dan fasilitator. Komunikasi terapeutik tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi persuasif yang informal dengan penekanannya membangun motivasi, sugesti dan interaksi saling menerima, percaya, terbuka, serta nyaman pada konteks membangun harapan atau optimisme untuk sembuh, mau berjuang, dan bersabar. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan contoh nyata tentang sebab dan dampak masalah kesehatan serta proses penyembuhan yang menumbuhkan optimisme serta sugesti kesembuhan. Komunikasi terapeutik menurut Mundakir (2006) dan Zen (2013) termasuk komunikasi personal yang penuh pengertian satu sama lainnya seperti antara klien atau pasien dengan perawat menggunakan prinsip dialog terbuka, empati, banyak mendengarkan dan saling pengertian.

Komunikasi terapeutik memiliki fungsi membantu klien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran, kemudian menumbuhkan mental dan sikap untuk berani mengambil tindakan, menghilangkan keraguan dan

ketakutan dalam mengubah situasi untuk penyembuhan. Kemudian dapat mempengaruhi dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan fisik (Evans & Lindsay, 2014). Komunikasi terapeutik berhubungan dengan komunikasi spiritual sebagai strategi dalam melakukan pembinaan kepada klien melalui interaksi komunikasi verbal dan non-verbal dalam komunikasi personal ketika pendampingan serta konsultasi, serta komunikasi kelompok, sehingga menciptakan serta menumbuhkan kembali kesadaran, kenyamanan dan ketenangan (Muliawan, 2017)

(5) Proses rehabilitasi selanjutnya dengan pendekatan spiritual keagamaan seperti salat lima waktu secara berjamaah dan sunnahnya setelah itu rutin berdzikir dan mengaji setelah salat. salat sunnah tambahan lain seperti salat tobat dan salat tahajut (salat malam) serta kegiatan ruqyah. Kemudian mengikuti siraman rohani minimal setelah salat magrib sampai Isha dan setelah salat Subuh. Proses rehabilitasi spiritual memiliki tujuan mengembalikan keimanan dan ketaqwaan untuk kembali menyadari sebagai manusia yang lemah, mengakui kebesaran dan kekuasaan Alloh SWT dengan segala ciptaan-Nya. Menumbuhkan keyakinan bahwa dengan bersungguh-sungguh ikhtiar, berdoa dan menyerahkan segala urusan kepada Alloh (tawakal) menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan meminta kesembuhan dari jeratan NPC. Kegiatan spiritual menjadi kebutuhan yang mendatangkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa yang asalnya gelisah, stres, putus asa atau frustasi, emosional dan malas. Kemudian pikiran dan jiwa menjadi tenang dan tentram dari yang awalnya terasa hampa, gelisah, malas, putus asa dan emosional akibat penyalahgunaan NPC. Rehabilitasi spiritual seperti salat, zikir, mengaji, dan mengikuti ceramah rohani, dan ruqyah dari gangguan sihir dan guna-guna. Dzikir yang rutin dilakukan berupa kalimat tauhid yang mempertebal keimanan dan ketenangan jiwa karena kepasrahan diri dan tawakal.

(6) Metode holistik yang dilakukan tim konselor, pendamping dan fasilitator diawali identifikasi dan menganalisis hasil medis, dialog, observasi dan evaluasi terhadap klien khususnya untuk menentukan jenis metode rehabilitasi yang cocok untuk klien. Metode rehabilitasi holistik dapat menggabungkan pendekatan spiritual, hipnoterapi dan psikologi untuk memberikan, membangun dan meningkatkan motivasi kembali pada klien yang sudah kecanduan NPC. Proses tahapan metode rehabilitasinya setelah metode medis dengan pemeriksaan dokter di Rumah Sakit daerah yang resmi ditunjuk untuk rehabilitasi Narkoba dengan memberikan obat-obatan secara ketat dan bertahap dosisnya menurut resep dokter. Kemudian metode rehabilitasi non

medis pendekatan pendekatan spiritual seperti mendisiplinkan salat wajib berjamaah dan salat sunnah, berdzikir, mengaji dan mengikuti siraman rohani serta Ruqyah Syar'iyyah dengan membaca dan atau mendengarkan ayat Al Qur'an untuk menstimulasi otak secara simultan. Selanjutnya metode non medis dengan bekam atau disebut *hijamah* (*cupping blood*) yang fungsinya mencegah penggumpalan darah dan mengeluarkan toksin dalam darah. Metode non medis dengan totok syaraf atau akupuntur untuk memperbaiki sirkulasi darah sehingga jaringan syaraf tubuh dapat bekerja normal. Metode non medis dengan herbalogi adalah terapi herbal dari tanaman tertentu sebagai alternatif dan pengganti obat-obatan. Metode hipnoterapi untuk memasuki, mengontrol dan mengelola pikiran bawah sadar serta membangun sugesti positif yang memperbaiki gangguan atau kelainan psikologis. Metode rehabilitasi psikologis dengan melakukan pendekatan persuasif dan kognitif, memperbaiki pola pikir, sikap mental dan perilaku, sehingga menumbuhkan kesadaran kembali akan hak, kewajiban dan tanggung jawab, sehingga dapat membentuk dan menstimulasi perilaku normal.

Namun dari berbagai macam metode rehabilitasi, tergantung pada keadaan dan kecocokan klien untuk berhasil disembuhkan, misalkan dengan terapi spiritual dan medis, ada juga dengan metode spiritual dengan Ruqyah Syar'iyyah seperti menggunakan media untuk doa dengan air putih, madu dan minyak zaitun biasanya untuk diminum, serta garam untuk ditaburkan. Rehabilitasi dengan metode Ruqyah Syar'iyyah dipergunakan untuk pasien yang biasanya dideteksi terkena gangguan sihir dan aura negatif sehingga kejiwaannya terganggu.

Metode Ruqiyah sebagai bentuk terapi religius yang berdasarkan ajaran agama untuk pasien dapat dilakukan oleh mentor atau konselor juga dapat dilakukan secara mandiri dengan tetap didampingi konselor atau pendamping. Tujuan Ruqyah sebagai terapi spiritual untuk dapat memperdalam keyakinan (iman), motivasi, beribadah secara teratur, dan membentuk perilaku yang baik, materinya seperti tausiah akhlak, ibadah (salat dan mengaji), zikir dan doa. Hikmahnya mampu merubah pola pikir, mental dan perilaku negatif menjadi positif dan produktif.

Rehabilitasi yang bagian dari metode holistik lainnya seperti psikoterapi dan hipnoterapi. Pada proses ini kesembuhan klien tergantung pada niat, tekad dan kesungguhan klien yang ingin sembuh, dukungan dan bantuan orang yang terdekat dan keluarga. Corey (2009) menyatakan psikoterapi membantu pasien untuk menumbuhkan kesadaran diri pada realitas yang harus dihadapi,

mengobati depresi dengan berbagi pengalaman dan perasaan dengan konselor sehingga menemukan pemaknaan dan perjuangan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Adapun tahapan hipnoterapi terdiri dari (a) Melakukan identifikasi dan analisis atau kajian, (b) Menginduksi suatu temuan dan fakta, (c) Pendalaman dan mengekplorasi masuk ke alam bawah sadar, (d) Terapis kognisi atau pikiran dengan memberikan keyakinan positif menghilangkan trauma dan stres, (e) Penggabungan, kesimpulan dan keputusan.

(7) Proses pendampingan klien pasca rehabilitasi dengan pulang dari tempat rehabilitasi di yayasan sosial keagamaan ke rumahnya, dengan konselor yang sudah dekat melakukan pendampingan melalui media sosial seperti telpon dan WhatsApp (WA) dengan kliennya. Pendamping konselor dapat juga berinteraksi dengan orang terdekat atau keluarga terdekat yang ditugasi melakukan pendampingan serta monitoring dengan klien di rumah dan lingkungan aktivitasnya. Pada tahapan ini menjadi sangat penting untuk menentukan kesembuhan klien. Jika tidak ada pendampingan khususnya dalam aktivitas keseharian baik interaksi dengan lingkungan pertemanan dan melalui media sosial, klien akan kembali terjerumus kecanduan penyalahgunaan Narkoba dan media sosial tanpa kontrol. Klien yang baru pulang melakukan rehabilitasi masih rentan dan potensial kembali kecanduan, sehingga harus didampingi dan memberikan media interaksi di keluarga dan lingkungan pertemanan yang terbuka, dekat serta harmonis. Kemudian memberikan media aktivitas lainnya seperti pemberdayaan dengan aktivitas usaha ekonomi atau berwirausahaa baik perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, membuka cafe, dan rumah makan, atau mengikuti aktivitas olah raga, penyaluran hoby baik seni, musik dan liburan. Klien jangan sampai menyendiri dan asik sendiri atau salah memilih kelompok interaksi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menjadi perhatian penting dalam pasca rehabilitasi memberikan media aktivitas positif untuk menyibukkan diri atau tidak lagi terjerumus pada pengaruh penyalahgunaan Narkoba, media sosial dan berkelompok atau berteman secara salah. Memberikan ruang interaksi untuk aktif dan produktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah, mengikuti kegiatan spiritual seperti pengajian, ceramah rohani dan kegiatan sosial, melakukan kegiatan bisnis, wirausaha dan bekerja. Bahkan klien yang sudah sembuh dapat aktif menjadi konselor, pendamping dan fasilitator di lembaga rehabilitasi untuk berbagi pengalaman, memotivasi dan ikut membantu merehabilitasi. Kemudian dapat dibuat suatu model rehabilitasi holistik untuk pasien kecanduan Narkoba, *Phubbing* dan *Conduct Disorder* sebagaimana dalam gambar 34.

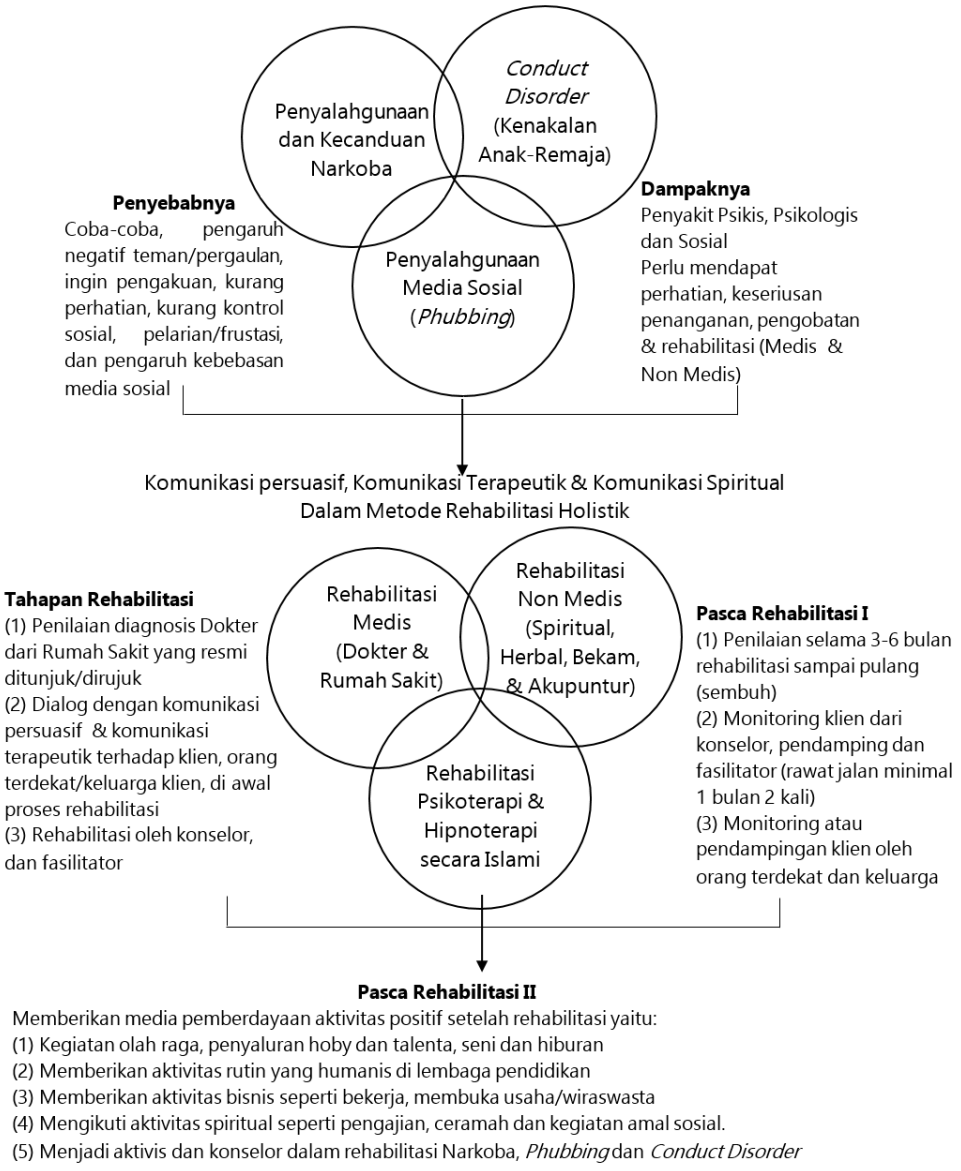

Gambar 34. Model Rehabilitasi Holistik untuk Pecandu Narkoba, *Phubbing* & *Conduct Disorder*

Sumber : Dimodifikasi dari Sulaiman et al. (2019b)

8.7. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Pesisir

8.7.1. Permasalahan dalam Masyarakat Perbatasan Pesisir

Pemberdayaan masyarakat perbatasan pesisir merupakan hasil penelitian dari Sugito et al. (2019a). Pembangunan desa menjadi pondasi pembangunan bagi daerah, perkotaan, bahkan bangsa dan negara, karena desa merupakan realitas kehidupan masyarakat yang memiliki banyak potensi sumber daya, menyediakan dan mengirim kebutuhan pokok, baik dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta menjadi lokasi pariwisata. Jika pembangunan desa dan masyarakatnya tidak mampu memberdayakan potensi sumber daya dan meningkatkan produktivitasnya maka terjadi permasalahan seperti urbanisasi, pengangguran, kemiskinan dan desa ditinggalkan masyarakatnya untuk pergi menjadi pekerja migran keluar negeri. Semangat membangunan desa merupakan perwujudan konsep pembangunan partisipatif, demokratis, berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan.

Pentingnya pembangunan desa termasuk di daerah perbatasan dan pesisir menjadi salah satu bidang kajian dan program penting khususnya dalam rangka menjaga kedaulatan, rasa nasionalisme dan keadilan dengan mempercepat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penting dan strategisnya pembangunan wilayah perbatasan, karena hakekatnya pembangunan perbatasan dan pesisir sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai kawasan perbatasan digolongkan pada kawasan strategis, yang penataan ruangnya diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan. Termasuk dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya Pasal 13 bahwa pemerintah dapat merancang dan membentuk desa pada kawasan yang bersifat strategis dan khusus untuk kepentingan nasional seperti wilayah kawasan terluar pada perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program strategis lainnya.

Perkembangan pembangunan di desa perbatasan pesisir seperti batas barat pulau Kalieks di Laut Natuna dan wilayah utara berbatasan langsung dengan Serawak Negara Malaysia sebagai daerah yang memiliki potensi besar dan keunikan serta daya tarik sebagai kunjungan atau tujuan wisata. Wisata yang ditawarkan adalah objek wisata alam flora dan fauna, kawasan wisata Mangrove dan konservasi Penyu, monumen Tugu Garuda, Batu Nenek, Batu Bajulang, Hutan Bakau, Air Terjun Gunung Pangi, terumbu karang, Dermaga Camar Bulan, dan wisata bahari dengan wisata pantai yang beragam seperti

pantai Surya, pantai Maludin, Teluk Atong, Pasir Plaik, dan Tanjung Datok. Akan tetapi problematika yang masih dihadapi di Desa Temajuk tahun 2018-2019 diantaranya infrastruktur akses jalan kendaraan masih kurang mendukung di penyebarangan sungai, walaupun sudah beraspal tetapi rusak parah, berbatu dan amblas yang disebabkan banyaknya kendaraan truk dengan bermuatan berat mengangkut kelapa sawit untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Kemudian dari penyebrangan akses jalan masih keadaan tanah atau tidak beraspal mengakibatkan jalan akan licin dan amblas jika terjadi hujan, sehingga sulit dilewati. Akses menuju desa hanya dapat dilewati pada pagi sampai sore hari, jika sudah menjelang malam tidak bisa dipergunakan karena pencahayaan jalan tidak ada. Akan tetapi tahun 2018-2019 sedang dalam proses pelebaran akses jalan hingga 10 meter. Kendala lainnya seperti penerangan listrik di jalan belum dapat dipergunakan, bahkan di tempat wisata Teluk Atong masih mengandalkan genset untuk menerangi lokasi wisata. Masyarakat desa perbatasan pesisir sering membeli kebutuhan harian seperti minyak goreng, gula, beras, dan gas untuk bahan bakar ke wilayah Malaysia karena harganya lebih terjangkau dan akses jarak lebih mudah serta dekat.

8.7.2. Pemberdayaan Ekowisata Masyarakat Perbatasan Pesisir

Berdasarkan hasil penelitian Sugito et al. (2019a), bahwa penggiat pemberdayaan merupakan individu atau komunitas yang memiliki semangat, ide, inisiasi, akses informasi dan kemitraan, melakukan desiminasi, memfasilitasi serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan program pemberdayaan. Penggiat pemberdayaan dapat juga disebut komunikator pemberdayaan dan fasilitator yang idealnya barasal dari dalam masyarakat desa (internal) dan atau dari luar (*outsider*) sebagai aktivis pelopor penggiat pemberdayaan yang memiliki kepedulian dan motivasi yang tinggi untuk kemajuan pembangunan desa. Penggiat pemberdayaan merupakan aset penting dalam pembangunan di desa, di tengah-tengah pemuda banyak yang meninggalkan desa dan generasi petani semakin sedikit karena lebih menilai mencari nafkah di kota (urbanisasi) dan menjadi pekerja migran di luar negeri lebih menjamin kensejahteraan. Sehingga adanya kesadaran dan semangat yang tinggi dari aktivis pemuda sebagai penggiat pemberdayaan merupakan modal penting untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki desa dari sumber daya pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Aktivis penggiat pemberdayaan merupakan komunikator pembangunan dan *opinion leader* yang dapat mempengaruhi dan mengajak para pemuda

lainnya sekaligus beberapa tokoh masyarakat yang peduli pada perkembangan pembangunan di desa. Namun penggiat pemberdayaan masih kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa baik kebijakan program dan anggaran. Pemberdayaan baru pada tahap individu, keluarga dan kelompok kecil, belum bisa menjadi program bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat keseluruhan. Program pembangunan masih cenderung untuk kebutuhan adminstrasi pemerintahan dan pembangunan material atau fisik, sedangkan untuk program pemberdayaan masih sedikit.

Partisipasi masyarakat khususnya dalam membuat perencanaan pembangunan umumnya kurang ada kesempatan untuk penggiat pemberdayaan, masyarakat masih kurang aktif dan tidak memiliki keberanian untuk beraspirasi, masyarakat lebih cenderung menyibukkan dirinya melakukan aktivitas rutin mencari nafkah dengan bertani, menjadi nelayan dan pekerja tani. Komunikator pemberdayaan sebagai penggiat pemberdayaan dari aktivis pemuda di masyarakat (*insider*) sudah melakukan dialog atau komunikasi secara personal dan komunikasi kelompok baik secara informal maupun secara formal dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa tentang pentingnya program pemberdayaan ekowisata sebagai konservasi dan wisata magrove, budidaya madu Kelulut di kawasan magrove, serta usaha pengolahan buah mangrove. Namun belum berhasil menjadi perhatian utama program pembangunan desa. Sekalipun ada kegiatan pemberdayaan sekaligus bantuan yang dilakukan dari dinas pertanian serta dinas kelautan dan perikanan kabupaten, tetapi hanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan, belum maksimal dari segi pendampingan dan kemitraan. Sehingga program pemberdayaan tidak ada keberkanjutan dan tidak memiliki dampak jangka panjang untuk masyarakat. Padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan.

Pemerintah dengan dinas terkait diharapkan dapat memprioritaskan program pembangunan melalui pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia di desa perbatasan pesisir untuk membangun motivasi, kepedulian, memberikan pengetahuan, keterampilan dan menciptakan kemandirian berdasarkan potensi masyarakat. Kemudian aktivis pemberdayaan lokal dapat menjadi fasilitator, instruktur, pendamping dan mitra dalam program pemberdayaan baik dengan pemerintah maupun dengan swasta.

Pihak swasta memiliki kepedulian dengan program pemberdayaan yang telah disepakati sebagai kewajibannya melakukan pemberdayaan dalam program pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kewajiban swasta melaksanakan CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1(3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Peran aktivis pemberdayaan sebagai komunikator pembangunan di desa pesisir perbatasan memiliki idealisme dan semangat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam khususnya konservasi dan wisata mangrove, wisata pantai, wisata konservasi dan penangkaran penyu. Aktivis pemberdayaan dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, pengalaman dan keterampilan untuk pengembangan potensi khususnya konservasi dan wisata pantai serta hutan magrove, perikanan, dan pertanian. Hal tersebut dengan dukungan berbagai program pemberdayaan baik penyuluhan, pelatihan dan studi banding dari pemerintah yang telah diikuti oleh aktivis pemberdayaan, seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas, Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSD) dan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) dari Kementrian Kalautan dan Perikanan selama tahun 2015-2017. Hasil pelaksanaan program pemberdayaan diantaranya konsevasi dan dibangun kawasan wisata dengan nama Ekowisata mangrove. Kemudian pemberdayaan budidaya madu Kelulut yang dibuat sarangnya di kawasan Ekowisata mangrove, pemberdayaan pengolahan buah mangrove yang menghasilkan produk sirup, selai, cendol, tepung untuk membuat bahan kue, kripik, dan dodol. Pemberdayaan lainnya dari instansi Dinas pertanian kabupaten seperti penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk organik, budidaya bawang merah, padi, lada, pertanian hortikultura, dan pelatihan kerajinan rotan dan studi banding tentang pengolahan kayu. Begitupun kawasan wisata teluk Atong mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sambas dengan dibuatkan penginapan (*homestay*) yang dekat dengan pantai, sehingga menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap menimati keindahan pantai dan alam serta dibangun warung makan untuk menghidangkan makanan ikan.

Keterlibatan aktivis pemberdayaan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan seperti melakukan penyuluhan, meningkatkan kemampuan

dengan pelatihan dan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan studi banding ke luar daerah merupakan bentuk jaringan komunikasi yang baik.

Penggiat pemberdayaan menyadari pentingnya akses jaringan komunikasi pembangunan sehingga memanfaatkan semua media komunikasi pembangunan yang ada baik yang konvensional seperti sering menulis tentang potensi dan wisata di desa melalui media koran dan majalah, media interaksional dengan sering mengikuti seminar, diskusi di kampus, lokakarya, penyuluhan, audiensi dengan pemerintah, pelatihan dan studi banding. Kemudian dengan memanfaatkan media teknologi informasi seperti internet dengan publikasi tulisan baik opini, iklan, publikasi kegiatan di media online. Walaupun jaringan internet di perbatasan pesisir aksesnya masih belum memadai, bahkan mengandalkan jaringan pada negara tetangga.

Penggiat pemberdayaan belum dapat melaksanakan secara optimal, komprehensif dan berkesinambungan dalam pemberdayaan, karena dukungan pemerintah desa yang masih belum maksimal, kendala infrastruktur dan budaya masyarakat yang bekerja di negeri tetangga tetap masih menjadi primadona. Padahal dapat dibuat program pemberdayaan pengembangan ekowisata yaitu:

(1) Meningkatkan motivasi dan kerjasama untuk peduli menjaga pelestarian lingkungan, pemanfaatan potensi alam terutama wisata pesisir pantai, wisata dan konservasi hutan mangrove.

(2) Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, perikanan serta aneka jenis makanan dan minuman dari hasil pengolahan buah mangrove.

(3) Mengembangkan berbagai fasilitas permainan di sekitar pantai seperti tempat oleh raga voli pantai, sepakbola pantai, kawasan perkemahan, permainan ketangkasan *outbond*, wisata perahu layar dan *motorboat*.

(4) Membentuk dan meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dan kewirausahaan yang dapat mendukung konsep ekowisata.

(5) Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah desa dan daerah untuk mendukung program pemberdayaan ekowisata secara komprehensif dan berkesinambungan

(6) Mengusulkan perbaikan pembangunan infrastruktur akses jalan, jembatan dan pelabuhan penyebrangan, akses jaringan internet dan fasilitas umum.

Pengembangan ekowisata di desa pesisir perbatasan dapat dijadikan sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat supaya tidak tergantung untuk bekerja di kota (urbanisasi) dan menjadi

pekerja migran di negeri tetangga. Berdasarkan permasalahan, peran penggiat pemberdayaan dan prospek ekowisata di daerah perbatasan pesisir khususnya di desa, dapat dibuat model pemberdayaan pada gambar 35.

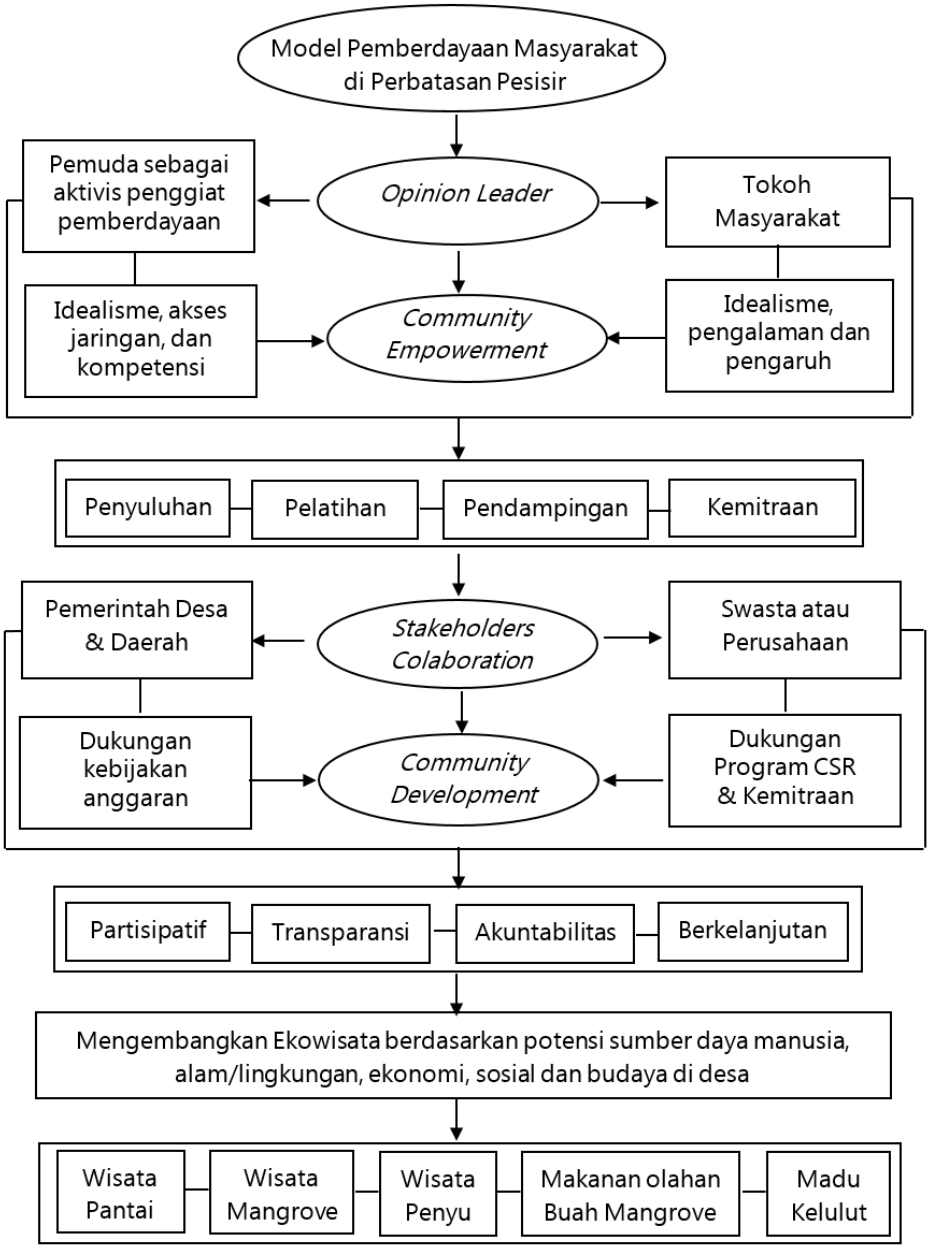

Gambar 35. Model Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan Pesisir
Sumber: dimodifikasi dari Sugito et al. (2019a)

8.7.3. Pemberdayaan Generasi Muda dalam Ekowisata di Perbatasan Pesisir

Berikut ini merupakan hasil penelitian dari Sugito et al. (2019b) tentang pemberdayaan generasi muda dalam ekowisata di perbatasan pesisir. Program pemberdayaan ekowisata di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Provinsi Kalieks Barat dirancang secara partisipatif dengan tokoh masyarakat dan pemuda, aktivis pemberdayaan pecinta lingkungan, pelaku usaha, pemerintah desa, dan akademisi untuk memperdalam dan menkonstruksi problematika yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan prospek yang dapat dikembangkan. Sasaran pemberdayaan ekowisata diantaranya para siswa aktivis organisasi SMA Negeri di Desa Temajuk yang dipilih sebagai perwakilan generasi generasi penerus. Harapannya setelah mendapat program pemberdayaan, generasi muda menjadi kader aktivis dan pionir yang akan menggerakkan komunitas pemuda lainnya untuk dapat melindungi, melestarikan dan mengembangkan potensi ekowisata di Desa Temajuk sebagai wilayah ekowisata perbatasan pesisir.

Sebelum melakukan implementasi model pemberdayaan ekowisata, tahapannya mengidentifikasi dan menganalisis lanjutan khususnya pada peserta pemberdayaan para generasi muda dengan metode partisipatif melalui pendekatan *Problem Based Learning, Discovery Learning*, dan *Project Based Learning* hasilnya yaitu: (1) Memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap potensi wisata dan lingkungannya, terbukti mampu mendeskripsikan jenis atau kategori wisata, rute dan lokasi wisata di Desa Temajuk. (2) Memiliki motivasi yang tinggi dan motif untuk dapat berperan menjadi pelaku usaha wisata dengan melindungi, melestarikan dan ingin mengembangkan potensi ekowisata dengan menjadi pemandu wisata, usaha kuliner dan tim promosi serta pemasaran. (3) Mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada tentang pengembangan ekowisata sekaligus memberikan konsep solusi. (4) Bersedia untuk membentuk kelompok generasi sadar wisata dengan nama Pokdarwis Ekor Borneo untuk menjalankan peran sebagai pemandu wisata, usaha kuliner dan tim promosi serta pemasaran. (5) Mampu mensimulasikan proses membuat program pengembangan ekowisata.

Pelaksanaan pemberdayaan ekowisata selain dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, simulasi dan pelatihan, juga memfasilitasi kepada generasi muda sebagai peserta pemberdayaan untuk menjalankan pengembangan ekowisata dengan pendampingan dan kerjasama atau kemitraan antar semua stakeholder seperti dari pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya

masyarakat, dan pelaku usaha. Maka aktivis penggiat yang sudah ada baik *insider* maupun *outsider* dilibatkan dalam pelaksanaan pemberdayaan menjadi instruktur dan pendamping atau fasilitator.

Maka dalam pengembangan ekowisata yang melibatkan generasi muda, dapat dibuat program pemberdayaan ekowisata yang didukung kemitraan dari berbagai pihak seperti pada tabel 13.

Tabel 13. Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Pesisir

Program Pemberdayaan	Pelaksanaan Pemberdayaan
✓ Kajian dan FGD tentang temuan penelitian sebelumnya ✓ Sosialisasi model pemberdayaan perbatasan pesisir kepada peserta pemberdayaan ✓ Diskusi kelompok tentang identifikasi dan analisis masalah, potensi dan prospek ekowisata di Desa Temajuk ✓ Menggunakan pendekatan *Brainstorming, Problem Based Learning, Discovery Learning,* dan *Project Based Learning*	✓ Kajian awal Tim Pemberdayaan dengan studi pendahuluan baik studi literatur dan studi pendahuluan bersama dengan penerima manfaat (*beneficiaries*) ✓ Tahap selanjutnya dengan para ahli, praktisi dan mitra yaitu: pihak pemerintah daerah dan desa, perguruan tinggi, penggiat pemberdayaan dan swasta, melibatkan juga masyarakat sebagai beneficiaries
✓ Penyuluhan dan pelatihan Manajemen strategi dan pengembangan ekowisata, ✓ Manajemen kewirausahaan produk khas kuliner minuman dan makanan.	✓ Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan tentang identifikasi serta analisis potensi sumber daya yang dimiliki dan dapat dikembangkan menjadi ekowisata. ✓ Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam keterampilan pengolahan produk olahan makanan dan minuman berbasis ketahan pangan lokal
✓ Pembentukan kelompok sadar wisata muda	✓ Menumbuhkan motivasi, solidaritas dan peran generasi muda untuk melestarikan, menjaga dan memanfaatkan secara arif serta bijaksana potensi ekowisata sebagai tanggung jawab bersama

Program Pemberdayaan	Pelaksanaan Pemberdayaan
✓ Manajemen Sampah dan Bank Sampah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya kawasan wisata	✓ Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mengelola sampah non organik dan organik yang dapat menghasilkan nilai ekonomi ✓ Keterampilan dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk
✓ Manajemen usaha dalam bentuk koperasi serba usaha	✓ Melakukan peningkatan motivasi, peran dan kemampuan dalam strategi peningkatan pendapatan, promosi serta pemasaran produk masyarakat dalam bentuk wadah usaha bersama yaitu: koperasi
✓ Pengembangan kelompok sadar wisata muda (Pokdarwis) Ekor Borneo lebih bisa mengadopsi inovasi teknologi informasi di Media sosial dan membuat Radio Komunitas	✓ Peningkatan dinamika kelompok dan manajemen ekowisata terutama promosi serta pemasaran ✓ Mendirikan radio komunitas dengan membentuk tim redaksi dari kelompok Pokdarwis Ekor Borneo bagi media informasi dan komunikasi masyarakat
✓ Manajemen penanggulangan sampah menjadi kelompok usaha Bank Sampah baik pengolahan sampah organik maupun non organik	✓ Analisis dan studi banding untuk membangun Bank sampah dan pengolahan sampah
✓ Melakukan inovasi dengan menyediakan fasilitas listrik bertenaga surya. Mengusulkan pembangunan jaringan internet	✓ Melakukan studi kelayakan dan realisasi pemasangan listrik bertenaga surya dan jaringan internet sebagai kemandirian energi dan teknologi informasi

Kemitraan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan

- ✓ Kemitraan dengan Pusat Studi Pengembangan Perdesaan dan Kawasan Perbatasan dan Kemitraan dengan perguruan tinggi melakukan FGD hasil penelitian dan merekomendasikan untuk melakukan pemberdayaan generasi muda di desa perbatasan pesisir, serta melibatkannya menjadi instruktur dan pendamping pemberdayaan ekowisata
- ✓ Kemitraan dengan pemerintah desa untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan pelatihan manajemen ekowisata
- ✓ Pihak sekolah SMA di Temajuk mendukung dan menjadi tuan rumah kegiatan penyuluhan dan pelatihan manajemen ekowisata
- ✓ Pihak aktivis pemberdayaan dan Pokdarwis dilibatkan menjadi instruktur dan fasilitator atau pendamping kegiatan penyuluhan dan pelatihan ekowisata

Pelaksanaan pemberdayaan ekowisata bagi pelajar sebagai generasi muda sangat penting dan efektif karena tingginya motivasi, keingintahuan dan solidaritas yang dibuktikan dari antusiasme dan peran aktif siswa sebagai peserta dalam rangkaian tahapan kegiatan pemberdayaan, termasuk pada proses serta hasil evaluasi dengan peserta. Generasi muda diharapkan dapat berperan aktif melanjutkan dan mengembangkan serta agen perubahan bagi proses pembangunan di masyarakat desa dalam hal ini pengembangan potensi ekowisata.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemberdayaan yaitu: (1) Pelaksanaan pemberdayaan harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, komprehensif, bersinergi dan berkolaborasi. Pemberdayaan masih kurang bersinergi dari pelaksana, program materinya dan waktu pelaksanaannya. Sehingga perlu secara periodik dilakukan oleh semua stakeholder baik pemerintah desa, aktivis pemberdayaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. (2) Program pemberdayaan menggunakan komunikasi partispatif dan berdasarkan pada hasil pengkajian atau penelitian dari permasalahan, potensi, kebutuhan dan prospek masyarakat. Sehingga perlu dirancang pemberdayaan berbasis riset. (3) Pemberdayaan bukan hanya peningkatan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, tetapi ada pembentukan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, kemampuan membuat dan mengusulkan program pemberdayaan, dapat menjalin kemitraan atau kerjasama. (4) Pemberdayaan dapat menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda itu sendiri dan masyarakat pada umumnya, mengurangi urbanisasi dan pekerja migran ke negara tetangga. (5) Pemberdayaan ekonomi dan ekowisata di perbatasan pesisir sebagai potensi yang prospektif, belum menjadi perhatian

serius bagi pemerintah desa. Sehingga pemerintah dapat memfokuskan pada perkembangan pembangunan daerah khususnya fasilitas akses jalan, listrik dan media telekomunikasi (internet) di daerah perbatasan pesisir. (6) Pihak lembaga pendidikan seperti SMA dan SMK dapat menjadikan pemberdayaan ekonomi serta ekowisata menjadi mata pelajaran tambahan, pilihan dan wajib sebagai muatan lokal yang unik serta memiliki ciri khas sebagai kearifan lokal. (7) Keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan ekowisata dapat menjadi suatu kebanggaan dan penguatan kedaulatan ekonomi di wilayah pesisir perbatasan. Jangan sampai ada ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ke negara tetangga menjadi pekerja migran. Menghindari konflik kecemburuan sosial ekonomi karena ketimpangan fasilitas umum dan kesejahteraan.

Adapun pengembangan model pemberdayaan perbatasan pesisir terluar dapat diilustrasikan pada gambar 36.

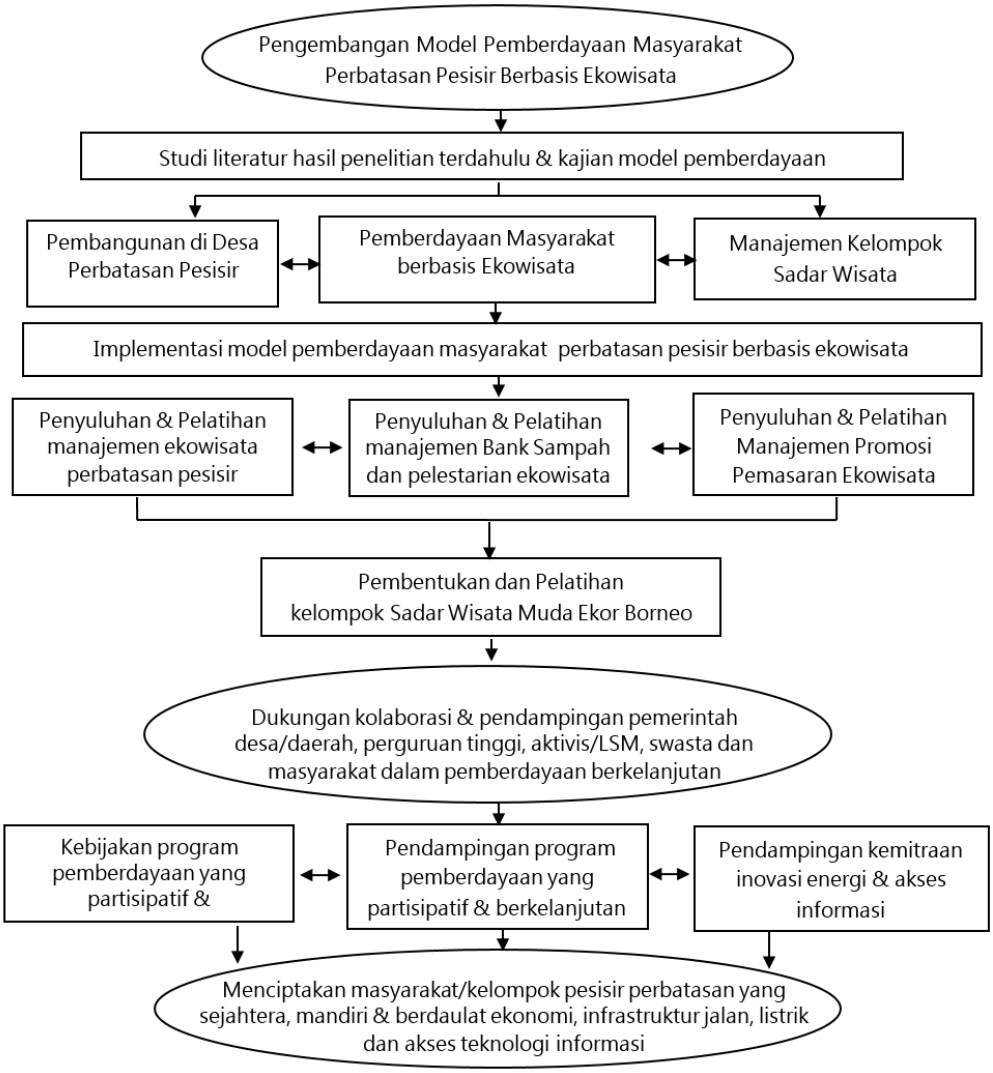

Gambar 36. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan Berbasis Ekowisata

Sumber: Sugito et al. (2019b)

8.8. Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Batik

8.8.1. Tantangan dan Perkembangan Pengrajin Batik

Berdasarkan hasil penelitian Sulaiman et al. (2019b) tentang pemberdayaan kelompok pengrajin batik, bahwa hasil seni budaya berupa produk batik tulis yang memiliki ciri khas, keunikan dan keistimewaan merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan serta dikembangkan sebagai warisan budaya.

Permasalahan yang masih dihadapi sebagai tantangan dalam usaha batik di kelompok pengrajin batik tulis termasuk kelompok batik yaitu:

(1) Modal yang diperlukan cukup besar untuk merintis usaha bisnis, sehingga pengrajin batik menginduk ke pengepul atau pengrajin batik serta tidak memiliki akses menjual langsung.

(2) Kelompok usaha yang mempekerjakan pembatik umumnya pembatik usia tua, sehingga terancamnya kelestarian dan warisan budaya membatik di kalangan generasi penerus. Hal ini dikarenakan generasi muda masih kurang memiliki minat membatik dan pemberdayaan membatik bagi pemula masih minim.

(3) Teknologi yang digunakan dalam membatik belum menggunakan teknologi modern atau terapan baik dari segi membuat desain motif dan proses produksi khususnya batik kombinasi antara batik cap dan batik tulis. Walaupun batik tulis murni tetap harus dipertahankan sebagai ciri khas dan kearifan lokal. Pemasaran batik belum menggunaan media teknologi yang perlu dikembangkan oleh para pengrajin, sehingga membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan media promosi dan pemasaran dengan media digital.

(4) Dukungan kebijakan pemerintah khususnya di daerah belum maksimal dalam pelestarian dan peningkatan batik sebagai kearifan lokal.

(5) Permasalahan dampak negatif dari hasil proses pembuatan batik tulis yang mengakibatkan cairan limbah yang bersumber dari obat pewarna dan obat pemutih batik yang menjadikan pencemaran pada air yang berupa limbah dan dibuang ke sungai yang berada di lingkungan perumahan. Limbah cair yang dihasilkan dari sisa-sisa pencelupan batik yang masuk kategori B3 singkatan dari pencemaran (limbah), bahan berbahaya serta beracun, yang merupakan pencemaran paling bahaya dalam industri pengrajin batik melalui dari proses pencelupan dalam larutan zat kimia dengan medium air dan minyak lilin, kanji dan deterjen sebagai bahan tambahan.

Harapannya dukungan kebijakan untuk mewajibkan pembelian bahan batik tulis atau batik kombinasi sebagai seragam resmi di pemerintahan dan lembaga pendidikan. Sehingga pengrajin dan pengusaha batik akan termotivasi dan terbantu dalam peningkatan serta pemasaran produk batik. Namun dukungan kebijakan tersebut masih belum konsisten, jika terjadi perubahan kepemimpinan di pemerintahan di daerah maka kebijakannya juga berubah.

Batik merupakan produk usaha yang unik, menarik dan ciri khas tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Batik bukan hanya produk komersial yang dapat menghasilkan keuntungan materi tetapi lebih dari itu sebagai ciri dan produk budaya masyarakat sehingga harus ada upaya secara terus menerus untuk melakukan kajian, studi baik riset, pemberdayaan dan publikasi tentang batik. Kaderisasi kelompok usaha batik di masyarakat desa perlu terus diperhatikan, didampingi dan dikembangkan secara arif dan bijaksana dengan mengggabungkan kearifan lokal dan adopsi inovasi sebagai tantangan dan tuntutan era kekinian (global). Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan batik diperlukan dalam usaha mengefisienkan produksi. Kelompok usaha seharusnya memiliki manajemen pegembangan usaha batik melalui program pemberdayaan untuk pembatik dari generasi muda sebagai penerus dan pelestarian warisan budaya membatik. Manajemen pengembangan usaha dan pemberdayaan pembatik harus dirancang, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi untuk memiliki standarisasi kulitas bahan, pewarnaan dan harga untuk kalangan pengrajin dan pengusaha batik.

Batik menjadi ikon atau simbol batik tulis, perkembangan kegiatan pemberdayaan batik diantaranya yaitu:

(1) Kelompok pengrajin batik, menjadi lembaga ekonomi yang menampung pembatik tulis di masyarakat yang bermanfaat menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Sehingga memerlukan perhatian dan dukungan kebijakan dari semua pihak mulai dari pemerintah desa dan daerah untuk mendukung pengunaan hasil produksi batik sebagai seragam sekolah dan seragam resmi pemerintah.

(2) Mengatasi kurangnya generasi penerus pembatik dari kalangan generasi muda yang belum tertarik untuk melestarikan dan mengembangkan usaha kerajinan membatik. Maka dilakukan program pemberdayaan dengan kegiatan belajar membatik secara gratis di tempat batik, bagi siapa saja yang ingin belajar terutama diperuntukkan remaja-remaja di desa khususnya dan umumnya di luar desa secara gratis tanpa dipungut biaya. Ada beberapa yang sudah belajar dan hasilnya bagus, tetapi beberapa lama kemudian mereka tidak lagi kembali ke tempat membatik karena kesibukan lainnya. Kesadaran dan keinginan tersendiri dari anak-anak belum begitu kuat, karena mereka juga tidak berpikir akan menekuni batik sampai mereka selesai sekolah. Anak muda zaman sekarang cenderung setelah sekolah akan lebih memilih kuliah di luar kota atau mencari kerja di kota besar.

Melaksakan program pemberdayaan membatik sejak dini mulai dikenalkan pada generasi sekolah dasar dan menengah, lalu praktikan menjadi mata pelajaran khusus atau tambahan di sekolah menengah atas atau keguaran. Pemberdayaan untuk generasi muda lainnya dan masyarakat dalam bentuk kelompok pengrajin batik melalui pelatihan membatik pewarnaan, pengemasan, labeling merek dan promosi serta pemasaran berbasis inovasi teknologi di media sosial.

(3) Kelompok pembatik perlu terus mengikuti beberapa acara pameran pembangunan dan pameran kelompok usaha sebagai usaha mempromosikan hasil batik. Akhirnya produk batiknya mulai diliput pemberitaan di media massa khususnya media online yang membantu promosi, sehingga jika sering terpublikasi di media, maka publik semakin mengetahui dan banyaknya peminat pada produk batik.

(4) Penanggulangan dampak negatif pembuangan limbah pewarna batik yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan ekosistem baik tanah maupun air serta sungai. Pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan dalam pengolahan dan pelestarian lingkungan, kemudian pelatihan penggunaan pewarna alami.

8.8.2. Model Pemberdayaan Pengrajin Batik

Model pemberdayaan pengrajin batik merupakan hasil riset Sulaiman et al. (2019b). Implementasi pemberdayaan pengrajin batik memerlukan dukungan serta kerjasama dari semua pihak lain dari pemerintah desa dan daerah termasuk pihak perguruan tinggi serta penggiat pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilaksananakan seperti memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk membatik di masyarakat supaya ada regenerasi pembatik, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pemasaran serta kemitraan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa program pemberdayaan merupakan sebuah upaya dari pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mendirikan, mengembangkan, melakukan pendampingan kewirausahaan dalam UMKM.

Pemberdayaan pengrajin batik dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan komprehensif mulai dari (1) Proses perencanaan program pemberdayaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat khususnya para pengrajin batik, wirausaha dan generasi muda bersama pemerintah daerah dan desa. Dukungan kebijakan anggaran, bantuan

modal dan sarana, promosi, pengunaan produk batik untuk seragam sekolah dan kantor serta pemasaran dengan adanya agenda kegiatan bazar batik di tingkat kabupaten. (2) Melakukan pengorganisasian melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengrajin batik yang sudah terbentuk melalui pelatihan peningkatan kualitas mutu produk batik, pengemasan, promosi dan pemasaran melalui pendekatan inovasi teknologi, bahkan dapat dibentuk Koperasi pengrajin batik yang dapat menghimpun produk, membantu dalam permodalan dan pemasaran. (3) Pelaksanaan program pemberdayaan oleh pemerintah daerah yang dapat bekerjasama dengan pihak swasta dan perguruan tinggi mulai dari (a) Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran, minat dan semangat dalam membatik khususnya bagi generasi muda atau pelajar. (b) Pelatihan meningkatkan kemampuan atau keahlian membatik tulis, kemudian mendesain motif batik, membuat kemasan produk, strategi promosi dan pemasaran produk dengan inovasi teknologi komputerisasi serta pemanfaatan media sosial. (c) Pelatihan pembuatan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan dan gerakan menjaga pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran limbah pewarnaan batik. (d) Program pendampingan pembentukan dan penguatan kelembagaan pembatik khususnya dari generasi muda baik di desa maupun di sekolah SMP dan SMA seperti membuat organisasi pembatik muda. Pengembangan kelembagaan batik dapat dibuat koperasi pembatik untuk membantu permodalan, produksi dan pemasaran. (e) Program kemitraan dapat bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi, swasta dan pemerintah khususnya dalam kebijakan penggunaan produk batik untuk seragam sehingga dapat meningkatkan produktivitas batik. (4) Proses rekrutmen generasi pembatik yang juga mengutamakan pada generasi muda dengan mengenalkan, memberikan motivasi dan keterampilan pada para pelajar SMP dan SMA sebagai generasi penerus pembatik. Pembatikan menjadi materi pelajaran tambahan dan muatan lokal bagi setiap sekolah untuk menanamkan semangat, minat dan potensi membatik generai muda, Hal ini perlu didukung kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan dinas lainnya seperti Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. (5) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan desa, juga oleh perguruan tinggi yang manjadi pendamping atau fasilitator pemberdayaan untuk pengembangan batik. Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting sebagai masukan dan perbaikan bagi perencanaan program berikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat model pemberdayaan untuk pengembangan pengrajin batik yang komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana pada gambar 37.

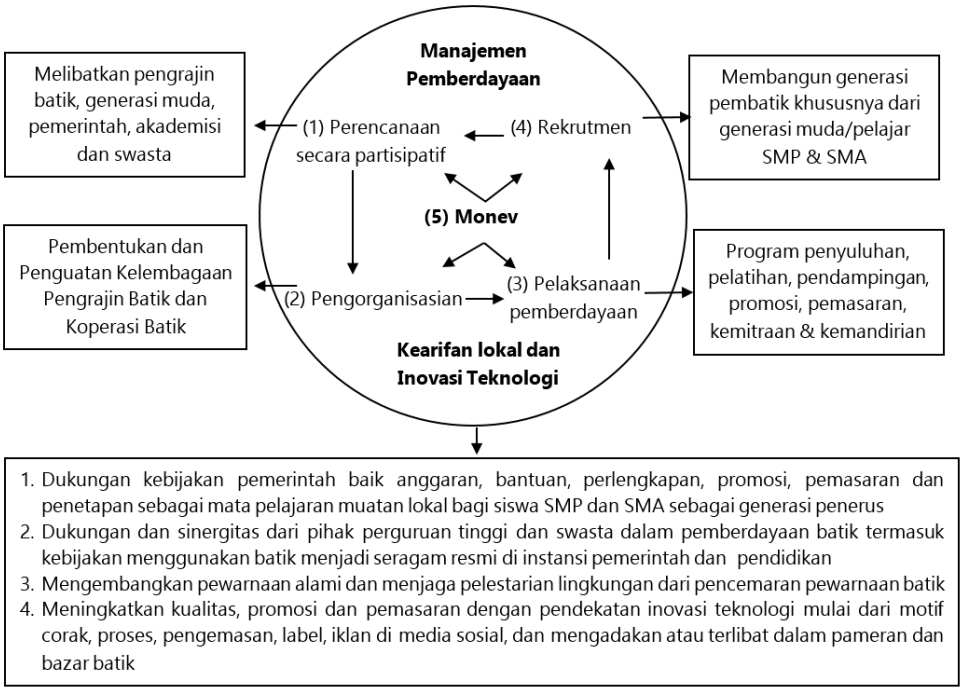

Gambar 37. Model Pemberdayaan Pengrajin Batik
Sumber: Sulaiman et al. (2019c)

8.9. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata

Program pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dengan sasaran generasi muda, kelompok usaha dan kelompok wisata desa sebagai generasi penerus dalam pembangunan sehingga dapat mengelola dan mengembangkan sumber potensi di desa serta tidak semua berorientasi untuk pekerja di kota (urbanisasi) dan di luar negeri (migran).

Program pemberdayaan masyarakat untuk desa wisata yaitu: (1) Materi tentang membangun motivasi, penyadaran dan inspirasi kesuksesan berwirausahaa serta mengelola desa wisata. Kegiatan bisa dilakukan dengan menghadirkan aktivis, praktisi, dan ahli kewirausahaan dan mengelola desa wisata. Program penyuluhan dan pelatihan tahap I ini sebagai dasar atau pondasi penting untuk membentuk pola pikir, sikap mental dan karakter dalam hal ini generasi muda di desa supaya memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengelola potensi wisata desa dan menjadi wirausaha atau kelompok usaha di desa. Membangun kepedulian terhadap pengelolaan, pemanfaatan

dan pelestarian lingkungan untuk menjadi lahan pekerjaan, menghasilkan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. (2) Tahap materi kedua, tentang penyuluhan dan pelatihan mekanisme serta prosedur pembuatan program pemberdayaan desa wisata seperti teknik komunikasi, musyawarah, lobi, negosiasi, pengambilan keputusan dan perancangan prioritas program kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dari permasalahan serta potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Penyuluhan dan pelatihan manajemen kelompok desa wisata mulai dari kepengurusan, keanggotaan, program kerja, pembagian tugas, teknik monitoring dan evaluasi, serta pengembangan unit usaha yang terintegrasi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (3) Tahap ketiga, penyuluhan dan pelatihan tentang manajemen administrasi dan keuangan kelompok desa wisata sehingga tercipta tertib administrasi keuangan secara digital. Pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan khususnya inovasi pengolahan makanan dan minuman khas pedesaan untuk para pengunjung di kedai atau warung-warung sekitar lokasi wisata. Hal ini untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat terutama kaum perempuan. (4) Tahap keempat, penyuluhan dan pelatihan manajemen kewirausahaan dan kepariwisataan untuk kelompok desa wisata dan kelompok usaha, dilanjutkan dengan digitalisasi teknik promosi dan pemasaran desa wisata, produk makanan serta minuman khas melalui media sosial. Penyuluhan dan pelatihan teknik kerjasama atau kemitraan baik dengan internal maupun dengan pihak eksternal dengan pemerintah, swasta, perbankan dan perguruan tinggi. Kerjasama yang dimaksud bisa investasi, pinjaman modal, sewa, bagi hasil usaha dan kontrak penjualan atau pembelian.

Mulai tahapan kegiatan ke-2 sampai ke-4 dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mengukur keberhasilan target dan memperbaiki kekurangan. Kegiatan tahap 1, 2 dan 3 dapat dibuat model program pemberdayaan desa wisata pada gambar 38.

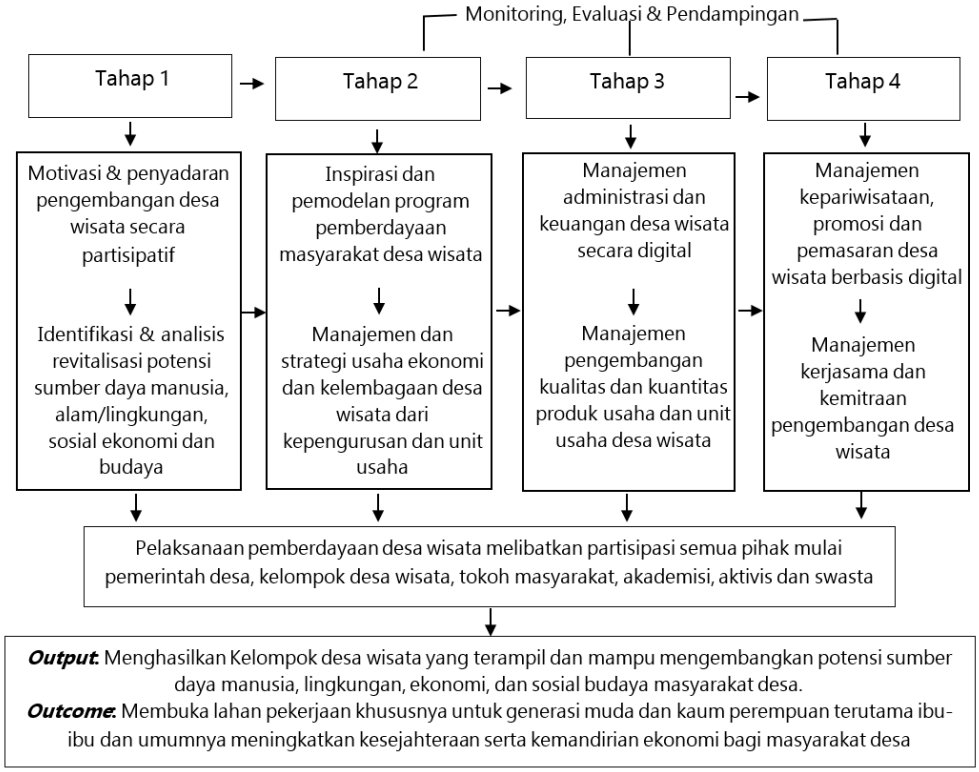

Gambar 38. Model Pemberdayaan Desa Wisata

8.10. Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga dalam Mendukung Klinik Kesehatan dan Wisata Jamu

Proses pembuatan program pemberdayaan tanaman obat keluarga dapat dimulai dari inisiatif pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan dan pengelola klinik kesehatan jamu sebagai fasilitator yang memiliki kebijakan, kewenangan dan anggaran. Masyarakat sekitar klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu sebagai peserta pemberdayaan yang akan menjadi kelompok penghasil dan pemasok tanaman obat yang dibutuhkan. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan perkebunannya untuk memenuhi kebutuhan tanaman obat keluarga dan menambah penghasilan dengan memasok bahan jamu kepada klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu. Karena masyarakat sekitar klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu memiliki potensi yang besar karena cocok daerahnya untuk menanam tanaman obat herbal di pekarangan rumah yang luas termasuk perkebunan.

Program pemberdayaan yang diiniasi dan difasilitasi pemerintah dinas kesehatan yaitu: (1) Melakukan sosialisasi secara intensif tentang visi, misi dan program pengembangan klinik kesehatan dan kawasan wisata kesehatan jamu kepada kelompok masyarakat dan para pelajar sekitar kawasan wisata jamu dengan melibatkan pemerintah desa setempat. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui, memahami dan termotivasi untuk ikut peduli terhadap pelestarian serta pengembangan ketahanan tanaman obat herbal atau jamu untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus dapat mendukung pengembangan klinik kesehatan dan kawasan wisata kesehatan jamu. (2) Melakukan penyuluhan secara berkelanjutan kepada kelompok masyarakat, para pelajar dan pemerintah desa tentang pentingnya manfaat penanaman, jenis-jenis tanaman herbal, dan pengolahan tanaman herbal sebagai tanaman obat untuk kesehatan keluarga serta memiliki nilai tambah atau menghasilkan pendapatan dengan memasok bahan baku jamu dan usaha jamu bagi wisatawan. Tujuannya masyarakat akan semakin termotivasi untuk melakukan penanaman tanaman herbal di halaman rumah dan kebun sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat keluarga serta penghasilan tambahan dengan memasok bahan herbal ke klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu. (3) Melakukan dialog dan musyawarah untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan, potensi, dan minat antara kelompok masyarakat dengan pemerintah desa dalam mengembangkan tanaman herbal di pekarangan rumah dan perkebunan serta proses pembuatan jamu. Selanjutnya menghasilkan program pemberdayaan yang dibutuhkan untuk kelompok masyarakat dan komitmen kesepakatan perjanjian kemitraan dengan Dinas kesehatan, pengelola klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu. Sehingga hasil tanaman herbal di pekarangan rumah dan perkebunan kelompok masyarakat dapat ditampung serta diterima untuk dibeli sesuai standar yang ditetapkan Dinas kesehatan, klinik kesehatan kawasan wisata jamu.

Proses dialog dalam musyawarah antara Dinas kesehatan, pengelola klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu dengan pihak kelompok masyarakat serta pemerintah desa merupakan proses perencanaan dan pelakasanaan pembangunan secara partisipatif dalam melaksanakan pemberdayaan tanaman herbal sebagai bahan obat keluarga. Tujuannya supaya masyarakat dan pemerintah desa dapat melestarikan budaya menanam, mengolah dan mengkonsumsi jamu sebagai warisan secara turun temurun (kearifan lokal) dalam menjaga kesehatan keluarga bahkan dapat terus dikembangkan sebagai kewirausahaan masyarakat. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang

dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Program pemberdayaan masyarakat dalam budidaya tanaman herbal untuk jamu selain melakukan penyuluhan juga pelatihan dan pendampingan tentang pemilihan, tata cara penanaman tanaman herbal di pekarangan dan kebun serta proses pengolahan herbal menjadi minuman jamu dengan sasaran para pelajar atau genarasi muda mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tingkat atas. Memberikan rekomendasi untuk mendapat dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan yang memasukkan materi pelajaran budidaya tanaman herbal dan pengolahan herbal untuk siswa di sekolah sebagai materi tambahan dan wajib.

Sasaran pemberdayaan pada kelompok tani dan masyarakat umum untuk memanfaatkan pekarangan serta kebun yang dapat menghasilkan tanaman herbal untuk produksi jamu, termasuk pelatihan mengolah tanaman herbal menjadi jamu untuk menjaga kesehatan keluarga, termasuk memasok bahan jamu ke klinik kesehatan di kawasan wisata jamu.

Membentuk kelompok pemberdayaan ketahanan tanaman herbal dari masyarakat yang didukung pemerintah dinas kesehatan dan pemerintah desa mulai dari kelompok tani yang terdiri dari kelompok wanita tani dan kelompok pemuda atau pelajar dengan untuk memanfaatkan pekarangan rumah serta perkebunan atau dapat juga difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan lahan bagi kelompok masyarakat.

Promosi dan pemasaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan, klinik kesehatan dan pengelola wisata jamu melalui *roadshow* ke setiap sekolah, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat. Mengadakan *event* pergelaran seperti pameran tanaman herbal, pengolahan herbal, dan produk jamu, pengecekan serta pengobatan gratis.
Menggunakan media promosi dan pemasaran melalui internet seperti media sosial baik *Facebook*, *Instagram, website, market place*, *blog* dan *Youtube* dengan melatih dan melibatkan kelompok pemuda sebagai aktor promosi serta pemasaran yang memiliki keterampilan, minat dan motivasi yang tinggi dalam penggunaan media sosial di era digital.

Tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan tanaman herbal untuk mendukung klinik kesehatan dan kawasan wisata jamu sebagaimana pada gambar 39.

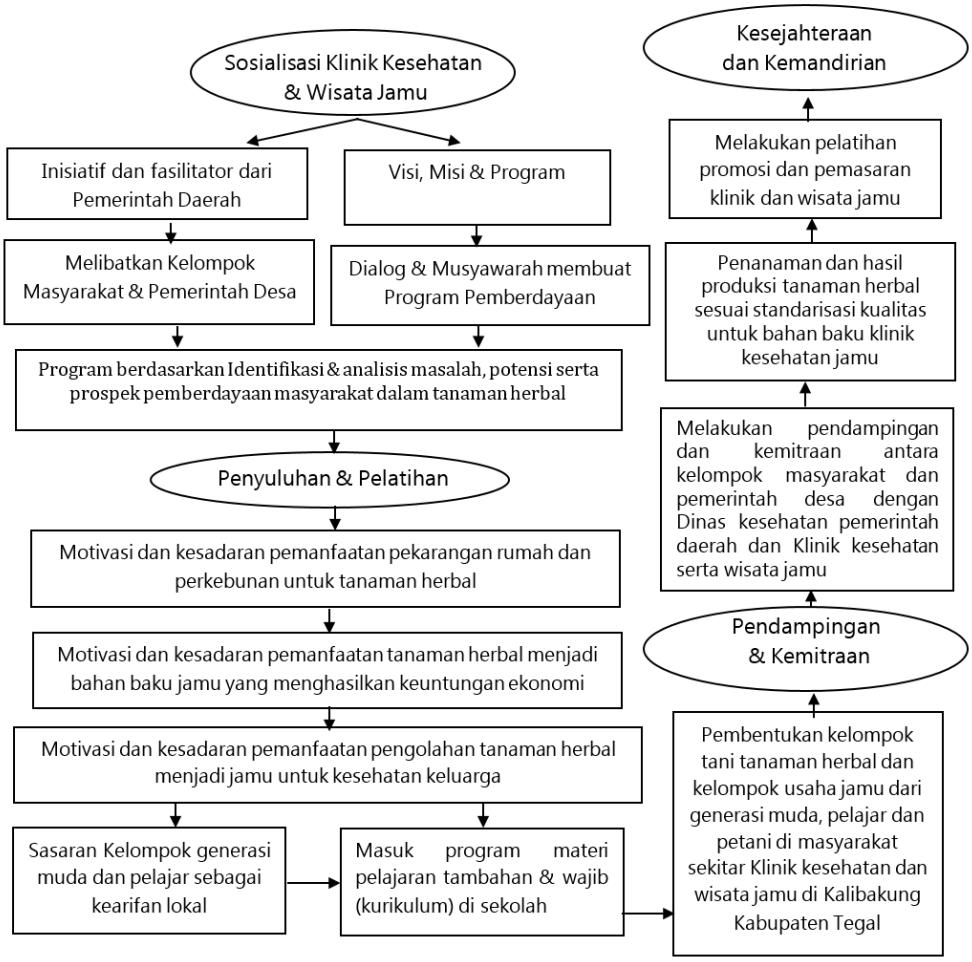

Gambar 39. Model Pemberdayaan Tanaman Herbal

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam budidaya tanaman obat herbal dapat menjadi ketahanan dan kemandirian ekonomi serta kesehatan masyarakat. Tanaman obat herbal juga dapat menjadi apotek hidup yang praktis dan mudah ditanam di halaman rumah. Tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan apotek hidup adalah kegiatan budidaya tanaman herbal di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri dan alami atau organik yang dapat menghasilkan bahan herbal dan ramuan herbal berupa jamu atau obat herbal. Adapun jenis Tanaman Obat Keluarga (Toga) daintaranya seperti Jahe, Kencur, Lempuyang, Lengkuas, Temulawak, Alang-alang, Blimbing Wuluh, Jeruk Mipis, Mengkudu dan Kapulaga, Jambu Biji, Sirih, Kumis Lucing, dan Daun Kelor.

8.11.Pemberdayaan Masyarakat Pesantren

8.11.1. Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)

Pemberdayaan Koperasi pondok pesantren merupakan hasil penelitian Sulaiman et al. (2018a), bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sudah lama eksis dan berperan dalam masyarakat di bidang pendidikan sosial keagamaan secara informal, pada tahap perkembangan selanjutnya pesantren merespon perubahan dan tantangan zaman menjadi pesantren modern dengan melengkapi perannya sebagai lembaga pendidikan formal, pendidikan berbasis inovasi dan teknologi serta lembaga ekonomi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dapat diperkuat aspek akademik maupun non-akademik, namun tetap mempertahankan penguatan nilai religiusitas dan tradisi pesantren sekaligus berinovasi terhadap perkembangan teknologi untuk dapat menjawab perubahan serta tantangan di masyarakat.

Perubahan pendidikan di pesantren yang menyatukan religiusitas dengan sosial dan ekonomi dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan santri, pesantren, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat mengantisipasi stigma negatif terhadap pesantren yang dinilai sebagai lembaga pendidikan agama yang kuno, fanatik tetapi tertutup, sulit menerima perubahan, bahkan distigmakan sebagai komunitas radikal dan teroris.

Kajian dinamika pesantren menjadi sangat menarik dan penting khususnya peran pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan santri, pesantren dan masyarakat sekitar karena memiliki pengalaman dan keterampilan dalam perekonomian atau kewirausahaan. Sehingga santri setelah lulus dari pesantren dapat berperan dalam proses pembangunan baik spiritual, moral, sosial dan ekonomi yang membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk pendidikan agama, sosial dan ekonomi di pesantren sangat relevan dengan konsep Islam yang melaksanakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pesantren memiliki peran penting dan strategis sebagai lembaga pendidikan sosial keagamaan untuk pembentukan akhlak atau karakter yang religius dan spiritual (agamis), serta bermoral. Kemudian pesantren juga sebagai lembaga pendidikan sosial ekonomi yang untuk berperan di masyarakat serta menjadi kelompok wirausaha seperti mendirikan dan mengembangkan Koperasi pondok pesantren (Kopontren) berdasarkan potensi dan kebersamaan santri, pesantren dan masyarakat di sekitarnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

Terdapat contoh Koperasi pondok pesantren yang masih mempertahankan tradisi sebagai pendidikan non formal khusus untuk belajar keagamaan, santrinya menginap dan seluruh aktivitas kehidupannya di pesantren. Memiliki Koperasi pesantren yang dibangun dari semangat untuk memiliki usaha bersama, mengisi waktu luang, menambah pengalaman, meneruskan usaha yang sudah dirintis. Namun Koperasinya belum dikelola secara profesional seperti kepengurusan yang jumlahnya masih terbatas, regenerasi dan pergantian pengurus tidak secara berkesinambungan, kepengurusan berdasarkan kesukarelaan dan penunjukan dari ketua yayasan kepada santri yang dipercaya dan sudah lama di pesantren. Pesantren sebetulnya memiliki potensi keanggotaan dari seluruh santri yang berjumlah ratusan, tetapi sifatnya sukarela sehingga tidak tercatat secara administrasi, tidak mengikat secara formal untuk memberikan kontribusi permodalan bagi Koperasi. Permodalan dan keuntungan koperasi masih terbatas dari unit usaha yang sudah dilaksanakan seperti warung mini market yang menyediakan bahan pokok kebutuhan harian santri dan masyarakat sekitar, unit usaha bengkel sepeda dan sepada motor, unit usaha isi ulang air minum, klinik kesehatan, menjahit pakaian dan dapur umum untuk katering kegiatan perayaan.

Kelembagaan koperasi di Pesantren belum didukung oleh kebijakan pesantren untuk menjadi Koperasi yang terdaftar secara resmi atau berbadan hukum, dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan santri untuk mengelola koperasi secara profesional. Pengurus pesantren tidak mewajibkan para santrinya menjadi anggota yang terikat secara formal untuk menambah permodalan dikarenakan santri memiliki keterbatasan pendanaan. Pesantren memiliki asas kesukarelaan (keikhlasan) dalam proses menjalankan pendidikan keagamaan, artinya tidak bersifat komersial dan tidak membebani santri untuk membayar dana operasional pesantren. Pesantren tetap mempertahankan peranannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial yang membantu santri serta masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat ilmu pengetahuan keagamaan di pesantren.

Pengurus koperasi masih melakukan rapat, namun tidak secara teratur setiap bulan, hanya dilaksanakan minimal dua kali setahun atau ketika melaporkan hasil unit usaha kepada pesantren. Rapat anggota belum dilaksanakan, belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) serta program pengembangan Koperasi.

Terdapat keinginan dari pengurus sebut saja Koperasi pesantren A untuk bisa ikut bergabung atau bekerjasama dengan Koperasi pesantren B yang

sudah memiliki badan hukum dan berkembang maju. Koperasi pesantren B memiliki unit usaha *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) atau perbankan mikro dengan syariah Islam. BMT adalah lembaga keuangan sekala mikro yang dijalankan menggunakan prinsip dasar syariat atau hukum Islam untuk adanya mekanisme bagi hasil dari keuntungan, dan mengembangkan bisnis usaha mikro serta usaha kecil untuk mengangkat ekonomi lemah. Kemajuan Koperasi pesantren B didukung juga oleh yayasan dan kurikulum sistem pendidikan Islam serta sistem nasional yang bersifat formal mulai dari sekolah dasar, menengah dan kejuruan komputer. Koperasi pesantren B lebih memiliki keuntungan secara profesional karena bersifat komersial sebagai lembaga pendidikan swasta, sedangkan Koperasi pesantren A berada di lembaga pendidikan sosial keagamaan yang bersifat non-formal seperti pondok pesantren.

Koperasi pesantren A dan Koperasi pesantren B memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang bisa saling melengkapi dan mendukung, bukan sebagai kompetitor, karena memiliki jarak yang cukup jauh, keadaan sosial ekonomi, potensi dan pangsa pasar masyarakat yang berbeda. Koperasi pesantren A berada di pedalaman dan memiliki lahan luas untuk mengembangkan unit usaha agribisnis seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Konsep agribisnis bisa membuka peluang unit usaha penyediaan sarana pupuk, bibit, obat-obatan pertanian dan peralatan pertanian. Koperasi pesantren A memiliki unit usaha yang sudah berjalan seperti warung yang menyediakan bahan pokok (mini market), bengkel sepeda dan sepeda motor, isi ulang air minum, klinik kesehatan, menjahit pakaian dan dapur umum.

Koperasi pesantren B lebih berkembang dan lebih maju daripada Koperasi pesantren A, selain karena melaksanakan manajemen koperasi secara profesional dan sudah memiliki badan hukum. Koperasi pesantren B didukung oleh letak yang strategis di daerah perkotaan dan dilalui jalur jalan utama ke luar kota serta banyak kendaraan umum melintas. Koperasi pesantren B memiliki unit usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat perkotaan diantaranya perbankan mikro, mini market, jasa kursus komputer dan perbaikan komputer, serta bengkel motor yang bermitra dengan merek motor ternama. Koperasi pesantren B memiliki lembaga pendidikan yang bersifat formal terutama jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas kejuruan yang berbasis komputer yang sangat mendukung terhadap unit usaha koperasi, karena masuk ke dalam kurikulum pendidikan dan praktikumnya.

Perlu ada kerjasama antara Koperasi pesantren A yang dapat mengajukan permohonan pendampingan pengembangan usaha kepada

Koperasi pesantren B yang sudah modern, maju dan berkembang pesat. Begitupun Koperasi pesantren B dapat memiliki inisiatif dan solidaritas untuk memberikan dukungan serta pendampingan dalam pengembangan usaha Koperasi pesantren A, bahkan dapat dijadikan mitra untuk menjadi cabang pengembangan usaha. Pengembangan Koperasi pesantren A tidak akan menjadi kompetitor Koperasi pesantren B, karena berbeda lokasi dan justru dapat saling melengkapi unit usaha.

Koperasi pesantren A dan B dapat membentuk kepengurusan bersama untuk koordinasi dan kerjasama, sehingga dapat menciptakan lembaga pendidikan Islam dengan konsep pesantren modern yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren (non formal) dengan pendidikan formal menggunakan kurikulum nasional. Koperasi pesantren dibentuk sebagai lembaga pendidikan sosial dan ekonomi yang menjadi tempat praktikum santri, kemudian meningkatkan kesejahteraan pesantren, santri dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 40.

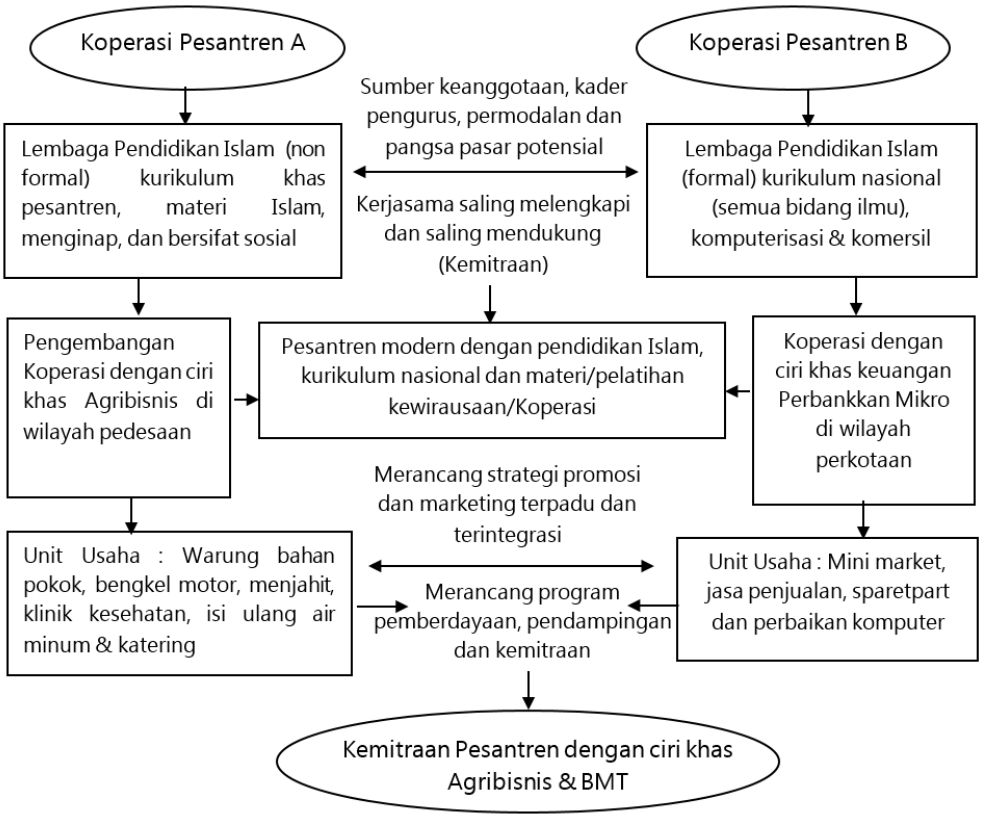

Gambar 40. Model Koperasi Pesantren dengan Kemitraan
Sumber: dimodifikasi dari Sulaiman et al. (2018a)

Koperasi pesantren A memiliki kendala dalam manajemen perkoperasian mulai dari kepengurusan,keanggotaan,permodalan,kelembagaan yang belum resmi atau berbadan hukum. Sehingga membutuhkan dukungan dari pengurus yayasan untuk pemberdayaan potensi santri dan masyarakat, dapat juga bekerjasama selain dengan Koperasi pesantren B juga dengan pihak pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kemitraan Koperasi pesantren A dan B dapat diawali dengan bermusyawarah antar pengurus yayasan dengan prinsip saling membantu, solidaritas, tolong menolong, gotong royong dan saling menguntungkan. Musyawarah dilakukan dalam proses informal diawali dengan dialog secara personal para tokoh dan sesepuh kedua yayasan serta pengurus Koperasi pesantren. Hasilnya membuat draf kesepakatan berdasarkan hasil identifikasi serta analisis dari aspirasi kedua belah pihak. Pelaku pemberdayaan menggunakan fungsi komunikasi partisipatif atau dialogis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan.

Koperasi pesantren A juga secara mandiri melakukan pengembangan usaha dengan segala potensi yang dimiliki, seperti pengurus pesantren mendukung secara moril maupun materil untuk mengembangkan Koperasi dan unit usahanya. Hal tersebut dilakukan dengan membuka dialog antar santri dan pengurus Koperasi untuk melakukan identifikasi dan analisis masalah, kebutuhan, potensi serta minat santri untuk dibuat program pemberdayaan. Program pemberdayaan ditujukan untuk pengembangan Koperasi pesantren dan unit usaha, baik permodalan, kepengurusan, dan pemasaran yang dapat menjadi media pembelajaran, pengalaman serta keahlian bagi santri dalam berwirausahaa, memberikan penghasilan tambahan yang mensejahterakan semua pihak.

Pengembangan Koperasi pesantren A selain menyelenggarakan pemberdayaan manajemen Koperasi dan unit usaha, dapat juga memberdayakan minat santri dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya di lingkungan pesantren dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sehingga Koperasi pesantren A memiliki ciri khas sebagai Koperasi pesantren agribisnis yang melibatkan masyarakat, karena pesantren tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Koperasi pesantren A dengan melaksanakan kerjasama melalui pemberdayaan potensi santri dan masyarakat, yang didukung manajemen Koperasi pesantren yang profesional, supaya menciptakan keberlangsungan, kesejahteraan ekonomi dan tidak mengakibatkan kesenjangan antara pesantren dan masyarakat sekitar. Pesantren dapat dikelola dengan proses

penentuan program pendidikan dan evaluasinya yang melibatkan masyarakat dan alumni untuk meminta masukan menyangkut pembangunan karakteristik moral dan kesejahteraan bersama. Pesantren dapat melaksanakan strategi pemberdayaan dengan meningkatkan potensi dan keterampilan santri sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya pada bidang keagamaan, tetapi pada bidang kehidupan sosial ekonomi untuk kemandirian

Dengan demikian, pesantren dapat memberikan tambahan materi pembelajaran seperti mempelajari konsep ekonomi syariah (Islami), kewirausahaan, ekonomi Koperasi syariah, dan manajemen ekonomi Islam. Pembelajaran tersebut dapat diperdalam dan dipraktikan di unit usaha dalam Koperasi pesantren, sehingga santri setelah lulus dari pesantren dan kembali ke masyarakat dapat berkarya, bekerja, membuka usaha dan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Pesantren dapat juga mendaftarkan pengurus dan santri yang berminat mengikuti program magang dan kerja tentang manajemen kewirausahaan serta Koperasi ke institusi lain seperti perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat supaya pengetahuan, pengalaman, kemampuannya meningkat dan memiliki akses jaringan yang dapat bermanfaat untuk kemajuan santri, pesantren, Koperasi dan masyarakat.

Pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan sosial dan keagamaan sekaligus menjadi lembaga ekonomi yang memiliki unit usaha serta Koperasi. Pesantren berperan multi fungsi baik sebagai agen pembangunan pendidikan, sosial dan keagamaan, juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan santri, pesantren dan masyarakat. Berikut model pemberdayaan ekonomi pesantren pada gambar 41.

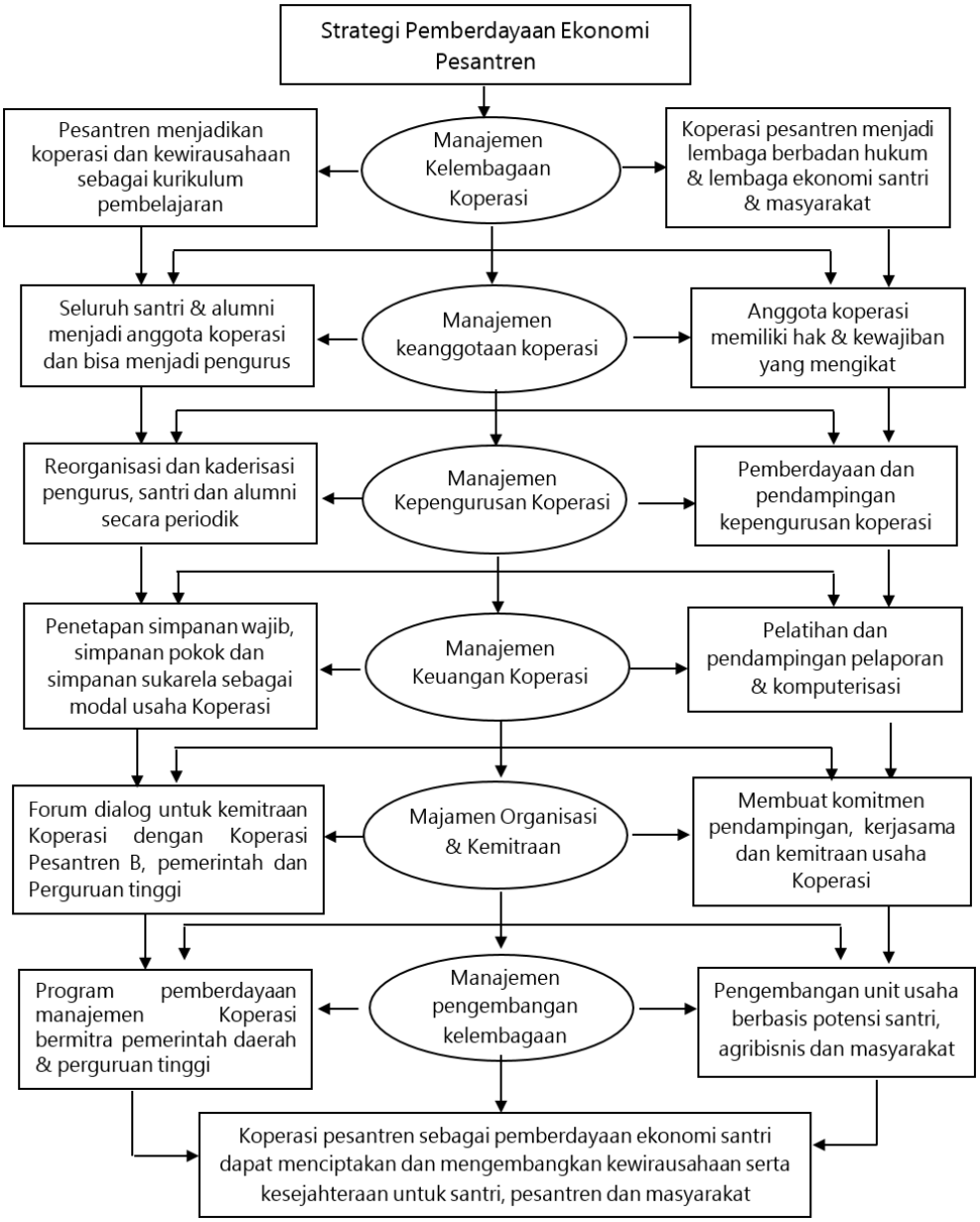

Gambar 41. Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
Sumber: Sulaiman et al. (2018a)

8.11.2. Model Pemberdayaan Ekonomi dalam Materi Kurikulum Pendidikan

Model pemberdayaan ekonomi dalam materi pendidikan merupakan hasil penelitian dari Sulaiman et al. (2018b) bahwa masuknya materi pemberdayaan ekonomi dalam kegiatan dan kurikulum pendidikan pesantren untuk menciptakan motivasi dan kemampuan berwirausahaa yang membekali santri terutama ketika sudah lulus, menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan sebagai media interaksi dengan masyarakat. Bahkan kegiatan dan kurikulum pendidikan ekonomi dapat mengantisipasi stigma negatif terhadap pesantren dan memperkuat harmonisasi dengan berinteraksi dan bertransaksi bersama masyarakat, sehingga dapat dibuat rancangan dan pelaksanaan program pemberdayaan dalam proses pendidikan pesantren, sebagai berikut:

(1) Program pemberdayaan dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan semua unsur pesantren mulai dari santri, orang tua santri, ustadz dan pengurus pesantren serta alumni. Sehingga program pemberdayaan dapat sesuai dengan minat, bakat, potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki, baik oleh santri maupun pesantren. Program pemberdayaan yang dapat dirancang dan disepakati misalkan bidang pertanian hortikultura terutama sayuran dan buah buahan, peternakan kambing untuk memenuhi kebutuhan masa Idul Adha dan pengembangan Koperasi syariah yang menjadi induk usaha pesantren. Pelaksanaan pelatihan budidaya hidroponik dan minimarket yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren tetapi untuk eksternal seperti pihak luar pesantren, karena berada di pinggir jalan yang dilalui masyarakat umum.

(2) Program pemberdayaan dapat diawali sebagai kegiatan ekstrakulikuler atau tambahan kegiatan santri seperti membentuk organisasi kewirausahaan santri, Koperasi syariah dan kelompok budidaya hortikultura serta hidroponik. Proses pembentukan organisasi ekstrakulikuler santri tersebut dilakukan terlebih dahulu kegiatan pemberdayaan berupa penyuluhan tentang menumbuhkan motivasi dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan kewirausahaan, pembentukan Koperasi syariah serta pemanfaatan lahan sebagai kekuatan pangan pesantren. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dan dialog interaktif, sebagai tahap awal pesertanya dari santri-santri yang memiliki minat untuk menjadi pengelola kewirausahaan atau sebagai pionir yang melibatkan staf pengajar yang akan menjadi fasiliator dan pengurus untuk merekrut santri lainnya. Tahapan berikutnya dilakukan pelatihan sebagai kelanjutan dari kegiatan penyuluhan untuk mempraktikan manajemen

kewirausahaan dan Koperasi seperti pengelolaan kepengurusan, keanggotaan, keuangan sampai laporan. Kelompok lainnya melakukan praktik budidaya hiroponik, ternak kambing dan hortikultura dapat dilakukan. Setelah kegiatan pelatihan, selanjutnya melakukan pendampingan secara berkesinambungan sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan. Kegiatan penyuluhan, praktik, pendampingan dan monev pemberdayaan dapat diselenggarakan dengan melibatkan dinas pemerintahan, akademisi dari perguruan tinggi dan alumni yang sudah berpengalaman sebagai praktisi, serta lembaga swadaya masyarakat sebagai aktivis kewirausahaan atau Koperasi.

(3) Materi pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan, manajemen ekonomi Islam, dan Koperasi syariah ke dalam kurikulum pesantren sebagai mata pelajaran pilihan bagi santri dengan disertai program praktikum, magang dan pengabdian masyarakat bagi lulusan atau alumni.

Materi tersebut diajarkan di kelas akhir sebelum lulus untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, motivasi dan wawasan kepada lulusan santri tentang konsep, teori dan perkembangan pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan, manajemen ekonomi dan Koperasi syariah. Media pembelajaran bisa didukung oleh tayangan atau cuplikan profil contoh pesantren yang memiliki keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi santri, kewirausahaan dan Koperasi pesantren. Kemudian melaksanakan praktikum atau magang oleh santri sesuai dengan minat dan potensi untuk memilih bidang ekonomi, seperti pemberdayaan santri dalam budidaya pertanian hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik dengan sistem konvensional maupun dengan hidroponik, kemudian pemberdayaan budidaya ternak ikan, budidaya ternak kambing dan sapi, kewirausahaan bidang ritel dalam bentuk mini market yang menyediakan kebutuhan harian, makanan kuliner, rumah makan, jasa photo copy, perbengkelan, percetakan, strategi promosi dan pemasaran. Selanjutnya materi Koperasi syariah tentang manajemen administrasi, keuangan, kepengurusan dan keanggotaan dan strategi pengembangan. Lokasi praktikum atau magang dapat di tempat usaha yang telah dimiliki oleh pesantren itu sendiri atau jika belum ada, dapat ditempatkan dengan bekerjasama pada pesantren yang telah berhasil dalam pemberdayaan usaha, kewirasusahaan, dan Koperasi syariah. Proses praktikum atau magang untuk santri dilaksanakan minimal satu bulan ketika masa liburan setelah santri melaksanakan evaluasi belajar, dan program magang 3 bulan untuk santri yang akan lulus, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran.

(4) Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi hasil pemberdayaan ekonomi santri di bidang kewirausahaan dan Koperasi melalui wawancara dengan para instruktur dan manajemen tempat magang tentang kegiatan magang santri, melakukan tes evaluasi tertulis bagi santri untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi dan perkembangan keberhasilan dengan mengukur pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman magang. Melakukan wawancara dengan para santri atas hasil magang, evaluasi dan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan motivasi, minat, bakat dan keterampilan kewirausahaan dan Koperasi syariah.

(5) Materi pelajaran berupa pemberdayaan santri, kewirausahaan dan Koperasi syariah merupakan mata pelajaran tambahan bagi santri yang berminat tanpa mengurangi pelajaran kepesantrenan yang selama ini sudah menjadi ciri khas. Namun keberhasilan proses pelajaran dan praktikum atau magang pemberdayaan ekonomi santri dan Koperasi syariah dapat menjadi ciri khas tambahan dan daya tarik bagi pesantren seperti menjadi pesantren agribisnis, pesantren wirausaha, bahkan menjadi pesantren berbasis teknologi. Harapannya santri dan pesantren dapat berperan selain di dunia pendidikan agama yang menekankan pada moralitas dan religi, namun juga berperan sebagai lembaga sosial dan ekonomi yang membentuk, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan usaha serta meningkatkan kesejahtraan santri, pesantren serta masyarakat sekitar.

Santri dan pesantren dapat secara terbuka berinteraksi dengan pihak masyarakat pada umumnya sehingga stigma negatif yang tertutup, eksklusif, fanatik, radikal dapat diantisipasi. Konsep Islam yang damai, rahmat bagi seluruh alam dan adanya keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dapat diimplementasikan dengan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi santri melalui pelatihan serta praktik kewirausahaan dan Koperasi syariah. Staf pengajar, instruktur dan fasilitator tentang manajemen ekonomi, kewirausahaan, dan Koperasi dengan merekrut staf pengajar dan mengundang alumni yang sudah pengalaman dan berhasil, serta dapat bekerjasama dengan pesantren lain yang sudah maju, dinas pemerintah dan perguruan tinggi.

Pemberdayaan ekonomi sebagai materi dalam kurikulum pendidikan, bukan hanya di lembaga pesantren tetapi pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah menengah atas atau kejuruan. Materi pemberdayaan ekonomi dapat berupa mata pelajaran muatan lokal (Mulok) sebagai bentuk kepedulian, pelestarian, dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki di suatu

daerah. Kemudian dapat juga dijadikan mata kuliah wajib yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bahkan sertifikasi keahlian bagi siswa. Materi pemberdayaan dapat berupa manajemen kewirausahaan, manajemen perkoperasian, dan manajemen bisnis semisal bidang pertanian, perkebunan perikanan dan peternakan, pengolahan produk pasca panen, produk inovasi, serta manajemen kelembagaan ekonomi lainnya. Materi pemberdayaan juga diberikan program praktikum, praktik kerja lapangan atau magang pada lembaga dan atau kewirausahaan yang berhasil, maju serta suskes. Kemitraan dengan lembaga kewirausahaan dan perusahaan tersebut dapat menjadi akses lulusan untuk dapat bermitra atau bekerja.

Berikut ini model pemberdayaan ekonomi dalam kurikulum pesantren pada gambar 42.

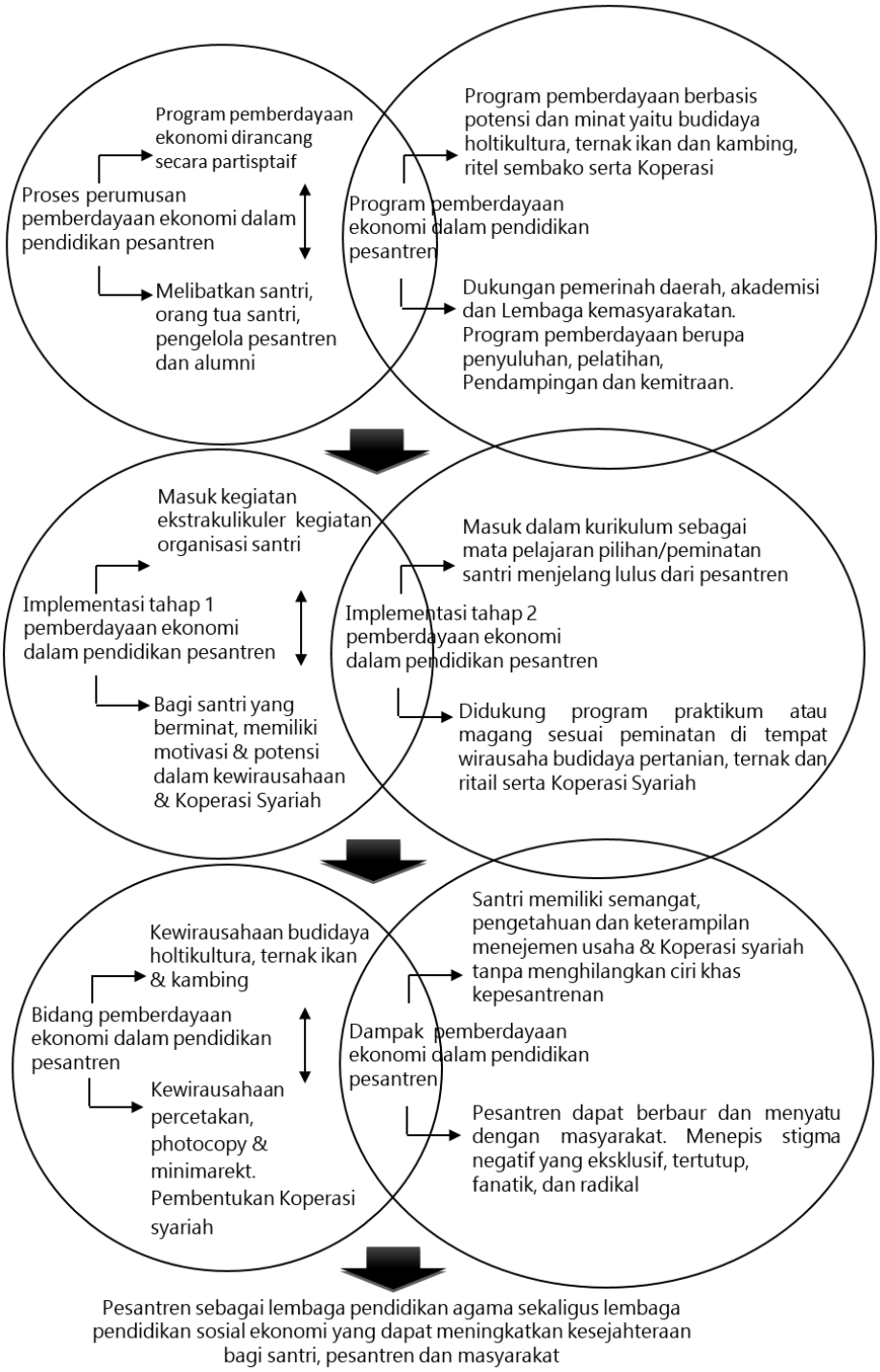

Gambar 42. Model Pemberdayaan Ekonomi Dalam Kurikulum Pendidikan Pesantren

Sumber: Sulaiman et al. (2018b)

Epilog

Buku ini melengkapi referensi tentang kajian paradigma pembangunan, komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga penulis memiliki idealisme untuk merekonstruksi dinamika pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang memiliki tantangan dan tuntutan dalam pembangunan, mulai dari tahapan: (1) Perubahan paradigma pembangunan dengan "*people centered development*" sebagai antitesis paradigma pembangunan modernisasi dan industrialisasi, yaitu perjuangan individu dan kelompok membangun kesadaran dengan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku untuk berubah serta mandiri, tidak lagi ketergantungan mencari pekerjaan dengan urbanisasi dan industrialisasi yang berdampak pada rendahnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, terjadi kepadatan penduduk di perkotaan, ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, alih fungsi lahan pertanian yang produktif, kerusakan serta pencemaran lingkungan. (2) Perjuangan *civil society* sebagai agen perubahan dalam kelompok atau komunitas aksi solidaritas pada bidang sosial, ekonomi dan politik untuk menyampaikan aspirasi, hak-hak, dan kesejahteraan para pekerja dan buruh tani serta industri. (3) Membangun solidaritas dan kekuatan bersama dalam bentuk kelembagaan atau *community development* seperti kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau kewirausahaan, Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis potensi sumber daya manusia, sosial ekonomi, alam dan budaya di masyarakat. (4) Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan proses intervensi dari pihak diluar masyarakat (*outsider*) yang menjadi fasilitator, instruktur dan narasumber untuk memediasi aspirasi, identifikasi dan analisis permasalahan, kebutuhan, dan potensi masyarakat menjadi program yang disepakati serta dilaksanakan bersama. Proses selanjutnya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran, inspirasi, motivasi, serta kerjasama untuk membangun partisipasi menjalankan program bersama. Menjalin kemitraan di masyarakat dan dengan pihak diluar masyarakat dalam meningkatkan kualitas, kuantitas serta promosi pemasaran produk. Target dari pemberdayaan masyarakat adanya kesejahteraan, kemandirian dan menjadi pionir, inisiator serta fasilitator pemberdayaan untuk masyarakat lainnya. (5) Perwujudan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, aplikatif dan berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, studi banding, monitoring, evaluasi, serta kemitraan. (6) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan sumber daya lokal, modal sosial, kearifan lokal dan pengetahuan serta teknologi lokal tetap dapat bersinergi dan berinovasi dengan perkembangan teknologi, maka program pemberdayaan dalam

bentuk digitalisasi administrasi, keuangan, label merek, pengemasan dan promosi pemasaran produk kelompok usaha serta desa wisata. Termasuk mengembangkan Agroindustri sebagai penerapan teknologi industri yang mendukung dan mengolah produk-produk pertanian secara umum seperti pertanian holtikultura dan palawija, produk dari perikanan, dan peternakan dengan pengolahan pasca panen sebagai produk inovatif.

Tahapan dinamika pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi sejarah perkembangan, paradigma, dan konsep yang didukung pendekatan teori, metode penelitian, tahapan, tujuan, strategi, model dan aplikasi program. Namun buku ini membutuhkan pengembangan dan dukungan referensi lainnya untuk melengkapi pembahasan pemberdayaan masyarakat sebagai kajian multidisipliner. Pembahasan yang perlu mendapat perhatian dan kedalaman kajian tentang monitoring serta evaluasi program pemberdayaan masyarakat, proses pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan *Corporate Social Responsibality* (CSR) dari perusahaan. Sinergitas stakeholder pemerintah, *civil society* dan perusahaan atau korporasi dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat. Proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan dalam mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang desa) serta dukungan anggaran dana desa.

Perkembangan kajian pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada bidang kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada bidang politik seperti memberikan kesempatan, kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan di pedesaan, kemudian pada bidang hukum tentang kesadaran, pengetahuan, perlindungan dan advokasi ketenagakerjaan serta agraria di masyarakat, bidang pendidikan informal dan non-formal untuk memberikan keterampilan seperti bidang sosial tentang masalah marginalisasi, stigma negatif, kesetaraan gender, dan konflik sosial, termasuk bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pemberdayaan sebagai komunikasi dan pembangunan partisipatif (*bottom up*) bukan sebagai perlawanan yang menggantikan diskursus dominasi struktur dan kebijakan, tetapi menjadi kontrol dan pelengkap dari komunikasi serta pembangunan teknokratis (*top down*) sebagai sebuah keniscayaan. Dengan demikian dua paradigma komunikasi pembangunan yang teknokratis dan partisipatif akan saling mengisi, melengkapi dan berkolaborasi menjadi pemberdayaan untuk kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya pemberdayaan merupakan strategi pembangunan partisipatif yang membangun dan mengembangkan kesadaran, motivasi dan inspirasi, pengetahuan, keterampilan serta perilaku individu, kelompok, juga komunitas yang kreatif, produktif dan inovatif menuju kesejahteraan sebagai tindakan kolektif (*collective action*), kerjasama, serta kemandirian berbasis sumber daya lokal.

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan penerapan pemberdayaan masyarakat, kemudian menjadi rekomendasi konstruktif bagi stakeholder dalam kebijakan sosial dan kebijakan publik untuk melakasanaan pembangunan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I.R. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Press

Adiwibowo, S. (2007). Ekologi Manusia: Mata Air Integrasi Ilmu-Ilmu Alam dan Ilmu-Ilmu Sosial. Dalam S. Adiwibowo (Ed.). *Ekologi Manusia*. Bogor : FEM IPB

Al-Saggaf, Y., & O'Donnel, S.B. (2019). Phubbing: Perceptions, reasons behind, predictors, and impacts. *Human Behavior and Emerging Technologies, 1*(2), 132-140. https://doi.org/10.1002/hbe2.137

Alwasilah, A.C. (2015). *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama

Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan : Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan*. Bandung : Alfabeta

Appel, K., Buckingham, E., Jodoin, K., & Roth, D. (2012). *Participatory Learning and Action Toolkit: For Application in BSR's Global Programs*. Kenya: BSR's Global Programs

Aziz, N.L.L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik, 13*(2), 193-211. https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575

Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology & Community Health,* 60, 854-857. http://dx.doi.org/10.1136/jech.2004.028662

Bessette, G. (2004). *Involving the Community :A Guide to Participatory Development Communication*. Malaysia: Southbound

Bhandari, B.B. (2003). *Module 4: Participatory Rural Appraisal (PRA). Japan:* Institute for Global Environmental Strategies (IGES)

Bhandari, H., & Yasunobo, K. (2009). What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept. *Asian Journal of Social Science, 37*(3), 480–510. https://doi.org/10.1163/156853109X436847

Bungin, B. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.* Jakarta: Kencana

Cadiz, M.C.H. (2005). *Communication for empowerment : The practice of participatory communication in development.* Argentina: CLACSO

Chambers, R. (1992). *Rural appraisal: rapid, relaxed and Participatory*, IDS Discussion paper 331. UK: Institute of Development Studies

_____.(1994).The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, *22*(7), 953-969. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4

_____. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner In U. Kirdar, & L. Silk (Ed.). *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press

_____. (2008). PRA, PLA and Pluralism: Practice and Theory. In P. Reason, & H. Bradbury (Ed.). *The SAGE Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice*. London, California & New Delhi: Sage Publications

Corey, G. (2009). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Eighth Edition. USA : Thomson

Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage publications, Inc

_____. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* : fourth edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage publications, Inc

Dainty, A., Moore, D., & Murayy M. (2006). *Communication in Construction : Theory and Practice*. London, New York : Taylor and Francis

Damanhuri, D.S. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: IPB

Dasgipta, S. (2009). *Sonarghachi Project : A Case Study Set in India*. In T.L. McPhail (Ed.). *Development Communication*. United Kingdom: Willy-Blackwell

DeVito, J.A. (2011). *Komunikasi Antarmanusia* 5th. A. Maulana (Alih bahasa). Dalam L. Saputra, I. Wahyu & Y. Prihantini (Ed.). Jakarta: Karisma Publishing

Easterly, W. (2001). *The Elusive Quest for Growth Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*. London : The MIT Press Cambridge

Effendy. O.U. (2010). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya

Effendy. O.U. (2017). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya

Evans, J.R., & Lindsay, W.M. (2014). *An introduction to Six Sigma and Process Improvement*. Boston: Cengage Learning

Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal, 1*(2), 123-130, doi.10.15408/sd.v1i2.1225

Fakih, M. (2009). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press

Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 6*(1), 1-17. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463

Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta : Pustaka LP3ES

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. USA: Wiley-Blackwell

Gastil J. (2009). Group Communication Theories. In S.W. Littejohn & K.A. Foss (Ed.). *Encyclopedia of Communication Theory 1*. California: Sage Publications

Given, L.M (Ed). (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Los Angeles, London, New Delhi & Singapore: SAGE Publications Inc

Goldberg, A.A., & Larson, C.E. (2006). *Komunikasi Kelompok: Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya.* K. Soemiati & G.R. Jusuf (Penerjemah). Jakarta: UI Press

Guazzini, A., Duradoni, M., Capelli, A., & Meringolo, P. (2019). An Explorative Model to Assess Individuals' Phubbing Risk. *Future Internet, 11*(21), 1-13. http://doi.org/doi:10.3390/fi11010021

Gudykunst, W.B., & Lee, C.M. (2002). Cross-Cultural Communication Theories. In W.B. Gudykunst & B. Mody (Ed.). *Handbook of International and Intercultural Communication*. London: Sage Publications

Gumbo M. (2014) Indigenous Technology. In R. Gunstone (Ed.) *Encyclopedia of Science Education*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6165-0_367-2

Hamijoyo, S.S. (2005). *Komunikasi Partisipatoris: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat.* Bandung: Humaniora

Hanika, I.M. (2015). Fenomena Phubbing di Era Milenia : Ketergantungan Seseorang pada Smartphone terhadap Lingkungannya. *Jurnal Interaksi, 4*(1), 43-51. http://dio.org/10.14710/interaksi.4.1.42-51

Haryanto, S. (2012). *Spekterum Teori Sosial: dari Klasik Hingga Postmodern.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal.* Makassar: CV Nur LIna & Pustaka Taman Ilmu

Hasim & Remiswal. (2009), *Community Development : Berbasis Ekosistem : Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat.* Jakarta : Diadit Media

Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung : Humaniora Utama Press

Hustedde, R.J. (2009). Seven theories for seven community developers. In R. Phillips & R.H. Pittman (Ed.). *An Introduction to Community Development.* London - New York : Routledge

Hutomo, M.Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Jakarta* : Bappenas

Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalization.* Australia: Pearson Education

Jundiani. (2018). Local Wisdom in the Environmental Protection and Management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175*, 1-5. doi :10.1088/1755-1315/175/1/012130

Kartasasmita. G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo

Kearney, C.A. (2003). *Casebook In Child Behavior Disorder*. Second edition. Las Vegas : University of Nevada

Kenny, S., McGrath, B., & Phillips, R. (2018). *The Routledge Handbook of Community Development: Perspectives From Around the Globe*. New York & London: Routledge

Kerlinger, F.N. (2010). *Asas-Asas Penelitian Behavioral.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Kincaid, D.L., & Figueroa, M.E. (2009). Communication for Participatory Development Dialogue, Action, and Change. In L.R. Frey & K.N. Cissna (Ed.). *Routledge Handbook of Applied Communication Research*. New York & London: Routledge

Kindon, S. L., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. London: Routledge studies in human geography

Kotler, P., & Keller, K.L. (2016). *Marketing Management*. USA : Pearson

Kuswandoro, W.E. (2016). Pendekatan *Good Village Governance* untuk Implementasi Desa di Jawa Timur. Dalam B. Wardianto, S. Aminah & U. Martanto (Ed.). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Surabaya: Airlangga University Press

Lassa, J., Pujiono, P., Pristiyanto, D., Paripurno, E.T., Magatani, A., & Parlan, H., (2009). *Kiat Mengurangi Resiko Bencana: Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas* (PRBBK). Jakarta: Grasindo

Leeuwis C. (2006). *Communication for Rural Innovation : Rethingking Agricultural Extention*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Lubis, D. (2007). Komunikasi Menuju Komunitas Pembelajar. Dalam S. Adiwibowo (Ed.). *Ekologi Manusia*. Bogor : FEM IPB

MacKinnon, S. (2012). John Pierson, Tackling social exclusion. *Journal of Social Work, 12*(2), 211-221. https://doi.org/10.1177/1468017311403961

Maftuhin, A. (2017). Mendefiniskan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator. *Jurnal Tataloka, 19*(2), 93-103. https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103

Mardikanto, T. (2010). *Komunikasi Pembangunan: Acuan Bagi Komunitas Akademis, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS Press

_____. (2014). *CSR : Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta

Marfai, M.A. (2013). *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Masrukin., Sugito, T., Suswanto, B., & Sabiq, A. (2013). Model Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Jurnal Komunitas*, *5*(2), 172-184. https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2736

Mawardi, I. (2018). Wisdom Local Empowerment in Sustainable Development Perspective. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, *8*(1), 1-10, https://doi.org/10.29122/jrl.v8i1.1975

McPhail, T.L. (2009). *Development Communication : Reframing The Role of The Media*. Malden, Oxford : Blackwell Publishing Ltd.

McQuail, D. (2009). *McQuail's Mass Communication Theory*. Los Angeles, London, California, New Delhi, Singapore: Sage Publications

Melkote, S.R., & Steeves, H.R. (2001). *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*. London: Sage Publications

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, United States: SAGE Publications Inc

Muliawan, D. (2017). Komunikasi Terapeutik Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Tarekat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 11*(1), 173-196. http://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356

Mullaly, B. (2002). *Challenging Oppression : a Critical Social Work Approach*. Don Mills, Ont : Oxford University Press

Mulyana, D. (2007). Membangun Komunikasi Pembangunan yang Humanistik, dalam Dilla, Sumadi. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. *Bandung* : Simbiosa Rekatama Media

_____. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya

_____. (2011). Membangun Ilmu Komunikasi yang Multidisipliner. Dalam A. Bajari & S.T. Saragih (Ed.). *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktek Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press

Mundakir. (2006). *Komunikasi Keperawatan Aplikasi Dalam Pelayanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I.N.N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut.* Bogor: Wetlands International

Nasution, Z. (2012). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.* Jakarta : Rajawali Pers

Noegroho, A., Sulaiman, A.I., & Suryanto. (2018). Religious Counseling as an Informal Education Approach in Rehabilitation of Drug Addicts. *International Educational Research, 1*(2), 57-68. https://doi.org/10.30560/ier.v1n2p57

Parmin,. Sajidan,. Ashadi,. Sutikno,. & Fibriana. (2017). Science Integrated Learning Model to Enhance The Scientific Work Independence of Student Teacher in Indigenous Knowledge Transformation. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, *6*(2), 365-372. https://doi.org/10.15294/jpii.v6i2.11276

Payne, M. (2014). *Modern Social Work Theory.* 4th Edition, London : McMillan Press Ltd

Phillips, R., & Pittman, R.H. (2009). A framework for community and economic development. *An Introduction to Community Development.* London - New York: Routledge

Porras, L.E & Steeves, H.L. (2009). Feminism in a Post-Development Age. In T.L. McPhail (Ed.). *Development Communication: Reframing The Role of The Media*. Malden, Oxford : Blackwell Publishing Ltd.

Pranarka & Vidhyandika. (1996). Pemberdayaan. Dalam S.P. Onny & A.M.W. Pranarka (Ed.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Pretty, J.N., Guijt, I., Thompson, J., & Scoones, I. (1995). *Trainers' Guide for Participatory Learning and Action*. London: International Institute for Environment and Development (IIED)

Ra'is, D.U. (2017). Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *7*(2), 88-106. http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v7i2.803

Rakhmat, J. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rangkuti, P.A. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*. Bogor : IPB Pers

Rini, I.R.S. (2010). Mengenali Gejala dan Penyebab dari Conduct Disorder. *Psycho Idea 8*(1), 1-17. http://doi.org/10.30595/psychoidea.v8i1.194

Rogers, E.M. (1989). K*omunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis*. N. Dasmar (Penerjemah). Jakarta : LP3ES

_____& Kincaid, D.L. (1981). *Commucation Networks: Toward a new Paradigm for Research*. New York: The Free press

_____ & Shoemaker, F.F. (1971). *Communication of Innovation. : A Cross-Cultural Approach.* New York: Free Press

Servaes, J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. India, UK, Singapore: SAGE Publications

Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N., & Bien, M.U. (2010). *Organizational Behavior*. USA: John Wiley & Sons, Inc

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Sugito, T., Windiasih, R., & Sulaiman, A.I. (2018). Aktualisasi dalam Pembangunan Partisipatif dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Desa. *Acta Diurna, 14*(1), 1-16. https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2018.14.1.1138

_____., Sulaiman, A.I., Sabiq, A., Faozanudin, M., & Kuncoro, B. (2019a). The Empowerment as Community Learning Based on Ecotourism of Coastal Border at West Kalimantan, *International Educational Research*, *2*(3), 23-36. https://doi.org/10.30560/ier.v2n3p23

_____.,Sulaiman, A.I., Sabiq, A., Kuncoro, B., & Faozanudin, M. (2019b). Implementation of Ecotourism Empowerment in Coastal Border of West Kalimantan. *Humanities and Social Science Research*, *2*(4), 1-12. https://doi.org/10.30560/hssr.v2n4p1

Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sulaiman, A.I., Chusmeru., & Kuncoro,B. (2019a). The Educational Tourism (Edutourism) Development Through Community Empowerment Based on Local Wisdom and Food Security. *International Educational Research, 2*(3), 1-14. https://doi.org/10.30560/ier.v2n3p1

_____., Chusmeru., & Masrukin. (2018a). Strategy of Cooperative Islamic Boarding School as Economic Empowerment Community. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(1), 25-44. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.25-44

_____., Djawahir, F.S., Sugito, T., & Weningsih, S. (2019c). Empowerment Management Model of Batik Craftsman Entrepreneurship Development. *Journal of Economics and Management Sciences*, *2*(3), 14-25. https://doi.org/10.30560/jems.v2n3p14

_____., & Kuncoro, B. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ketahanan Pangan dalam Mendukung Konsep Eduwisata. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, 2*(1), 657-668, http://dx.doi.org/10.25008/pknk.v2i01.200

_____., Noegroho, A., Suryanto., & Weningsih, S. (2019b). The Holistic Rehabilitation Model for Drug Addicts, Phubbing and Conduct Disorder in Boarding Schools. *Humanities and Social Science Research*, *2*(4), 34-46, https://doi.org/10.30560/hssr.v2n4p34

_____., Suswanto, B., & Masrukin. (2018b). Economic Empowerment of Islamic Student Throught Optional Course Learning in Boarding School for Harmonization and Preventing Negative Stigma. *International Educational Research, 1*(2), 26-37. https://doi.org/10.30560/ier.v1n2p26

_____., Suswanto, B., & Suryanto. (2016). Peran Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ickhsan Al-Islami dalam Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi Bagi Pecandu Narkoba Melalui Pengobatan Herbal (Non Medis), Pendekatan Spiritual (Islami) dan Program Pemberdayaan. *Kontekstualita*, *32*(2), 1-26

Sulistiyani, A.T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gava Media

Sumarti, T. (2007). Sosiologi Lingkungan. Dalam S. Adiwibowo (Ed.). *Ekologi Manusia*. Bogor : FEM IPB

Sumartini, S. (2010). *Teori Tindakan Jurgen Habermas dalam Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang: Aditya Media

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

_____., Nugroho, R., & Wrihatnolo, R.R. (2005). *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Negara yang Unggul dalam Persaingan Global.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Swantz, M.L. (2008). Participatory Action Research as Practice. In P. Reason & H. Bradbury (Ed.). *The SAGE Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice.* London, California & New Delhi: Safe Publications

Syahyuti. (2006). *Tiga Puluh Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian : Penjelasan tentang Konsep, Istilah, Teori, Indikator serta Variabel.* Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara

Sztompka, P. (2010). *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenada

Thomas, P.N. (2014). Development Communication and Social Change in Historical Context. In K.G. Wilkins, T. Tufte. & R. Obregon (Ed.). *The Handbook of Development Communication and Social Chang*e. UK: Wiley Blackwell

Tubbs, L.T., & Moss, S. (2005). H*uman Communication : Kontek-Kontek Komunikasi*. D. Mulyana & Gembirasari (Penterjemah). Bandung : Remaja Rosdakarya

Tufte, T., & Mefalopulos P. (2009). *Participatory Communication.* Washington D.C, USA: The World Bank

Usman, S. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Varma, S.P. (2001). *Teori Politik Modern*. Jakarta RajaGrafindo Persada

Wenar, C., & Kerig, P. (2011). *Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence*. New York: McGraw-Hill

West, R., & Turner, L.H. (2017). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika

Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *1*(1), 87-102. http://digilib.uin-suka.ac.id/13931/1/Welfare

Widjanarko, M. (2016). Modal Sosial Masyarakat Desa Rahtayu: Studi Kasus Pelestarian Hutan Muria di Kabupaten Kudus. *Jurnal Masyarakat & Budaya, 18*(1), 109-120. https://doi.org/10.14203/jmb.v18i1.344

Widyastuti, S. (2017). *Manajemen Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: FEB-UP Press

Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 18*(1), 101-120. https://doi/org/10.7454/mjs.v18i1.3735

Wood, C.J. (2008). Participatory Decision Making: Why Doesn't It Seem to Work?. *Journal: The Educational Forum, 49*(1), 55-64. https://doi.org/10.1080/00131728409335820

Wrihatnolo, R.R., & Dwijowiyoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT. Elex Komputindo

Youarti, I.E., & Hidayah, N. (2018). Perilaku Phubbing Sebagai Karakter Remaja Generasi Z. *Jurnal Fokus Konseling, 4*(1), 143-152. https://doi.org/10.26638/jfk.553.2099

Zen MH, P. (2013). *Panduan Komunikasi Efektif Untuk Bekal Keperawatan Profesional.* Yogjakarta: D-Medika

Profil Penulis

Penulis lahir di Bandung, 13 Oktober 1976, riwayat pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro tahun 1995-1999, sempat mengabdi menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Wastukancana tahun 2001-2004, dan STT Texmaco tahun 2003-2004, menjadi dosen khususnya di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mulai tahun 2005. Melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran (Unpad) 2006-2008 dan S3 Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Institut Pertanian Bogor (IPB) 2011-2016. Penulis mengabdi kembali ke kampus sebagai dosen khususnya di Jurusan Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi FISIP, kemudian di Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, serta Pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dari tahun 2017 sampai sekarang. Penulis mengampu beberapa matakuliah seperti komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan media komunikasi pemberdayaan masyarakat, serta strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat. Penulis juga aktif sebagai periset, fasilitator dan penggiat pemberdayaan masyarakat dengan konsen pada bidang konflik dan harmonisasi sosial, rehabilitasi sosial ekonomi, serta peningkatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga penulis lebih suka disebut "Blusuker" yang mengkonstruksi realitas sosial, ekonomi dan budaya dengan melakukan pendekatan, pembukaan akses, pembuatan dan pelaksanaan program serta model pemberdayaan masyarakat. Beberapa hasil riset sudah dipublikasi di jurnal nasional dan jurnal internasional serta prosiding. Penulis memiliki komunitas sebagai forum kajian, diskusi dan kegiatan pemberdayaan dalam "Komunitas Pemberdayaan Aksi Kemandirian" (Kompak).